



Katalog BPS: 9201003

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indicators of Sustainable Development
2012



BADAN PUSAT STATISTIK
Statistics Indonesia

**INDIKATOR
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

*Indicators of
Sustainable Development*

2012

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2012

Indicators of Sustainable Development 2012

ISSN : 2086-2814
No. Publikasi / Publication Number : 04320.1203
Katalog BPS / BPS Catalogue : 9201003
Ukuran Buku / Book Size : 17,6 cm X 25 cm
Jumlah Halaman / Number of Pages : 224 halaman / pages

Naskah / Script :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup
Sub Directorate of Environment Statistics

Penyunting / Editor :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup
Sub Directorate of Environment Statistics

Gambar Kulit / Cover Design:

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup
Sub Directorate of Environment Statistics

Diterbitkan oleh / Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS – Statistics Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 merupakan salah satu publikasi tahunan yang diterbitkan BPS sejak tahun 2002. Publikasi ini menyajikan data terkait indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Indikator-indikator tersebut merupakan gambaran hasil pencapaian pembangunan selama ini dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat direalisasikan jika pembangunan dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan segala aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan sekaligus secara berimbang dan terintegrasi.

Publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mendukung momentum pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Publikasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan dan indikator-indikatornya serta interaksinya yang kompleks. Semoga publikasi ini dapat memajukan usaha pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kami juga mengharapkan saran dan kritik dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Dr. Suryamin, M.Sc.

FOREWORD

Indicators of Sustainable Development 2012 is an annual part of publication published by the BPS-Statistics Indonesia since 2002. This publication present the data related to indicators of social, economic, and environment from BPS-Statistics Indonesia and other institutions. Its indicators presenting overview of development progress in order to achieve the goals of sustainable development. Sustainable development can only be realized if the development is carried out in holistic manner by considering all aspects of development, whether economic, social, environmental, and institutions as well as in balanced and integrated manner.

This publication is expected to support the momentum of sustainable development in Indonesia. This publication is also expected to upgrade an understanding of the various dimensions' of sustainable development and its indicators along with their complex interaction. Hopefully this publication can promote efforts to mainstreaming sustainable development in Indonesia.

This publication has been made possible due to the assistance and contributions of various government institutions. To all who has involved in the making of this publication, I would like to express my highly appreciation and gratitude. Suggestions and critics which might improve the contents and format of future publication are always welcome.

Jakarta, October 2012

BPS-Statistics Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

CHIEF STATISTICIAN

DAFTAR ISI / CONTENTS

Kata Pengantar / Foreword	iii
Daftar Isi / Contents	v
Daftar Tabel / List of Tables.....	vii
Daftar Gambar / List of Figures	xiii
Penjelasan Umum / Explanatory Notes.....	xiv
I. PENDAHULUAN / INTRODUCTION	1
1.1. Latar Belakang / Background.....	3
1.2. Tujuan / Objective.....	6
1.3. Ruang Lingkup / Coverage	6
II. KAJIAN LITERATUR / LITERATURE STUDY	7
2.1. Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 1995 / <i>DSR Framework by CSD in 1995</i>	9
2.2. Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 2001 / <i>DSR Framework by CSD in 2001</i>	10
2.4. Revisi Indikator Pembangunan Berkelanjutan oleh CSD, 2007 / <i>Revised CSD Indicators of Sustainable Development, 2007</i>	11
III. METODOLOGI / METHODOLOGY.....	15
3.1. Sumber Data / <i>Data Source</i>	17
3.2. Pemilihan Indikator / <i>Indicators Selection</i>	17
3.3. Konsep dan Definisi / <i>Concept and Definition</i>	32
IV. INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA <i>INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA</i>	41
4.1. Kemiskinan / <i>Poverty</i>	44
4.2. Pemerintahan / <i>Governance</i>	54
4.3. Kesehatan / <i>Health</i>	56
4.4. Pendidikan / <i>Education</i>	65
4.5. Demografi / <i>Demography</i>	70
4.6. Bencana Alam / <i>Natural Disaster</i>	73
4.7. Atmosfer / <i>Atmosphere</i>	76
4.8. Lahan / <i>Land</i>	79
4.9. Laut dan Pesisir / <i>Marine and Coastal</i>	82
4.10. Air Tawar / <i>Freshwater</i>	85

4.11. Keanekaragaman Hayati / <i>Biodiversity</i>	87
4.12. Pembangunan Ekonomi / <i>Economic Development</i>	88
4.13. Kerjasama Ekonomi Global / <i>Global Economic Partnership</i>	98
4.14. Pola Konsumsi dan Produksi / <i>Consumption and Production Pattern</i>	101
Tabel-Tabel / <i>Tables</i>	107
Daftar Pustaka / <i>Reference</i>	193
Lampiran / <i>Appendix</i>	195

http://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES

4.1.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (ribu), 2006-2012 <i>Number of Poor People by Province (thousand), 2006-2012</i>	109
4.1.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2006-2012 <i>Percentage of Poor People by Province, 2006-2012.....</i>	110
4.1.3	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (rupiah/kapita/bulan), 2006-2012 <i>Poverty Line by Province (rupiahs/capita/month), 2006-2012.....</i>	111
4.1.4	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2005-2011 <i>Distribution of Expenditure per Capita and Gini Index, 2005-2011</i>	112
4.1.5	Persentase Rumah Tangga dengan Penampungan Akhir Tinja Tangki Septik Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household with Toilet Discharge Septic Tank by Province, 2006-2011</i>	113
4.1.6	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household which Use Clean Water by Province, 2006-2011.....</i>	114
4.1.7	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household Using Source of Lighting from Non Electricity by Province, 2006-2011</i>	115
4.1.8	Persentase Rumah Tangga yang Bahan Bakar Memasaknya Kayu Bakar Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household Using Source of Cooking Fuel from Fire Wood by Province, 2006-2011.....</i>	116
4.1.9	Jumlah Desa Menurut Keberadaan Sungai yang Melintasi Desa dan Permukiman Kumuh, 2011 <i>Number of Villages by the Existence of Rivers that Flows Through the Village and Slum Areas, 2011.....</i>	117
4.2.1	Jumlah Kasus Korupsi yang Sudah Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011 <i>Number of Corruption Cases Solved by Regional Police Office, 2006-2011.....</i>	118
4.2.2	Jumlah Kasus Pembunuhan Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011 <i>Number of Homicide Cases by Regional Police Office, 2006-2011</i>	119
4.3.1	Estimasi Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Provinsi, 2006-2012 <i>Estimate of Infant Mortality Rate (IMR) by Province, 2006-2012.....</i>	120

4.3.2	Estimasi Angka Harapan Hidup (e_0) Menurut Provinsi (tahun), 2006-2012 <i>Estimate of Life Expectancy at Birth (e_0) by Province (year), 2006-2012.....</i>	121
4.3.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Selama Sebulan yang lalu Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Population who Sought Treatment Outpatient at Health Center and Subsidiary Health Center During The Previous Month by Province, 2006-2011.....</i>	122
4.3.4	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Provinsi dan Alat KB yang sedang Digunakan, 2011 <i>Percentage of Married Women Aged 15-49 Years by Province and Type of Contraceptive Currently Used, 2011.....</i>	123
4.3.5	Persentase Balita yang Diimunisasi Menurut Provinsi dan Jenis Imunisasi, 2010-2011 <i>Percentage of Under-Fives who Immunized by Province and Type of Immunization, 2010-2011</i>	124
4.3.6	Status Gizi Balita Menurut Provinsi, 2005-2010 <i>Nutritional Status of Children Under Five Years Old by Province, 2005-2010.....</i>	125
4.3.7	Jumlah Penderita dan Angka Kesakitan Malaria Menurut Provinsi, 2006-2010 <i>Number of Malaria Patient and Annual Paracite Incidence (API) by Province, 2006-2010</i>	126
4.3.8	Kumulatif Kasus AIDS, Kasus Meninggal, dan Angka Kumulatif Kasus Menurut Provinsi, 2010 <i>AIDS Cummulative Cases, Death Cases, and Cases Rate by Province, 2010.....</i>	128
4.3.9	Jumlah Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi, 2006-2010 <i>Number of Tuberculosis Disease Cases by Province, 2006-2010.....</i>	129
4.3.10	Prevalensi Perokok Saat ini dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi, 2010 <i>Prevalence of Current Smokers and Average of Cigarettes Consumed by Population Aged 15 Years and Over by Province, 2010.....</i>	130
4.3.11	Jumlah Kasus Bunuh Diri Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011 <i>Number of Suicide Cases by Regional Police Office, 2006-2011</i>	131
4.4.1	Persentase Penduduk Usia 15 tahun keatas yang Tamat Pendidikan Dasar Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Graduated from Primary Education by Province (percent), 2006-2011</i>	132
4.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Net Enrollment Ratio of Elementary School by Province, 2006-2011</i>	133

4.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Net Enrollment Ratio of Junior High School by Province, 2006-2011.....</i>	134
4.4.4	Persentase penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan Minimal SMA Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of population Aged 25-64 Years Old have Completed Minimum Education Senior High School by Province, 2006-2011.....</i>	135
4.4.5	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Literacy Rate of Population Aged 15 Years and Over by Province, 2006-2011</i>	136
4.5.1	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, 2000-2010 <i>Population and Growth Rate of Population by Province, 2000-2010</i>	137
4.5.2	Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi, 2006-2012 <i>Total Fertility Rate (TFR) by Province, 2006-2012.....</i>	138
4.5.3	Angka Beban Ketergantungan Menurut Provinsi (persen), 2006-2012 <i>Dependency Ratio by Province (percent), 2006-2012.....</i>	139
4.6.1	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Bencana Alam, 2005-2011 <i>Number of Villages by Province and Type of Natural Disaster, 2005-2011.....</i>	140
4.6.2	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Upaya Antisipasi Bencana Alam, 2011 <i>Number of Villages by Province and The Efforts in Anticipation of Natural Disaster, 2011</i>	141
4.6.3	Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Provinsi dan Kondisi Korban, 2006-2011 <i>Number of Natural Disaster Victims by Province and Condition of Victims, 2006-2011</i>	142
4.6.4	Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam Menurut Provinsi dan Kondisi Kerusakan, 2006-2011 <i>Number of Damage Houses Caused due to Natural Disaster by Province and Condition of Damage, 2006-2011.....</i>	143
4.7.1	Perkiraan Emisi CO ₂ dari Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis bahan Bakar untuk Memasak (ribu ton), 2008-2010 <i>Estimates of CO₂ Emissions from Household by Province and Type of Cooking Fuel Used (thousand ton), 2008-2010.....</i>	147
4.7.2	Perkiraan Emisi CO ₂ yang Berasal dari Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi (ribu ton), 2006-2010 <i>Estimates of CO₂ Emissions from Motorized Vehicles by Province (thousand ton), 2006-2010.....</i>	148

4.7.3	Perkiraan Emisi CH ₄ dari Hewan Ternak dan Unggas Menurut Provinsi (ton), 2008-2011 <i>Estimates of CH₄ Emissions from Livestocks and Poultries by Province (ton), 2008-2011.....</i>	151
4.7.4	Impor Komoditi Bahan yang Mengandung Zat Perusak Ozon (kg), 2009-2011 <i>Import of Materials Containing Ozone Depleting Substances (kg), 2009-2011.....</i>	152
4.7.5	Rata-rata Bulanan Hasil Pengukuran Konsentrasi Gas SO ₂ dan NO ₂ di Stasiun Kemayoran, Jakarta (ppm/24 jam), 2006-2011 <i>Monthly Average of SO₂ and NO₂ Concentration at Kemayoran Station, Jakarta (ppm/24 hours), 2006-2011</i>	153
4.8.1	Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi dan Jenis Irigasi (ha), 2006-2010 <i>Wetland Area by Province and Type of Irrigation (ha), 2006-2010.....</i>	154
4.8.2	Luas Lahan Tegal/Kebun Menurut Provinsi (ha), 2006-2010 <i>Area of Dry Field/Garden by Province (ha), 2006-2010.....</i>	156
4.8.3	Luas Lahan Ladang/Huma Menurut Provinsi (ha), 2006-2010 <i>Area of Shifting Cultivation by Province (ha), 2006-2010.....</i>	157
4.8.4	Luas Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Provinsi (ha), 2006-2010 <i>Area of Temporarily Unused Land by Province (ha), 2006-2010.....</i>	158
4.8.5	Persentase Luas Hutan Terhadap Luas Wilayah Menurut Provinsi <i>Percentage of Forest Area to Area of Province</i>	159
4.8.6	Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi Satelit Menurut Provinsi, 2006-2010 <i>Number of Hotspot Detected by Satellite by Province, 2006-2010.....</i>	160
4.9.1	Jumlah dan Persentase Desa Menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2011 <i>Number and Percentage of Village by Province and Geographical Location, 2011.....</i>	161
4.9.2	Sebaran Kawasan Konservasi Laut Menurut Provinsi, 2010 <i>Distribution of Marine Conservation Areas by Province, 2010.....</i>	162
4.9.3	Luas dan Kondisi Terumbu Karang Menurut Provinsi, 2011 <i>Area and Condition of Coral Reef by Province, 2011.....</i>	163
4.10.1	Volume Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi (ribu m ³), 2006-2010 <i>Volume of Clean Water that Distributed by Water Supply Establishment by Province (thousand m³), 2006-2010</i>	164
4.10.2	Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi, 2006-2010 <i>Number of Water Supply Establismment Customer by Province, 2006-2010.....</i>	165

4.10.3	Kandungan Maksimum <i>Biochemical Oxygen Demand</i> (BOD) dan <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) pada Air Sungai di Beberapa Kota di Indonesia (mg/L), 2011 <i>Maximum of Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) on the River Water in Major Cities in Indonesia (mg/L), 2011</i>	166
4.11.1	Kawasan Konservasi Daratan Menurut Provinsi, 2010 <i>Land Conservation Area by Province, 2010.....</i>	167
4.11.2	Spesies Satwa yang Dilindungi, 2000-2011 <i>Protected Species of Fauna, 2000-2011.....</i>	169
4.11.3	Spesies Tumbuhan yang Dilindungi, 2000-2011 <i>Protected Species of Flora, 2000-2011.....</i>	170
4.12.1	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah), 2006-2011 <i>Per Capita Gross Regional Domestic Product at Current Market Price by Province (thousand rupiahs), 2006-2011</i>	171
4.12.2	Tabungan Bruto Menurut Sektor (triliun rupiah), 2006–2011 <i>Gross Saving by Sectors (trillion rupiahs), 2006–2011</i>	172
4.12.3	Pembagian Investasi dalam Produk Domestik Bruto (miliar rupiah), 2005-2011 <i>Investment Share in Gross Domestic Product (billion rupiahs), 2005-2011</i>	173
4.12.4	Laju Inflasi 66 Kota di Indonesia (2007=100), 2006-2011 <i>Inflation Rate of 66 Cities in Indonesia (2007=100), 2006-2011</i>	174
4.12.5	Rasio Pinjaman Luar Negeri Terhadap Produk Nasional Bruto, 2006-2011 <i>Ratio of External Debt on Gross National Product, 2006-2011</i>	176
4.12.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi, 2005-2011 <i>Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Worked by Province, 2005-2011.....</i>	177
4.12.7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Rentan Kehilangan Pekerjaannya Menurut Provinsi, 2005-2011 <i>Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Vulnerable Employment by Province, 2005-2011.....</i>	178
4.12.8	Persentase Buruh/Karyawan/Pegawai Wanita di Sektor Non Pertanian Menurut Provinsi, 2007-2011 <i>Percentage of Women Worker in Non Agricultural Sector by Province, 2007-2011</i>	179

4.12.9	Percentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household with Access to the Internet in the Last Three Months by Province, 2006-2011.....</i>	180
4.12.10	Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household Having Telephone by Province, 2006-2011.....</i>	181
4.12.11	Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler menurut Provinsi, 2006-2011 <i>Percentage of Household Having Cellular Phone by Province, 2006-2011.....</i>	182
4.12.12	Percentase Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Produk Domesti Bruto, 2005-2010 <i>Percentage of Tourism Economic Impact to Gross Domestic Product, 2005-2010.....</i>	183
4.13.1	Percentase Transaksi Berjalan Terhadap Produk Domestic Bruto, 2006-2011 <i>Percentage of Current Account to Gross Domestic Product, 2006-2011.....</i>	184
4.13.2	Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US\$), 2006-2011 <i>Value of Imports by Major Countries of Origin (CIF Value: million US\$), 2006-2011</i>	185
4.13.3	Posisi Pinjaman Luar Negeri (juta US\$), 2007-2011 <i>External Debt Outstanding (million US\$), 2007-2011</i>	186
4.13.4	Percentase Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Produk Domestik Bruto , 2006-2011 <i>Percentage of Foreign Direct Invesment (FDI) to Gross Domestic Product (GDP), 2006-2011.....</i>	187
4.13.5	Percentase Remitan terhadap Pendapatan Nasional 2006-2011 <i>Percentage of Remittances to National Income 2006-2011.....</i>	188
4.14.1	Pemakaian Energi Termasuk Biomasa Menurut Sektor (SBM), 2000-2010 <i>Energy Used Included as Biomass by Sectors (BOE), 2000-2010.....</i>	189
4.14.2	Jumlah Kendaraan Penumpang dan Barang Menurut Provinsi, 2009-2011 <i>Number of Passenger and Freight Vehicles by Province, 2009-2011</i>	190
4.14.3	Produksi Angkutan Kereta Api Penumpang dan Barang, 2008-2010 <i>Production of Passenger and Freight Railways Transportation, 2008-2010</i>	191

DAFTAR GAMBAR / LIST OF FIGURES

2.1. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, Agustus 1996 <i>Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators,</i> August 1996.....	9
2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, September 2001 <i>Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators, September</i> 2001.....	11
4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1996-2012 <i>Number and Percentage of Poor People, 1996-2012.....</i>	45
4.2. Indeks Gini, 2002-2011 <i>Gini Index, 2002-2011.....</i>	47
4.3. Estimasi Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi, 2012 <i>Estimated of Infant Mortality Rate by Province, 2012.....</i>	58
4.4. Status Gizi Balita, 2005-2010 <i>Nutritional Status of Children Under Five Years Old, 2005-2010.....</i>	62
4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 2000-2011 <i>Net Enrollment Ratio (NER) of Elementary School and Junior High School, 2000-2011.....</i>	67
4.6. Penduduk usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan Minimal SMA (persen), 2000-2011 <i>Population Aged 25-64 Years Old have Completed Minimum Education Senior High School (percent), 2000-2011</i>	68
4.7. Angka Beban Ketergantungan, 2000-2012 <i>Dependency Ratio, 2000-2012.....</i>	72
4.8. Distribusi Lahan Sawah Menurut Pulau (Persen), 2010 <i>Distribution of Wetland by Island (percent), 2010.....</i>	80
4.9. Laju Inflasi Gabungan 66 Kota (2007=100), 2000-2011 <i>Composite Inflation Rate of 66 Cities (2007=100), 2000-2011</i>	93
4.10. Posisi Pinjaman Luar Negeri (juta US\$), 2000-2011 <i>External Debt Outstanding (million US\$), 2000-2011</i>	100
4.11. Pemakaian Energi Termasuk Biomasa Menurut Sektor (miliar SBM), 2000-2010 <i>Energy Used Included as Biomass by Sectors (billion BOE), 2000-2010</i>	102

PENJELASAN UMUM / EXPLANATORY NOTES

1. TANDA-TANDA / SYMBOLS

Data belum tersedia / <i>Data not yet available</i>	: ...
Data tidak tersedia / <i>Data not available</i>	: -
Data dapat diabaikan / <i>Data negligible</i>	: 0
Angka diperbaiki / <i>Revised figures</i>	: r
Angka sementara / <i>Preliminary figures</i>	: x
Angka sangat sementara / <i>Very Preliminary figures</i>	: xx
Angka sangat-sangat sementara / <i>Extremely Preliminary figures</i>	: xxx

2. SATUAN / UNIT

barel / <i>barrel</i>	: 158,99 liter/ <i>litres</i> = 1/6,2898 m ³
kilometer (km) / <i>kilometers (km)</i>	: 1 000 meter/ <i>meters (m)</i>
kwintal (kw) / <i>quintal (ql)</i>	: 100 kg
MSCF	: 1/35,3 m ³
metric ton (m. ton) / <i>metric ton (m. ton)</i>	: 0,98421 <i>long ton</i> =1 000 kg
ton / <i>ton</i>	: 1 000 kg

3. SINGKATAN

3. GLOSSARY

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku	<i>Current Market Price</i>
AHH	: Angka Harapan Hidup	<i>Life Expectancy Rate</i>
AIDS	: <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>	
AKB	: Angka Kematian Bayi	<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>
AMH	: Angka Melek Huruf	<i>Literacy Rate</i>
API	: <i>Annual Parasite Incidence</i>	
APM	: Angka Partisipasi Murni	<i>Net Enrollment Ratio (NER)</i>
BCG	: <i>Bacillus Calmette Guerin</i>	
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	<i>Meteorology, Climatology and Geophysics Agency</i>
BOD	: <i>Biochemical Oxygen Demand</i>	
BPO	: Bahan Perusak Ozon	<i>Ozone Depleting Substance (ODS)</i>
CIF	: <i>Cost Insurance and Freight</i>	
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>	
CSD	: <i>Commission on Sustainable Development</i>	

DPT	: <i>Difteri Pertusis Tetanus</i>	
DSD	: <i>Division for Sustainable Development</i>	
DSR	: <i>Driving Force-State-Response</i>	
GK	: Garis Kemiskinan	<i>Poverty Line</i>
GNI	: <i>Gross National Income</i>	
GRK	: Gas Rumah Kaca	<i>Green House Gases (GHG)</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>	
KB	: Keluarga Berencana	<i>Family Planning</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi	<i>High Level Conference</i>
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>	
NSB	: Negara Sedang Berkembang	<i>Less Developed Countries</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>	
PDB	: Produk Domestik Bruto	<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto	<i>Gross Regional Domestic Product (GRDP)</i>
PNB	: Produk Nasional Bruto	<i>Gross National Product (GNP)</i>
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat	
Pustu	: Puskesmas Pembantu	<i>Public Health Center</i>
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional	<i>Subsidiary Public Health Center</i>
SBM	: Setara Barel Minyak	<i>National Labor Force Survey</i>
SP	: Sensus Penduduk	<i>Barrel Oil Equivalent (BOE)</i>
Supas	: Survei Penduduk Antar Sensus	<i>Population Census</i>
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional	<i>Inter Censal Population Survey</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>	<i>National Socio Economic Survey</i>
TB	: <i>Tuberculosis</i>	
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>	
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>	
WHO	: <i>World Health Organization</i>	
WTO	: <i>World Trade Organization</i>	

1

PENDAHULUAN *Introduction*

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses pembangunan yang berlangsung sekarang ini cenderung berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Aspek sumber daya alam yang tersedia di bumi jumlahnya terbatas, sehingga apabila sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dan dieksplorasi secara terus menerus akan merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Akibat lain yang ditimbulkan adalah degradasi lingkungan berupa semakin meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang erat kaitannya dengan aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia antara lain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan untuk pertanian dan perumahan, penggunaan zat radioaktif dan kegiatan-kegiatan industri.

Dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah mulai muncul dan dirasakan beberapa tahun terakhir seperti hujan asam, kekeringan, pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak-dampak tersebut sudah pada kondisi merugikan atau mengganggu kehidupan manusia.

Permasalahan lingkungan hidup telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Tanggapan serius terhadap permasalahan tersebut sudah muncul sejak tahun 1972 dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Stockholm, Swedia. Dalam konferensi tersebut dibahas tentang lingkungan yang sehat dan produktif. Sejak saat itu lahir konsep pembangunan yang ramah lingkungan mulai diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan oleh negara-negara di dunia.

1.1 Background

Development objective is essentially to improve the welfare and prosperity of society. The development that goes on now oriented to increase economic growth by using natural and human resource. The availability of natural resource on earth is limited, hence if it used and exploited continuously it will damage the environmental balance of the ecosystem. Another problem caused by the exploitation of natural resources is environmental degradation in the form of increasing of pollution and environmental damage. Pollution and environmental damage are closely related to the activities carried out by development activities, among others, caused by land use change for agriculture and housing, the use of radioactive substance and industrial activities.

The impacts of pollution and environmental damage have started to emerge in recent years such as acid rain, drought, global warming, and climate change. The impacts are already harming or disturbing the conditions of human life.

Environmental problems have long been a concern of the international community. Serious response to the problems has emerged since 1972 with the convening of Summit Earth in Stockholm, Sweden. The conference discussed about healthy and productive environment. Since that time the development concept of an environmentally friendly start implemented by countries around the world.

PENDAHULUAN

Meskipun komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih tetap saja memburuk. Perilaku penduduk yang masih bergaya hidup mewah, penggunaan energi yang kurang efisien dan terus mencemari lingkungan merupakan hambatan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor industri, kendaraan bermotor, konsumsi energi yang tidak diimbangi oleh kesadaran menjaga lingkungan telah mengakibatkan bertambahnya kerusakan lingkungan (air, tanah dan udara), seperti terjadinya hujan asam, tercemarnya pemukiman, serta terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu usaha untuk menjaga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk diperjuangkan sehingga kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang dapat terpenuhi.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1983 dibentuk Komisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Dunia (*World Commission on Environment and Development*, WCED) oleh PBB, dimana komisi inilah yang akan bertugas menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan. Pada tahun 1987, WCED menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*, yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan global antara ekonomi, sosial, budaya dan isu-isu lingkungan. Laporan tersebut mendefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembahasan dan pertemuan tingkat dunia terus berlanjut dengan diadakannya *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 yang mengadopsi agenda untuk

Despite the commitment and great attention has been given to the international level, but the environmental conditions are still deteriorating. Population habit in luxuriously life, inefficient in using of energy and still contaminated the environment had been problems toward sustainable development. The growth of industrial sector, motorized vehicle, and the consumption of energy which were not balanced by the awareness on environment had caused more contaminations to environment, such as the emergence of acid rain, poorer settlement, global warming and climate change. Therefore, some efforts to protect the environment through sustainable development becomes increasingly important to do, so that the needs of future generations are fulfilled.

*In 1983, World Commission on Environment and Development (WCED) was established by the United Nations, where the commission is to be responsible for handling various issues related to development and environment. In 1987 the WCED published a report entitled *Our Common Future*, which describes the relationship and the global linkages between economic, social, cultural, and environmental issues. That report defines the concept of sustainable development. The sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.*

Discussion and meeting continued by present the United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) at Rio de Janeiro in June 1992 to adopt the agenda for environment and development in the 21st

lingkungan dan pembangunan di abad ke-21 yang kemudian disebut Agenda 21. Agenda 21 lebih lanjut menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari 3 pilar; ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk menindaklanjuti Agenda 21, UNCED membentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development, CSD*) pada tahun 1993. Tahun 2002, sepuluh tahun dari Deklarasi Rio, dilaksanakan konferensi puncak sedunia tentang pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) di Johannesburg Afrika Selatan, yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Konferensi tersebut dikenal juga dengan sebutan Konferensi Rio+10.

Untuk membantu negara-negara dalam mengambil keputusan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, maka Komisi Pembangunan Berkelanjutan menyusun indikator pembangunan berkelanjutan sebagai acuan negara-negara dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1995, Komisi Pembangunan Berkelanjutan berhasil menyusun sekitar 134 indikator pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja *Driving Force-State-Response*. Pada tahun 2001, Divisi Pembangunan Berkelanjutan merevisi 134 indikator pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi 58 indikator berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan indikator tersebut. Indikator tersebut direvisi kembali menjadi 50 indikator utama dan 46 indikator lain pada tahun 2007.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu dengan mengevaluasi perkembangan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, penyusunan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan penting

century called Agenda 21. Agenda 21 confirmed that sustainable development is built by the integration of three pillars; the economic, social and environmental pillars. To follow up Agenda 21, UNCED established the Commission on Sustainable Development (CSD) in 1993. In 2002, ten years after Rio Declaration, was held the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg South Africa, to discuss and address environmental degradation. The conference also known as Rio+10.

To assist countries in making decisions related to sustainable development focus, the Commission on Sustainable Development develops indicators of sustainable development as the reference in the context of sustainable development. In 1995, the Commission on Sustainable Development managed to develop about 134 indicators of sustainable development within the framework of Driving Force-State-Response. In 2001, the Division for Sustainable Development CSD revised the 134 indicators of sustainable development to 58 indicators based on experiences of several countries that have implemented these indicators. The indicators were revised again to 50 core indicators and 46 other indicators in 2007.

To measure the achievement of sustainable development in Indonesia by evaluate the progress of development programs that have been implemented, the preparation of indicators of sustainable development as recommended by the Commission on Sustainable Development is important. Therefore, BPS-Statistics Indonesia has

PENDAHULUAN

dilakukan. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menelaah indikator-indikator yang mungkin dapat diimplementasikan dengan kondisi negara Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk publikasi khusus, yaitu Indikator Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah untuk menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB. Publikasi ini diharapkan dapat berguna bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data dan informasi terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang meliputi 14 tema, yaitu: 1) Kemiskinan, 2) Pemerintahan, 3) Kesehatan, 4) Pendidikan, 5) Demografi, 6) Bencana Alam, 7) Atmosfer, 8) Lahan, 9) Laut dan Pantai, 10) Air Bersih, 11) Keanekaragaman Hayati, 12) Pembangunan Ekonomi, 13) Kerjasama Ekonomi Global, dan 14) Pola Konsumsi dan Produksi.

Cakupan data dalam publikasi ini utamanya adalah untuk tingkat provinsi dan nasional. Sebagian data diasumsikan sebagai representasi provinsi, meskipun sebenarnya datanya tidak menggambarkan keseluruhan provinsi, seperti data dari titik stasiun pengamatan cuaca BMKG di ibukota provinsi dan data tentang kualitas air sungai yang mengaliri ibukota provinsi. Sedangkan tahun data yang disajikan bervariasi dari tahun 2006 sampai dengan 2012.

examined indicators that may be implemented by the Indonesian state conditions, and presenting it in the form of publications, namely Indicator of Sustainable Development.

1.2 Objective

The objective of this publication is to provide data and information on sustainable development indicators suggested by Commission on Sustainable Development of the United Nations. It is expected that this publication can be used as source of information for planning, monitoring, and evaluating of development programs.

1.3 Coverage

This publication presents data and information related to sustainable development which include 14 theme, that are : 1) Poverty, 2) Governance, 3) Health, 4) Education, 5) Demography, 6) Natural Disasters, 7) Atmosphere, 8) Land, 9) Marine and Coastal, 10) Clean Water, 11) Biodiversity, 12) Economic Development, 13) Global Economic Cooperation, and 14) Consumption and Production Patterns.

Data coverage of this publication is primarily for province and national level. Some data are assumed to represent the province, although the data not describe the whole province, such as data from weather observation station BMKG point in the provincial capital and data about the quality of river water running through the provincial capital. While years of data presented varies from 2006 up to 2012.

2

KAJIAN LITERATUR *Literature Study*

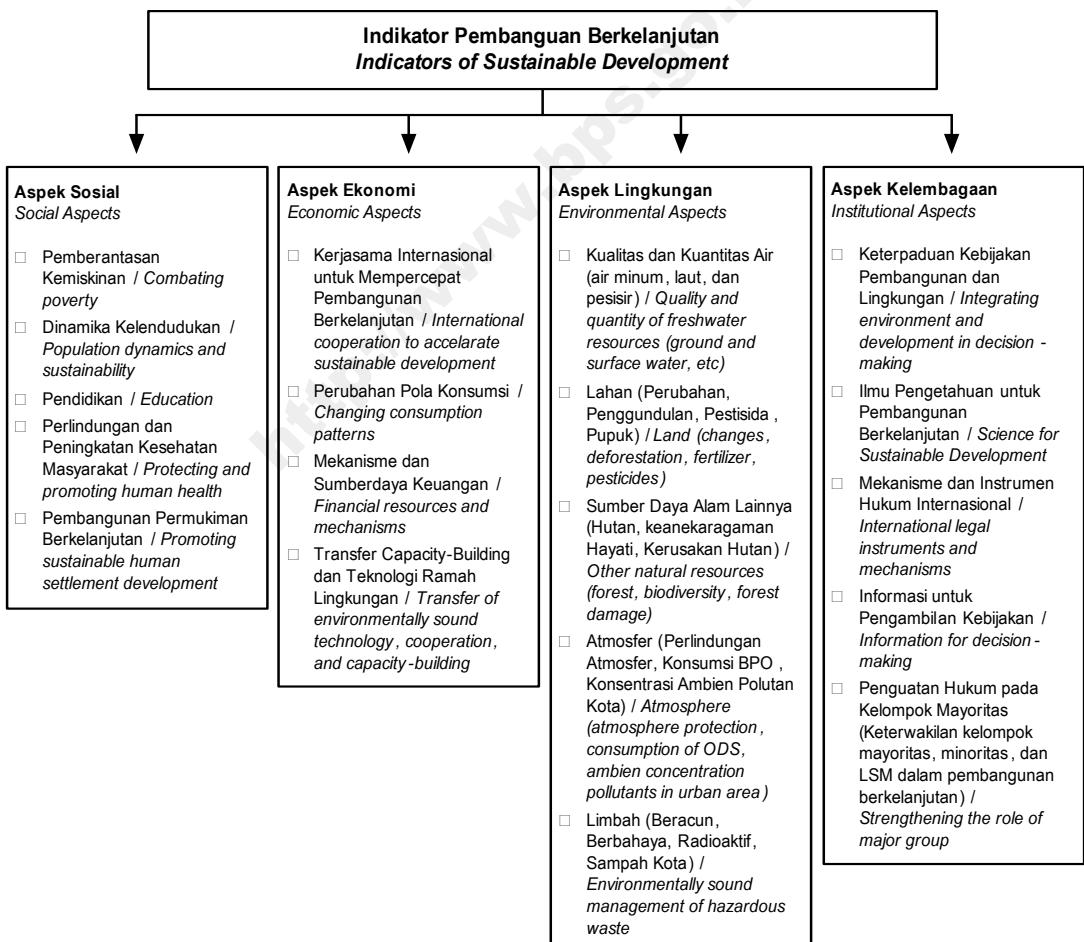
2.1 Kerangka kerja DSR oleh CSD, 1995

Pada pertemuan yang dilakukan bulan April 1995, Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development*, CSD) menyusun program kerja untuk indikator pembangunan berkelanjutan. Program kerja tersebut terdiri dari 134 indikator yang disusun dalam kerangka kerja *Driving Force-State-Response* (DSR). Dalam kerangka kerja tersebut, indikator *Driving Force* merepresentasikan aktivitas, proses dan pola-pola manusia yang

2.1 DSR Framework by CSD in 1995

At the meeting held in April 1995, the Commission on Sustainable Development (CSD) develops a work program for the sustainable development indicators. The work program consists of 134 indicators organized within the framework of Driving Force-State-Response (DSR). In this framework Driving Force indicators represent activities, processes and patterns of human that impacts on sustainable development; State indicators describes the condition/state of

Gambar 2.1. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, Agustus 1996
 Figure 2.1. Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators, August 1996



Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB
 Source United Nation - Commission on Sustainable Development (UN-CSD)

KAJIAN LITERATUR

berdampak pada pembangunan berkelanjutan; indikator *State* menggambarkan kondisi/keadaan dari pembangunan berkelanjutan; dan indikator *Response* menggambarkan pilihan kebijakan dan respon lainnya untuk mengubah kondisi atau keadaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja DSR dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu : sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Kerangka kerja DSR lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.2 Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 2001

Pada September 2001, CSD telah mempublikasikan laporan terbarunya mengenai indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil evaluasi program kerja selama 1995 – 2000. Hasil laporan tersebut merupakan presentasi akhir yang diharapkan menjadi kerangka kerja dan merupakan indikator-indikator inti (*the core set indicators*) yang disediakan bagi negara anggota dalam mewujudkan usahanya dalam mengukur kemajuan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagian besar negara anggota yang telah menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan CSD menemukan bahwa sekumpulan indikator awal CSD tahun 1995 dianggap masih terlalu banyak sehingga kurang mudah untuk diterapkan. Pada tahun 2001 indikator tersebut direvisi dan dikurangi sampai akhirnya disetujui sebanyak 58 indikator yang tertuang dalam kerangka kebijakan yang berorientasi tema dan sub tema. Indikator-indikator tersebut telah disesuaikan dengan implementasi dari Agenda 21 mengenai komitmen negara-negara anggota PBB tahun 1992 bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya indikator pokok hasil

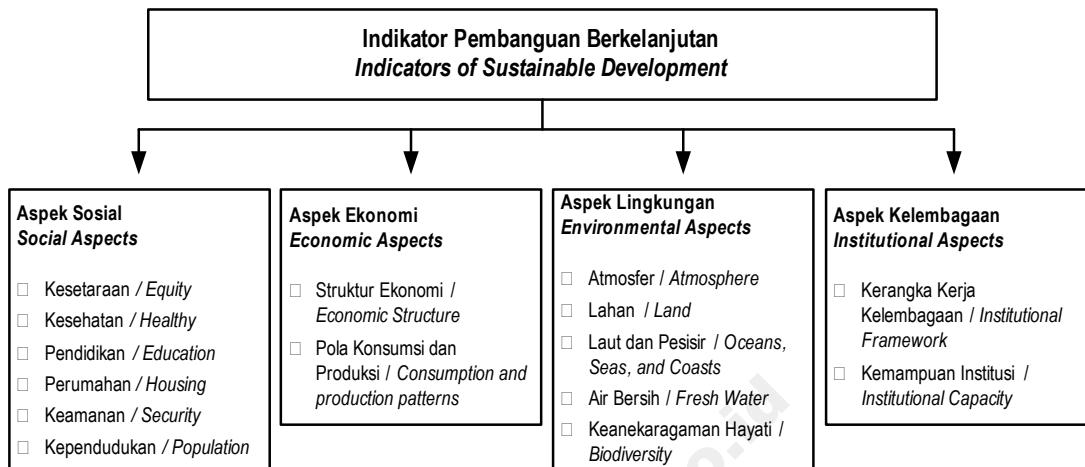
sustainable development, and Response indicators describes the policy options and other responses to changing conditions or state of sustainable development. DSR framework is grouped into four categories: social, economic, environmental and institutional. DSR framework further can be seen in Figure 2.1.

2.2 DSR Framework by CSD in 2001

In September 2001, CSD has published his latest report about indicators of sustainable development which is the result of the evaluation work program during 1995 – 2000. The results of the final presentation of the report is expected to be a framework and is “the core set indicators” that are provided to member countries in realizing their efforts in measuring the progress of sustainable development results which have been and will be implemented.

Most of the countries that have implemented the CSD indicators of sustainable development, found that the initial CSD Indicators set in 1995 was still too large and quite difficult to apply. Consequently in 2001, a set of CSD Indicators was revised and it was decided to be reduced until finally approved as many as 58 indicators that are embedded within the framework of policy oriented to the themes and sub themes. This indicators have been adapted to the implementation of Agenda 21 regarding the commitment of UN member states in 1992 that development is carried out should pay attention to the concept of sustainable development. Actually, the core set indicators of this CSD evaluate result is a choice indicators of sustainable development indicators which publish

Gambar 2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, September 2001
Figure 2.2. Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators, September 2001



Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB

Source United Nation - Commission on Sustainable Development (UN-CSD)

evaluasi CSD ini merupakan indikator pilihan dari indikator pembangunan berkelanjutan yang dipublikasi dari hasil sidang WCED tahun 1995, yang berjumlah sekitar 134 indikator.

as a result of WCED Conference in 1995, it's around 134 indicators.

2.3 Revisi Indikator Pembangunan Berkelanjutan oleh CSD, 2007

Pada tahun 2005, Divisi Pembangunan Berkelanjutan PBB mulai meninjau kembali indikator pembangunan berkelanjutan CSD. Peninjauan ulang ini sebagian besar didasarkan karena dua alasan, yaitu sudah banyak negara yang menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan. Bahkan mereka sudah mulai mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan nasional mereka sendiri, namun tetap berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan CSD. Selain itu, sejak diadopsinya deklarasi milenium oleh PBB tahun 2000, banyak perhatian diberikan oleh PBB dan negara-negara anggota demi pengembangan dan penggunaan indikator untuk mengukur kemajuan dalam mencapai MDGs.

2.3 Revised CSD Indicators of Sustainable Development, 2007

In 2005, the UN Division for Sustainable Development (DSD) started a process to review the CSD indicators of sustainable development. This review was largely carried out for two reasons, that was many countries already implementing sustainable development indicators. They have started to develop their own national indicators of sustainable development, based on the CSD indicators of sustainable development. In addition, since the adoption by the UN millennium declaration of 2000, many attention had been given within the UN system and by member states to the development and using of indicators to measure progress in achieving the MDGs.

KAJIAN LITERATUR

Peninjauan kembali indikator pembangunan berkelanjutan CSD dilakukan dengan bantuan dari para ahli dan pengalaman negara-negara yang telah menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil peninjauan kembali pada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan CSD, telah menghasilkan 50 indikator utama. Indikator utama ini merupakan bagian dari 96 indikator pembangunan berkelanjutan hasil revisi. Divisi Pembangunan Berkelanjutan telah memastikan koherensi indikator CSD hasil revisi dengan indikator lain seperti MDGs, the 2010 Biodiversity Indicators Partnership, the Hyogo Framework for Action on Disaster Reduction, the Global Forest Resource Assessment, dan Sustainable Tourism Indicators.

Pemilihan indikator utama membantu negara-negara untuk bisa memilih indikator yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Sementara kumpulan indikator yang lebih besar memungkinkan dimasukkannya indikator tambahan sehingga masing-masing negara dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap indikator pembangunan berkelanjutan.

Indikator utama ini memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama indikator mencakup isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di sebagian besar negara. Kedua, indikator ini memberikan informasi penting yang tidak tersedia dari indikator inti lainnya dan ketiga, indikator ini dapat dihitung oleh sebagian besar negara dengan data yang tersedia ataupun dapat dihitung dengan waktu dan biaya yang memungkinkan. Sebaliknya, indikator yang bukan bagian dari indikator utama hanya relevan untuk sebagian kecil negara dan bisa digunakan sebagai informasi pelengkap untuk indikator utama atau tidak mudah tersedia untuk sebagian besar negara.

A review of CSD indicator of sustainable development with the help of experts and the experience of countries that have implemented sustainable development indicators. The results of the review set of CSD indicators of sustainable development contain a core set of 50 indicators. These core indicators are part of a larger set of 96 indicators of sustainable development from CSD. Division for Sustainable Development has ensured coherence of revised CSD indicators with other indicator sets such as the MDGs Indicators, the 2010 Biodiversity Indicators Partnership, the Hyogo Framework for Action on Disaster Reduction, the Global Forest Resource Assessment, and Sustainable Tourism Indicators.

The introduction of a core set of indicators helps all countries to keep the indicator set manageable accordance with the conditions of each country. While the larger set of indicators allows the inclusion of additional indicators that each country can do a more comprehensive assessment of sustainable development indicators.

Core indicators fulfill three criterias. First, they cover issues that are relevant for sustainable development in most countries. Second, they provide critical information not yet available from other core indicators. Third, they can be calculated by most countries with data that is either readily available or could be available within reasonable time and costs. Conversely, indicators that are not part of the core are either relevant only for a smaller set of countries, provide complementary information to core indicators or are not easily available for most countries.

Sekumpulan indikator ini tetap mempertahankan kerangka tematik/sub-tematik yang diadopsi pada tahun 2001. Dengan demikian, tetap konsisten dengan praktek kebanyakan negara yang menerapkan sekumpulan indikator pembangunan berkelanjutan nasional.

Indikator pembangunan berkelanjutan CSD yang di revisi terdiri dari 14 tema (kemiskinan, kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, demografi, bencana alam, atmosfir, lahan, laut dan pesisir, air, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi global, serta konsumsi dan pola produksi), 44 sub-tema, 50 indikator utama, dan 46 indikator lain (Lampiran 1).

The indicator set retains the thematic/sub-thematic framework that was adopted in 2001. Thus, it remains consistent with the practice in most countries which applying national sustainable development indicator sets.

Revised CSD indicators of sustainable development consisted of 14 themes (poverty, governance, health, education, demographic, natural hazards, atmosphere, land, seas and coasts, freshwater, biodiversity, economic development, global economic partnership, and consumption and production patterns), 44 sub themes, 50 core indicators, and 46 other indicators (Appendix 1).

3

METODOLOGI *Methodology*

3.1. Sumber Data

Dalam publikasi ini, indikator-indikator yang disajikan sebagian besar berasal dari hasil survei/sensus yang dilakukan BPS dan kompilasi laporan tahunan instansi pusat atau daerah yang terkait bidang lingkungan hidup. Instansi tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3.2. Pemilihan Indikator

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Agenda 21. Sebagai konsekuensinya, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyajikan indikator atau variabel pembangunan berkelanjutan sesuai dengan yang disarankan dan direkomendasikan oleh UN-CSD. Oleh karena itu kerangka kerja yang digunakan mengacu pada kerangka kerja UN-CSD. Dalam penyajian publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan ini, tidak semua indikator bisa disajikan karena keterbatasan data yang tersedia di Indonesia. Selain itu, ada beberapa indikator pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan data di Indonesia (Lampiran 1).

Berikut merupakan penjelasan setiap indikator terpilih dari kerangka kerja CSD yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan.

3.1. Data Source

In this publication, the presented indicators are mainly taken from the surveys/censuses conducted by BPS-Statistics Indonesia and the annual reports of related institutions (central or regional) on environment. The institutions such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Forestry, the Ministry of Health, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, National Agencies for Disaster, Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, Indonesian National Police Headquarters, Bank of Indonesia, Regional Environmental Impact Control Agency, and Directorate General of Customs and Excise.

3.2. Indicators Selection

Indonesia is one of country whose ratified the Agenda 21. As consequence, Indonesia has an obligation to present the indicators or variables of sustainable development based on the advice and recommendation of the UN-CSD. Therefore a framework that is used referring to the framework of UN-CSD. In presenting the publication of Indicators of Sustainable Development, not all indicators could be served because of limited data that available in Indonesia. In addition, there are several indicators of approaches adapted to environmental conditions and availability of data in Indonesia (Appendix 1).

The following will be explained of each selected indicators from CSD framework that have been adapted to conditions in Indonesia

1. Number and percentage of poor people

Poor people are defined as people whose expenditure per capita per month that below the poverty line. The purpose of poverty

METODOLOGI

Tujuan dari ukuran kemiskinan adalah untuk memungkinkan adanya perbandingan kemiskinan dan menilai kemajuan upaya pengentasan kemiskinan serta evaluasi program.

2. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini

Indikator ini merupakan suatu ukuran ketimpangan pendapatan atau sumber daya dalam suatu masyarakat. Ketimpangan akibat pendapatan atau konsumsi dan ketidaksetaraan dalam meraih kesempatan menghambat pembangunan manusia dan merugikan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

3. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik

Penyediaan sanitasi yang memadai diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Indikator ini memantau kemajuan akses rumah tangga pada fasilitas sanitasi, pelayanan sosial dasar yang penting sekaligus merupakan dasar untuk mengurangi resiko dari bakteri faecal (yang terdapat pada kotoran manusia) dan frekuensi penyakit yang terkait.

4. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Indikator ini memonitor kemajuan dari akses rumah tangga terhadap sumber air bersih dengan volume yang memadai dan jarak yang terjangkau.

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik

Listrik dan layanan energi modern adalah komponen penting dalam penyediaan pelayanan sosial dasar. Kurangnya akses ke layanan energi modern berkontribusi terhadap kemiskinan dan membatasi pembangunan ekonomi.

measurement is for poverty comparisons and to assess progress toward poverty alleviation and for program evaluation.

2. *Distribution of expenditure per capita and gini index*

The indicator shows the extent of inequality in income distribution or resource within a society. Inequality in outcomes such as income or consumption and inequality in opportunities hinder human development and are detrimental to long-term economic growth.

3. *Percentage of household with toilet discharge septic tank*

Provision of adequate sanitation is necessary to protect human health and the environment. The indicator monitors progress in the accessibility of the household to sanitation facilities, a basic and essential social service. Accessibility to adequate excreta disposal facilities is fundamental to decrease the faecal risk and frequency of associated diseases.

4. *Percentage of household using safe water*

The indicator monitors progress in the accessibility of the households to improved safe water sources with adequate volume and convenience distance covered.

5. *Percentage of household using source of lighting from non electricity*

Electricity and modern energy services are an important component of providing basic social service. Lack of access to modern energy services contribute to poverty and limits economic development.

6. Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu bakar
- Penggunaan bahan bakar padat dalam rumah tangga merupakan proxy dari polusi udara dalam ruangan. Tingginya permintaan bahan bakar biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga berkontribusi terhadap penebangan hutan dan degradasi lahan. Indikator ini juga mengukur akses ke layanan energi modern.
7. Jumlah desa menurut keberadaan permukiman kumuh
- Keberadaan pemukiman kumuh merupakan manifestasi dari kemiskinan yang ditandai oleh kepadatan penduduk, perumahan yang tidak memadai, kekurangan air dan sanitasi. Indikator ini mengukur kecukupan tempat berlindung.
8. Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan
- Indikator ini menyajikan jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan di masing-masing kepolisian daerah. Penurunan indikator ini merupakan tanda bagi kemajuan pada tata pemerintahan yang baik dalam penanganan korupsi.
9. Jumlah kasus pembunuhan
- Indikator ini mengukur perkembangan jumlah kasus pembunuhan dari waktu ke waktu. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai ukuran untuk kepatuhan terhadap aturan hukum dan merupakan salah satu komponen dari tata kelola pemerintahan yang baik.
10. Angka kematian bayi
- Estimasi angka kematian bayi merupakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (dinyatakan per 1000 kelahiran hidup). Tingkat kematian bayi dipengaruhi oleh ketersedian, akses
6. Percentage of household using source of cooking fuel from fire wood
- The use of solid fuels in households is a proxy of indoor air pollution. High demand for biomass fuels to meet household energy needs can contribute to deforestation and subsequent land degradation. The indicator also measures access to modern energy services.*
7. Number of villages by the existence of slum area
- The existence of slums area is a manifestation of poverty which is characterized by overcrowding, inadequate housing, lack of water and sanitation. The indicator measures the shelter adequacy.*
8. Number of corruption cases which solved
- The indicator presents the number of corruption cases that have been solved respectively by regional police. A decline of this indicator is a sign of progress on good governance in handling of corruption.*
9. Number of homicide cases
- The indicator measures the progress of homicides cases over time. The indicator can also be used as a measure for the adherence to the rule of law, a component of good governance.*
10. Infant mortality rate
- The infant mortality rate is the probability of infants dying before age 1 year (expressed per 1000 live births). mortality levels are influenced by the availability, accessibility and quality of health services; education,*

METODOLOGI

dan kualitas sarana kesehatan; pendidikan, khususnya ibu-ibu; akses air bersih dan sanitasi; kemiskinan dan gizi.

11. Angka harapan hidup saat lahir

Indikator ini merupakan rata-rata umur yang dicapai oleh bayi yang baru lahir yang diharapkan hidup, dengan mengingat adanya resiko kematian pada saat usia tertentu. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator kematian dan proxy terhadap kondisi kesehatan.

12. Persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu

Indikator ini mengukur akses penduduk terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

13. Persentase balita yang diimunisasi

Indikator ini memantau implementasi dari program imunisasi. Pengelolaan yang baik pada program imunisasi sangat penting untuk mengurangi kesakitan dan kematian dari penyakit menular di masa kanak-kanak.

14. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB

Indikator ini menunjukkan usaha manusia secara sadar dalam mengontrol kelahiran/pelayanan kesehatan reproduksi. Meskipun indikator ini tidak dapat mengontrol semua tindakan yang diambil dalam mengontrol kelahiran. Manfaat kesehatan dari penggunaan kontrasepsi meliputi kemampuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mengurangi resiko aborsi, potensi komplikasi kehamilan dan resiko kematian ibu.

15. Status gizi balita

Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur ketidakseimbangan gizi

particularly of mothers; access to safe water and sanitation; poverty and nutrition.

11. Life expectancy at birth

The indicator is the average age reached by a newborns who are expected to live, given current age-specific mortality risk. Life expectancy at birth is an indicator of mortality and by proxy of health conditions.

12. Percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health center

The indicator monitors progress in the access of the population to primary health care.

13. Percentage of children under-five years who immunized

The indicator monitors the implementation of immunization programs. Good management of immunization program is essential to reduce morbidity and mortality from major childhood infectious diseases.

14. Percentage of married woman aged 15-49 years who used contraceptive

The indicator shows a conscious human effort in controlling the birth/reproductive health services. Although this indicator can not control all the action taken in birth control. The health benefits of using contraceptive include the ability to prevent unwanted pregnancies, thereby reducing the resort to induced abortion as well as potential complications of pregnancy and the risks of maternal mortality.

15. Nutritional status of children under five years

The purpose of this indicator is to measure long term nutritional imbalance

- jangka panjang dan kekurangan gizi yang mengakibatkan gizi buruk (dinilai dengan berat badan kurang dan pendek) serta kelebihan berat badan.
16. Jumlah penderita malaria, kumulatif kasus AIDS dan jumlah kasus penyakit TB paru
Indikator ini mengukur angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular seperti malaria, AIDS, dan TB paru. Indikator ini juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan langkah-langkah memerangi penyakit menular tersebut.
17. Prevalensi perokok saat ini
Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok. Prevalensi perokok merupakan ukuran untuk menentukan beban ekonomi dan kesehatan di masa depan dari penggunaan tembakau, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program pengendalian tembakau dari waktu ke waktu. Konsumsi rokok selain mahal juga berkontribusi pada kemiskinan dan penurunan kesehatan individu dan negara.
18. Jumlah kasus bunuh diri
Indikator ini merupakan pendekatan penting pada gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental merupakan hambatan utama bagi kesejahteraan penduduk.
19. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar
Indikator ini mengukur penduduk usia sekolah yang mempunyai akses untuk sekolah dan menyelesaikan pendidikan dasarnya secara penuh.
20. Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Angka Partisipasi Murni SD merupakan proporsi penduduk usia SD yang bersekolah di SD terhadap penduduk usia SD di suatu
- and malnutrition resulting in undernutrition (assessed by underweight and stunting) and overweight.*
16. Number of malaria patient, AIDS cumulative cases, and number of tuberculosis disease cases
The indicator measures the morbidity caused by major diseases such as malaria, AIDS, and tuberculosis. The indicator also provides information on the success of measures to combat major diseases.
17. Prevalence of current smokers
The indicator is defined as the percentage of people aged 15 years and over who smoked. The prevalence of smokers is a measure useful to determine the economic and future health burden of tobacco use, and as a basis for evaluating the effectiveness of tobacco control programs over time. Tobacco consumption is costly and contributes to poverty and associated health inequalities at the individual and national levels.
18. Number of suicide cases
The indicator is an important proxy for the prevalence of mental health disorders. Mental health disorders is a major impediment to the well-being of population.
19. Percentage of population aged 15 years and over who graduated from primary education
The indicator measures the entire eligible school age population has access to school and complete the primary education.
20. Net enrollment ratio of elementary school and junior high school
Net enrollment ratio of elementary school is the proportion of children of elementary school age who are attending

METODOLOGI

wilayah. Tujuan angka partisipasi murni memberikan ukuran tentang penduduk yang menurut peraturan sudah pantas/harus bersekolah untuk bersekolah di pendidikan dasar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur jumlah penduduk usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di sekolah dasar.

21. Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA

Indikator ini merupakan proporsi penduduk usia kerja yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Indikator ini juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam populasi penduduk dewasa.

22. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Indikator ini dapat menggambarkan akumulasi pencapaian pendidikan dalam penyebaran baca-tulis.

23. Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mengukur seberapa cepat jumlah penduduk berubah. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mempengaruhi secara negatif aspek penggunaan lahan, air, udara, energi dan sumber daya lainnya.

24. Angka Kelahiran Total

Angka Kelahiran Total adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya. Angka kelahiran total merupakan salah satu variabel yang secara langsung berpengaruh pada perubahan penduduk. Angka kelahiran

elementary school to the elementary school age population in a region. The purpose of the net enrollment ratio is provides a measure of the population whose the age according to the rules, it deserves / should go to school to study primary education. This indicator can be used to measure the number of primary school age population who do not attend primary school.

21. *Percentage of population aged 25-64 years old have completed minimum education of senior high school*

The indicator is the proportion of working age population who had completed upper secondary education. The indicator also describes the quality of human resources in adult population.

22. *Literacy rate of population aged 15 years and over*

The literacy rate of population aged 15 and over is the percentage of population aged 15 years and above who can read and write in Latin letters or other. It reflects the accumulated accomplishment of education in spreading literacy.

23. *Population and growth rate of population*

Population growth rate measures how fast the size of population is changing. High rates of population growth could negatively affect the use of land, water, air, energy and other resources.

24. *Total fertility rate*

Total Fertility Rate (TFR) is the average number of children born by a woman throughout her life. Total fertility rate is one of the variables that directly affect the change in population. Total fertility rate was not influenced by population age distribution.

total tidak dipengaruhi oleh distribusi umur penduduk. Angka kelahiran yang rendah dapat meningkatkan kemampuan keluarga dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk melawan kemiskinan, melindungi dan memperbaiki lingkungan.

25. Angka beban ketergantungan

Angkabebanketergantunganmenunjukkan perbandingan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi terhadap penduduk usia muda dan usia tua yang tergantung secara ekonomi. Angka beban ketergantungan dapat mengindikasikan dampak potensial perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

26. Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya antisipasi bencana alam

Indikator ini menggambarkan jumlah desa yang terkena dampak bencana baik yang berupa tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gempa bumi yang disertai tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir disertai tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, angin puyuh/puting beliung dan kebakaran hutan. Indikator ini juga menunjukkan kerentanan terhadap bencana alam. Kerentanan yg tinggi ditunjukkan oleh tingginya keterpaparan oleh rupa-rupa kejadian bencana.

27. Jumlah korban dan kerusakan rumah akibat bencana alam

Indikator ini memperkirakan dampak ekonomi dan manusia dari bencana. Bencana yang melibatkan bahaya alam dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang buruk terhadap masyarakat dan perekonomian negara manapun, serta dapat menghambat berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.

Low fertility rates can increase the ability of families and governments in the management of existing resources to combat poverty, protect and repair the environment.

25. Dependency ratio

Dependency ratio is a comparison of the number of economically active population to the economically dependent of young people and old age. Dependency ratio indicate the potential effects of changes in population age structure for social and economic development.

26. Number of villages by type of natural disaster and the efforts in anticipation of natural disaster

The indicator describes the number of villages affected by the disaster in the form of landslides, earthquakes, tsunamis, earthquakes accompanied by tsunamis, volcanic eruptions, floods, landslides accompanied by floods, drought, tidal waves/abrasion, typhoons/ cyclones and forest fires. The indicator also shows the vulnerability to natural disasters. High vulnerability is show by the high exposure by different kinds of disasters.

27. Number of disaster and damaged house caused by natural disaster

The indicator provides estimates of the human and economic impact of disasters. Disasters involving natural hazards can have devastating short and long-term impacts on the society and the economy of any country, and adversely affecting progress towards sustainable development.

METODOLOGI

28. Emisi gas rumah kaca

Indikator ini mengukur emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak langsung terhadap perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksida (CO_2), methan (CH_4) dan nitrogen oksida (N_2O). Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berkontribusi terhadap pemanasan global yang merupakan tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Indikator ini juga memberikan informasi mengenai pemenuhan komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

29. Impor komoditi bahan yang mengandung zat perusak ozon

Indikator ini menggambarkan perkembangan dari proses pengurangan bahan perusak ozon (BPO). Tanpa penggunaan BPO akan memperbaiki lapisan ozon, sehingga mengurangi efek buruk pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, kehidupan laut, barang-barang, rantai bio komia, dan kualitas udara.

30. Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO_2 dan NO_2

Indikator ini memberikan ukuran keadaan lingkungan dalam hal kualitas udara dan merupakan ukuran tidak langsung paparan populasi dengan polusi udara yang menjadi perhatian kesehatan di wilayah perkotaan. Meningkatkan kualitas udara merupakan aspek penting dalam mempromosikan pemukiman yang berkelanjutan.

31. Luas lahan sawah

Indikator ini menunjukkan luas lahan yang tersedia untuk produksi pertanian, khususnya tanaman pangan.

28. Emission of greenhouse gases (GHG)

This indicator measures the emissions of greenhouse gas (GHG) which have a direct impact on climate change. The main of GHG are carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4) and nitrous oxide (N_2O). An increase of GHG concentration in the atmosphere contributes to global warming, which is a major global challenge to sustainable development. The indicator also provides information on the fulfilment of the global commitment to reduce GHG emissions.

29. Import of materials containing ozone depleting substance

This indicator depicts the progress towards the phase out of ozone depleting substances (ODS). The phase-out of ODS will lead to the recovery of the ozone layer, whose depletion has adverse effects on human health, animals, plants, micro-organisms, marine life, materials, biogeochemical cycles, and air quality.

30. Monthly average of SO_2 and NO_2 concentration

The indicator provides a measure of the state of the environment in terms of air quality and is an indirect measure of population exposure to air pollution of health concern in urban areas. Improving air quality is a significant aspect of promoting sustainable human settlements.

31. Wetland area

This indicator shows the area of land available for agricultural production, especially foodcrop.

32. Luas lahan tegal/kebun dan ladang/huma

Indikator ini menunjukkan jumlah luas yang tersedia untuk produksi pertanian, selain tanaman pangan.

33. Luas Lahan yang sementara tidak diusahakan

Indikator ini menunjukkan luas lahan yang tersedia, namun sementara tidak diusahakan, memungkinkan untuk diusahakan lagi.

34. Persentase luas hutan

Indikator ini untuk memantau perubahan luas hutan. Hutan menyediakan banyak sumber daya dan fungsi yang penting termasuk produk kayu dan produk non-kayu, potensi wisata, habitat satwa liar, konservasi keanekaragaman hayati, dan memainkan peran penting dalam siklus karbon global.

35. Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi satelit

Indikator ini merupakan pendekatan dari upaya pencegahan kejadian kebakaran hutan di suatu wilayah. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab penggundulan hutan, polusi udara dan penipisan lapisan ozon.

36. Jumlah dan persentase desa pesisir

Indikator ini mengukur jumlah dan persentase desa pesisir. Persentase desa pesisir yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan laut dan bahaya pesisir lainnya seperti badai dan tsunami.

37. Sebaran kawasan konservasi laut

Indikator ini menunjukkan luas wilayah konservasi laut dan sebarannya. Konservasi wilayah laut sangat penting untuk menjaga keanekaragaman ekosistem laut, dalam kaitannya dengan manajemen pengaruh manusia terhadap lingkungannya.

32. *Land area of dry field/garden and unirrigated agricultural field/shifting cultivation*

This indicator shows the area of land available for agricultural production, in addition to food crops.

33. *Temporarily unused land area*

This indicator shows the area of land available, but while not attempted, allowing for longer cultivated.

34. *Percentage of forest area*

The indicator allows for monitoring changes in the area covered by forests. Forests provide many significant resources and functions including wood products and non-wood products, recreational opportunities, habitat for wildlife, conservation of biological diversity, and play a crucial role in the global carbon cycle.

35. *Number of hotspot detected by satellite*

This indicator is an approximation of the prevention of forest fires in a region. Forest fires are one of the causes of deforestation, air pollution and ozone layer depletion.

36. *Number and percentage of coastal villages*

The indicator is measures number and percentage of coastal villages. High percentage of coastal villages is increase vulnerability to sea-level rise and other coastal hazards such as tsunami.

37. *Distribution of marine conservation areas*

The indicator represents the marine conservation areas and its distribution. Marine conservation areas are essential for maintaining marine ecosystem diversity, in conjunction with management of human impacts on the environment.

METODOLOGI

38. Luas dan kondisi terumbu karang

Indikator ini menggambarkan efektifitas kebijakan nasional yang dirancang untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati laut dan memastikan penggunaannya secara berkelanjutan. Terumbu karang terdiri dari spesies langka atau endemik lokal, merupakan spesies mahal dan langka serta mempunyai nilai ekonomi yang potensial.

39. Volume air bersih yang disalurkan oleh perusahaan

Indikator ini memperlihatkan sampai sejauh mana sumber daya air telah dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan air suatu daerah. Terbatasnya ketersediaan air mempunyai pengaruh negatif pada keberlanjutan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah serta mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati.

40. Jumlah pelanggan perusahaan air bersih

Indikator ini memperlihatkan berapa banyak penduduk yang membutuhkan air bersih dan sudah dapat dilayani baik oleh perusahaan air minum nasional, daerah atau swasta.

41. Kandungan BOD dan COD dalam air

Tujuan indikator ini adalah untuk menilai kualitas air yang layak untuk dikonsumsi pada daerah atau masyarakat untuk kebutuhan dasar dan tujuan komersial. Kandungan BOD dan COD yang tinggi menunjukkan adanya kontaminasi kotoran atau peningkatan partikulat dan karbon organik terlarut dari sumber-sumber non-manusia dan hewan yang dapat membatasi penggunaan dan pembangunan air, memerlukan perawatan yang mahal dan merusak kesehatan ekosistem.

42. Kawasan konservasi daratan

Indikator ini memperlihatkan sampai sejauh mana kawasan yang penting

38. Area and condition of coral reef

The indicator illustrates the effectiveness of national measures designed to conserve marine biological diversity and ensure its use is sustainable. Coral reefs contain rare or locally endemic species, are of particularly high species richness and rare or unusual habitat, and are potential economic importance.

39. Volume of cleaned water that distributed by water supply establishment

The indicator shows how far water resources have been exploited to meet the water needs of an area. Limited availability of water has a negative impact on the sustainability of economic activities and regional development and the resulting loss of biodiversity.

40. Number of water supply establishment customer

The indicator shows how much of the population need clean water and it can be served either by the national water company, local or private.

41. BOD and COD in water bodies

The purpose of this indicator is to assess the quality of water available to consumers in localities or communities for basic and commercial needs. The presence of high BOD and COD may indicate faecal contamination or increases in particulate and dissolved organic carbon from non-human and animal sources that can restrict water use and development, necessitate expensive treatment and impair ecosystem health.

42. Land conservation area

The indicator represents the extent to which areas important for conserving

- untuk konservasi keanekaragaman hayati, cagar budaya, penelitian ilmiah (termasuk pemantauan dasar), rekreasi, pengelolaan sumber daya alam, dan hal-hal lain, dilindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Wilayah yang dilindungi merupakan perangkat penting untuk mempertahankan keanekaragaman ekosistem di suatu negara dan ekologi wilayah, dalam kaitannya dengan manajemen pengaruh manusia terhadap lingkungannya.
43. Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi
- Indikator ini memungkinkan memonitor seberapa banyak spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Indikator ini menggambarkan efektifitas kebijakan nasional yang dirancang untuk membatasi hilangnya keanekaragaman hayati.
44. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
- Indikator ini merupakan indikator dasar pertumbuhan ekonomi dan mengukur tingkat serta jumlah output ekonomi. Hal ini menunjukkan perubahan pada jumlah produksi barang dan jasa.
45. Tabungan bruto menurut sektor
- Indikator ini menunjukkan seberapa banyak tabungan bruto yang dimiliki oleh negara sebagai cadangan untuk keberlanjutan pembangunan. Tabungan bruto merupakan penghitungan dari pendapatan nasional bruto dikurangi total konsumsi ditambah transfer netto.
46. Pembagian investasi dalam Produk Domestik Bruto
- Rasio investasi memberikan indikasi kepentingan relatif dari sisi lain investasi, misalnya, konsumsi. Akuisisi barang modal memberikan informasi penting tentang *biodiversity, cultural heritage, scientific research (including baseline monitoring), recreation, natural resource maintenance, and other values, are protected from incompatible uses. Protected areas are essential for maintaining ecosystem diversity in countries and ecological regions, in conjunction with management of human impacts on the environment.*
43. *Protected species of flora and fauna*
- The indicator allows monitoring how many the protected species of flora and fauna. The indicator represent the effectiveness of national policy that designed to limit the loss in biodiversity.*
44. *Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita*
- The indicator is a basic economic growth indicator and measures the level and extent of total economic output. It reflects changes in total production of goods and services.*
45. *Gross savings by sector*
- The indicator shows how much gross savings owned by the state as sustainable development backup. Gross savings is the calculation of gross national income minus total consumption plus net transfers.*
46. *Investment share in Gross Domestic Product*
- The investment ratio gives an indication of the relative importance of investment as opposed to, for example, consumption. Acquisition of capital goods provides important information on future economic*

METODOLOGI

kinerja ekonomi masa depan masyarakat dengan memperluas dan memperdalam modal saham. Indikator ini menunjukkan kontribusi investasi terhadap pembentukan produk domestik bruto.

47. Laju inflasi

Indikator ini mengukur laju inflasi, dimana jika nilainya terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tak diinginkan sering menimbulkan efek berantai, seperti mengurangi pendapatan riil dari yang berpenghasilan tetap dan pergeseran kekayaan dari kreditur kepada debitur.

48. Rasio pinjaman luar negeri terhadap produk nasional bruto (PNB)

Indikator ini merupakan ukuran standar keuangan publik. Hutang merupakan beban bagi generasi mendatang karena mengurangi ketersediaan untuk konsumsi dan investasi. Rasio hutang yang tinggi dan meningkat mengindikasikan ketidakberlanjutan keuangan publik.

49. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja

Indikator ini menyediakan informasi pada kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Bekerja sebagai lawan pengangguran dipandang sebagai posisi yang diinginkan oleh penduduk usia produktif (angkatan kerja).

50. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang rentan kehilangan pekerjannya

Indikator ini memberikan informasi berapa banyak orang yang rentan terhadap risiko ekonomi karena lemahnya pengaturan institusi ketenagakerjaan. Pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga dianggap sangat rentan karena pada dasarnya tidak ada pengaturan pekerja formal dan karena itu

performance of a society by broadening and deepening the capital stock. This indicator shows the contribution of investment to the establishment of gross domestic product.

47. Inflation rate

The indicator measures the inflation rate, which if it is too high will hamper the economic growth. Unanticipated inflation has often create unwanted distributional effects, as it reduces real income of fixed income earners and shifts wealth away from creditors to debtors.

48. Ratio of external debt on gross national product (GNP)

The indicator is a standard measure of public finance. Debt constitutes a burden for future generations as it reduces the amount available for their consumption and investments. High and increasing debt ratios can be seen as an indication of unsustainable public finances.

49. Percentage of population aged 15 years and over who worked

The indicator provides information on the ability of an economy to create employment. Employment, as opposed to unemployment, is viewed as the desired portion of the productive age population (labour force).

50. Percentage of population aged 15 years and over who vulnerable employment

This indicator provides information how many persons are vulnerable to economic risk because of weak institutional employment arrangements. Own-account workers and contributing family members are regarded as especially vulnerable as they have by definition no formal work arrangements and

- kurang memiliki tingkat keamanan kerja dan akses terhadap jaminan sosial yang rendah.
51. Persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian
- Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses ke pekerjaan yang dibayar dan sejauh mana pasar tenaga kerja terbuka untuk perempuan di non pertanian. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender di pasar tenaga kerja sangat penting untuk memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
52. Persentase rumah tangga yang mengakses internet
- Jumlah pengguna internet adalah ukuran yang menggunakan dan mengakses internet. Internet dan penggunaannya memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan informasi dengan mudah.
53. Persentase rumah tangga yang memiliki telpon dan telpon seluler
- Indikator ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan telekomunikasi di suatu negara. Telekomunikasi berhubungan erat dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hal ini juga merupakan faktor penting untuk berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertukaran informasi antar warga. Komunikasi modern relatif ramah lingkungan, karena merupakan pengganti potensial untuk transportasi dan tingkat pencemaran lingkungan yang relatif rendah.
54. Dampak pariwisata terhadap produk domestik bruto
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur peranan pariwisata terhadap perekonomian indonesia dengan menggunakan model Input-
- are therefore more likely to have a low degree of job security and to lack access to social security.
51. Percentage of women workers in non-agricultural sector
- The indicator shows the extent to which women have access to paid employment and the degree to which labour markets are open to women in non agricultural sectors. Promoting gender equality and the empowerment of women thus eliminating all forms of gender-based discrimination in labour markets is essential in defeating poverty and fostering sustainable development.*
52. Percentage of household with access to internet
- The number of Internet users is a measure of internet access and use. The Internet and its usage provide opportunities for bringing education and information within the reach of all.*
53. Percentage of household having telephone and cellular phone
- This indicator is a commonly used to measure the degree of telecommunication development in a country. Telecommunication is closely linked to social, economic, and institutional development. It is also a critical factor for many economic activities and improves exchange of information among citizens. Modern communications are considered to be relatively benign to the environment, as they are potential substitutes for transport and induce relatively low levels of environmental pollution.*
54. The impact of tourism economic to gross domestic product
- This indicator aims to measure the role of tourism on the economy of Indonesia by using a model of Input-Output matrix of supply*

METODOLOGI

Output berupa matriks supply (penyediaan/penawaran) dan Demand (permintaan), yang menggambarkan keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pariwisata.

55. Persentase transaksi berjalan terhadap produk nasional bruto

Transaksi berjalan merupakan catatan gabungan dari neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Transaksi berjalan merupakan bagian pengukuran penghematan ekonomi. Seiring dengan transfer modal bersih dan akuisisi / disposal non produksi, aset non keuangan, neraca transaksi berjalan menggambarkan investasi luar negeri neto atau posisi pinjaman neto negara di seluruh dunia.

56. Nilai impor

Perdagangan memegang peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Indikator ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan komitmen internasional untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang.

57. Posisi pinjaman luar negeri

Indikator ini mengukur besarnya arus dana, baik yang berasal dari konsesi maupun yang terutama ditujukan untuk mempromosikan pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan. Indikator ini menginformasikan tentang kontribusi negara-negara asing untuk pembangunan berkelanjutan serta ketergantungan mereka pada bantuan asing.

58. Persentase penanaman modal asing langsung terhadap produk domestik bruto

Indikator ini menunjukkan penyediaan sumber daya pendanaan eksternal dalam

(supply/supply) and Demand (demand), which describes the balance of economic transactions between the tourism industries with tourists in the effort to fulfill their needs. The increasing number of tourists gives effect to the growth of tourism industries.

55. Percentage of current account to gross national product

Current account is a combined record of the trade balance, service balance, income and transfers. Current account is part of economic austerity measures. Along with net capital transfers and acquisition / disposal of non-production, non-financial assets, current account balance represents the net foreign investment or net borrowing position of countries around the world.

56. Value of import

Trade can play a major role in achieving sustainable development. The indicator provides information on the implementation of international commitments to increase the trade opportunities of developing countries.

57. External debt outstanding

The indicator is a measure of the size of capital flows from both concessional which is aimed mainly at promoting development and welfare. The indicator provides information on the contribution of foreign countries to sustainable development as well as on their dependency on foreign aid.

58. Percentage of foreign direct investment to gross domestic product

This indicators show the provision of external financing resources in the form

- bentuk investasi langsung di negeri sendiri dari investor asing dan luar negeri dari investor dalam negeri.
59. Persentase remitan terhadap pendapatan nasional
- Indikator ini menunjukkan banyaknya keuntungan finansial bagi suatu negara dari penduduknya yang mampu bekerja di luar negeri. Bagi banyak negara, remitan merupakan sumber pembiayaan external yang tetap dan utama sehingga remitan memberikan arti penting bagi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan.
60. Pemakaian energi
- Indikator ini mengukur tingkat penggunaan energi dan mencerminkan pola energi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi dan sektor-sektor yang lain. Energi merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan memberikan layanan penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Disisi lain penggunaan energi telah mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan yaitu menguras sumber daya dan menimbulkan polusi.
61. Jumlah kendaraan bermotor
- Indikator ini memberikan informasi mengenai pentingnya alternatif moda transportasi. Penggunaan mobil pribadi untuk transportasi secara umum kurang efisien dan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, seperti polusi, pemanasan global serta tingginya tingkat kecelakaan dibandingkan dengan angkutan massal.
62. Produksi angkutan kereta api penumpang dan barang
- Indikator ini menunjukkan kontribusi kereta api sebagai angkutan penumpang dan barang yang merupakan bagian dari salah satu moda transportasi darat. Penggunaan

of direct investment at home from foreign investors and abroad from domestic investors.

59. *The percentage of remittances to the national income*

This indicator shows the number of financial benefits for a country from people who are able to work abroad. For many countries, remittances are a major and stable source of external financing and thus remittances provide important means of implementation of sustainable development goals.

60. *Energy consumption*

This indicator measures the level of energy use and reflects the energy-use patterns in the overall economy and in every sectors. Energy is a key factor in economic development and in providing vital services to improve quality of life. Otherwise, energy used has resulted in major pressures on the environment, both by depleting resources and by creating pollution.

61. *Number of motorized vehicles*

The indicator provides information on the importance alternative of different modes for passenger transport. The use of cars for passenger transportation is generally less energy efficient and has greater environmental and social impacts, such as pollution, global warming as well as a higher accident rate, than mass transit.

62. *Production of passenger and freight railway transportation*

This indicator shows the contribution of trains to transport passengers and freight that are part of one of the modes of land transportation. The use of rail transport is

METODOLOGI

angkutan kereta api lebih hemat energi dibanding dengan moda transportasi jalur jalan raya. Penggunaan energinya ditunjukkan dengan banyaknya penumpang per km atau barang per ton km.

3.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi berasal dari berbagai sumber seperti BPS, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan lain-lain.

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap.
2. Kawasan konservasi laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya, yang secara hukum dilindungi sebagian atau semua lingkungan disekitarnya.
3. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pemantang, saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah.
4. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.
5. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti

more energy efficient compared with other modes of transportation lane highway. The use of energy indicated by the number of passengers per km or goods per ton km.

3.3. Concept and Definition

Concept and definition used in this publication are taken from several sources such BPS-Statistics Indonesia, Ministry of Environment, Ministry of forestry, Meteorology, Climatology and Geophysical Agency, etc.

1. *Forest area is a specific territory of forest ecosystem determined and or decided by the government as a permanent forest. Such decision is important to maintain the size of forest area and to ensure its legitimation and boundary demarcation of permanent forest.*
2. *Marine conservation area is a coastal marine area covering coral of rock, mangrove, seagrass, or other habitats, which has been reserved by law to protect part or the entire enclosed environment.*
3. *Wetland is agricultural land that separated by small dykes to resist water, where the main crop is usually paddy.*
4. *Agricultural dryland is all agricultural land except wetland. The presented dryland in this publication consist of dry field/garden, unirrigated agricultural field/shifting cultivation land, and temporarily unused land.*
5. *Coastal is an area of interface between land and sea, landward include part of land, either dry or immersed in water, which is still influenced traits such as tidal sea, the sea*

- pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
6. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae.
 7. Emisi adalah polusi yang dimasukkan ke atmosfer dari sumber-sumber tidak bergerak seperti cerobong asap, bagian atas dari fasilitas industri dan komersil, dan sumber-sumber bergerak seperti mobil, kereta api dan pesawat.
 8. Emisi CO adalah emisi gas karbon monoksida berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun.
 9. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah emisi yang disebabkan oleh akibat proses alami dan kegiatan manusia yang menghasilkan gas-gas karbondioksida (CO_2), methan (CH_4), dan nitrogen oksida (N_2O). Konsentrasi dari gas-gas inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.
 10. Bahan Perusak Ozon (BPO) adalah zat-zat organik yang mengandung chlorine (Cl) atau bromine (Br) yang merusak lapisan stratosfer ozon, diantaranya CFC, HCFC, halon, metil bromida, carbon tetrachlorida, dan metil kloroform.
 11. NO_2 atau Nitrogen Dioksida adalah gas yang menyebabkan gangguan pernapasan dalam kadar tinggi, terjadi akibat pembakaran pada kendaraan bermotor dan juga mesin-mesin industri.
 12. SO_2 atau Sulfur Dioksida adalah gas berbau yang menyebabkan iritasi pernapasan terjadi

breeze, and the seepage of salt water, while covering the sea towards the sea which is still influenced by the natural processes that occur on land, such as sedimentation and flow of fresh water, and caused by human activities on land such as deforestation and pollution.

6. Coral reefs are a group of animals with a sort of symbiotic reef algae called zooxanthellae plants.
7. Emission is discharge of pollutants into the atmosphere from stationary sources such as smokestacks, other vents, surface areas of commercial or industrial facilities, and mobile sources, for example motor vehicles, locomotive, air craft.
8. CO Emission is carbon monoxide gas emission, come from imperfect combustion process of fossil fuel. This gas is not chromatic, odorless, and poisonous.
9. Greenhouse Gasses (GHG) is emission caused by natural process and human being activity yielding gases of carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4), and nitrous oxide (N_2O). The concentration of this gases cause global warming.
10. Ozone Depleting Substances (ODS) is an organic matters considering chlorine (Cl) or bromine (Br) damage ozone stratosphere, among others CFC, HCFC, halon, methyl bromide, carbon tetrachloride, and methyl chloroform.
11. NO_2 or Nitrogen Dioxide is gas causing exhalation trouble in high rate, happened effect of combustion at motor vehicle as well as industrial machines.
12. SO_2 or Sulfur Dioxide is gas smell causing exhalation irritation happened effect of coal

METODOLOGI

akibat pembakaran batubara, bahan bakar minyak, dan bahan bakar fosil lainnya yang mengandung sulfur. Bisa juga berasal dari proses alami dari gunung berapi.

13. CH₄ atau Metana adalah komponen utama dalam gas alam. Dalam proses pembuatan pupuk urea, metana merupakan bahan baku untuk memproduksi gas sintesa, yaitu hidrogen dan karbon monoksida. Selain itu, gas metana juga merupakan salah satu sumber energi yang utama. Sedangkan dalam proses produksi metanol, metana digunakan sebagai salah satu bahan bakunya.
14. *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram/liter yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali.
15. *Chemical Oxygen Demand (COD)* adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram/liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimiawi.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Penggunaan B3 biasanya dalam sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.
17. Bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh alam, misalnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain.
18. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

combustion, oil fuel and other fossil fuel considering sulphur. It can also come from natural process of volcanic mountain.

13. *CH₄ or Methane is the main component of natural gas. In the process of urea fertilizer, methane is a raw material to produce synthesis gas, i.e. hydrogen and carbon monoxide. In addition, methane is also one of the main energy sources. While in the process of production of methanol, methane is used as one of its raw materials.*
14. *Biochemical Oxygen Demand (BOD) is the number of oxygen in PPM or mg/l needed to fracture organic matter by bacteria.*
15. *Chemical Oxygen Demand (COD) is the number of oxygen in PPM or mg/lt needed in special condition to fracture organic matter (to purify waste) chemically.*
16. *Poisonous and dangerous substance are materials which because of their nature or their concentration of and/or their amount, either directly or indirectly, can contaminate or destroy the environment, health, the continuity of human life and other live creatures. Poisonous and Dangerous Materials are mostly used in industrial sector, agriculture, and household.*
17. *Natural disasters are disasters caused by natural change or natural activity such as flood, earthquake, landslide, storm, etc.*
18. *Environmental sanitation is the health status of an environment which includes housing, sewerage, water supply and so forth.*

19. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
20. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase.
21. Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dikalikan 100.
22. Angka kelahiran total adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.
23. Angka harapan hidup saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
24. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
25. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
26. Indeks gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai koefisien gini terletak
19. *Population are all residents of the entire geographic territory of Republic of Indonesia who have stayed for six months or longer, and those who intended to stay more than six months even though their length of stay is less than six months*
20. *Growth rate of population is the rate at which a population increase (or decrease) in a given year and expressed as percentage of the base population.*
21. *Dependency ratio is the ratio of population aged 0-14 years and 65 years and over (unproductive age) to population aged between 15-64 years (productive age), multiplied by 100.*
22. *Total Fertility Rate (TFR) is the average number of children that would be born per women if all women lived to the end of their child bearing years and bore children according to a give set of "age specific fertility rate" also referred to as total fertility.*
23. *Life expectancy at birth is average number of years that a member of a "cohort" of birth would be expected to live if the cohort were subject to the mortality condition expressed by a particular set of "age-specific mortality rates".*
24. *Infant Mortality Rate (IMR) is the number of infant deaths under one year old, per 1000 live birth in a given year.*
25. *Poor people is a person whose expenditure per month per capita that below the poverty line.*
26. *Gini index is the measure of income distribution calculated based on income classes. Gini ratio lies between null (zero) reflects 'perfect*

METODOLOGI

antara nol yang mencerminkan kemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

27. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis sebuah kalimat sederhana.
28. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
29. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi)
30. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
31. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga, kerabat, atau tetangga tanpa mendapat upah/gaji.
32. Upah buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan unjangan dalam bentuk natura.

equality' to one (1) which reflect 'perfect inequality'.

27. *Literacy rate is percentage of people aged 15 years or older who can read and write a simple sentence.*
28. *Net Enrolment Ratio (NER) is the percentage of students with age related to level of education of the population in the same age*
29. *Working means activity intended to earn income by doing work or helping to do work at least one hour continuously during the reference week (including unpaid family worker/s for any economic activity)*
30. *Employment status is the employment status of a person at his place of work or establishment where he was employed.*
31. *Unpaid worker is a persons who intended work in order to earn income without pay in an establishment run by other member of the family, relative or neighbor.*
32. *Wage/Salary is the term for wage/salary that earn in cash which used in the wage surveys not only all kinds of remuneration received regularly by workers in monetary terms but also additional cash and other incentives such as for (transportation, lunch, and other incentives in cash) excluded regular bonuses, such as incentives for major religious day "Lebaran", and other incentives for end of the year, quartal incentives and other incentives in form of nature.*

33. Pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya adalah pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap dan atau buruh tidak dibayar, dan pekerja tak dibayar.
34. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam suatu wilayah dalam satu tahun tertentu atau output produksi yang ada dalam wilayah.
35. Tabungan bruto dalam neraca nasional didefinisikan sebagai disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan dan dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
36. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
37. Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
38. Bantuan Pembangunan Resmi (ODA/*Official Development Assistance*) adalah arus pembiayaan resmi yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utama, dan terdapat unsur hibah sebesar minimal 25 persen (menggunakan diskon tingkat bunga tetap 10 persen). Menurut konvensi, arus ODA merupakan kontribusi dari lembaga
33. *Vulnerable employment is the employment status of workers with their own try, try with and assisted by temporary workers or unpaid workers, and unpaid workers.*
34. *Gross Domestic Product (GDP) at national level and Gross Regional Domestic product (GRDP) at regional level (province/ regency/ municipality) is the value of goods and services produced in a certain (state/region) during one year.*
35. *Gross savings on the national balance sheet is defined as disposable income and used to purchase consumer goods and services and the rest into savings are distributed into investments.*
36. *Investment is a term with some sense related to finance and economics. The term is associated with a form of asset accumulation with a hope of benefit in the future. Sometimes, investing is also known as capital investment.*
37. *Inflation is an indicator that gives information about fluctuation of general price level of good and services consumed by people.*
38. *Official Development Assistance (ODA) is flows of official financing administered with the promotion of the economic development and welfare of developing countries as the main objective, and which are confessional in character with a grant element of at least 25 percent (using a fixed 10 percent rate of discount). By convention, ODA flows comprise contributions of donor government agencies, at all levels, to developing countries ("bilateral*

METODOLOGI

pemerintah donor di semua tingkatan kepada negara berkembang ("ODA bilateral") dan kepada lembaga multilateral. Penerimaan ODA terdiri dari pengeluaran oleh donor bilateral dan lembaga multilateral.

39. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperkayakan kepada mereka.
40. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum.
41. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam, namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar, karena merasa gagal untuk mencapai sesuatu harapan.
42. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang disebut Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Dalam tubuh manusia, parasit berkembang biak dalam hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah.
43. Penyandang AIDS/HIV adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
44. Transaksi Berjalan merupakan indikator yang menunjukkan keseimbangan dari transaksi berjalan dibagi Produk Domestik Bruto. Transaksi berjalan merupakan bagian dari keseimbangan pembayaran dan berisi transaksi keuangan antara penduduk lokal

ODA") and to multilateral institutions. ODA receipts comprise disbursements by bilateral donors and multilateral institutions.

39. *Corruption is behavior of public officials, whether a politician and civil servants, which is not fair and not legal to enrich themselves or enriching those close to him, by misusing public authority enrichment to them.*
40. *Homicide was an act to eliminate someone's life in a way that is unlawful or not against the law.*
41. *Suicide is the act of ending life without the active help of others. Reasons or motives of suicide vary, but usually based on a very big sense of guilt, because he felt failed to achieve expectations.*
42. *Malaria is caused by a parasite called Plasmodium, which is transmitted via the bites of infected mosquitoes. In the human body, the parasites multiply in the liver, and then infect red blood cells.*
43. *Person with AIDS/HIV is a person who on the recommendation of professional (doctor) or a laboratory worker infected with HIV so proven experience decreased body resistance syndrome (AIDS) and displaced lives.*
44. *Current account is an indicator that shows the balance of the transaction runs divided by Gross Domestic Product. Current account is part of the balance of payments and contains the financial transaction between locals and non-local. Among other components of the*

- dan non lokal. Komponen transaksi berjalan antara lain keseimbangan perdagangan barang dan jasa, keseimbangan pendapatan (kompensasi dari pekerja di luar negeri dan pendapatan dari investasi di luar negeri) dan keseimbangan transfer remitan dan pegawai pemerintahan.
46. Penanaman modal asing langsung merupakan partisipasi jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain. Biasanya melibatkan partisipasi dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Ada tiga tipe dari investasi asing langsung: investasi asing langsung ke dalam, investasi asing langsung ke luar, dan "*stock of foreign direct investment*", yang merupakan jumlah kumulatif dalam suatu periode. Investasi langsung tidak meliputi investasi melalui pembelian saham.
47. Remitan didefinisikan sebagai jumlah transfer khusus yang diterima oleh penduduk di suatu negara saat ini ditambah dengan kompensasi yang diterima karyawan yang bukan penduduk lokal dan transfer dari pekerja migran dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB).
- current account balance of trade in goods and services, the balance of income (compensation of employees abroad) and income from investments abroad and remittances of balance transfers and government officials.*
46. *Foreign Direct Investment (FDI) is a long-term participation by a country in another country. Usually involves participation in management, joint ventures, technology transfer, and konsultasi experts. There are three types of direct foreign investment: foreign direct investment inward, outward foreign direct investment, and "the stock of foreign direct investment", which is the cumulative amount within a period. Direct investment does not include investment via the purchase of shares.*
47. *Remittances are defined as the number of special transfers received by residents in a country at this time coupled with the compensation received by employees who are not local residents and the transfer of migrant workers with a Gross National Income (GNI).*

4

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

*Indicators of Sustainable Development
in Indonesia*

Pembangunan merupakan proses untuk memperbaiki kualitas hidup manusia supaya menjadi sejahtera dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mencapai tujuan akhir pembangunan tersebut, tentunya memerlukan unsur-unsur pendukung seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Seiring berjalaninya waktu, jumlah penduduk pun bertambah setiap tahun, begitu pula dengan kebutuhan hidupnya. Pertambahan penduduk tersebut tidak diikuti oleh penambahan luas wilayah, sehingga hal ini menjadi tekanan bagi daya dukung lingkungan yang keberadaan dan kondisinya mempunyai keterbatasan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pembangunan yang terjadi sekarang ini cenderung berorientasi pada kemajuan secara ekonomi. Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan akibat eksloitasi sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini telah menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia dan menjadikan pembangunan yang telah dilakukan seakan menjadi bumerang bagi pembangunan itu sendiri.

Persoalan pembangunan tersebut, dapat didekati dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengusung pembangunan yang bersifat holistik, yang mempertimbangkan segala aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan dan lainnya sekaligus secara berimbang dan terintegrasi. Pembangunan yang baik, sejatinya adalah pembangunan yang tidak hanya ideal untuk masa kini, namun berdaya guna bagi generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan menghendaki agar generasi masa depan tidak lebih buruk kehidupannya dibandingkan generasi saat ini. Maka setiap indikator pembangunan harus saling terkait dengan indikator pembangunan yang lain, seperti terlihat di Lampiran 2.

Development is a process to improve the quality of human life to be prosperous in the long term. To achieve the ultimate goal of development, it requires support elements such as human resources, natural resources, and technology. Over time, the number of population had increased each year, nor to the needs of life. The increasing number of population was not followed by the increment of area, so this puts pressure on the environmental carrying capacity that have a limited presence and condition, both in quality and quantity.

Recently, development is still oriented toward economic progress. Development outcomes that have been achieved have not been proportional to the impact such as environment damage due to excessive exploitation of natural resources. These have led to degradation of natural resources and finally decline the quality of life. It will be the development that happened seemed to have backfired for the development itself.

The issue of development before can be approached with the concept of sustainable development. This concept brings a holistic development, which considers all aspects of development economic, social, environmental, and other institutions well balanced and integrated manner. The real of good development is not only ideal for the present but also useful for the next generation. Sustainable development requires that the next generations' life would not worse than the current generations. Thus any development indicators are interrelated with other development indicators, as shown in Appendix 2.

4.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral di Indonesia bahkan di dunia. Kemiskinan saling terkait dan menjadi sebab akibat bagi berbagai masalah lainnya, seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM), serta rendahnya kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini, terutama bagi negara berkembang. Pemberantasankemiskinanjugamutlakdiperlukan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Komitmen global untuk mengurangi separuh dari kemiskinan dunia hingga tahun 2015 telah ditetapkan dan ditegaskan oleh para pemimpin dunia dalam MDGs dan *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)*. Sebagai salah satu negara yang menetapkan komitmen global tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam salah satu visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ingin diwujudkan pada periode 2005-2025 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan sosial secara menyeluruh, serta penanggulangan kemiskinan.

Statistik kemiskinan penting untuk menganalisis hubungan antara pendapatan atau konsumsi terhadap dimensi lain dari

4.1 Poverty

Poverty is multidimensional problems that have long been a central issue in Indonesia even in the world. Poverty are interrelated and cause and effect other variety problems, such as the increasing of open unemployment rates that cause high rates of poverty, low quality of human resources which is marked with a low value of the Human Development Index (HDI), and declining of population welfare that is characterized by large number of poor people. Poverty can be an obstacle to future development that will affect the sustainable development.

Poverty eradication is the greatest global challenge facing the world today, especially for developing countries. Poverty eradication is also necessary for the implementation of sustainable development. Global commitment to halve world poverty by 2015 has been established and confirmed by world leaders in the MDGs and the Johannesburg Plan of Implementation (JPOI). As one of the countries that set global commitments, Indonesia committed to eradicate poverty in the implementation of sustainable development. This commitment is embodied in one of the vision of the long term development plan to be established in the period 2005-2025 is to achieve an equitable distribution of development through the reduction of social inequality as a whole, as well as poverty reduction.

Poverty statistics is important to analyze the relationship between income or consumption to other dimensions of human development such

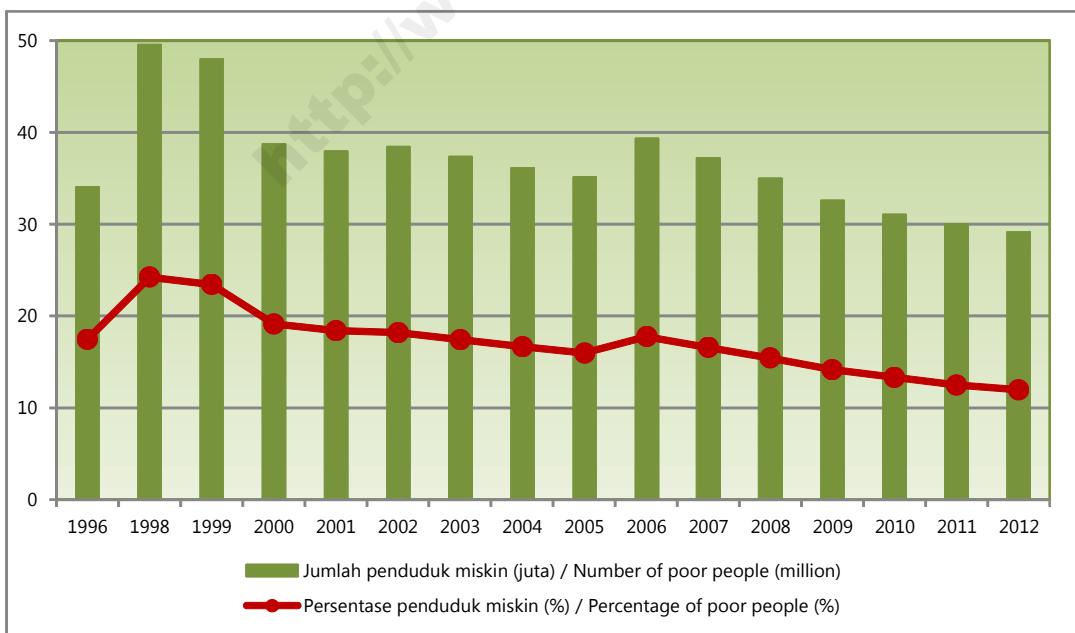
perkembangan manusia seperti pendidikan, kesehatan, keahlian kerja dan ukuran standar hidup lainnya. Ukuran kemiskinan dapat pula digunakan untuk memantau potensi kerusakan sumber daya alam di suatu wilayah karena penduduk miskin pada umumnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya untuk membiayai kebutuhan hidup. Tingkat kemiskinan di Indonesia dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga.

Secara umum, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi selama periode 1996-2012. Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan selama periode 2000-2005, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006 dan kembali menurun pada periode 2007-2012 (Gambar 4.1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96

as education, health, job skills and other measures of living standards. The measure of poverty can also be used to monitor the potential damage of natural resources in a region because of generally poor people use natural resources in the environment around them to finance their family's life. National poverty level using the poverty line base on household consumption.

Generally, the growth of number and percentage of poor people in Indonesia was fluctuated during the period 1996-2012. The number and percentage of poor people has decreased during the period 2000-2005, then increased in 2006, and back to declined in 2007-2012 (Figure 4.1). During 1996 to 1999, the number of poor people increased by 13.96 million persons due to the economic crisis, from 34.01 million

Gambar 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1996-2012
Figure 4.1. Number and Percentage of Poor People, 1996-2012



Sumber / Source : Dolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

juta jiwa karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999. Dengan menggunakan standar kemiskinan yang disempurnakan, jumlah penduduk miskin tersebut terus berkurang hingga menjadi 29,13 juta jiwa (11,96 persen) pada tahun 2012 (Tabel 4.1.1 dan Tabel 4.1.2).

Garis kemiskinan (GK) menentukan banyaknya jumlah penduduk miskin, semakin banyak penduduk dengan pendapatan (didekati dengan pengeluaran) berada di bawah garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin akan semakin banyak. Nilai garis kemiskinan setiap tahun selalu mengalami kenaikan (Tabel 4.1.3). Pada tahun 2006, nilai garis kemiskinan Indonesia adalah Rp. 151.997,- per kapita per bulan dan pada maret 2012 nilai garis kemiskinan naik menjadi Rp. 248.707,- per kapita per bulan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu masalah serius di dunia, khususnya negara berkembang. Ketimpangan pendapatan menggambarkan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan di suatu wilayah atau negara. Ketimpangan pendapatan, konsumsi, dan ketidaksetaraan kesempatan dapat menghambat pembangunan manusia dan merugikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indeks gini merupakan salah satu indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Secara umum, nilai indeks gini pada periode 2002–2011 di Indonesia cenderung mengalami peningkatan (Gambar 4.2). Pada periode 2002–2007, terjadi kenaikan nilai indeks gini dari 0,33

(17.47 percent) in 1996 to 47.97 million (23.43 percent) in 1999. By using an enhanced standard of poverty, the number of poor people continues to decrease to 29.13 million (11.96 percent) in 2012 (Table 4.1.1 and Table 4.1.2).

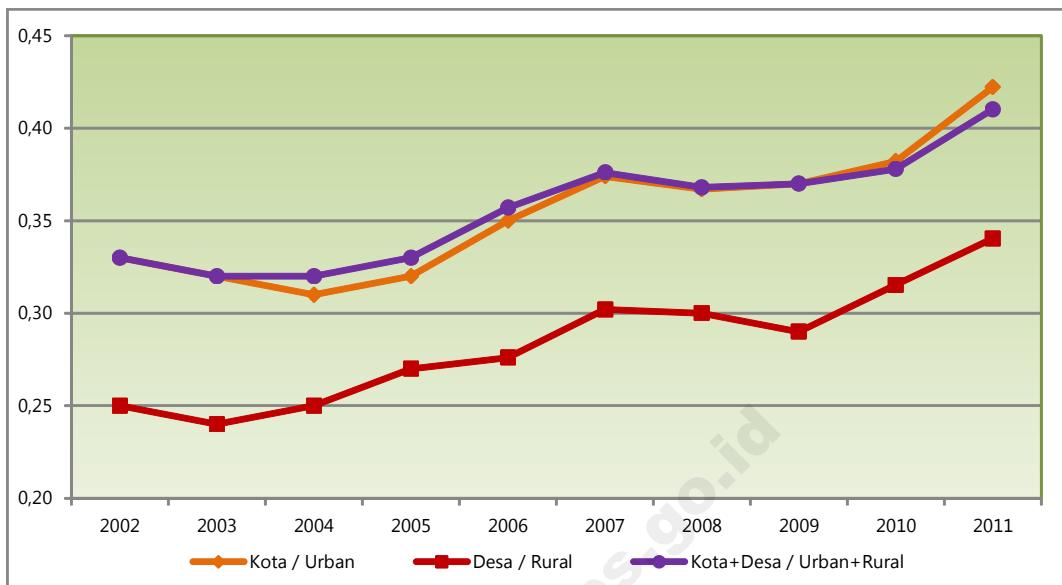
Poverty line is used to determine the number of poor people, the more people with income (approximated with expenditures) below the poverty line, the more number of poor people. The value of poverty line is always increased every year (Table 4.1.3). In 2006, the value of Indonesia's poverty line is Rp. 151,997 per capita per month, and in March 2012 the value of poverty line rose to Rp. 248,707 per capita per month.

Income Inequality

Income inequality becomes one serious problem in the world, especially developing countries. Income inequality shows the extent of inequality in income distribution within a region or country. Inequality in income, consumption, and inequality in opportunities can hinder human development and detrimental to long-term economic growth. Gini index is an indicator to represent income inequality. Gini index is also used to measure income distribution and expenditure of households in each region.

In general, the gini index in Indonesia tends to increase in the period 2002-2011 (Figure 4.2). During 2002 to 2007, there was an increase of gini index from 0.33 in 2002 to 0.38 in 2007. Increasing

Gambar 4.2. Indeks Gini, 2002-2011
Figure 4.2. Gini Index, 2002-2011



Sumber / Source : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

pada tahun 2002 menjadi 0,38 pada tahun 2007. Peningkatan nilai indeks gini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin tidak merata. Pada periode 2008-2010 relatif tidak terjadi perubahan nilai indeks gini. Namun pada tahun 2011, nilai indeks gini mengalami peningkatan menjadi 0,41. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada tahun 2011 semakin tidak merata, meskipun ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi masih termasuk kategori ketimpangan sedang (nilai indeks gini antara 0,4 sampai 0,5).

Selain indeks gini, distribusi pembagian pengeluaran per kapita juga dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan. Menurut kriteria yang ditentukan Bank Dunia, jika kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya kurang dari 12% termasuk ketimpangan tinggi, antara 12% sampai 17% termasuk ketimpangan sedang,

of gini index indicated that the distribution of the expenditure in that period is uneven. In the period 2008-2010, the gini index is relatively no change. But in 2011, gini index increased to 0.41, it indicated the expenditure distribution is uneven, despite the inequality of income distribution still could categorized as moderate inequality (gini index value between 0.4 and 0.5).

Beside gini index, the distribution of expenditure per capita can also be used to measure income inequality. According to the World Bank criteria; if the expenditure of 40% of the poorest population is less than 12% of total expenditure included in high inequality category; between 12% and 17% of total expenditure included in moderate

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

dan jika lebih dari 17 % termasuk ketimpangan rendah. Pada periode tahun 2005-2010, tingkat ketimpangan di Indonesia termasuk ketimpangan rendah, sedangkan pada tahun 2011 termasuk ketimpangan sedang (Tabel 4.1.4).

inequality category; and more than 17% of total expenditure included in low inequality category. In the period of 2005-2010, the category of inequality in Indonesia included in low inequality, whereas in 2011 included in moderate inequality (Table 4.1.4).

Sanitasi

Sanitasi umumnya mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan yang aman dari urin dan tinja manusia. Sanitasi mempunyai peranan penting bagi kesehatan dan pembangunan suatu negara. Sanitasi yang buruk merupakan mata rantai kunci dalam lingkaran kemiskinan dan penyakit yang berpengaruh langsung terhadap penduduk miskin sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi negara. Sanitasi yang baik dapat membantu memutuskan lingkaran kemiskinan dan penyakit dengan mencegah kotoran manusia berinteraksi langsung dengan lingkungan, sehingga penduduk dapat memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

KTT tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002 (Konferensi Rio+10) mengadopsi target sanitasi internasional yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar pada tahun 2015 yang tertuang dalam *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)*. Target tersebut juga seiring dengan target sanitasi dalam MDGs. Menurut data dari WHO/UNICEF dalam *Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation*, secara global 2,5 miliar penduduk tidak memiliki akses ke sanitasi yang baik pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, 1,2 miliar orang tidak memiliki fasilitas sanitasi sama sekali dan terpaksa menggunakan area terbuka yang tidak higienis. Di negara berkembang, persentase

Sanitation

Generally, sanitation refers to provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and feces. Sanitation has an important role for the health and development of a country. Poor sanitation is key link in the cycle of disease and poverty that directly affects poor people and indirectly will affect social and economic development of the country. Good sanitation can help to break the cycle by preventing human excreta directly interact with the environment, so people can get better education and better health.

World summit on Sustainable Development in Johannesburg 2002 (Rio+10) adopted international sanitation target that is to halve the number of people without access to basic sanitation by 2015 set out in the Johannesburg Plan of Implementation (JPOI). This target sits alongside with the MDGs sanitation target. According to data from WHO/UNICEF on Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation in 2010, globally 2.5 billion people lack access to improved sanitation. Of these, 1.2 billion people do not have any sanitation facilities at all and therefore to use unhygienic open defecation. In developing countries in 2010, the percentage of people has access to improved sanitation is 56 percent If the growth of access to improved

penduduk yang memiliki akses ke sanitasi yang baik pada tahun 2010 sebesar 56 persen. Jika perkembangan tren sanitasi terus berlanjut seperti kondisi sekarang, maka target sanitasi dalam JPOI dan MDGs tidak akan tercapai yaitu sebesar 75 persen di tahun 2015.

Menyediakan fasilitas sanitasi yang bersih, efisien dan ekonomis merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Sanitasi yang bersih dan baik merupakan langkah penting untuk mengurangi penyebaran penyakit diare yang merupakan pembunuh terbesar kedua anak-anak di negara berkembang (*Global Burden Disease 2008*, WHO) dan mencegah penyebaran penyakit lain seperti kolera, *schistosomiasis* dan *trachoma*. Selain itu, sanitasi yang baik dapat mengurangi kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Untuk mengukur perkembangan keadaan sanitasi di Indonesia didekati dengan persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik. Semakin tinggi persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik mengindikasikan hal positif bagi kemajuan akses fasilitas sanitasi.

Secara nasional, pada periode 2006-2011 persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik mengalami peningkatan, dari 40,67 persen pada tahun 2006 menjadi 60,33 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik yang paling tinggi yaitu sebesar 93,90 persen, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi Papua (28,42 persen).

Air minum

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Dalam publikasi ini, indikator

sanitation continues as present state, the sanitation target on JPOI and MDGs will not be achieved in 2015 (75 percent).

Provide clean, efficient, and economical sanitation facilities is a challenge that must be faced by developing countries. Clean and good sanitation is an important step to reduce the spread of diarrhea disease, the second biggest killers of children in developing countries (Global Burden Disease 2008, WHO), and prevent the spread other diseases such as cholera, schistosomiasis, and trachoma. It also helps reduce child mortality and improve maternal health. To measure the development in sanitation in Indonesia is approached by the percentage of household with toilet discharge septic tank. The higher percentage of households with toilet discharge septic tanks indicates a positive thing for progress of access to sanitation facilities.

During the period 2006-2011, the percentage of households with toilet discharge septic tank in Indonesia has increased from 40.67 percent in 2006 to 60.33 percent in 2011. In 2011, DKI Jakarta was the province with the highest percentage of household with toilet discharge septic tank that about 93.90 percent, while the lowest is Papua Province (28.42 percent).

Drinking Water

Drinking water is a basic necessity for life. Drinking water contributes to living things, especially humans in order to survive. In this publication, drinking water is approximated by the

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

air minum didekati dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.

Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan mungkin timbul dari konsumsi air yang terkontaminasi oleh kuman, virus, bahan beracun dan berbahaya, dan bahan radiologi. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat bersekolah dan meningkatkan produktifitas. Pengelolaan sumber daya air merupakan komponen penting dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Akses terhadap air bersih sampai saat ini belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hasil Susenas tahun 2011 menunjukkan bahwa hanya sekitar 23,92 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengakses air bersih. Sedangkan rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang sudah menggunakan air bersih untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari sebanyak 91,54 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2006 sampai 2011 selalu mengalami peningkatan, dari 49,69 persen di tahun 2006 menjadi 62,65 persen di tahun 2011 (Tabel 4.1.6).

Akses Terhadap Energi

Energi merupakan inti dari masalah ekonomi, lingkungan dan pembangunan yang paling kritis yang dihadapi dunia pada saat ini. Energi yang bersih, terjangkau dan dapat diandalkan sangat dibutuhkan untuk

percentage of household which use clean water.

Adequate water supply is essential to reduce the risk of disease and to ensure the right of food, health and housing. Security and accessibility to clean water become great concern of worldwide. Variety of diseases can damage the health may result from consumption of water that contaminated by bacteria, viruses, toxic and hazardous materials, and radiological materials. Easy access to clean water and sanitation can improve individual health, so they can attend school and improve the productivity. Management of water resources is an important component of the fulfillment of human rights to drinking water and safe and clean sanitation.

Until now, access to clean water could not be felt equally by all people. Based on National Socio Economic Survey data, only 23.92 percent of household in Kalimantan Barat Province have access to clean water in 2011. While, most household in DKI Jakarta Province, as many as 91.54 percent, already used clean water to support their daily need. During 2006 to 2011, percentage of household which use clean water has increased from 49.69 percent in 2006 to 62.65 percent in 2011 (Table 4.1.6).

Access to Energy

Energy is the core of economic, environmental, and developmental critical issues facing the world today. Clean, affordable and reliable energy are indispensable for global prosperity. All countries, especially developing

kemakmuran global. Seluruh negara, khususnya negara berkembang perlu untuk memperluas akses terhadap energi yang handal dan modern. Semakin mudah akses terhadap energi dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memantau kemajuan dalam aksesibilitas dan keterjangkauan jasa energi modern seperti listrik atau penggunaan bahan bakar modern untuk memasak dibutuhkan suatu indikator. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik dan persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu bakar bisa dijadikan indikator untuk mengukur kemajuan akses terhadap energi tersebut.

Akses terhadap energi listrik sangat penting untuk pembangunan manusia. International Energy Agency (IEA) memperkirakan sekitar 1,5 miliar orang atau sekitar seperlima penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap listrik pada tahun 2008. Listrik sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti untuk penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Secara nasional, persentase rumah tangga yang sumber penerangannya bukan listrik selama periode 2006-2011 terus mengalami penurunan dari sekitar 9 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 5 persen di tahun 2011. Hal ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan akan penyediaan akses fasilitas energi listrik, meski belum secara menyeluruh akses tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari data hasil Susenas 2011, dimana sebanyak 60,60 persen rumah tangga di Provinsi Papua dan 45,87 persen rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menggunakan sumber penerangan bukan dari listrik.

countries need to expand access to reliable and modern energy. Easier access to energy can reduce poverty, increasing productivity, enhancing competitiveness and promoting economic growth.

To monitor the progress in accessibility and affordability of modern energy services such as electricity or modern fuel usage for the cook needs an indicator. Percentage of households using source of lightning from non-electricity and percentage of households using source of cooking fuel from fire wood can be used as indicators to measure the progress.

Access to electricity is essential for human development. The International Energy Agency (IEA) estimated that about 1.5 billion people, about one-fifth of the world's population have no access to electricity in 2008. Electricity is very useful for basic human activities such as lighting, running household appliances, and operates industrial equipment. During 2006 to 2011, percentage of household using source of lighting from non-electricity has decreased from about 9 percent in 2006 to 5 percent in 2011. This shows that there has been progress in the development of access to electricity facilities. Although, the access has not been enjoyed by Indonesia's citizen. It is proved from the data of Susenas 2011, about 60.60 percent of household in Papua Province and 45.87 percent of household in Nusa Tenggara Timur Province still using non electricity for lighting.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Penggunaan bahan bakar padat dalam rumah tangga seperti kayu bakar mengindikasikan kurangnya akses terhadap energi modern, seperti gas dan LPG. Menurut UNDP dan WHO, pada tahun 2009 sekitar 3 miliar orang bergantung pada bahan bakar biomassa tradisional untuk memasak dan pemanas. Penggunaan bahan bakar biomassa tradisional seperti kayu dapat menyebabkan polusi udara dalam ruangan, yang dapat meningkatkan risiko kematian karena pneumonia dan infeksi saluran pernafasan akut. Tingginya permintaan bahan bakar biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi lahan.

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar di Indonesia menurun pada periode 2006-2011 yaitu dari 51,96 persen di tahun 2006 menjadi 39,89 persen di tahun 2011 (Tabel 4.1.8). Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya sosialisasi penggunaan gas dan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak.

Kondisi Tempat Tinggal

Kondisi tempat tinggal yang ideal ditandai dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, perumahan yang layak, kecukupan air bersih, akses sanitasi yang layak serta sarana dan prasarana ekonomi, sosial maupun budaya yang memadai. Namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada munculnya permukiman kumuh. Kondisi kehidupan di pemukiman kumuh menggambarkan kemiskinan dari segi pendapatan yang tidak memadai dan lingkungan yang tidak layak. Permukiman kumuh memberikan tekanan besar terhadap kehidupan masyarakat melalui polusi, kemacetan, kebisingan, kelangkaan air bersih dan banjir. Penduduk yang tinggal di lingkungan kumuh harus membayar

The use of solid fuels in households such as firewood indicates the lacking of access to modern energy, such as gas and LPG. According to the UNDP and WHO, approximately 3 billion people rely on traditional biomass fuels for cooking and heating in 2009. The use of traditional biomass fuels such as wood can cause indoor air pollution, which can increase the risk of death due to pneumonia and acute respiratory infections. The highly demand for biomass fuels to meet energy needs of households contributing to deforestation and land degradation.

Nationally, the percentage of household using firewood in Indonesia was decreased in the period 2006-2011, from 51.96 percent in 2006 to 39.89 percent in 2011 (Table 4.1.8). This decrease was in line with the socialization increasing of the use of gas and LPG as fuel for cooking.

Housing Conditions

Ideal living conditions is characterized by lower population density, decent housing, adequate clean water, adequate sanitation access as well as adequate infrastructure of economic, social and cultural. However, if the conditions are not met, then it will have an impact on the emergence of slums. Living conditions in the slums area describes poverty in the term of inadequate income and unfeasible environment. Slums give huge pressure on communities live through pollution, congestion, noise, water scarcity, and flooding. People who live in the slums have to pay more to obtain basic facilities services, poorer health status, low level of education and productivity as well as prone to crime and violence.

lebih untuk memperoleh layanan fasilitas dasar, memiliki status kesehatan yang lebih buruk, memiliki tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah serta rentan terhadap tindak kejahatan dan kekerasan.

Timbulnya permukiman kumuh disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi dan mahalnya lahan permukiman. Daya tarik kota sebagai pusat pelayanan, pendidikan, dan kegiatan perekonomian dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya mendorong masyarakat berdatangan ke kota. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di daerah perkotaan dengan tidak diimbangi penambahan perumahan merupakan salah satu pendorong munculnya permukiman kumuh. Selain itu, seringkali orang yang meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota tidak mempunyai pilihan selain menetap di permukiman kumuh.

Menurut Bank Dunia (1999), wilayah kawasan kumuh merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat, serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Semakin banyak permukiman kumuh dan munculnya permukiman kumuh baru dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Permukiman kumuh merupakan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan.

Pada tahun 2011, terdapat sebanyak 4.267 desa atau sebanyak 5,43 persen desa dengan keberadaan permukiman kumuh. Persentase desa dengan keberadaan permukiman kumuh paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu

The appearance of slums caused by high levels of urbanization and expence of residential land. The attraction of the cities as a center of services, education, and economic activities with various completeness facilities encourage people to flock to cities. The high addition of population in urban areas is not matched by the addition of housing is one of the driver of the appearance of slums. In addition, frequently the person who left the village to seek better life in cities has no choice but to live in slums.

According to the World Bank (1999), slums area is a neglected part of urban development. This is indicated by the social and demographic conditions in the slum area such as high population density, not suitable and not eligible of environmental condition for habitation, and the lack of educational facilities, health and socio-cultural infrastructure. Growing number of slums and the appearance of new slums can put pressure on the environment, which in turn led to environmental degradation. Slums are major challenge for environmental sustainability in the development context.

In 2011, there were 4,267 villages or about 5.43 percent of villages with existence of slums. Percentage of village with the highest existence of slum areas was in DKI Jakarta Province as much as 69.29 percent or about 185 villages out of 267

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

sebanyak 69,29 persen atau sebanyak 185 desa dari 267 desa di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tidak ada desa dengan keberadaan wilayah permukiman kumuh (Tabel 4.1.9).

4.2 Pemerintahan

Pemerintahan sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena pemerintahan memegang peranan besar dalam bidang pembangunan berkelanjutan yaitu dengan mengawasi dan memastikan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan konsisten. Pembangunan berkelanjutan bersifat integrasi, memasuki semua bidang dan tingkatan pemerintahan sehingga pemerintahan yang baik dan bersih mutlak diperlukan.

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta bebas dari segala bentuk penyelewengan dalam pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kendala paling besar yang dihadapi adalah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian dan kemajuan ekonomi terhambat. Dewasa ini, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang menggejala di berbagai belahan dunia baik di negara maju maupun berkembang. Gejala tersebut mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN.

Indikator prevalensi korupsi di antara pejabat pemerintah dan swasta merupakan suatu ukuran tindakan kejahatan. Penurunan indikator ini mengindikasikan terjadinya penurunan kejadian korupsi dan merupakan tanda kemajuan

villages in DKI Jakarta. Meanwhile, in Province of Sulawesi Tengah and Maluku Utara did not have slum area in their villages (Table 4.1.9).

4.2 Governance

Governance is closely linked with sustainable development because governance plays a key role of sustainable development that is by monitoring and ensuring sustainable development consistent runs. Sustainable development is integrated with all sectors and levels of governance, so that good and clean governance absolutely necessary.

Clean governance is governance that free from corruption, collusion and nepotism and also free from all forms of deviation in governance. The greatest obstacles that faced by government in governmental activities is the practice of abuse of power and state finance so that countries experiencing losses and stunted economic progress. Today, the abuse of power and authority is common phenomena in various part of the world, both in developed countries and developing countries. That phenomenon has encouraged the development of demands and presences of clean and good governance. Good governance can only be built through a clean government in which bureaucratic apparatus is free from corruption, collusion and nepotism.

The indicator of prevalence of corruption among government officials and private sectors is a measurement of crime. A declining of this indicator indicates a decrease in the incidence of corruption and a sign of progress on the corruption

pada komponen tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan pada periode 2006-2011 mengalami angka yang fluktuatif (Tabel 4.2.1). Pada tahun 2011, jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan sebanyak 283 kasus korupsi dari 424 kasus korupsi yang dilaporkan atau sebesar 67 persen yang terselesaikan. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 208 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan sistem pemerintahan Indonesia masih jauh dari pemerintahan yang bersih. Hal ini berdampak bagi pembangunan berkelanjutan yang kurang baik pula.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berkembang dan menyebar ke seluruh sektor pemerintahan. Bagi sebagian orang, korupsi bukan lagi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, melainkan sudah menjadi hal yang biasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (TI) yang disajikan dalam sebuah indeks yaitu *Corruption Perception Index (CPI)*, Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara yang diukur. Walaupun terjadi perbaikan peringkat dalam CPI bukan berarti korupsi di Indonesia berkurang secara signifikan.

Selain korupsi, kriminalitas juga mempunyai kaitan yang erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Semakin banyak terjadi tindak kriminalitas, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat terganggu. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenram, dan damai. Kasus kriminalitas merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam pembangunan sosial-ekonomi sebagai ketidakseimbangan

component of good governance practices. Good governance practice is essential for sustainable development.

The number of corruption cases that was solved in the period 2006-2011 is show fluctuates (Table 4.2.1). In 2011, there were 283 cases of corruption that was solved from 424 cases of corruption that was reported or about 67 percent. This figure was increased compare with previous year that only reached 208 cases. This condition is very worrying and show that Indonesia government system is still far from clean governance. This is also affects to sustainable development.

Corruption in Indonesia has grown and spread throughout the government sectors. For some people, corruption is no longer regarded as unlawful acts, but merely as a habit. Based on research conducted by Transparency International (TI) that is presented in the Corruption Perception Index (CPI), Indonesia was ranked 110th of 178 countries in 2010. Meanwhile in 2011, Indonesia was ranked 100th of 183 countries. Although there has been improvement in the CPI ranking, it does not mean corruption in Indonesia is significantly reduced.

Apart from corruption, crime also has a close relationship with the implementation of sustainable development. More and more crime occurs then the implementation of sustainable development can be disturbed. Crime is a real threat to the establishment of a safe, comfort and peace community. Cases of crime are a phenomenon that occurs in the socio-economic development as a socio-economic imbalances and uneven level of welfare in the community.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

pembangunan sosial-ekonomi dan belum meratanya tingkat kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kriminalitas di Indonesia adalah jumlah kasus pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja serta kejahatan yang disertai dengan kekerasan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Fenomena kejahatan yang sering terjadi dapat menciptakan iklim ketakutan dan mengikis kualitas hidup. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk kepatuhan terhadap aturan hukum dan komponen tata pemerintahan yang baik.

Selama periode 2006-2011, jumlah kasus pembunuhan cenderung mengalami peningkatan dari 1.120 kasus pada tahun 2006 menjadi 1.378 kasus pada tahun 2011 (Tabel 4.2.2). Pada tahun 2011, jumlah kasus pembunuhan paling banyak terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Metro Jaya yang meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3 yaitu sebesar 526 kasus pembunuhan. Jumlah kasus pembunuhan terbanyak berikutnya terdapat di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu sebanyak 112 kasus pembunuhan. Sementara di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tidak terjadi kasus pembunuhan selama tahun 2011.

4.3 Kesehatan

Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan sangat berhubungan. Sumber daya manusia yang sehat dan lingkungan hidup yang sehat merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan. Ketersediaan air bersih, akses

One of the indicators that used to measure the crime rate in Indonesia is the number of homicides. Intentional homicides and violent crime have a significant negative impact on sustainable development. The phenomenon of crime creates a climate fear and erodes the quality of life. This indicator can be used as a measure for the adherence to the rule of law and a component of good governance.

During 2006-2011, the number of homicides cases tends to increase from 1,120 cases in 2006 to 1,378 cases in 2011 (Table 4.2.2). In 2011, the highest number of homicides occurred in Metro Jaya Regional Police which consist of Police Sub regionals of Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Bekasi Regency, Bekasi Municipality, Tangerang Regency, Tangerang Municipality, Depok Municipality, Soekarno-Hatta Airport, and KP3 that reached about 526 homicides cases. The next highest number of homicides occurred in Sumatera Utara Regional Police about 112 homicides cases. While there are no homicides cases during that year in Kalimantan Selatan Regional Police.

4.3 Health

Health and sustainable development are closely connected. Healthy human resource and healthy environment is the capital in the implementation of development. Availability of clean water, access to health care, good nutrition,

terhadap layanan kesehatan, gizi yang baik dan tempat tinggal yang bebas polusi semuanya menyebabkan terjaminnya kesehatan penduduk. Jika sejumlah faktor tersebut diabaikan, maka akan mempengaruhi risiko kesehatan penduduk dan berakibat terhambatnya pelaksanaan pembangunan.

Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu aspek penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya. Angka kematian bayi terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Di negara berkembang termasuk Indonesia, angka kematian bayi masih tergolong tinggi. Penyakit diare dan pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi di Indonesia. Selain itu, kematian bayi di Indonesia juga disebabkan oleh cacat lahir, masalah gizi seperti kekurangan kalori dan protein, dan komplikasi kelahiran seperti kekurangan oksigen.

Selama tujuh tahun terakhir (2006-2012), berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia, angka kematian bayi secara nasional selalu mengalami penurunan (Tabel 4.3.1). Pada tahun 2006 angka kematian bayi tercatat sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012, angka tersebut turun menjadi sekitar 24 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup. Provinsi dengan estimasi AKB paling rendah pada tahun 2012 adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yaitu sekitar 8 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan estimasi AKB tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 38 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup (Gambar 4.3).

and unpolluted living condition can guarantee population health. If some of these factors are ignored, it will affect risk of population's health which results in poor implementation of development.

Infant Mortality and Life Expectancy

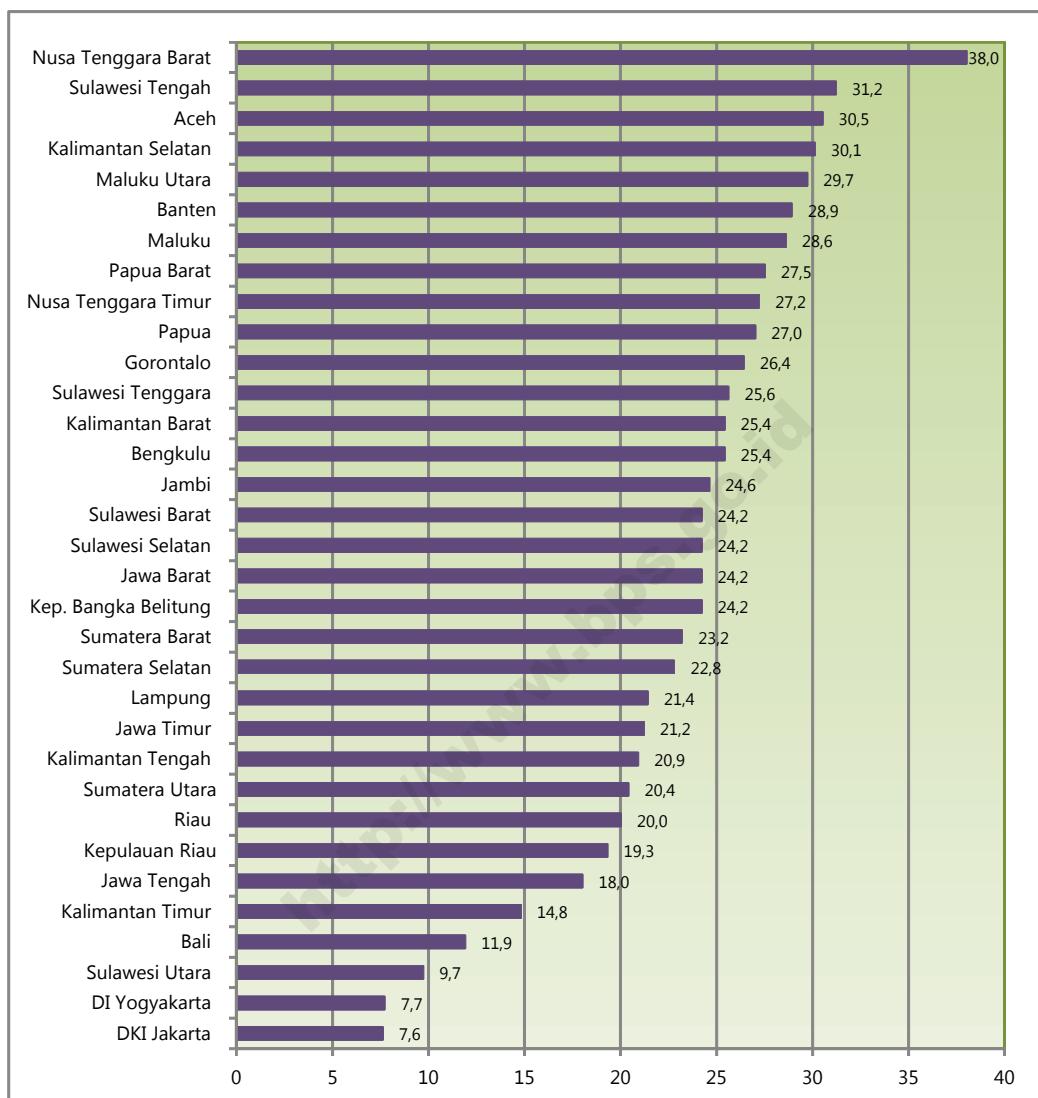
Infant Mortality Rate (IMR) is one of the important aspects in describing the level of human development in terms of public health. Infant mortality rate is directly related to child survival targets and reflect the social, economic and environmental living condition of children including health maintenance.

In developing countries, especially Indonesia, infant mortality rate is still high. Diarrhea and pneumonia is the leading cause of infant mortality in Indonesia. In addition, infant mortality in Indonesia is also caused by birth defects, nutritional problems such as lack of calories and protein, and birth complications such as lack of oxygen.

Over the last seven years (2006-2012), based on Indonesia Population Projection, the national infant mortality rate was decreased (Table 4.3.1). In 2006, infant mortality rate was recorded at 28 among 1,000 live births. In 2012, the number decreased to about 24 babies' deaths in 1,000 live births. DKI Jakarta and DI Yogyakarta are the provinces with the lowest estimation of infant mortality rate in 2012 with 8 babies' deaths in 1,000 live births, while the highest estimation is in Nusa Tenggara Barat Province with 38 babies' deaths in 1,000 live births (Figure 4.3).

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Gambar 4.3. Estimasi Angka Kematian Bayi menurut Provinsi, 2012
Figure 4.3. Estimated of Infant Mortality Rate by Province, 2012



Sumber / Source : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS / Indonesian Population Projection 2005-2025,
BPS-Statistics Indonesia

Angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Secara teoritis, menurunnya angka kematian bayi akan menyebabkan meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup yang

Life expectancy is closely related to infant mortality rate. Theoretically, decreased of infant mortality will lead to increase of life expectancy. Life expectancy is an indicator that reflects the degree of public health. Low life expectancy in the region should be followed by the development of health programs and other social programs

rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, angka harapan hidup penduduk Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan selama periode 2006-2012, mulai dari 70 tahun pada tahun 2006 menjadi 71 tahun di tahun 2012. Hal ini menunjukkan anak yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 71 tahun. Jika dilihat estimasi menurut provinsi nampak bahwa angka harapan hidup tertinggi pada tahun 2012 tercatat di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mencapai 76 tahun. Sementara angka harapan hidup terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 67 tahun (Tabel 4.3.2).

Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik, cepat, tepat dan memadai merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik, cepat, tepat dan memadai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan indikator untuk memonitor kemajuan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar. Aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah hal penting untuk mencerminkan tentang kemajuan sistem kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu selama periode tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi dengan persentase tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebanyak 39,16 persen dan terendah pada tahun 2008 yaitu sebanyak 33,43

including environmental health, nutrition, and poverty reduction programs.

Based on Indonesia Population Projection 2005-2025 from BPS-Statistics Indonesia, life expectancy of Indonesia's population is estimated to increase during the period 2006-2012, from 70 years in 2006 to 71 years in 2012. It shows that a child born in 2012 is expected to live on average age of 71 years. If seen estimated by province, it seems that the highest life expectancy in 2012 was recorded in province of DKI Jakarta and DI Yogyakarta, which reached 76 years. While the lowest life expectancy located in Nusa Tenggara Barat Province reached 67 years (Table 4.3.2).

Health Care Delivery

Good, fast, accurate and adequate health services are needed by the community. In the presence of good, fast, accurate and adequate health services will improve community health status. The health service is an indicator to monitor the progress of the population access to basic health services. Accessibility of health services is important to reflect on the progress of health system and sustainable development.

Based on data from National Socio Economic Survey, percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health center during the period 2006-2010 fluctuated with the highest percentage in 2006 which reached 39.16 percent and the lowest percentage in 2008 which reached 33.43 percent

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

persen (Tabel 4.3.3). Pada tahun 2011, penduduk yang berobat jalan ke puskesmas dan puskesmas pembantu tercatat sebanyak 35,12 persen. Jika dilihat menurut provinsi, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan persentase penduduk yang berobat jalan ke puskesmas dan puskesmas pembantu paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar 74,29 persen. Sementara Sumatera Utara merupakan provinsi dengan persentase terkecil yaitu 19,81 persen.

Salah satu hal yang juga merupakan bagian dari layanan kesehatan dasar adalah layanan kesehatan reproduksi. Layanan kesehatan reproduksi merupakan satu dari 14 cakupan pelayanan kesehatan dasar. Program kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan tren dan perilaku demografi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Dari segi kesehatan, manfaat penggunaan kontrasepsi adalah untuk mengatur kehamilan, mencegah komplikasi selama kehamilan dan risiko kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan.

Pada tahun 2011, jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah suntikan (60,37 persen) dan pil KB (23,14 persen), sedangkan yang paling sedikit digunakan adalah intravag/tisu (0,04 persen). Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi dengan persentase pengguna alat kontrasepsi suntikan paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain (71,36 persen). Untuk jenis kontrasepsi pil KB, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase pengguna paling banyak (47,06 persen) (Tabel 4.3.4).

Hal lain yang juga sangat penting dalam memelihara kesehatan penduduk adalah pemberian imunisasi pada anak balita. Persentase

(Table 4.3.3). In 2011, percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health center reached 35.12 percent. Nusa Tenggara Timur is the province with highest percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health center compared with other provinces, which reached 74.29 percent. While Sumatera Utara is the province with the smallest percentage which reached 19.81 percent.

One of the things that is also part of the primary health care is reproductive health services. Reproductive health service is one part of fourteenth primary health care program. Reproductive health programs, including family planning, is one of the factor that leading changes in behavior and trends of demographics, which in turn will affect sustainable development. In terms of health, the benefits of the usage of contraceptives are for birth control, to prevent complications during pregnancy and risk of maternal death during pregnancy and childbirth.

In 2011, the type of contraceptive mostly used by married women aged 15-49 years old is injection (60.37 percent) and pills (23.14 percent), while the least used is intravag/tissue (0.04 percent). Sumatera Selatan is the province with the highest percentage of injection users compared with other provinces (71.36 percent). While Kalimantan Selatan is the province with the highest percentage of pills users (47.06 percent) (Table 4.3.4).

Another important thing to maintain the health of the population is immunization for children under five years old. Percentage of

balita yang diimunisasi merupakan indikator untuk memantau implementasi program imunisasi. Pengelolaan yang baik pada program imunisasi sangat penting untuk mengurangi angka kesakitan (morbidity) dan kematian dari kebanyakan penyakit menular di masa balita dan ini berkaitan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Secara nasional, persentase balita yang diimunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B pada tahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Pada tahun 2011 balita yang diimunisasi BCG sebanyak 91,85 persen, imunisasi DPT (89,07 persen), imunisasi Polio (89,34 persen), imunisasi Campak/Morbili (76,88 persen), dan imunisasi Hepatitis B (85,01 persen) (Tabel 4.3.5).

Status Gizi

Status gizi sangat berkaitan dengan derajat kesehatan dan keberhasilan pembangunan di suatu masyarakat. Penduduk dengan status gizi yang baik berarti mempunyai derajat kesehatan yang baik dan pembangunan di daerah tempat tinggalnya dapat dikatakan berhasil. Masalah gizi yang terjadi dalam masyarakat sering dikaitkan dengan masalah ketahanan pangan di daerah tersebut. Pada kasus tertentu, seperti kemiskinan, masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kekurangan gizi pada anak balita merupakan suatu keadaan yang perlu ditanggulangi segera. Hal ini agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan status gizi penduduk khususnya anak balita.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan diketahui

children under five years old who are immunized are indicators to monitor the implementation of immunization programs. Good management of immunization programs is essential to reduce morbidity and mortality from major infectious diseases in childhood and associated with the achievement of sustainable development.

Nationally, percentage of children under-five years old were immunized (BCG, DPT, Polio, Measles, and Hepatitis B immunization) in 2011 decreased compared with 2010. In 2011, children under-five years old who were immunized BCG reached 91.85 percent, DPT immunization (89.07 percent), Polio immunization (89.34 percent), Measles immunization (76.88 percent), and Hepatitis B immunization (85.01 percent) (Table 4.3.5).

Nutritional Status

Nutritional status is closely linked to health status and success rate of development in a society. Residents with good nutritional status mean they have good status of health and development in area where they lived was successful. Nutritional problems that occur in society are often associated with food security issues in region. In some cases, such as poverty, malnutrition arises due to food security problem at the household level. Malnutrition in children under-five year is a situation that need to be addressed immediately. This is important in order not to disrupt the development of the child. Realizing this, increasing the nutritional status of people especially young children need appropriate policies to obtain adequate food.

Based on data from Basic Health Research from Ministry of Health is known that the number

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

bahwa jumlah balita yang menderita gizi buruk mengalami penurunan dari 8,80 persen pada tahun 2005 menjadi 4,90 persen pada 2010. Begitu pula dengan balita yang mengalami gizi kurang, menurun dari 19,24 persen pada tahun 2005 menjadi 13,00 persen pada tahun 2010 (Tabel 4.3.6).

Jumlah balita kurang gizi (gizi buruk ditambah gizi kurang) menurun dari 18,4 persen pada tahun 2007 menjadi 17,9 persen pada tahun 2010. Adanya penurunan persentase balita yang kurang gizi diiringi dengan kenaikan persentase balita yang bergizi normal dan bergizi lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas gizi balita di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

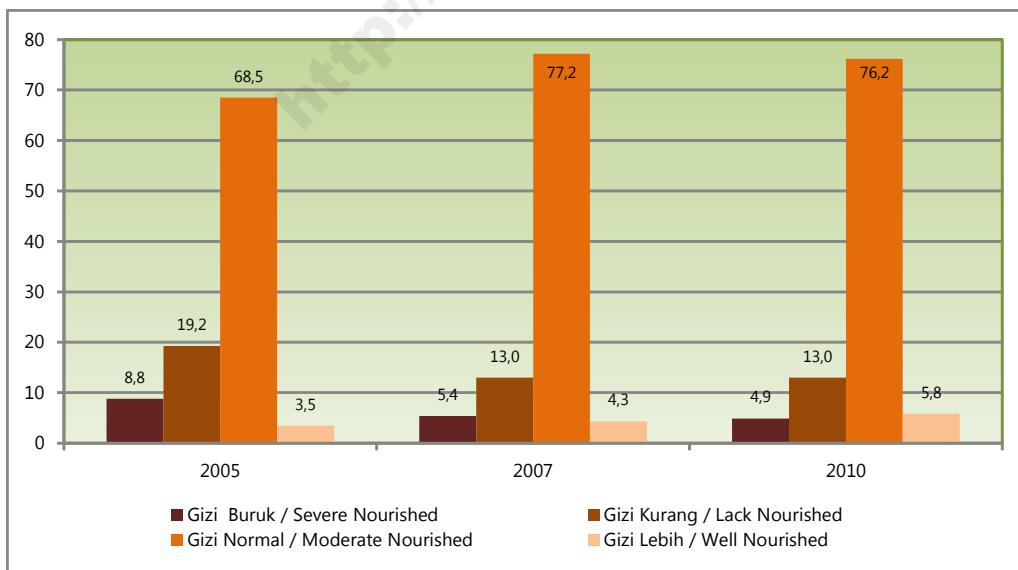
Pada tahun 2010, provinsi dengan persentase balita yang menderita gizi buruk paling tinggi adalah Provinsi Gorontalo (11,20 persen), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat

of children under-five years who have severe nourished decreased from 8.80 percent in 2005 to 4.90 percent in 2010. Lack nourished children under-five years also decreased from 19.24 percent in 2005 to 13.00 percent in 2010 (Table 4.3.6).

Number of malnourished children under five years old (severe nourished plus lack nourished) decreased from 18.4 percent in 2007 to 17.9 percent in 2010. Decreasing in the percentage of malnourished children under-five years accompanied with increasing in the percentage of moderate nourished and well-nourished children under five years. This indicates that nutritional quality of children under-five years in Indonesia has increased from year to year.

In 2010, province that has highest percentage of severe nourished children was Gorontalo Province (11.20 percent), followed by Nusa Tenggara Barat Province (10.60 percent). In

Gambar 4.4. Status Gizi Balita, 2005-2010
Figure 4.4. Nutritional Status of Children Under Five Years Old, 2005-2010



Sumber / Source : Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan / Basic Health Research, Ministry of Health

(10,60 persen). Untuk kategori gizi kurang, provinsi dengan persentase balita penderita gizi kurang paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (22,30 persen), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (20,40 persen).

Status Kesehatan dan Kesakitan

Lingkungan yang tidak sehat dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti malaria. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Sebagai vektor penular, nyamuk mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya epidemik penyakit ini. Sejauh ini permasalahan masih berkutat pada bagaimana mengobati orang yang sakit malaria atau memberantas nyamuk sebagai vektor penular. Hasil studi epidemiologi lingkungan memperlihatkan kejadian suatu penyakit pada suatu kelompok masyarakat merupakan resultan dan hubungan timbal balik antara masyarakat itu sendiri dengan lingkungan. Lingkungan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam penularan penyakit malaria.

Jumlah penderita penyakit malaria di Indonesia secara umum berfluktuatif selama periode tahun 2006-2010 (Tabel 4.3.7). Pada tahun 2010, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua adalah dua provinsi dengan jumlah penderita malaria paling banyak yaitu berturut-turut sebanyak 492.792 penderita dan 311.052 penderita. Secara umum, jumlah penderita malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain selama periode tahun 2006-2010. Selain jumlah penderita malaria, indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat endemisitas malaria di suatu daerah adalah Annual Parasite Incident (API). Suatu daerah termasuk endemis tinggi apabila nilai API lebih besar dari 5. Pada

lack nourished category, province that has highest percentage was Kalimantan Tengah Province (22.30 percent), followed by Nusa Tenggara Timur Province (20.40 percent).

Health Status and Morbidity

Unhealthy environment resulted in the emergence of various diseases such as malaria. The disease is transmitted by Anopheles mosquitoes. As the transmitter vector, mosquitoes have an important role against the occurrence of epidemics of these diseases. So far the problem remains about how to treat people who are sick with malaria or eradicate the mosquito as a vector for the spread of parasites. Based on environmental epidemiology studies show the incidence of a disease in a community group is resultant and reciprocal relationship between the communities themselves with the environment. Social and cultural environment plays an important role in the enormous transmission of malaria.

Number of malaria patient in Indonesia is generally fluctuated over the period 2006-2010 (Table 4.3.7). Nusa Tenggara Timur and Papua are the two provinces with the most malaria patients, reached 436,717 patients and 259,634 patients. Generally, Nusa Tenggara Timur Province has more malaria patients than other province during the period 2006-2010. Besides number of malaria patient, other indicators that can be used to view endemicity of malaria in an area is Annual Parasite Incident (API). An area can be included as a high endemic area if has API value greater than 5. In 2010, the provinces that include high endemic malaria area are Province of Papua (18.03 percent), Papua Barat (17.86 percent), Nusa Tenggara Timur (12.14 percent), Maluku

tahun 2010, provinsi yang termasuk daerah endemis malaria tinggi adalah Provinsi Papua (18,03 persen), Papua Barat (17,86 persen), Nusa Tenggara Timur (12,14 persen), Maluku Utara (6,45 persen), Maluku (5,43 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (5,06 persen).

Selain penyakit malaria, jumlah kasus penyakit AIDS dan Tuberkulosis (TB) juga menjadi hal yang perlu dipantau dan ditanggulangi dengan segera. Kumulatif kasus AIDS pada tahun 2010 tercatat sebesar 24.131 kasus dengan kasus terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.995 kasus, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (3.771 kasus) dan Jawa Barat (3.728 kasus). Sementara angka kumulatif kasus per 100.000 penduduk paling banyak terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar 174 kasus (Tabel 4.3.8).

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Jumlah kasus penyakit TB paru selama periode 2006-2010 mengalami peningkatan dari 277.589 kasus pada tahun 2006 menjadi 302.861 kasus pada tahun 2010 (Tabel 4.3.9). Selama periode tahun 2006-2010, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kasus penderita TB paru paling banyak. Penderita TB paru ini mungkin saja berasal dari provinsi lain yang sedang menjalankan perawatan di RS TB Paru di Jawa Barat.

Salah satu penyebab TB paru diduga karena kebiasaan menghisap tembakau/rokok. Perilaku merokok merupakan sesuatu hal yang banyak dilakukan walaupun sudah tahu bahaya dari merokok. Prevalensi perokok saat ini pada penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 tercatat sebesar 34,7 persen dengan prevalensi terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah (43,1 persen) dan prevalensi terkecil di provinsi

Utara (6,45 percent), Maluku (5,43 percent), and Kepulauan Bangka Belitung (5,06 percent).

Besides malaria, the number of cases of AIDS and Tuberculosis (TB) is also a matter that needs to be monitored and dealt with immediately. AIDS cumulative cases in 2010 was recorded about 24,131 cases by the number of cases found in DKI Jakarta reached 3,995 cases, followed by Jawa Timur (3,771 cases) and Jawa Barat (3,728 cases). While the province with the highest cumulative cases per 100,000 populations is Papua with 174 cases (Table 4.3.8).

*Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by *Mycobacterium Tuberculosis*. Most of TB germs attack pulmonary, but it can also on other organs. The number of Tuberculosis disease cases during 2006-2010 has increased from 277,589 cases in 2006 to 302,861 cases in 2010 (Table 4.3.9). During the period 2006-2010, Jawa Barat was the province with the highest number of Tuberculosis disease cases. Patients with tuberculosis disease in Jawa Barat may have come from other provinces who are undergoing treatment in tuberculosis hospital in Jawa Barat.*

One cause of Tuberculosis disease is suspected because of habit of sucking tobacco / cigarettes. Smoking behavior is something that many people do although they already know the risk of smoking. In 2010, prevalence of current smokers of population aged above 15 years old was recorded at 34.7 percent, with the highest prevalence in Kalimantan Tengah (43.1 percent) and the lowest prevalence in Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (28,3 persen). Secara nasional, sebagian besar perokok saat ini (52,3 persen) rata-rata per hari menghisap 1-10 batang rokok dan hanya sekitar 2,1 persen perokok saat ini yang menghisap lebih dari 30 batang rokok per hari.

Salah satu hal yang juga menjadi pokok bahasan pada masalah kesehatan adalah perilaku bunuh diri. Perilaku bunuh diri merupakan bagian dari penyakit mental. Perilaku bunuh diri mulai merebak beberapa tahun terakhir. Menurut WHO dalam *Global Burden Disease 2004*, bunuh diri termasuk dalam 20 penyebab utama kematian untuk semua usia. Penyakit mental terutama depresi, pelecehan, kekerasan, latar belakang budaya dan sosial merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan bunuh diri. Perilaku bunuh diri dapat dijadikan salah satu pendekatan untuk prevalensi gangguan kesehatan mental di suatu negara. Gangguan kesehatan mental merupakan hambatan utama untuk mencapai kesejahteraan penduduk di negara maju dan berkembang. Indikator perilaku bunuh diri didekati dengan jumlah kasus bunuh diri. Jumlah kasus bunuh diri selama periode 2006-2010 cenderung menurun dari 1.228 kasus pada tahun 2006 menjadi 583 kasus pada tahun 2010. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kasus bunuh tertinggi pada tahun 2010 (Tabel 4.3.11).

4.4 Pendidikan

Pendidikan dapat dianggap sebagai suatu proses yang membawa manusia dan masyarakat mencapai potensi terbaik yang dapat dicapai. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan,

(28.3 percent). Nationally, the majority of current smokers (52.3 percent) average smoked 1-10 cigarettes per day and only about 2.1 percent of current smokers who smoked more than 30 cigarettes per day.

One thing that is also the subject of health problems is suicide behavior. Suicide behavior is part of the mental health disorder. Suicide behavior started to emerge in recent years. According to WHO in Global Burden Disease 2004, suicide was including in the leading cause of death for all ages. Mental health disorder, especially depression, abuse, violence, social and cultural background are the main risk factors that lead to suicide. Suicide behavior can be used as a proxy for the prevalence of mental health disorders in a country. Mental health disorder is a major obstacle to achieve the population welfare in developed and developing countries. Indicators of suicide behavior approximated by the number of suicide cases. Number of suicide cases during 2006-2010 tended to decrease from 1,228 cases in 2006 to 583 cases in 2010. Jawa Tengah was the province with the highest number of suicide cases in 2010 (Table 4.3.11).

4.4 Education

Education can be considered as a process that brings people and communities reach the best potential that can be achieved. Education has an important role in sustainable development. Education for sustainable development enables every person to acquire the knowledge, skills, attitudes and values that needed to improve the

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup sekarang dan membentuk masa depan yang berkelanjutan.

Pembangunan di bidang pendidikan menentukan kemajuan dan masa depan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa mengindikasikan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pendidikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan yang secara tidak langsung akan menjamin masa depan bangsa.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baru, mendorong munculnya perilaku terdidik, dan meningkatkan pemberdayaan individu serta masyarakat. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah wajibkan semua warga negara Indonesia untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP). Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar selama periode 2006-2011 cenderung mengalami peningkatan (Tabel 4.4.1).

Pada tahun 2011, terdapat sekitar 50,18 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar. Persentase tertinggi penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar pada tahun 2011 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (76,57 persen), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (34,99 persen).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. APM

quality of life for present and shape a sustainable future.

Development in education determines the progress and future of the nation. The higher levels of education of the nation indicate the level of progress of the nation. Therefore, the government needs to provide the facilities and infrastructure that support the development of education so that all people can enjoy the education that indirectly will ensure the future of the nation.

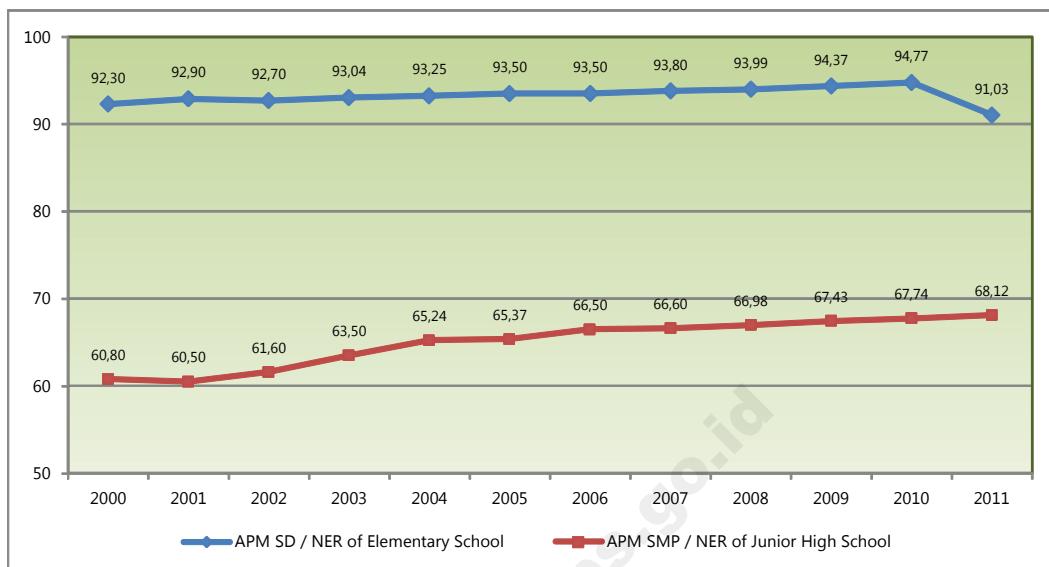
Education Level

Education has an important role in human life because education improves knowledge and skills, encourages educated behavior, and improves individual and community empowerment. Because the importance of education, the government requires all Indonesian citizens must undertake nine years compulsory education with a program of six years in elementary school and three years in junior high school. Percentage of population aged 15 years and over graduated from primary education during the period 2006-2011 tended to increase (Table 4.4.1).

In 2011, there was approximately 50.18 percent population aged 15 years and over graduated from primary education. The highest percentage of population aged 15 and over graduated from primary education in 2011 was in DKI Jakarta Province (76.57 percent), while the lowest was in Nusa Tenggara Timur Province (34.99 percent).

Net Enrollment Ratio (NER) is one indicator of the achievement of sustainable development in the education sector. NER shows school enrollment

Gambar 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 2000-2011
Figure 4.5. Net Enrolment Ratio (NER) of Elementary School and Junior High School, 2000-2011



Sumber / Source : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Pada bagian ini APM yang dibahas untuk dua kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun. Secara umum APM SD dan APM SMP mengalami peningkatan selama periode 2000-2011. Namun, APM SD pada tahun 2011 terlihat lebih kecil dibandingkan dengan APM SD pada tahun 2010 (Gambar 4.5).

Secara nasional nilai APM SD pada tahun 2011 sebesar 91,0 dan APM SMP sebesar 68,1 (Tabel 4.4.2). Pada tahun 2011, Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi dengan nilai APM SD paling tinggi yaitu sebesar 93,5, sedangkan nilai APM SD yang paling rendah adalah Provinsi Papua (70,1). Untuk APM SMP, provinsi dengan nilai APM SMP tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,7) dan APM SMP terendah adalah Provinsi Papua (46,0).

of school-aged population in certain educational level. In this section NER are covered for two education groups, there are elementary schools for people aged 7-12 years and junior high school for people aged 13-15 years. Generally, NER of elementary school and junior high school have increased during the period 2000-2011. However, NER of elementary school in 2011 look smaller than NER of elementary school in 2010 (Figure 4.5).

Nationally, in 2011 NER of elementary school was 91.0 and NER of junior high school was 68.1 (Table 4.4.2). In 2011, Sumatera Barat was a province with the highest NER of elementary school at 93.5 whereas the lowest NER of elementary school was in Papua (70.1). Province with the highest NER of junior high school in 2011 was Nusa Tenggara Barat (76.7) and the lowest was Papua (46.0).

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

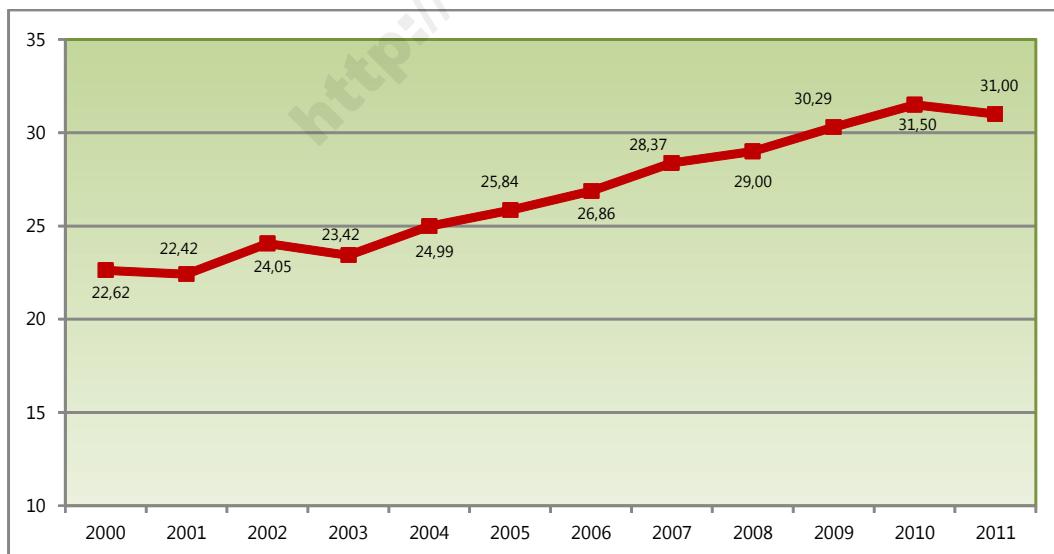
Selain dilihat dari tingkat pencapaian APM, indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia kerja. Indikator tersebut menunjukkan kualitas modal sumber daya manusia pada usia kerja. Penduduk usia kerja dengan ijazah minimal SMA diharapkan memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki pasar tenaga kerja sehingga secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran.

Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA selama periode 2000-2011 cenderung menunjukkan peningkatan (Gambar 4.6). Secara nasional, persentase penduduk usia 25-64 tahun yang berpendidikan minimal SMA pada tahun 2011 tercatat sebesar 31 persen,

Besides from the level of NER achievement, other indicator that indicates successful achievement of sustainable development in education is the highest level education attained by working age population. The indicator shows the quality of human capital in working age. Working age population with at least senior high school certificate is expected to have sufficient skills to enter labor market thus indirectly will lower the unemployment rate.

Percentage of population aged 25-64 years old have completed minimum senior high school level during the period 2000-2011 tended to increase (Figure 4.6). Nationally, in 2011, percentage of population aged 25-64 years old have completed minimum senior high school level was 31 percent which the largest percentage

Gambar 4.6. Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Minimal SMA (persen), 2000-2011
Population Aged 25-64 Years Old Have Completed Minimum Education Senior High School (percent), 2000-2011



Sumber / Source : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

dimana persentase terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta (58,63 persen) dan persentase terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (22,69 persen) (Tabel 4.4.4).

Melek Huruf

Melek huruf sangat penting untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Lingkungan masyarakat dengan tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan lingkungan masyarakat yang terpelajar. Lingkungan masyarakat yang terpelajar sangat penting dalam rangka mencapai tujuan memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, membatasi pertumbuhan penduduk, mencapai kesetaraan gender, dan memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan kemampuan membaca dan menulis penduduk. Kemampuan membaca merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik. Indikator ini menggambarkan keadaan orang-orang terpelajar dalam populasi penduduk usia dewasa (15 tahun keatas) yang mampu menggunakan kata-kata dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Kecilnya angka melek huruf memberikan indikasi diperlukannya upaya keras untuk mengurangi banyaknya penduduk usia dewasa yang buta huruf.

Secara nasional, selama periode 2006-2011 angka melek huruf cenderung mengalami peningkatan (Tabel 4.4.5). Pada tahun 2011 angka melek huruf mencapai 92,81 persen yang artinya sekitar 92,81 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas mampu membaca dan menulis di tahun 2011. Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi

found in DKI Jakarta Province (58.63 percent) and the smallest percentage found in Nusa Tenggara Timur Province (22.69 percent) (Table 4.4.4).

Literacy

Literacy is essential for promoting and communicating sustainable development and improving the capacity of communities. Communities with high level of literacy indicate educated communities. The educated communities is essential to achieve the goal to eradicate poverty, reducing child mortality, limiting the growth of population, achieving gender equality, and ensuring sustainable development.

Literacy rate showed the ability to read and write. Ability to read and write is the minimum skill needed for life in a better future. This indicator describes the state of well-educated people in adult age population (15 years and over) who are able to use words and writing in everyday life. The low literacy rate gives an indication of the need for further efforts in the future to reduce the number of illiterate adult population.

Nationally, literacy rates tend to increase during the period 2006-2011 (Table 4.4.5). In 2011, literacy rate reached 92.81 percent, which means in 2011 approximately 92.81 percent of Indonesian population aged 15 years and over can read and write. If seen by province, Sulawesi Utara Province has the highest literacy rate which

Sulawesi Utara memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu sebesar 98,85 persen, sedangkan angka melek huruf terendah terdapat di Provinsi Papua (64,08 persen).

4.5 Demografi

Penduduk adalah subyek dan sekaligus menjadi obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang seluas-luasnya.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi modal dan pendorong bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika kualitasnya rendah, penduduk tersebut justru akan membebani pembangunan.

Salah satu permasalahan di bidang kependudukan adalah besarnya jumlah penduduk dan sebarannya yang tidak merata. Permasalahan tersebut telah mengakibatkan tidak meratanya hasil pembangunan yang dilaksanakan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 tercatat sebesar 205.132,5 ribu jiwa kemudian naik menjadi 237.641,3 ribu jiwa pada tahun 2010 (Tabel 4.5.1). Meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar, namun

reached 98.85 percent, while the lowest literacy rate found in Papua Province (64.08 percent).

4.5 Demography

Population are subject and also become the object of development. As the subject of development, the population must be fostered and developed in order to be able to be a driving force of development. Development should be enjoyed by the population. Thus it is clear that development should be developed by taking into account the ability of their entire population to participate actively in development dynamics. The development is said to be succeed if they can improve the welfare and prosperity of their population in the broadest sense.

The circumstances and conditions of the population greatly affect the dynamics of the development undertaken by the government. The large number of population equipped with an adequate quality will be a driving force and capital for development. Conversely large population if its quality is low, make the population will burden the development.

One of the problems in demography is the large number of population and its uneven distribution. This problem has resulted in uneven development is carried out. The number of Indonesia's population in 2000 was recorded 205,132.5 thousand people then rose to 237,641.3 thousand people in 2010 (Table 4.5.1). Although the Indonesia's population is very large but the population distribution is uneven. Distribution of Indonesia's population concentrated in western

persebarannya tidak merata. Sebaran penduduk Indonesia terpusat di wilayah Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2010 persentase penduduk Indonesia yang menempati kedua pulau tersebut mencapai 78,79 persen dimana sekitar 57,49 persen penduduknya berada di Pulau Jawa.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 2000-2010 tercatat sebesar 1,49 persen per tahun, mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) yang hanya sebesar 1,40 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode 2000-2010 adalah Provinsi Papua (5,39 persen), diikuti Provinsi Kepulauan Riau (4,95 persen). Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Jawa Tengah (0,37 persen).

Jumlah anak per perempuan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah/negara. Rendahnya jumlah anak per perempuan berdampak pada mengecilnya ukuran keluarga yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi pembangunan berkelanjutan. Wanita yang mempunyai banyak anak akan merasa sulit bekerja di luar rumah, sehingga memiliki lebih sedikit kesempatan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial keluarga serta lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Penghitungan jumlah anak per perempuan didekati dengan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*).

Perkembangan estimasi angka kelahiran total selama periode tahun 2006-2012 cenderung mengalami penurunan. Selama periode 2006-2012, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka kelahiran total tertinggi dibanding provinsi lainnya, sedangkan angka kelahiran total terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta. Sementara estimasi angka kelahiran total Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebesar 2,13 yang berarti bahwa secara rata-rata wanita

region of Indonesia especially Java and Sumatra island. In 2010, the percentage of population in those two islands has reached 78.79 percent, which about 57.49 percent of population in Java island.

The growth rate of population in Indonesia during the period 2000-2010 was recorded at 1.49 percent per year, increased compared to previous period (1990-2000) which is only amounted 1.40 percent per year. The highest growth rate of Indonesia's population in 2000-2010 was in Papua Province (5.39 percent), followed by Kepulauan Riau Province (4.95 percent). While the lowest growth rate was in Jawa Tengah Province (0.37 percent).

The number of children per woman is linked to the implementation of development in a region/country. Low number of children per women has an impact on shrinking the size of family, which in turn will have benefit in sustainable development. Women who have many children will find difficulties to work outside, so they have less chance to improve economic and social status of family as well as more difficult to get out of poverty. Calculation of the number of children per woman was approached by Total Fertility Rate (TFR).

The trend of total fertility rate during 2006-2012 tends to decrease. During 2006-2012, Nusa Tenggara Timur was the province with highest total fertility rate compared to other provinces, while the lowest total fertility rate was in DI Yogyakarta Province. The total fertility rate in 2012 was recorded at 2.13, which means in average that Indonesia woman aged 15-49 years old give birth to 2 or 3 children during their reproductive age.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Indonesia usia 15-49 tahun mempunyai 2 atau 3 anak selama masa usia suburnya.

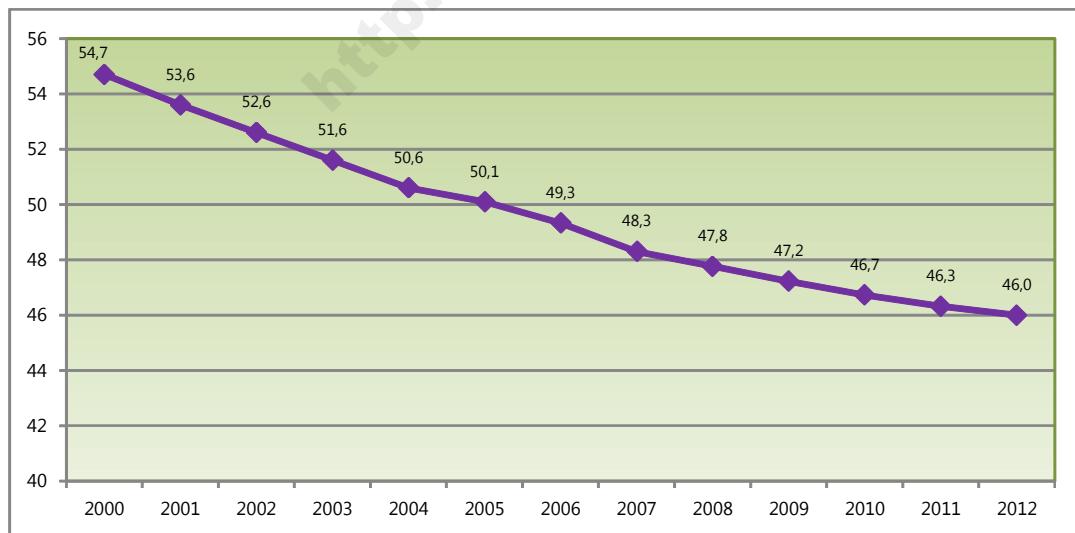
Dampak dari keberhasilan pembangunan bidang kependudukan di antaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, khususnya kelompok umur 0-14 tahun. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2000, angka beban ketergantungan tercatat sebesar 54,7, yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 55 orang penduduk usia tidak produktif (Gambar 4.7). Pada tahun 2012 angka beban ketergantungan turun menjadi 46,0, yang berarti ada penurunan beban tanggungan

The impacts of the successful population development is indicated by the changing of the population composition by age group which is reflected by the declining of non-productive population, especially in age group of 0-14 years old which also leads to lower dependency ratio. The lower of dependency ratio will give more opportunity for productive population (15-64 years old) to upgrade their quality.

In 2000, the dependency ratio reached 54.7. It means every hundred productive people have to bear around 55 non-productive people. It declined to 46.7 in 2012, which means there is a reduction in the burden of dependents in each population of productive age (Figure 4.7). The highest dependency ratio in 2012 was occurred

**Gambar
Figure 4.7. Angka Beban Ketergantungan, 2000-2012**
Dependency Ratio, 2000-2012



Sumber / Source : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS / Indonesian Population Projection 2005-2025,
BPS-Statistics Indonesia

pada setiap penduduk usia produktif. Angka beban ketergantungan tertinggi pada tahun 2012 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mencapai angka 57,5, sedangkan angka beban ketergantungan terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 36,8.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, angka beban ketergantungan akan terus turun hingga mencapai titik terendah yaitu 45,3 pada tahun 2022 dan 2023 yang selanjutnya angka beban ketergantungan akan naik kembali pada tahun 2024. Kondisi dimana angka beban ketergantungan berada pada titik terendah sering disebut dengan bonus demografi. Dengan kata lain, bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia tidak produktif (lansia dan anak-anak) yang kecil. Bonus demografi akan sangat menguntungkan negara apabila penduduk usia produktif mempunyai skill dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara. Disisi lain, bonus demografi dapat juga menjadi beban dan ancaman bagi negara apabila penduduk usia produktif lebih banyak yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan.

4.6. Bencana Alam

Bencana alam adalah fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, seismis, hidrologis dan meteorologis atau suatu proses dalam lingkungan alam yang menimbulkan malapetaka dan mengancam kehidupan serta perekonomian masyarakat. Bencana alam yang termasuk kelompok ini antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, angin topan, dan tsunami. Perubahan cuaca yang disertai dengan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam. Bencana alam juga dapat disebabkan oleh

in Nusa Tenggara Timur Province (57,5) and the lowest was in DKI Jakarta Province (36,8).

According to Indonesian Population Projection 2005-2025, dependency ratio will continue to decline until reaches the lowest point about 45,3 in 2022-2023 and the dependency ratio will increase again in 2024. The condition where dependency ratio in the lowest point often called demographic bonus. In other word, demographic bonus is a condition in which the population of productive age are very large and bear small population of non-productive age (elderly and children). Demographic bonus will greatly benefit to the country if the productive age population has skills so it will increase the prosperity of the country. On the other hand, demographic bonus can also be burden and threat to the country if more productive age population is unemployed and has no income.

4.6. Natural Disaster

Natural disasters are natural phenomena or symptoms caused by geological conditions, seismic, hydrological and meteorologist or a process in nature that cause havoc and threatening the lives and economic activities. Natural disasters which include in this group are earthquakes, volcanic eruptions, floods, hurricanes, and tsunami. Weather changing which is accompanied by decreasing the carrying capacity of environment had increased the level of frequent occurrence on natural disaster. The natural disasters can be also caused by the forest and land destruction, spatial

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

kerusakan hutan dan lahan, pelanggaran tata ruang, dan kegiatan industri yang menggunakan bahan beracun berbahaya.

Bencana alam yang terjadi dapat dikatakan sebagai respon alam karena terjadi kerusakan pada lingkungan akibat perbuatan manusia yang terkait dengan proses pembangunan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor lingkungan akan memperbesar risiko terjadinya bencana alam. Bencana alam juga akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Bencana alam yang dibahas dalam subbab ini hanya terbatas bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Kejadian bencana alam berupa banjir selalu mendominasi wajah bencana di Indonesia diikuti oleh tanah longsor dan gempa bumi. Selama periode tahun 2005 sampai 2011, jumlah desa yang mengalami bencana banjir tercatat berfluktuatif yaitu sebanyak 13.332 desa pada tahun 2005, kemudian meningkat menjadi 15.143 desa pada tahun 2008 dan menurun menjadi 14.732 desa pada tahun 2011 (Tabel 4.6.1). Provinsi dengan jumlah desa yang mengalami kejadian bencana banjir tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Aceh (1.463 desa), diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (1.370 desa), dan Provinsi Jawa Tengah (1.266 desa). Sementara provinsi dengan jumlah desa yang mengalami kejadian bencana banjir terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (16 desa).

Untuk kejadian gempa bumi, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera termasuk memiliki desa dengan kejadian gempa bumi yang relatif tinggi, sedangkan Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan kejadian gempa bumi terendah. Sementara jumlah desa yang mengalami kejadian bencana tanah longsor pada tahun 2011 mencapai 7.521 desa atau 9,57 persen dari keseluruhan desa. Desa dengan kejadian tanah longsor tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu terjadi pada 1.477 desa.

violation, and industrial activities which using poisonous and dangerous substance.

Natural disasters are a natural response due to damage to the environment caused by human activity associated with the development process. Development which neglected the environment factor will raise the potential risk of natural disasters occurrence. Natural disasters are also inhibiting the passage of development process.

Natural disasters which are discussed in this section are limited to floods, earthquakes, and landslide. The natural disasters such as floods dominated the disasters occurrence in Indonesia, followed by landslides and earthquakes. The number of villages hit by flood occurrence during 2005 to 2011 was fluctuated. In 2005, the number of villages hit by flood reach the total number of 13,332 villages. While in the year of 2008, the figure increased reached 15,143 villages and as many as 14,732 villages in 2011. Province with the highest number of village that experienced flood occurrence in 2011 was Aceh Province (1,463 villages), followed by province of Jawa Timur (1,370 villages), and Jawa Tengah (1,266 villages). While province with the lowest flood occurrence was Kepulauan Bangka Belitung Province (16 villages).

For the earthquakes occurrence, islands of Java and Sumatera were islands with the highest occurrence of earthquakes, while Kalimantan island had the lowest occurrence of earthquakes. Meanwhile the number of village that experienced landslide in 2011 reach the total number of 7,521 villages or around 9.57 percent from the total number of villages. Jawa Barat was the province with the highest number of landslide occurrence, which occurred in 1,477 villages.

Antisipasi Bencana Alam

Untuk mengurangi risiko dan terjadinya bencana alam, perlu dilakukan antisipasi bencana alam. Antisipasi bencana alam dapat dilakukan antara lain dengan sistem peringatan dini tsunami, ketersediaan perlengkapan keselamatan, kebiasaan tolong menolong, penyuluhan ataupun kegiatan lainnya. Gotong royong yang dilakukan oleh warga merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap bencana alam yang secara alami sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki sistem peringatan dini tsunami dan perlengkapan keselamatan sebagai bentuk antisipasi bencana. Untuk itu diperlukan upaya antisipasi sebelum terjadinya bencana alam seperti membersihkan saluran air untuk mengantisipasi banjir, penanaman bakau untuk mengatasi abrasi pantai, dan sebagainya.

Persentase desa yang melakukan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam sebesar 41,94 persen pada tahun 2011 (Tabel 4.6.2). Persentase desa yang melakukan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (80,52 persen). Sementara persentase terkecil dari desa yang melakukan gotong royong untuk mengantisipasi bencana alam terdapat di Provinsi Papua Barat yang hanya meliputi 6,25 persen dari total desa dalam satu provinsi.

Korban Bencana

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak besar terhadap populasi manusia. Bencana alam juga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak tersebut antara lain menimbulkan kematian, luka-luka, sakit, kehilangan tempat tinggal, dan kerusakan lingkungan. Dalam publikasi ini disajikan data jumlah korban meninggal, luka-luka, dan hilang

Anticipation of Natural Disaster

To reduce the occurrence and impact of natural disaster, it needed to anticipate natural disaster. The anticipation of natural disaster is conducting by initiating the tsunami early warning system, the availability of safety equipment, community inter-assistance, disaster illumination or other activity. Not every province is provided with the tsunami early warning system and the availability of safety equipment for anticipation of natural disaster. Therefore the anticipation of disaster is commonly conducted by cleaning the water drain in anticipation of flooding, planting mangroves to prevent coastal erosion, and so forth.

Percentage of villages that make community selfhelp to anticipate natural disasters amounted to 41.94 percent in 2011 (Table 4.6.2). The highest percentage of villages that make community selfhelp to anticipate natural disasters was occurred in DKI Jakarta Province (80.52 percent), while the lowest was occurred in Papua Barat Province that only covers 6.25 percent of the existing villages.

Disaster Victims

Natural disasters can cause big impact on human population. Natural disasters can also cause devastating effect on economic, social, and environment. The impact of natural disaster such as death, injury, illness, shelter lost and environmental damage. This publication presented data on the number of victims died, suffered and lost as well as the number of damage houses, both

serta jumlah rumah yang mengalami rusak berat dan rusak ringan akibat bencana yang terjadi.

Dalam rentang tahun 2006-2011, bencana alam yang terjadi telah menimbulkan korban meninggal sebanyak 11.789 jiwa, korban luka-luka sebanyak 197.832 orang, dan korban hilang tercatat sebanyak 721 orang (Tabel 4.6.3). Pada tahun 2011, korban meninggal tercatat sebanyak 360 jiwa, turun dibandingkan tahun sebelumnya (1.630 jiwa).

Selain menimbulkan korban manusia, bencana alam juga menimbulkan korban harta benda, seperti kerusakan rumah serta kerusakan sarana dan prasarana umum. Kerusakan rumah baik rusak berat atau rusak ringan telah menimbulkan kerugian harta yang cukup besar. Selama rentang waktu 2006-2011, total kerusakan rumah yang di alami akibat bencana tercatat sebanyak 697.055 rumah, dengan perincian rusak berat sebanyak 218.180 rumah, dan rusak ringan tercatat sebanyak 478.875 rumah. Pada tahun 2011, jumlah rumah yang mengalami rusak berat sebagian besar terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.849 rumah, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.313 rumah.

4.7. Atmosfer

Efek rumah kaca merupakan penyebab utama naiknya temperatur bumi yang menurut sebagian ahli disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap dan menahan radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change*-UNFCCC), ada 6 jenis gas yang digolongkan

heavily damaged and lightly damaged which is caused by disaster.

During 2006-2011 periods, the natural disasters had caused death victims as many as 11,789 people lost their lives, 197,832 people injured and 721 lost victims (Table 4.6.3). In 2011, the death victims caused by natural disaster amount 360 people, decreased compared with previous year (1,630 people).

Besides causing human casualties, natural disasters also caused on property casualties, such as house damage and public infrastructure damage. Houses damage either heavily or lightly damaged had caused property losses. During the period 2006-2011, total of houses damage due to natural disasters reach around 697,055 houses, where as much as 218,180 houses were the heavily damaged and the lightly damaged were recorded reach the number 478,875 houses. In 2011, the number of heavily damaged houses mostly occurred in Jawa Tengah Province as much as 1,849 houses, followed by Nusa Tenggara Timur Province as many as 1,313 houses.

4.7. Atmosphere

The greenhouse effect is the main cause of temperature rising on earth. According to some experts it is due to the increasing concentration of greenhouse gases. The greenhouse gases are gases in the atmosphere that have the ability to absorb and retain solar radiation reflected by the earth which cause the increasing of earth surface temperature. According to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), there are 6 types of gases that is classified as GHG, among other: carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), dinitro oxide (N₂O),

sebagai gas rumah kaca, antara lain: karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitro oksida (N_2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF_6).

Emisi Karbon dioksida (CO_2)

Perkiraaan emisi CO_2 yang dihitung dalam publikasi ini adalah emisi CO_2 dari bahan bakar memasak dan emisi CO_2 dari kendaraan bermotor. Perkiraaan emisi CO_2 dari bahan bakar memasak oleh rumah tangga dihitung berdasarkan emisi dari penggunaan bahan bakar gas, minyak tanah dan kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Secara umum emisi CO_2 yang terbesar dihasilkan dari kayu bakar, kemudian minyak tanah dan gas.

Pada rentang tahun 2008-2010, perkiraan emisi CO_2 dari bahan bakar gas untuk memasak naik sebesar 6,08 juta ton, yaitu dari 4,96 juta ton pada tahun 2008 menjadi 11,04 juta ton pada tahun 2010, atau naik sekitar 123 persen dibandingkan tahun 2008. Perkiraan emisi CO_2 dari bahan bakar minyak tanah untuk memasak mengalami penurunan sebesar 10,59 juta ton atau turun sebesar 64 persen. Sementara emisi CO_2 yang dihasilkan kayu bakar untuk memasak mengalami kenaikan sebesar 6,75 juta ton atau sebesar 4,52 persen.

Perkiraan emisi CO_2 yang berasal dari penggunaan kendaraan bermotor dikontribusikan oleh emisi CO_2 yang berasal dari pemakaian bahan bakar bensin dan solar. Emisi CO_2 yang berasal dari kendaraan bermotor dalam rentang tahun 2006-2010 cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Emisi CO_2 dari kendaraan bermotor pada tahun 2010 tercatat sebesar 96,05 juta ton yang terdiri dari emisi CO_2 dari bensin sebesar 53,88 juta ton dan emisi CO_2 dari solar sebesar 42,18 juta ton (Tabel 4.7.2).

hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulfur hexafluoride (SF_6).

Carbon Dioxide (CO_2) Emissions

Estimation of CO_2 emissions that calculated in this publication are CO_2 emission from using of fuel for cooking and CO_2 emission from motorized vehicle. Estimation of CO_2 emissions from cooking fuel was calculated by estimating the emission from the use fuel for cooking which includes using gases, kerosene and firewoods. Generally, the biggest CO_2 emission from firewood shared the biggest contribution, followed by kerosene and gas.

During 2008-2010, the estimation of CO_2 emissions from gas fuel for cooking increased 6.08 million tons, from 4.96 million tons in 2008 to 11.04 million tons in 2010, or had increased around 123 percent compared with 2008. The estimation of CO_2 emission from kerosene decrease 10.59 million tons, or decrease around 64 percent. While the CO_2 emission from firewood increase 6.75 million tons, or increase around 4.52 percent.

The estimate of CO_2 emission from motorized vehicle is contributed mainly by emission of CO_2 from the use of diesel fuel and gasoline fuel. The estimate of CO_2 emission from motorized vehicle during 2006-2010 tends to increase along with the increasing number of motorized vehicle. The CO_2 emission from motorized vehicle in 2010 reached the total number of 96.05 million tons that was contributed by CO_2 emission of gasoline fuel around 53.88 million tons and CO_2 emission of diesel fuel around 42.18 million tons (Table 4.7.2).

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Emisi CO₂ dari kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2010 terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan total emisi mencapai 14,78 juta ton. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Sementara emisi CO₂ dari kendaraan bermotor terkecil terdapat di Provinsi Maluku Utara dengan total emisi 49,9 ribu ton.

Emisi Gas Metana (CH₄)

Metana (CH₄) adalah salah satu gas rumah kaca di atmosfer bumi yang dapat memantulkan kembali sinar inframerah. Akumulasi dari besarnya sinar infra merah yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi menyebabkan suhu bumi semakin panas yang selanjutnya dapat merubah sistem iklim bumi. Salah satu penyumbang emisi gas metana berasal dari fermentasi yang terjadi dalam sistem pencernaan hewan ruminansia seperti sapi, kerbau dan domba.

Emisi CH₄ dihitung berdasarkan perkiraan emisi yang dikontribusikan oleh hewan ternak dan unggas. Pada tahun 2011, emisi CH₄ dari hewan ternak diperkirakan mencapai 1,06 juta ton dan emisi CH₄ dari unggas diperkirakan mencapai 31,13 ribu ton. Emisi CH₄ dari ternak yang tertinggi pada tahun 2011 terdapat di Provinsi Jawa Timur (275,23 ribu ton), sedangkan emisi CH₄ dari hewan unggas yang tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat (11,79 ribu ton).

Bahan Perusak Ozon

Lapisan ozon perlu dilindungi dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mengandung klorin dan bromine. Sampai saat ini BPO masih digunakan secara luas pada berbagai kegiatan industri dan domestik. BPO masih banyak digunakan pada sektor-sektor

The highest CO₂ emission from motorized vehicle in 2010 was DKI Jakarta Province with total emission reached 14.78 million tons. It was due to the high number of motorized vehicle in DKI Jakarta Province. Meanwhile, the lowest CO₂ emission from motorized vehicle was in Maluku Utara Province with the total number of 49.9 thousand tons.

Methane (CH₄) Emissions

Methane (CH₄) is one of the greenhouse gases in the earth's atmosphere that can reflect infrared rays back. The accumulation of the magnitude of infrared light that is reflected back into the earth's surface causes the temperature of the earth getting hotter which in turn can alter the earth's climate systems. One of contributor to methane emissions is fermentation process that takes place in the digestive systems of ruminant animals such as cows, buffalo, and sheep.

The emission of CH₄ is estimate based on emission which is contributed by livestocks and poutries. In 2011, the emission of CH₄ estimated from livestock reached around 1.06 million tons and the emission of CH₄ which were contributed by poutries reached 31.13 thousand tons. The highest CH₄ emission from livestock in 2011 was in Jawa Timur Province with 275.23 thousand tons, while the highest CH₄ emission from poutries was in Jawa Barat Province with 11.79 thousand tons.

Ozone Depleting Substance (ODS)

Ozone layer need to be protected from damage due to the use of chemicals substances containing chlorine and bromine. ODS is widely used for various industrial and domestic activities. ODS is still used widely in sector of aerosol, foam, halon, metal bromide, refrigerator, and solvents.

aerosol, foam, halon, metal bromide, refrigerasi, dan pelarut.

Jenis bahan perusak ozon ditentukan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 24/M-DAG/PER/6/2006. Walaupun sudah ada larangan untuk menggunakan BPO, tetapi masih ada yang mengimpor BPO dalam jumlah terbatas. Impor BPO dapat dilihat pada Tabel 4.7.4.

Konsentrasi Gas SO₂ dan NO₂

Pengukuran rata-rata bulanan konsentrasi gas SO₂ dan NO₂ dilakukan BMKG. Berdasarkan PP No 41 Tahun 1999, nilai ambang batas untuk SO₂ adalah sebesar 365 µg / Nm³ untuk waktu pengukuran selama 24 jam sedangkan nilai ambang batas NO₂ adalah 150 µg / Nm³ untuk waktu pengukuran selama 24 jam. Nilai ambang batas SO₂ yang telah dikonversikan adalah 0,14 ppm/24 jam, sedangkan nilai ambang batas NO₂ yang telah dikonversikan adalah sebesar 0,08 ppm/24 Jam. Hasil pengukuran konsentrasi gas SO₂ di stasiun Kemayoran Jakarta selama tahun 2011 tercatat tidak ada yang melewati ambang batas yang sudah ditetapkan. Sementara hasil pengukuran konsentrasi gas NO₂ pada tahun 2011 yang hanya tercatat sampai bulan Agustus, tidak ada yang melewati ambang batas yang sudah ditetapkan (Tabel 4.7.5).

4.8. Lahan

Sumber daya lahan merupakan salah satu modal pembangunan di berbagai bidang termasuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Lahan merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu informasi

The type of ODS is according to Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 24/M-DAG/PER/6/2006. Although there had been a ban for using ODS, but Indonesia still imports ODS in limited quantities. Imports of ODS were presented on Table 4.7.4.

SO₂ and NO₂ Concentration

The measurement of monthly average concentration of SO₂ and NO₂ conducted by the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG). Based on PP No 41 Tahun 1999, the threshold values for the SO₂ is 365 µg / Nm³ for time measurement for 24 hours while for NO₂ is 150 µg / Nm³ for time measurement for 24 hours. SO₂ threshold value that has been converted is 0.14 ppm/24hours, while for NO₂ is 0.08 ppm/24hours. The result of the measurements of SO₂ gas concentration at Kemayoran Station Jakarta in 2011 shows there is no concentration over the threshold value. While the measurement of NO₂ gas concentration in 2011, which is only recorded until August, show there is no concentration over the threshold value (Table 4.7.5).

4.8. Land

Land resources is one of the capital of development in any sectors including agriculture, estate crops, and forestry. Land is a resource that is needed by people in order to meet the needs of life and improve their welfare. Therefore, information about land use change that protected or productive is important to facilitate sustainable

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

tentang perubahan penggunaan sumber daya lahan yang dilindungi atau produktif menjadi penting untuk memfasilitasi perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Secara ekonomi, perubahan penggunaan lahan dapat mengakibatkan perubahan dalam produksi pertanian dan mempengaruhi kesempatan kerja. Dari sudut pandang lingkungan, penggunaan lahan yang tidak mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam degradasi lahan, dapat menimbulkan ancaman terhadap ekosistem, dan menyebabkan hilangnya habitat alami dan perubahan lanskap lahan.

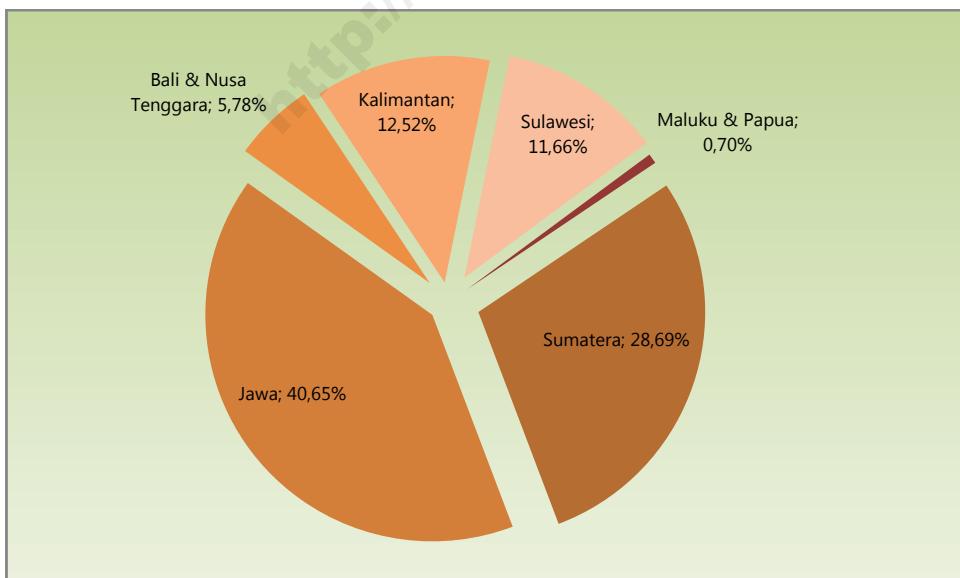
Data lahan yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari lahan sawah yang ditanami padi (irigasi dan non irigasi) dan lahan bukan sawah (lahan tegal/kebun, ladang/huma dan lahan yang sementara tidak diusahakan). Selama periode 2006-2010, luas lahan sawah mengalami

land use planning and as policy making.

Economically, land use change will result changes in agricultural production and influence employment opportunities. From the environmental point of view, unsustainable land use is a major factor in land degradation, threatening the environment and leads to landscape changes and natural habitat loss.

The data of lands are presented in this publication consists of paddy cultivated wetland (irrigated and non irrigated) and agricultural dryland. Agricultural dryland covers only dryfield/garden, unirrigated agricultural field/shifting cultivation land and temporally unused land. In

Gambar 4.8. Distribusi Lahan Sawah Menurut Pulau (persen), 2010
Figure 4.8. Distribution of Wetland by Island (percent), 2010



Sumber / Source : Luas Lahan Menurut Penggunaan, BPS / Land Area by Utilization, BPS-Statistics Indonesia

peningkatan, yaitu dari 7,79 juta hektar pada tahun 2006 menjadi 8,00 juta hektar pada tahun 2010. Lahan sawah di Pulau Jawa pada tahun 2010 seluas 3,25 juta hektar (40,65 persen) dan di luar jawa seluas 4,75 juta hektar (59,35 persen). Lahan sawah terluas di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Timur (1,11 juta hektar) dan di luar Jawa terdapat di Propinsi Sumatera Selatan (0,61 juta hektar).

Jika dilihat menurut pulau, lahan sawah terluas berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan persentase terhadap total luas lahan sawah di Indonesia masing-masing sebesar 40,65 persen dan 28,69 persen. Sedangkan persentase lahan sawah terkecil terdapat di Pulau Maluku dan Papua, yaitu hanya 0,70 persen dari total lahan sawah (Gambar 4.8). Sementara lahan pertanian bukan sawah meliputi lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Luas lahan pertanian bukan sawah tersebut pada tahun 2010 masing-masing sebesar 11,88 juta hektar; 5,33 juta hektar dan 14,76 juta hektar.

Hutan

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan karena hutan mempunyai manfaat yang amat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia dan membantu mengurangi percepatan pemanasan global. Pengelolaan hutan secara bijak untuk berbagai penggunaan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penafsiran citra satelit landsat dan data luas wilayah provinsi, luas hutan mencapai sekitar 47,67 persen dari daratan di Indonesia (Tabel 4.8.5). Provinsi yang memiliki

2006-2010, wetland area was increasing from 7.79 million hectare in 2006 to 8.00 million hectare in 2010. The wetland area in 2010 spreads in Java Island that cover the area of 3.25 million hectare (40.65 percent) and the outside Java was covering the area of 4.75 million hectare (59.35 percent). The largest area of wetland in Java Island located in Jawa Timur Province (1.11 million hectare) and outside Java located in Sumatera Selatan Province (0.61 million hectare).

If seen by island, the island of Java and Sumatera share greater proportion from the total area of wetland in Indonesia, which were 40.65 percent and 28.69 percent. While the island of Maluku and Papua share the smallest wetland area which were 0.70 percent (Figure 4.8). Meanwhile, dryland agricultural area includes dryfield/garden, shifting cultivation land, and temporarily unused land. That area of dryland agricultural area in 2010 were cover an area of 11.88 million hectare, 5.33 million hectare, and 14.76 million hectare.

Forest

Forest has an important role in supporting development because forest has enormous benefits for the prosperity and welfare. Forest can also make a major contribution to sustainable development around the world and reduce global warming. Wise forest management for a variety of uses are essential for achieving sustainable development.

Based on the interpretation of satellite image landsat and the data of province area, the percentage of forest area reached the total number of 47.67 percent (Table 4.8.5). Province with the

persentase hutan terbesar berturut-turut yaitu Provinsi Papua Barat (86,73 persen) dan Papua (80,34 persen). Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki persentase luas hutan per luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia yaitu hanya 0,15 persen dan 3,80 persen.

4.9 Laut dan Pesisir

Pembangunan di wilayah laut dan pesisir memiliki dampak terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, manfaat yang banyak diperoleh dari akses ke laut, pesisir, perikanan, pariwisata dan rekreasi mengakibatkan pembangunan pemukiman penduduk sering kali terkonsentrasi di zona pesisir dari pada di tempat lain. Saat ini sekitar 40 persen dari populasi dunia tinggal dan bermukim dalam jarak 100 kilometer dari pantai. Meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di zona pesisir mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir juga meningkat. Penduduk yang tinggal di daerah pesisir atau daerah yang berbatasan langsung dengan laut rentan terhadap bencana seperti kenaikan permukaan laut, badai, dan gelombang tsunami.

Tekanan terhadap wilayah laut dan pesisir yang sering terjadi adalah konversi habitat, perubahan tutupan lahan, dan beban polutan. Tekanan ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, pemutihan terumbu karang, penyakit baru diantara organisme, hipoksia, munculnya alga berbahaya, pelumpuran, kualitas air berkurang dan ancaman bagi kesehatan manusia melalui racun pada ikan, kerang dan patogen seperti kolera dan hepatitis A yang berada pada air tercemar.

highest percentage of forest area are province of Papua Barat (86.73 percent) and Papua (80.34 percent). While DKI Jakarta and DI Yogyakarta are provinces with the smallest percentage of forest area to province area with 0.15 and 3.80 percent.

4.9 Marine and Coastal

Development in marine and coastal areas has had impact on economic, social, and environmental sectors. Economically, the benefit that derived from access to ocean, coastal, fisheries, tourism and recreation, caused human settlements are often more concentrated in the coastal zone than elsewhere. Presently about 40 percent of the world's population lives within 100 kilometers of the coast. An increasing population density and economic activities in the coastal zone, the pressure on coastal ecosystems is also increase. People who live in coastal zones or area which is adjacent to the sea are vurnerable to disaster such the rising of sea level, storm surges, and tsunamis.

Pressures to the marine and coastal areas that often happens are habitat conversion, land cover change, and pollutant loads. These pressure lead to biodiversity loss, coral reef bleaching, new diseases among organisms, hypoxia, harmful algae bloms, siltation, water quality degradation, and threat to human health through toxin in fish, shellfish and pathogens such as cholera and hepatitis A residing in poluted water.

Desa Pesisir

Desa pesisir adalah desa yang berbatasan langsung dengan laut. Berdasarkan hasil Sensus Potensi Desa tahun 2011, jumlah desa di Indonesia tercatat sebanyak 78.609 desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 66.725 desa merupakan desa non pesisir, sedangkan sisanya 11.884 desa merupakan desa pesisir atau sekitar 15,12 persen dari total desa yang ada. Persentase desa pesisir tertinggi berturut-turut terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (84,70 persen) dan Provinsi Maluku (83,89 persen). Sumatera Selatan adalah propinsi dengan persentase desa pesisir terendah yaitu 1,07 persen (34 desa pesisir dari 3.152 desa)

Kawasan Konservasi Laut

Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah wilayah perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya dibawahnya yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut. Secara umum, tujuan dari pengelolaan kawasan konservasi laut adalah untuk konservasi habitat dan proses-proses ekologi, serta perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

Indonesia memiliki 31 kawasan konservasi laut dengan luas 4,7 juta hektar pada tahun 2010 (Tabel 4.9.2). Kawasan konservasi laut tersebut terdiri dari cagar alam (6 unit), suaka margasatwa (4 unit), taman wisata alam (14 unit), dan taman nasional (7 unit). Masing-masing kawasan konservasi mempunyai luas yang berbeda-beda, untuk kawasan cagar alam mempunyai luas

Coastal Village

Coastal village is village which is adjacent to the sea. Based on data from Village Potential Cencus in 2011, the number of villages in Indonesia reaches the total number of 78,609 villages. From that figure, the non-coastal villages reach the number of 66,725 villages, while the remaining number of 11,884 villages are coastal villages or around 15.12 percent from the total villages. The highest percentage of coastal villages dominated by Province of Kepulauan Riau (84.70 percent) and followed by Maluku Province (83.89 percent). Sumatera Selatan is province with the smallest percentage of coastal villages with 1.07 percent (34 coastal villages from 3,152 villages).

Marine Conservation Area

Marine conservation area is a region of coastal and marine water including small islands which include plants and animals in it, including historical and socio-cultural sites underneath, which is protected by law or other effective means, either by protecting all or part of the region. Generally, the purpose of management of marine conservation areas is to conserve habitats and ecological processes, and protection of resource values so that the activities of fisheries, tourism, research, and education can be implemented in sustainable manner.

Indonesia has 31 marine conservation area with constituted an area of 4.7 million hectare (Table 4.9.2). Marine conservation area consist of strict nature reserves (6 units), wildlife sanctuaries (4 units), nature recreational park (14 units), and national park (7 units). Each conservation areas cover uneven area coverage. The strict nature reserve constituted the total area

154,61 ribu hektar, suaka margasatwa 5,59 ribu hektar, taman wisata alam 491,25 ribu hektar, dan taman nasional 4,04 juta hektar.

of 154.61 thousand hectare, the wildlife sanctuary 5.59 thousand hectare, nature recreational park 491.25 thousand hectare, and national park 4.04 million hectare.

Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir dan laut tropis. Terumbu karang memiliki peranan yang sangat besar, seperti sebagai habitat untuk daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), dan sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya. Eksosistem terumbu karang dikenal memiliki spesies yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya variasi habitat yang terdapat di dalam ekosistem terumbu karang. Spesies yang paling banyak dijumpai di terumbu karang adalah ikan. Oleh karena itu peranannya sangat menunjang sektor perikanan karang.

Berdasarkan laporan analisa lingkungan Indonesia tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, terumbu karang yang terdapat di Indonesia mencapai 18 persen dari total terumbu karang yang ada di dunia. Kondisi terumbu karang yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan. Kerusakan terumbu karang antara lain disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang membahayakan, penambangan terumbu karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan proses sedimentasi yang diakibatkan erosi di bagian hulu sungai.

Luas terumbu karang di Indonesia pada tahun 2011 tercatat seluas 1,29 juta hektar. Dari luas terumbu karang yang teridentifikasi, terumbu karang yang berada dalam kondisi baik mencapai 44,37 persen, kondisi sedang 25,99 persen, dan kondisi rusak mencapai 25,01 persen. Selain itu,

Coral Reef

Coral reef ecosystems are unique ecosystems found in coastal regions and tropical seas. Coral reefs have an ultimate role such as a habitat for local upbringing (nursery ground), foraging (feeding ground), and as a place of spawning (spawning ground) for a variety of biota that live in coral reefs or surrounding area. Coral reef ecosystems are known to have high economic value species. This is due to the large variety of habitats found in the coral reefs ecosystem. Species that are most found on coral reefs is fish, therefore, the role is to support the fisheries sector, especially the coral fishery.

Based on the Indonesian Environmental Analysis Report issued by the World Bank in 2009, coral reefs were found in Indonesia reached 18 percent of coral reef in the world. Presently the condition of coral reef is quite alarming damage. Damage of coral reefs caused by harmful fishing practice, coral mining, coastal reclamation, tourism and sedimentation process caused erosion in the upstream river.

The coral reefs in Indonesia in 2011 are recorded cover the area of 1.29 million hectare. From the identified coral reef area which is in good condition cover around 44.37 percent, while in moderate condition around 25.99 percent and in damage condition around 25.01 persen. Beside

terdapat terumbu karang yang tidak diketahui kondisinya yaitu sekitar 4,63 persen (Tabel 4.9.3).

4.10. Air Tawar

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan manusia, sehingga merupakan salah satu modal dasar dan faktor utama pembangunan berkelanjutan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Air perlu dilestarikan melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran dengan memperhatikan keseimbangan ekologisnya untuk kepentingan generasi saat ini dan akan datang.

Penyediaan air bersih untuk penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan penduduk, serta berperan dalam meningkatkan standar atau kualitas hidup penduduk. Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk penduduk di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat, masalah kualitas air baku dan kuantitas yang sangat fluktuatif pada musim hujan dan musim kemarau.

Kuantitas air

Berdasarkan survei tahunan perusahaan air bersih yang dilaksanakan oleh BPS, volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih kepada pelanggan pada tahun 2006 adalah sebesar 3,79 miliar meter kubik, sedangkan pada tahun 2010 air bersih yang disalurkan adalah sebesar 2,44 miliar meter kubik. Volume air bersih terbesar yang disalurkan perusahaan air

that, there are unknown coral reef condition in Indonesia cover around 4.63 percent (Table 4.9.3).

4.10. Freshwater

Water is natural resources that plays significant role for the people in order to promote the public welfare, also role for the basic fundamental capital and the main factor of sustainable development. Water is an important environmental component to the survival of humans and other living creatures. Water should be conserved through quality management and population control by considering it's ecological balance for the benefit of todays and next generation.

Clean water supply for population has a very important role in improving the health of the environment and population, as well as improving the standard or quality of life for the population. Recently, the clean water supply to population in Indonesia is still faced several problems. These problems include the low level of water availability service to the community, the quantity and quality of raw water, and the highly volatile during the rainy season and dry season.

Water Quantity

Based on the annual survey of clean water establishment, which are conducted by BPS, the volume of clean water that distributed by water supply establishment to customers in 2006 as much as 3.79 billion cubic meters, while in 2010 the distributed clean water as much as 2.44 billion cubic meters. The largest volume of clean water distributed by water supply establishment

bersih selama tahun 2010 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (417,98 juta meter kubik) dan Jawa Timur (368,92 juta meter kubik). Sedangkan volume air bersih terkecil yang disalurkan perusahaan air bersih terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,36 juta meter kubik)

Jumlah pelanggan perusahaan air bersih yang dilayani pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 9,57 juta pelanggan. Pelanggan perusahaan air bersih terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (1,53 juta pelanggan), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (1,39 juta pelanggan), dan Provinsi DKI Jakarta (1,20 juta pelanggan).

Kualitas Air

Penentuan kualitas air berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang terdiri dari parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Parameter fisika terdiri dari suhu, residu terlarut, dan residu tersuspensi. Parameter kimia organik terdiri dari minyak dan lemak, deterjen, dan senyawa fenol. Parameter kimia anorganik diantaranya adalah pH, besi, timbal, mangan, sulfat, BOD, dan COD. Parameter mikrobiologi terdiri dari fecal coliform dan total coliform. Parameter radioaktivitas terdiri dari Gross-A dan Gross-B.

Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah banyaknya oksigen yang diperlukan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri, sementara *Chemical Oxygen Demand (COD)* adalah banyaknya oksigen yang digunakan dalam reaksi kimia oleh bakteri. Konsentrasi BOD dan COD yang tinggi di perairan sungai mengindikasikan tingginya pencemaran dari bahan organik di sungai tersebut. Pada tahun 2011, kandungan

during 2010 were DKI Jakarta Province (417.98 million cubic meters) and Jawa Timur Province (368.92 million cubic meters). While the least volume of clean water distributed by water supply establishment was Kepulauan Bangka Belitung Province (3.36 million cubic meter).

The number of customers which were served by the water supply establishment in 2010 reach 9.57 million customers. The highest number of customer was in Jawa Timur Province (1.53 million customers), followed by Jawa Barat (1.39 million customers), and DKI Jakarta (1.20 million customers).

Water Quality

Water quality is regulated according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 Year 2001 on Water Quality Management and Water Pollution Control, that consists of characteristics of physical parameters, inorganic chemistry, organic chemistry, and radioactivity of water. Physical parameters consist of temperature, the residue dissolve, and suspended residue. The chemical organic parameter includes: oil and grease, detergents and phenol compound. Chemical inorganic includes: pH, iron, lead, manganese, sulfate, BOD, and COD. Microbiological consists of fecal coliform and total coliform. Gross radioactivity consists of gross-A and gross-B.

Biochemical Oxygen Demand (BOD) is the amount of oxygen required by bacteria for oxidation reaction, while *Chemical Oxygen Demand (COD)* the amount of oxygen used in chemical reactions by bacteria. The concentration of BOD and COD are high on the river water indicating contamination of organic matters. In 2011, the maximum of BOD on the river water in major cities in Indonesia was above the maximum

maksimum BOD pada air sungai di beberapa kota di Indonesia semua berada di atas ambang batas maksimum 2 mg/L. Sementara kandungan maksimum COD pada air sungai di beberapa kota di Indonesia yang berada di bawah ambang batas yang ditetapkan 10 mg/L hanya terdapat di Sungai Lariang, Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.10.3.

4.11 Keanekaragaman Hayati

Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keragaman berbagai makhluk hidup mulai dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme termasuk gen yang dimiliki serta ekosistem yang menjadi lingkungan hidupnya. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor di kehidupan manusia. Manusia mengantungkan hampir sebagian besar kebutuhan hidupnya dari keragaman sumber daya alam, baik yang sudah dibudidayakan maupun yang masih alami dan liar sebagai sumber makanan, obat-obatan dan produk industri.

Di Indonesia, sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi mengandalkan potensi keanekaragaman hayati yang tersedia. Oleh karena itu keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa. Sejauh ini masyarakat Indonesia memanfaatkan keanekaragaman hayati tanpa memperhatikan keberlanjutannya di masa yang akan datang sehingga terjadi kemerosotan keanekaragaman hayati. Kurangnya pengetahuan dan informasi menjadi salah satu penyebabnya.

threshold of 2 mg/L. While the maximum of COD on the river water in major cities in Indonesia which was below the maximum threshold of 10 mg/L only in the Lariang River, Sulawesi Tengah Province. The Measurement of other river can be seen from the Table 4.10.3.

4.11 Biodiversity

Indonesia is one of the seven countries with the highest biodiversity in the world. Biodiversity can be defined as the diversity of the various living beings from animals, plants, and microorganisms including genes possessed and its ecosystems. Biodiversity plays an important role in various sectors of human life. Humans rely most of their daily needs of a diversity of natural resources, both of which have been developed and are still in the form of natural and wild as source of food, pharmaceuticals and industrial products.

In Indonesia, most of the economic development activities rely on the availability of biodiversity potential. Therefore, biodiversity is an asset to the development and prosperity of the nation. So far the people of Indonesia utilize biodiversity regardless of sustainability in the future resulting in deterioration of biodiversity. Lack of knowledge and information to be one of the causes.

Kawasan Konservasi Daratan

Untuk menjaga serta mempertahankan keanekaragaman hayati, pemerintah telah menetapkan kawasan-kawasan tertentu menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi daratan merupakan wilayah daratan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi daratan di bagi atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan rakyat, dan taman buru. Total luas kawasan konservasi daratan pada tahun 2010 mencapai sekitar 22,51 juta hektar (Tabel 4.11.1). Kawasan konservasi daratan didominasi oleh taman nasional yang mencapai 54,76 persen, diikuti oleh suaka margasatwa (22,32 persen), dan cagar alam (19,24 persen).

Spesies Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi

Jenis dan ragam satwa yang dilindungi ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan. Satwa yang dilindungi terdiri dari 8 kelas yaitu *Mamalia* (127 spesies), *Aves* (382 spesies), *Reptilia* (31 spesies), *Pisces* (9 Spesies), *Insecta* (20 spesies), *Crustacea* (2 spesies), *Anthozoa* (1 spesies) dan *Bivalvia* (12 Spesies). Data mengenai spesies satwa yang dilindungi selama tahun 2000-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.11.2. Seperti halnya jenis satwa, jenis tumbuhan yang dilindungi juga ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan. Tumbuhan yang dilindungi terdiri dari 6 kelas yaitu *Palmae* (12 spesies), *Rafflesia* (11 spesies), *Orchidaceae* (29 spesies), *Nephentaceae* (8 spesies), *Dipterocarpaceae* (13 spesies), *Araceae* (2 spesies).

Land Conservation Area

To protect and preserve biodiversity, the government has set certain areas as conservation area. Land conservation area is an area of land with typical characteristics with main function to conserve biodiversity and ecosystem. Land conservation area consists of strict nature reserve, wildlife sanctuary, national park, nature recreational park, grand forest park and hunting park. The total area of land conservation in 2010 was 22.51 million hectare (Table 4.11.1). The land conservation area was dominated by area of national park (54.76 percent), followed by wildlife sanctuary (22.32 percent), and strict nature reserve (19.24 percent).

Protected Species of Fauna and Flora

*The type and variety of protected fauna are regulated by the decree of Minister of Forestry. Protected fauna consist of 8 classes, which are: *Mamalia* (127 species), *Aves* (382 species), *Reptilia* (31 species), *Pisces* (9 species), *Insecta* (20 species), *Crustacea* (2 species), *Anthozoa* (1 Species) and *Bivalvia* (12 species). Data on protected species of fauna in the period of 2000-2011 are presented in Table 4.11.2. Similar with protected fauna, the variety of protected flora are also regulated by the decree of Minister of Forestry. Protected flora consist of 6 classes, which are: *Palmae* (12 species), *Rafflesia* (11 species), *Orchidaceae* (29 species), *Nephentaceae* (8 species), *Dipterocarpaceae* (13 species), *Araceae* (2 species).*

4.12. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan usaha atau proses untuk meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini maka pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali tanpa memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan sehingga membawa dampak negatif tidak hanya bagi alam tetapi juga bagi masyarakat.

Tuntutan percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Indonesia, juga menuntut lebih banyak sumber daya alam yang harus diambil untuk modal pembangunan. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan ini dapat merusak dan mengurangi persediaan sumber daya alam. Percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti pula oleh peningkatan sektor industri yang pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran lingkungan akibat polusi dan sisa limbah produksi yang tidak teratas secara benar. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang identik dengan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung pembangunan ekonomi tentu akan banyak memerlukan lahan. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat lahan yang tersedia sangat terbatas. Namun, dampak negatif dari proses pembangunan ekonomi dapat dikurangi melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Sehingga pembangunan yang kita rasakan sekarang ini juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4.12. Economic Development

Economic development is a process to increase national income and per capita income to achieve the prosperity of the society. To accomplish this goal, the economic development is focused on economic growth. Economic development that is solely devoted to the pursuit of economic growth often regardless the sustainability of nature and environment, so has negative impact not only for nature but also for society.

The needs for accelerating economic growth in Indonesia had taken more natural resources for development capital. Excessive exploitation of natural resources can damage and reduce the stock of natural resources. The accelerated economic growth usually accompanied by the growth of industrial sector which in turn increase natural deterioration due to pollution and unappropriate treatment of production waste. Economic growth is identical to infrastructure development and it is quite certain impact on the needs of land. The alarming condition due to the limited of land available. The negative impact of economic development can be minimize by initiating environmentally economic development. So the development of the perceived present can also be enjoyed by future generations.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ekonomi makro

Salah satu tolok ukur yang biasa dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah adalah produk domestik bruto (PDB). PDB merupakan indikator dasar pertumbuhan ekonomi dan jumlah output ekonomi yaitu mengindikasikan perubahan pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. PDB merupakan indikator pembangunan ekonomi yang ringkas dan kuat, tetapi memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan yang timbul dari konsumsi dan produksi.

Pertumbuhan produksi barang dan jasa merupakan penentu dasar bagi manajemen ekonomi. Dengan mengalokasikan total produksi pada setiap penduduk, menunjukkan sejauh mana total produksi suatu negara dapat dibagi dengan penduduknya. Nilai PDB perkapita diperoleh dengan membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.

Selama periode 2006-2011, PDB perkapita atas dasar harga berlaku penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari Rp. 14.991,1 ribu pada tahun 2006 menjadi Rp. 30.813,0 ribu pada tahun 2011. PDRB perkapita tertinggi selama tahun 2006-2011 selalu dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian Rp. 105.849,2 ribu pada tahun 2011. Sedangkan peringkat kedua dan ketiga berturut-turut dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 100.985,3 dan Rp. 72.030,5 ribu.

Tabungan Bruto

Tabungan bruto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan

Macro Economic

The measuring rod which is commonly used to measure the achievement in economic development for a country or region is gross domestic product (GDP). GDP is a basic economic growth indicator and total of economic output that reflects changes in total production of goods and services in a country. GDP is a powerful summary indicator of economic development, even though it does not account for social and environmental cost of production and consumption.

The production growth of goods and services are the basic determinator of economic cost. By allocating the total production to every people shows the performance of economic growth for each of its people. Per capita GDP are obtained by dividing GDP at current market prices by population

During the period 2006-2011, per capita GDP at current market price of Indonesia experienced significant increases from 14,991.1 thousand rupiah in 2006 to 30,813.0 thousand rupiah in 2011. Province with the highest per capita GDP from 2006-2011 was achieved by Kalimantan Timur Provinces with 105,849.2 thousand rupiah in 2011. While in the second place was DKI Jakarta Province with 100,985.3 thousand rupiah, and the third followed by Riau Province with 72,030.5 thousand rupiah.

Gross Savings

Gross savings is the difference between incomes and expenditure from economic activities

ekonomi ditambah penyusutan barang modal. Penerimaan meliputi pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). Pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll) dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Indikator ini mengukur bagian dari pendapatan yang tersedia untuk investasi atau mungkin untuk transfer modal ke seluruh dunia. Hal ini memberikan informasi yang penting tentang cara pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di dalam negeri.

Pada periode tahun 2006-2011, tabungan bruto selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 848,3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 2.096,6 triliun pada tahun 2010. Apabila dilihat berdasarkan sektor, maka sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan tabungan bruto adalah subsektor bisnis yang menyumbang sebesar Rp. 1.357,7 triliun pada tahun 2010 terhadap besaran tabungan bruto.

Investasi mencerminkan masukan modal yang diperlukan dalam mendorong proses pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi baik berupa investasi domestik maupun luar negeri dapat berdampak pada peningkatan kinerja sektoral. Indikator ini berhubungan dengan proses dan pola aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan elemen penting dari proses pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan jumlah modal produktif rendah yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi global.

Peningkatan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi akan memperkuat daya tahan perekonomian indonesia dari berbagai gejolak. Terjaganya stabilitas makro ekonomi

added with the contraction of capital goods. Incomes includes earning from selling goods and service, incomes from production factors (wages/salary, dividend, interest, rent, etc), and current transfer (subsidy, taxes, foreign aids, and pension). Expenditure include consumption expenditure, current transfer (such as taxes, etc), and other expenditure (except expenditure for production activity) such as dividend and interest payment. The indicator measures the part of income available or, possibly, capital transfer to the rest of the world. It provides important information on domestic means of implementation for sustainable development.

During the period of 2006-2011, the gross saving shows increase trend from 843.3 trillion rupiah in 2006 to 2,096.6 trillion rupiah in 2010. The gross saving was contributed significantly by private enterprises sector which was contributes 1,357.7 trillion rupiah in 2010.

Investment reflects the capital input to support the process of economic development of a country. Investment either domestic or foreign investment have an impact on improving sectoral performance. This indicator related to the processes and pattern of economic activities. It is an important element of the sustainable development process in developing countries with small amount of productive capital which aimed to increase partnership in the global economy.

Increasing the investment share in economic growth will strengthen the Indonesia's economic resilience from shocks. Maintaining macroeconomic stability and improved economic

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

dan prospek perekonomian yang membaik akan mendorong kegiatan investasi di dalam negeri.

Peranan investasi dalam pembentukan PDB selalu mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2005 peran investasi mencapai 25,08 persen, kemudian meningkat menjadi 32,77 persen pada tahun 2011. Kondisi seperti ini menunjukkan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang makin baik. Meskipun sumbangan yang diberikan masih relatif kecil terhadap pembentukan PDB, namun investasi tetap mempunyai peranan penting dalam permintaan agregat.

Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi tidak dapat diukur hanya dengan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Saat terjadi inflasi, daya beli uang akan menurun, sehingga biaya hidup masyarakat pun menjadi tinggi. Tingkat inflasi yang berfluktuasi menggambarkan besarnya ketidakpastian arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode tahun 2006-2011, secara nasional laju inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006-2008 laju inflasi lebih tinggi dibanding tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa imbas krisis moneter masih terasa. Pada tahun 2008, laju inflasi mengalami kenaikan sampai dua digit yaitu 11,06 persen. Pada tahun 2010 dan 2011, laju inflasi mengalami penurunan. Laju

prospects will drive investment activities in the country.

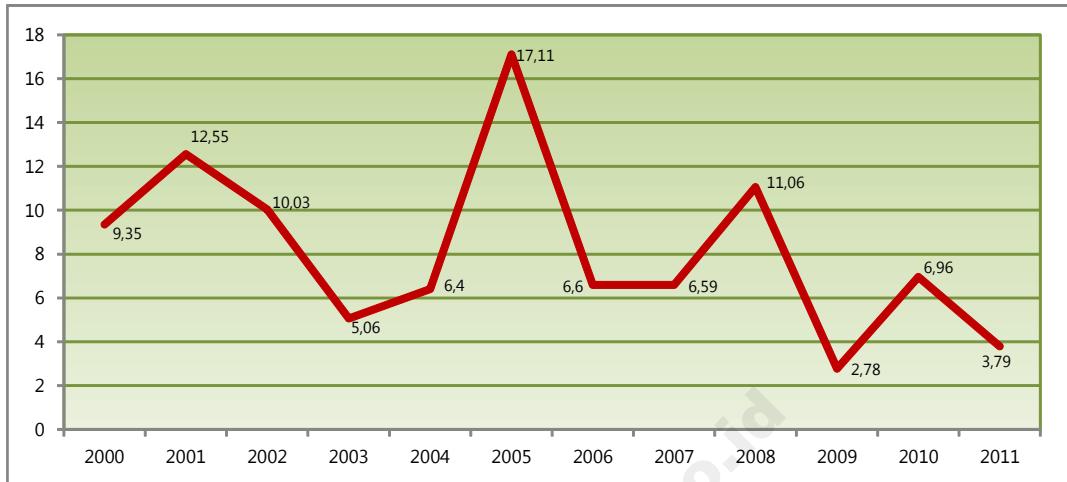
The investment share in GDP had experienced growth in the last six years. In 2005, the investment share reached 25.08 percent and this figure reach 32.77 percent in 2011. This condition showed the better investment climate in Indonesia and reflected the economic growth and better growth of per capita income. Although this figure was relatively small contribution to generate GDP, however the investment had a significant role in aggregate demand.

Inflation

Inflation is a process of continuous increase in the price of most goods and services. Inflation cannot be measured by an increase in the price of one or two products, except the increasing of price cause an increasing price of other goods and services in the economy. Inflation occurrences cause the decreasing of purchasing power of money which in turn impact on the high living cost of society. The fluctuating level of inflation reflect the uncertainty of economic trends and development and lead to false expectation which threatening the economic stability.

During the period of 2006-2011, the national inflation rate in Indonesia experiencing fluctuation state, where during 2006-2008 the inflation rate was higher compare to the successive years. This condition showed the impact of economical crisis still occupied the Indonesia economy. Inflation rate reach double digit in 2008 (11.06 percent). In 2010 and 2011, inflation rate were decline. The low level of inflation in

Gambar 4.9. Laju Inflasi Gabungan 66 Kota¹ (2007=100), 2000-2011
Figure 4.9. Composite Inflation Rate of 66 Cities¹ (2007=100), 2000-2011



Catatan / Note : ¹ Sebelum tahun 2008 merupakan laju inflasi gabungan 45 kota (2002=100) / Prior to 2008, the inflation rate in 45 cities (2002=100)

Sumber / Source : Indikator Ekonomi, BPS / Economic Indicators, BPS-Statistics Indonesia

inflasi yang relatif kecil yang terjadi pada 2010-2011 tersebut bisa dijadikan petunjuk bahwa kemampuan daya beli masyarakat masih cukup bagus, meskipun belum bisa dijadikan pertanda sebagai peningkatan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan.

2010-2011 indicating the purchasing power of the society is in a good condition, yet it can not be generalize as a current potray of Indonesia economic condition.

Keuangan

Pembangunan ekonomi merupakan syarat penting bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara maju. Upaya pembangunan ekonomi di negara berkembang seringkali terkendala kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumber daya modal sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan ini, maka pemerintah berusaha mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman yang tersedia di pasar.

Finance

Economic development is an important requirement for developing countries to minimize economic gap and welfare from developed country. The effort of economic development in developing countries are stumbled due to the scarcity of the productive economic resources, especially capital resources which acts as the development catalyst. In order to meet the capital scarcity, the government tried to borrow capital from abroad through the variety of loan available in the market.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Rasio hutang yang tinggi dan meningkat dapat dilihat sebagai indikasi keuangan publik yang tidak berkelanjutan. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang karena hutang saat ini merupakan beban bagi generasi mendatang.

Rasio pinjaman luar negeri Indonesia terhadap produk nasional bruto (PNB) selama kurun waktu 2006 sampai 2011 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2006, rasio pinjaman luar negeri terhadap PNB tercatat sebesar 36,32 persen. Rasio tersebut terus turun hingga pada tahun 2011 menjadi 28,32 persen. Meskipun begitu, secara absolut hutang luar negeri tiap tahun terus mengalami kenaikan. Menurunnya rasio hutang terhadap PNB tersebut setidaknya bisa memberikan indikasi yang bagus bagi keuangan publik.

Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai orang berusia 15 tahun atau lebih menurut standar Organisasi Buruh Internasional (ILO). Indonesia menggunakan peraturan ini sebagai dasar untuk menentukan batas minimal usia yang tepat untuk mengukur populasi yang aktif secara ekonomi.

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dalam periode tahun 2005-2011 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja mencapai 93,44 persen. Hal ini berarti terdapat sekitar 6,56 persen penduduk usia kerja yang menganggur. Persentase terendah usia 15 tahun keatas yang bekerja terdapat di Provinsi Banten sebesar 86,94 persen.

Selain data mengenai penduduk usia kerja, masalah ketenagakerjaan yang terkait dengan

The high grow of debt ratio can be seen as indication of unsustainable of public financial management. It will cause deteriorating the prosperity and welfare of the society in the future because debt is a burden for future generations.

Indonesia's external debt ratio to Gross National Product (GNP) during the period 2006-2011 tends to declining trends. In 2006, debt ratio to GNP is 36.32 percent. This ratio was continuously declined until reach 28.32 percent in 2011. However, the value of external debt experiencing an increasing trends. The declining trends of debt ratio to GNP at least as indication of a healthy of public financial state.

Employment

The working-age population is defined as a person aged 15 year and over, according to the International Labour Organization (ILO). Indonesia is using these regulation as a basis for determining the appropriate minimum aged as a limit for measuring economically active population.

The percentage of population aged 15 and over who work during 2005-2011 experiencing a rising trends. In 2011, the the percentage of population aged 15 and over who work reach 93.44 percent, thus indicating around 6.56 percent of working-age population were unemployed. The smallest percentage of population age 15 and over who work was in Banten Province with 86.94 percent.

Beside the data of working-age population, the employment issues related to sustainable

pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah data tentang pekerja yang rentan kehilangan perkerjaannya. Pekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu anggota rumah tangga atau pekerja tidak dibayar dianggap sangat rentan. Hal ini dikarenakan mereka pada dasarnya tidak ada pengaturan kerja formal sehingga lebih mungkin untuk memiliki tingkat keamanan pekerjaan rendah dan kekurangan akses terhadap jaminan sosial. Indikator ini memberikan informasi mengenai informalisasi pasar tenaga kerja, yang mungkin berhubungan dengan meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2005-2011 diketahui bahwa persentase pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan di Indonesia cenderung turun dari 58,77 persen pada tahun 2005 menjadi 52,03 persen pada tahun 2011. Persentase pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan tertinggi tercatat di Provinsi Papua (78,57 persen), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (76,45 persen).

Selain indikator diatas, indikator mengenai persentase pekerja wanita di sektor non pertanian juga penting bagi pembangunan karena indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses ke pekerjaan yang dibayar, yang akan mempengaruhi integrasi mereka ke dalam ekonomi moneter. Hal ini juga menunjukkan sejauh mana pasar tenaga kerja terbuka untuk perempuan di sektor industri dan jasa yang mempengaruhi tidak hanya kesempatan kerja yang sama bagi perempuan, tetapi juga efisiensi ekonomi melalui fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kapasitas perekonomian. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender di pasar tenaga kerja sangat penting untuk memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

economic development in are vulnerable employment. Own account working and assisted by household member or unpaid worker are regarded as vulnerable workers as they did not have formal management thus have insecure working condition and gain no access to social security. The vulnerable employment indicator provides information of labor markets informalization, which may be associated with increasing poverty.

Based on data from National Labor Force Survey 2005 to 2011 shows the declining trends of vulnerable employment in Indonesia from 58.77 percent in 2005 to 52.03 percent in 2011. The highest percentage of vurnerable employment occurred in Papua Province (78.57 percent), followed by Nusa Tenggara Timur Province (76.45 percent).

Beside the above indicators, the indicator of percentage of women worker in non agricultural sector is also an important to development because it show the extent to which women have access to paid employment, which will affect their integration into monetary economy. This indicator also indicate the degree to which labour markets are open to women in industry and services sectors which affects not only equal employment opportunities for women but also economic efficiency through flexibility of labour market and the economy's capacity to adapt to changes over time. Promoting gender equality and the empowerment of women thus eliminating all forms of gender-based discrimination in labour markets is essential to poverty eradication and fostering sustainable development.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian pada kurun waktu tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian mencapai 36,67 persen atau mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (36,60 persen). Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase tertinggi buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian yaitu mencapai 44,62 persen.

Teknologi informasi

Internet merupakan suatu sistem distribusi informasi yang bisa menjangkau semua. Internet mempersingkat waktu secara signifikan serta membuka berbagai sumber informasi baru. Internet juga membuka peluang ekonomi baru secara signifikan serta kemungkinan pilihan pasar yang lebih ramah lingkungan. Internet dapat memungkinkan bisnis antar negara dan memfasilitasi penyediaan layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan yang saat ini tidak merata.

Persentase rumah tangga yang mengakses internet selama periode 2006-2011 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, rumah tangga yang mengakses internet tercatat sebesar 26,21 persen (Tabel 4.12.9). Persentase tertinggi rumah tangga yang mengakses internet terdapat di Provinsi DKI Jakarta (56,69 persen), sedangkan persentase terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (10,37 persen).

Telekomunikasi sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terkait erat dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Telekomunikasi juga merupakan faktor penting bagi banyak kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertukaran informasi

The percentage of women workers in non-agricultural sectors during 2007-2011 tended to increase. In 2011, the percentage of women workers in non-agricultural sectors reach 36.67 percent or experienced increased compared with previous year (36.60 percent). Gorontalo is a province with the highest percentage of women workers in non-agricultural sectors that reached 44.62 percent.

Information Technology

Internet is the information distribution system within the reach of all people. Internet is significantly shorten time and open to a diverse resource of new information. Internet also significantly open new economic opportunity and a wider eco-friendly market. Internet enable us to conduct international trades and facilitate basic services such as education and health which is unevenly distributed.

The percentage of households with access to the internet during the period of 2006-2011 experienced a raising trend. In 2011, households with access to the internet reach 26.21 percent. The highest percentage of household with access to the internet was in DKI Jakarta Province (56.69 percent), while the smallest percentage household with access to the internet was Nusa Tenggara Timur Province (10.37 percent).

Telecommunication is critical to support sustainable development and is closely linked to social, economic and institutional development. Telecommunication is also a critical factor for many economic activities and improves exchange of information among citizens. The modern

antar warga. Komunikasi modern dianggap relatif ramah terhadap lingkungan, karena merupakan pengganti potensial untuk transportasi dan relatif rendah terhadap pencemaran lingkungan. Indikator tentang telekomunikasi dapat dilihat dari rumah tangga yang menggunakan telepon tetap dan telepon seluler.

Persentase rumah tangga yang memiliki telepon tetap selama periode 2006-2011 mengalami penurunan dari 11,20 persen pada tahun 2006 menjadi 7,85 persen pada tahun 2011. Hal ini seiring dengan peningkatan pengguna telepon selular.

Selain indikator rumah tangga pengguna telepon tetap, indikator rumah tangga yang memiliki telepon seluler juga merupakan ukuran paling umum untuk melihat perkembangan telekomunikasi. Di banyak negara berkembang, penggunaan telepon seluler telah melampaui penggunaan telepon tetap sebagai alat komunikasi.

Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon selular selalu meningkat selama tahun 2006-2011 (Tabel 4.12.11). Pada tahun 2006, rumah tangga yang menggunakan telepon selular sebesar 24,60 persen dan pada tahun 2011 naik hingga mencapai 78,96 persen. Persentase tertinggi pengguna telepon selular terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (96,13 persen), sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Papua (35,12 persen).

Pariwisata

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan pariwisata yang menarik di dunia, hal ini dikarenakan Indonesia dianggap memiliki alam yang indah serta kebudayaan yang unik dan menarik. Maka tidak mengherankan bila pariwisata menjadi industri yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis di Indonesia.

communications are considered to be relatively benign to the environment, as they are potential substitutes for transport and relatively low levels of environment pollution. The household that using fixed telephone and celuler telephone represent the telecommunication indicators.

The percentage of household with fixed telephone during 2006-2011 tends to decline from 11.20 percent in 2006 to 7.85 percent in 2011. It due to the increasing of cellular phone user.

Beside indicator of household with fixed telephone, indicator of household using cellular phone is also commonly used to measure telecommunication development. In most countries, the cellular phone user is beyond the fixed telephone user.

The percentage of household using cellular phone is rising during 2006-2011 (Table 4.12.11). In 2006, the percentage of household using cellular phone was reached 24.60 percent and experiencing a significant rise to 78.96 percent in 2011. The highest percentage of cellular phone user was in Kepulauan Riau Province (96.13 percent) and the lowest in Papua Province (35.12).

Tourism

Indonesia is one of the attractive tourist destination in the world, this is due to Indonesia is endowed with beatiful and unique nature. It is not surprising that tourism industry is a promising bussiness in Indonesia.

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor penghasil devisa bagi negara Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata sangat membantu dalam peningkatan pembentukan PDB. Dalam urutan posisi penghasilan devisa nasional tahun 2008, sektor pariwisata menempati peringkat tiga setelah migas dan kelapa sawit. Hal ini memperlihatkan porsi pariwisata, selain memiliki daya tahan terhadap ekonomi yang bisa diandalkan, sekaligus mencerminkan potensi yang masih perlu dikembangkan.

Dalam kurun tahun 2005-2010, dampak peranan pariwisata terhadap PDB mengalami fluktuasi (Tabel 4.12.12). Pada tahun 2010, dampak ekonomi sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,06 persen terhadap PDB, sedikit menurun dibandingkan dampak ekonomi tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,17 persen. Dampak ekonomi pariwisata tersebut sebagian besar berasal dari sumbangan wisatawan nusantara yaitu sebesar 1,93 persen, diikuti investasi di sektor pariwisata yaitu sebesar 1,05 persen. Walaupun dampak ekonomi sektor pariwisata baru menyumbang sekitar 4 persen, tetapi sektor pariwisata terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena dianggap sebagai sektor yang menjanjikan dan bisa diandalkan dalam perekonomian Indonesia.

4.13 Kerjasama Ekonomi Global

Upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kestabilan ekonomi makro dunia. Ekonomi makro dunia yang stabil dapat dicapai dengan kerjasama ekonomi global antara negara maju dan negara berkembang secara berkeadilan. Negara maju bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan melakukan kerjasama dengan negara berkembang. Bantuan internasional dari negara

Tourism is a sector that generate devisen to Indonesia and significant to the increasement of GDP generator. Tourism is contributed the third place as the main contribution and as the generator of national devisen after oil and gas followed by palm oil. Tourism had the potency of development and had been showing endurance to economics shocks in Indonesia.

During 2005-2010, the economic impact of torism to GDP were experiencing a fluctiative states (Table 4.12.12). In 2010, the economic impacts of tourism to GDP reach 4.06 percent, a bit lower compare to previous year which were 4.17 percent. That economic impact is a most contributed by domestic tourist (1.93 percent), followed by investment (1.05 percent). Although the tourism sector only have economic impact to GDP around 4 percent, but the tourism sector are gaining special attention from the government as a promising and reliable sector in Indonesia economy.

4.13 Global Economic Partnership

Sustainable economic development efforts are supported by macro-economic stability of the world. A stable macro economy can be achieved by global economic partnership between developed and developing countries equitably. Developing countries are responsible for provide assistance and partnership with developing countries. International assistance from developed countries in the form of Foreign Direct Investment (FDI),

maju dapat berupa investasi langsung penanaman modal luar negeri, pinjaman luar negeri maupun pinjaman bantuan pembangunan resmi. Sedangkan kerjasama ekonomi global antara lain tertuang dalam bentuk perdagangan antar negara, baik melalui ekspor maupun impor.

Nilai impor Indonesia selama periode 2006-2011 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai impor Indonesia pada tahun 2006 sebesar US\$ 61.065,5 juta, naik menjadi US\$ 177.435,6 juta pada tahun 2011 (Tabel 4.13.2). Selama tahun 2011, nilai impor Indonesia terbesar berasal dari kawasan Asia yang mencapai US\$ 132.262,7 juta atau sebesar 45,74 persen dari keseluruhan nilai impor Indonesia. Jika dilihat berdasarkan negara, pada tahun 2011 nilai impor Indonesia terbanyak berasal dari negara Cina yang mencapai 14,77 persen dari total nilai impor Indonesia, kemudian diikuti negara Singapura (14,63 persen) dan Jepang (10,95 persen).

Posisi pinjaman luar negeri selama periode 2000-2011 cenderung mengalami peningkatan (Gambar 4.10). Selama periode tersebut, posisi pinjaman luar negeri Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2011, sedangkan posisi pinjaman luar negeri Indonesia yang paling rendah terjadi pada tahun 2006. Posisi pinjaman luar negeri Indonesia dari tahun 2000-2007 cenderung konstan pada posisi antara US\$ 130 miliar sampai US\$ 150 miliar. Namun sejak tahun 2008 hingga 2011 posisi pinjaman luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Pada tahun 2011, pinjaman luar negeri yang paling banyak adalah pinjaman pemerintah dan otoritas moneter yang mencapai US\$ 118.642 juta (52,64 persen) (Tabel 4.13.3). Jika dilihat menurut institusi, pinjaman pemerintah dan otoritas moneter didominasi oleh pinjaman

external debt and Official Development Assistance (ODA). While the global economic partnership is set out in the form of trade between countries, both exports and imports.

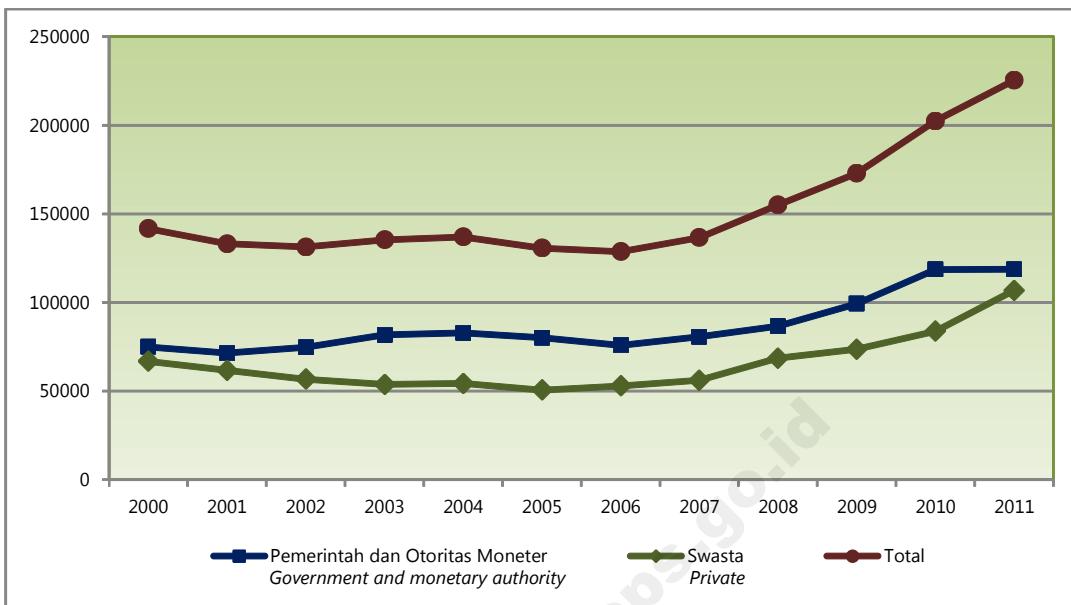
Indonesia import values during the period 2006-2011 tend to increase every year. Indonesia import value in 2006 amounted to US\$ 61,065.5 million rise to US\$ 177,435.6 million in 2011 (Table 4.13.2). During 2011, the largest value of Indonesia import was in Asia which reached US\$ 132,262.7 million or about 45.75 percent of the import value of Indonesia. If seen by country, in 2011 the largest import value of Indonesia came from China which reached 14.77 percent of the import value of Indonesia, then from Singapore (14.63 percent) and Japan (10.95 percent).

Indonesia's external debt outstanding during the period 2000-2011 tended to increase (Figure 4.10). In that period, the highest value of external debt outstanding of Indonesia was in 2011, while the lowest was in 2006. In the period 2000-2007, Indonesia's external debt outstanding remained constant at the position between US\$ 130 billion to US\$ 150 billion. But from 2008 to 2011, Indonesia's external debt outstanding continues to increase quite drastic.

In 2011, most of external debt was the debt of government and monetary authority which reached US\$ 118,642 million (52.64 percent) (Table 4.13.3). If seen by institution, the debt of government and monetary authority were dominated by central government debt (US\$

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Gambar 4.10. Posisi Pinjaman Luar Negeri (juta US\$), 2000-2011
Figure 4.10. External Debt Outstanding (million US\$), 2000-2011



Sumber / Source : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia / *Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia*

pemerintah pusat (US\$ 112.427 juta), sedangkan jika dilihat menurut persyaratan, pinjaman bukan komersial yang paling banyak yaitu sebesar US\$ 70.218 juta. Sementara pinjaman swasta pada tahun 2011 mencapai US\$ 106.732 juta (47,36 persen) yang meliputi pinjaman oleh lembaga keuangan sebesar US\$ 24.570 juta dan pinjaman oleh bukan lembaga keuangan sebesar US\$ 82.162 juta.

Pada periode tahun 2006-2011, persentase penanaman modal asing langsung terhadap PDB berfluktuatif. Selama periode tersebut, persentase penanaman modal asing langsung terhadap PDB paling besar adalah pada tahun 2011 yang mencapai 2,35 persen, sedangkan persentase paling kecil adalah pada tahun 2009 yang hanya sekitar 0,82 persen (Tabel 4.13.4).

Pengiriman tenaga kerja ke negara lain merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi

112,427 million) and if seen by term of credits, non-commercial debt were dominated by US\$ 70,218 million. Meanwhile, private debt in 2011 reached US\$ 106,732 million (47.36 percent), which includes financial institutions debt (US\$ 24,570 million) and non-financial institutions debt (US\$ 82,162 million).

In the period 2006-2011, percentage of foreign direct investment (FDI) to GDP was fluctuated. During that period, the highest percentage of foreign direct investment to GDP was in 2011 which reached 2.35 percent, while the lowest was in 2009 that only about 0.82 percent (Table 4.13.4).

One of global economic partnership is sending workers to other countries. Transfer money

global. Pengiriman uang dari tenaga kerja di luar negeri asal mereka (remitansi) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Remitansi merupakan sumber *external funding* terbesar ketiga setelah penanaman modal asing langsung dan pinjaman bantuan pembangunan resmi. Peranan remitansi yang sebenarnya adalah untuk menyokong ekonomi keluarga berupa pembiayaan pembangunan tempat tinggal dan usaha kecil serta membantu penyediaan infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit. Dengan demikian remitansi memberikan arti penting bagi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Persentase remitansi terhadap pendapatan nasional selama periode 2006-2011 mengalami penurunan dari 1,38 persen pada tahun 2006 menjadi 0,63 persen pada tahun 2011 (Tabel 4.13.5).

4.14 Pola Konsumsi dan Produksi

Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah pola atau mekanisme sistematis yang mengatur produksi dan konsumsi suatu produk sehingga benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumber daya alam. Peningkatan efisiensi bahan-bahan dan produk serta pengurangan tekanan pada lingkungan merupakan salah satu upaya dalam perubahan pola produksi dan konsumsi sehingga diharapkan bisa tercapai pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Mengurangi intensitas material pada produksi dan konsumsi barang dan jasa sangat penting untuk perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pengurangan intensitas material dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dalam produksi dan konsumsi, mendaur ulang

from workers to their home countries (remittance) effect on economic growth and regional development. Remittance is the third largest source of external funding after foreign direct investment and official development assistance. The role of remittance is actually to support the family economy in the form of financing the construction of house and small businesses, as well as assisting with the provision of social infrastructure such as schools and hospitals. Thus, remittance provides important means for the implementation of sustainable development goals. The percentage of remittance to national income during the period 2006-2011 was decreased from 1.38 percent in 2006 to 0.63 percent in 2011 (Table 4.13.5).

4.14 Consumption and Production Patterns

The sustainable of production and consumption patterns is a pattern or a systematic mechanism that regulates the production and consumption of a product that follow the schemes to ensure the balance of ecosystems and the sustainability of natural resources in particular. Improving efficiency of materials and products as well as reducing pressure on the environment is one of the efforts in changing of consumption and production patterns that expected to be achieved the sustainable of production and consumption patterns.

Reducing the material intensity of production and consumption of goods and services is essential to environmental protection and natural resource conservation. Reductions in intensity of material use can be achieved by more efficient use of natural resources in production and consumption, by recycling used and waste

limbah dan material yang sudah digunakan, dan pergeseran pola konsumsi barang dan jasa yang kurang intensif.

Energi

Energi merupakan komponen utama yang menyediakan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan transportasi serta memfasilitasi berbagai peluang bagi pencapaian kualitas hidup yang layak. Energi juga sangat penting dalam kegiatan ekonomi khususnya kegiatan di bidang industri. Meskipun secara umum energi telah dianggap sebagai mesin kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain energi mempunyai dampak dan tekanan yang besar terhadap lingkungan. Konsumsi bahan bakar fosil oleh sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (rumah tangga, industri, dan niaga) merupakan sumber utama pencemaran udara sekaligus salah satu penyumbang terbentuknya emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global.

Energi mempengaruhi semua aspek pembangunan seperti akses terhadap air, produktivitas pertanian, kesehatan, tingkat populasi, dan pendidikan. Perluasan akses terhadap sumber energi yang modern dan terpercaya merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan. Akses yang layak dan terjangkau terhadap energi merupakan syarat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian MDGs.

Konsumsi energi dalam jangka panjang merupakan penentu kualitas lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Konsumsi energi setiap daerah atau provinsi berbeda-beda tergantung besarnya penduduk, aktivitas ekonomi penduduk, dan pola konsumsi penduduk. Konsumsi energi yang tinggi dapat

material, and by shifts in consumption patterns to less material intensive goods and services.

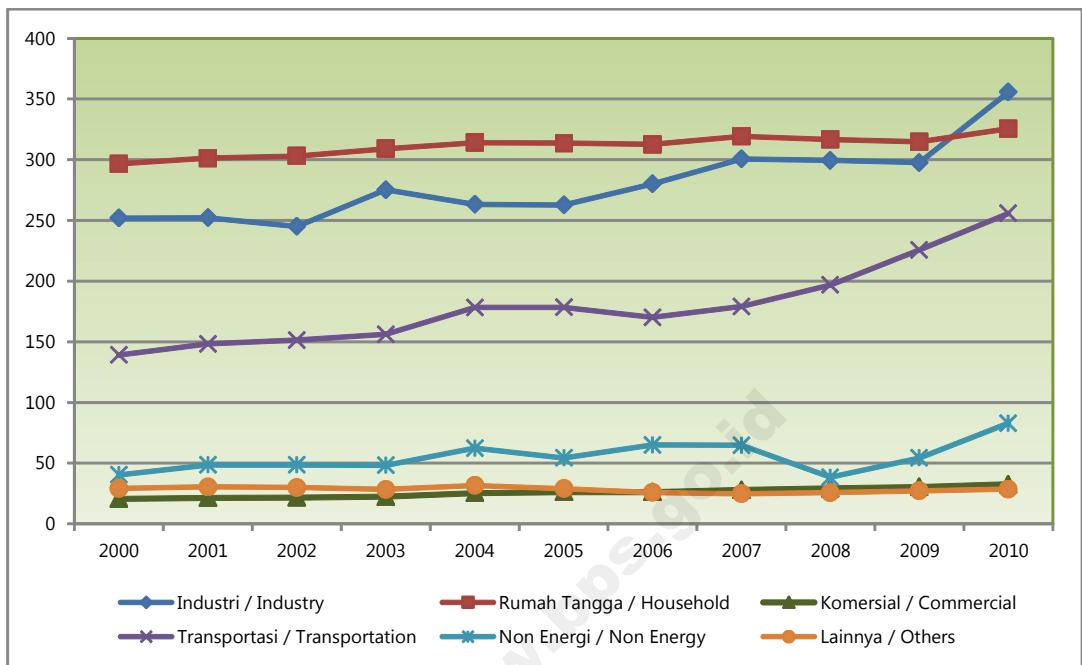
Energy

Energy is major component that provides access to the fulfillment of basic human needs such as food, transportation and facilitating opportunities for achievement of a decent quality of life. Energy is also very important in economic activities especially in industrial activities. Although in general the energy has been considered as an engine of economic progress, but on the other hand energy have impacts on the environment by giving pressure on the environment. Consumption of fossil fuels by mobile sources (transportation) and stationary sources (households, industry, and commercial) is major sources of air pollution and one of the contributors to the forming of greenhouse gas emissions that trigger global warming.

Energy affects all aspects of development such as access to water, agricultural productivity, health, population, and education. Expanding access to modern and trusted energy sources is an effort to reduce poverty and improve health. Decent and affordable access to energy is a prerequisite to sustainable development and achievement of the MDGs.

Energy consumption for a long term period determines the environmental quality and the sustainability in economic development. Energy consumption in each region or province varies from each other's depending on population number, level of economic activity, and consumption pattern. High energy consumption can reduce

Gambar 4.11. Pemakaian Energi Termasuk Biomasa Menurut Sektor (miliar SBM), 2000-2010
Figure 4.11. Energy Used Included as Biomass by Sectors (billion BOE), 2000-2010



Sumber / Source : Buku Saku Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral / Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2011, Ministry of Energy and Mineral Resources

menurunkan cadangan energi, menurunkan kualitas udara, dan memicu terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan pemanasan global.

Pemakaian energi total termasuk biomassa terbesar di Indonesia selama periode 2000-2009 didominasi oleh sektor rumah tangga, sedangkan pada tahun 2010 didominasi oleh sektor industri (Gambar 4.11). Selama periode 2000-2010, pemakaian energi di sektor industri, transportasi dan non energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya. Pada tahun 2010, pemakaian energi pada sektor industri mencapai 355,76 juta SBM, sementara pemakaian energi untuk rumah tangga sebesar 325,50 juta SBM, sektor komersial sebesar 32,69 juta SBM dan sektor transportasi sebesar 255,83 juta SBM (Tabel 4.14.1).

energy reserves, degrading air quality, and cause acid rain which will lead to global warming.

The biggest energy consumption in Indonesia during the period 2000-2009 was dominated by household sector, whereas in 2010 was dominated by industry sector (Figure 4.11). During the period 2000-2010, energy consumption in industry, transportation, and non-energy has increased significantly compared to household sector, commercial and other sectors. In 2010, energy consumption in industrial sector reached 355.76 million BOE, while energy consumption for household sector amounted to 325.50 million BOE, commercial sector about 32.69 million BOE, and transportation sector about 255.83 million BOE (Table 4.14.1).

Transportasi

Transportasi mempengaruhi keberlanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem transportasi mempermudah masyarakat dalam mengakses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Sistem transportasi juga mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses ke pasar dan lapangan kerja. Disisi lain, sektor transportasi juga memberikan tekanan terhadap lingkungan melalui konsumsi energi tidak terbarukan, emisi polutan berbahaya dan gas rumah kaca dari kendaraan bermotor.

Di kota-kota besar atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, lalu lintas kendaraan bermotor cenderung padat sehingga polusi udara menjadi masalah yang serius. Sumbangan pencemaran dari sektor ini ditambah oleh pencemaran akibat sumber spesifik lainnya seperti polusi industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah menyebabkan permasalahan polusi regional dan global. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya hujan asam, perubahan iklim, kekeringan, banjir bandang (erosi), dan pemanasan global.

Indikator jumlah kendaraan bermotor dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa banyak energi yang digunakan dan emisi CO₂ yang dihasilkan. Semakin banyak kendaraan bermotor akan mengakibatkan semakin banyak energi yang digunakan dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya cadangan sumber daya penghasil energi khususnya BBM. Selain itu, jumlah emisi CO₂ yang dihasilkan juga akan semakin banyak.

Jumlah kendaraan pengangkut barang (mobil truk) dan kendaraan pengangkut penumpang (mobil penumpang dan bus)

Transportation

Transportation affects sustainability in the social, economic, and environmental aspect. Transportation system provides the community access to basic social services such as health, education, and recreation. Transportation system also supports the implementation of economic activities by providing access to markets and employment. On the other hand, transportation sector also exert pressure on environment through the consumption of non-renewable energy, emissions of harmful pollutants and greenhouse gases from motor vehicles.

In big cities or urban areas with high population density, motor vehicle traffic is tend to high, so it would contributing to a serious air pollution problems. Contribution of pollution from this sector added by pollution due to other specific sources such as industrial pollution, forest fires and burning garbage will cause global and regional pollution problems. This can cause acid rain, climate change, drought, flash flood (erosion), and global warming.

Number of vehicles can be used to estimate energy used and emission of CO₂ release. The higher number of motor vehicles will cause the higher energy used, higher CO₂ emission and will also affect on the depletion of energy resources, especially natural oil.

The number of freight transport vehicles (trucks) and passenger transport vehicles (passenger cars and buses) increased every year

mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2011 (Tabel 4.14.2). Pada tahun 2011, jumlah mobil penumpang di Indonesia sebanyak 9,46 juta unit, mobil truk sebanyak 4,96 juta unit, dan bus sebanyak 2,25 juta unit. Jika dilihat menurut provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah mobil penumpang, bus dan mobil truk paling banyak di bandingkan provinsi lain selama periode tahun 2009-2011, sedangkan provinsi dengan jumlah mobil penumpang, bus dan mobil truk paling sedikit adalah Provinsi Maluku Utara.

Konsumsi energi per unit dari aktivitas transportasi merupakan ukuran kunci seberapa efisien sistem transportasi mengubah energi yang digunakan untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang. Sehingga pemisahan transportasi angkutan penumpang dan barang sangat penting untuk analisis energi. Terdapat dua satuan pengukuran aktivitas (yaitu penumpang-km dan ton-km) yang cukup berbeda dan dikumpulkan secara terpisah. Ukuran penumpang-km mengukur proporsi setiap moda transportasi (mobil penumpang, bus, truk, kereta dll) terhadap total transportasi penumpang di darat. Penggunaan mobil untuk transportasi penumpang umumnya kurang hemat energi dan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, seperti polusi dan tingkat kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi massal.

Ukuran ton-km mengukur proporsi setiap moda transportasi (jalan, rel, dan air) terhadap total transportasi barang di darat. Transportasi jalan kurang efisien energi dan menghasilkan emisi per ton-kilometer lebih banyak dari kereta api atau transportasi air. Oleh karena itu, penggunaan jalan untuk transportasi angkutan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar daripada kereta api atau transportasi

during the period 2009-2011 (Table 4.14.2). In 2011, the number of passenger cars in Indonesia reached 9.45 million unit, truck reached 4.96 million unit and buses reached 2.25 million unit. If seen by province, DKI Jakarta was a province with the biggest number of passenger cars, buses and trucks compared with other provinces during the period 2009-2011, while the lowest number of passenger cars, buses and trucks was in Maluku Utara Province.

Energy consumption per unit of transportation activity is a key measure of how efficiently transportation systems that is used to convert energy to the mobility of population and distribution of goods. So the separation of passenger and freight is essential for energy analysis. There are two units of measurement activities (i.e. passenger-km and ton-km) are quite different and collected separately. Passenger-km measure the share of each mode of transportation (passenger cars, busses, trucks, trains, etc.) in total inland passenger transport. The use of cars for passenger transportation is generally less energy efficient and has greater environmental and social impacts, such as pollution and a higher accident rate than mass transportation.

Ton-km measure the share of each mode (road, rail, and waterways) in total inland freight transport. Road transport is less energy efficient and produces more emissions per ton-kilometer than either rail or waterway transport. Therefore, the use of road for freight transport has greater environmental and social impacts than either rail or waterways transport, such as pollution and a higher accident rate..

sungai, seperti polusi dan tingkat kecelakaan yang lebih tinggi.

Produksi angkutan kereta api penumpang yang dihitung dengan rata-rata jarak perjalanan per penumpang (km/orang) cenderung naik selama periode 2008-2010. Begitu juga dengan kereta api barang yang dihitung dengan rata-rata jarak angkutan tiap ton (km/ton) juga cenderung naik. Pada tahun 2010 rata-rata jarak perjalanan per penumpang di Pulau Jawa adalah 98 km/orang, sementara di Pulau Sumatera 186 km/orang. Rata-rata jarak angkutan barang tiap ton di Pulau Jawa tercatat sebesar 519 km/ton, sementara di Pulau Sumatera sebesar 299 km/ton (Tabel 4.14.3).

Production of passenger railways transportation was calculated by the average length of journey per passenger (km/person) tend to increase in the period of 2008-2010. Likewise with freight railways transportation that calculated by the average distance of freight transported (km/ton) also tend to increase. In 2010, the average length of journey per passenger in Java Island was 98 km/person, while in Sumatera Island reached 186 km/person. The average distance of freight transported in Java Island was 519 km/ton, while in Sumatera Island 299 km/ton (Table 4.14.3).

TABEL-TABEL

Tables

Tabel

4.1.1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (ribu), 2006-2012

Number of Poor People by Province (thousand), 2006-2012

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1 149,7	1 083,7	959,7	892,9	861,9	894,8	909,0
Sumatera Utara	1 897,1	1 768,5	1 613,8	1 499,7	1 490,9	1 481,3	1 407,2
Sumatera Barat	578,7	529,2	477,2	429,3	430,0	442,1	404,7
Riau	564,9	574,5	566,7	527,5	500,3	482,0	483,1
Jambi	304,6	281,9	260,3	249,7	241,6	272,7	271,7
Sumatera Selatan	1 446,9	1 331,8	1 249,6	1 167,9	1 125,7	1 074,8	1 057,0
Bengkulu	360,0	370,6	352,0	324,1	324,9	303,6	311,7
Lampung	1 638,0	1 661,7	1 591,6	1 558,3	1 479,9	1 298,7	1 253,8
Kep. Bangka Belitung	117,4	95,1	86,7	76,6	67,8	72,1	71,4
Kepulauan Riau	163,0	148,4	136,4	128,2	129,7	129,6	131,2
DKI Jakarta	407,1	405,7	379,6	323,2	312,2	363,4	363,2
Jawa Barat	5 712,5	5 457,9	5 322,4	4 983,6	4 773,7	4 648,6	4 477,5
Jawa Tengah	7 100,6	6 557,2	6 189,6	5 725,7	5 369,2	5 107,4	4 977,4
DI Yogyakarta	648,7	633,5	616,3	585,8	577,3	560,9	565,3
Jawa Timur	7 678,1	7 155,3	6 651,3	6 022,6	5 529,3	5 356,2	5 071,0
Banten	904,3	886,2	816,7	788,1	758,2	690,5	652,8
Bali	243,5	229,1	215,7	181,7	174,9	166,2	168,8
Nusa Tenggara Barat	1 156,1	1 118,6	1 080,6	1 050,9	1 009,4	894,8	852,6
Nusa Tenggara Timur	1 273,9	1 163,6	1 098,3	1 013,1	1 014,1	1 012,9	1 012,5
Kalimantan Barat	626,7	584,3	508,8	434,8	428,8	380,1	363,3
Kalimantan Tengah	212,8	210,3	200,0	165,9	164,2	146,9	148,0
Kalimantan Selatan	278,5	233,5	218,9	176,0	182,0	194,6	189,9
Kalimantan Timur	335,5	324,8	286,4	239,2	243,0	247,9	253,3
Sulawesi Utara	249,4	250,1	223,5	219,6	206,7	194,9	189,1
Sulawesi Tengah	553,5	557,4	524,7	489,8	475,0	423,6	418,6
Sulawesi Selatan	1 112,0	1 083,4	1 031,7	963,6	913,4	832,9	825,8
Sulawesi Tenggara	466,8	465,4	435,9	434,3	400,7	330,0	316,3
Gorontalo	273,8	241,9	221,6	224,6	209,9	198,3	186,9
Sulawesi Barat	205	189,9	171,1	158,2	141,3	164,9	160,5
Maluku	418,6	404,7	391,3	380,0	378,6	360,3	350,2
Maluku Utara	116,8	109,9	105,1	98,0	91,1	97,3	91,8
Papua Barat	284	266,8	246,5	256,8	256,3	249,8	230,0
Papua	816,7	793,4	733,1	760,3	761,6	944,8	966,6
Indonesia	39 295,3	37 168,3	34 963,3	32 530,0	31 023,4	30 018,9	29 132,4

Catanan / Note : Referensi waktu untuk seluruh data adalah bulan Maret / Time reference for all data is March

Sumber / Source : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS - Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.1.2 **Percentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2006-2012**
Table **Percentage of Poor People by Province, 2006-2012**

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	28,28	26,65	23,53	21,80	20,98	19,57	19,46
Sumatera Utara	15,01	13,90	12,55	11,51	11,31	11,33	10,67
Sumatera Barat	12,51	11,90	10,67	9,54	9,50	9,04	8,19
Riau	11,85	11,20	10,63	9,48	8,65	8,47	8,22
Jambi	11,37	10,27	9,32	8,77	8,34	8,65	8,42
Sumatera Selatan	20,99	19,15	17,73	16,28	15,47	14,24	13,78
Bengkulu	23,00	22,13	20,64	18,59	18,30	17,50	17,70
Lampung	22,77	22,19	20,98	20,22	18,94	16,93	16,18
Kep. Bangka Belitung	10,91	9,54	8,58	7,46	6,51	5,75	5,53
Kepulauan Riau	12,16	10,30	9,18	8,27	8,05	7,40	7,11
DKI Jakarta	4,57	4,61	4,29	3,62	3,48	3,75	3,69
Jawa Barat	14,49	13,55	13,01	11,96	11,27	10,65	10,09
Jawa Tengah	22,19	20,43	19,23	17,72	16,56	15,76	15,34
DI Yogyakarta	19,15	18,99	18,32	17,23	16,83	16,08	16,05
Jawa Timur	21,09	19,98	18,51	16,68	15,26	14,23	13,40
Banten	9,79	9,07	8,15	7,64	7,16	6,32	5,85
Bali	7,08	6,63	6,17	5,13	4,88	4,20	4,18
Nusa Tenggara Barat	27,17	24,99	23,81	22,78	21,55	19,73	18,63
Nusa Tenggara Timur	29,34	27,51	25,65	23,31	23,03	21,23	20,88
Kalimantan Barat	15,24	12,91	11,07	9,30	9,02	8,60	8,17
Kalimantan Tengah	11,00	9,38	8,71	7,02	6,77	6,56	6,51
Kalimantan Selatan	8,32	7,01	6,48	5,12	5,21	5,29	5,06
Kalimantan Timur	11,41	11,04	9,51	7,73	7,66	6,77	6,68
Sulawesi Utara	11,54	11,42	10,10	9,79	9,10	8,51	8,18
Sulawesi Tengah	23,63	22,42	20,75	18,98	18,07	15,83	15,40
Sulawesi Selatan	14,57	14,11	13,34	12,31	11,60	10,29	10,11
Sulawesi Tenggara	23,37	21,33	19,53	18,93	17,05	14,56	13,71
Gorontalo	29,13	27,35	24,88	25,01	23,19	18,75	17,33
Sulawesi Barat	20,7	19,03	16,73	15,29	13,58	13,89	13,24
Maluku	33,03	31,14	29,66	28,23	27,74	23,00	21,78
Maluku Utara	12,73	11,97	11,28	10,36	9,42	9,18	8,47
Papua Barat	41,3	39,31	35,12	35,71	34,88	31,92	28,20
Papua	41,52	40,78	37,08	37,53	36,80	31,98	31,11
Indonesia	17,75	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49	11,96

Catatan / Note : Referensi waktu untuk seluruh data adalah bulan Maret / Time reference for all data is March

Sumber / Source : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS - Statistics Indonesia

**Tabel
Table 4.1.3**

**Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (rupiah/kapita/bulan), 2006-2012
Poverty Line by Province (rupiahs/capita/month), 2006-2012**

Provinsi <i>Province</i>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	198 858	218 143	239 873	261 898	278 389	303 692	320 013
Sumatera Utara	162 677	178 132	193 321	210 241	222 898	246 560	262 102
Sumatera Barat	154 218	180 669	195 733	217 469	230 823	261 719	277 784
Riau	185 063	214 034	229 371	246 481	256 112	282 479	300 791
Jambi	154 911	172 349	182 229	199 623	216 187	242 272	259 257
Sumatera Selatan	160 607	178 209	196 452	212 381	221 687	236 298	252 377
Bengkulu	160 641	170 802	189 607	210 084	225 857	250 949	263 050
Lampung	144 934	157 052	172 332	188 812	202 414	234 073	248 645
Kep. Bangka Belitung	212 094	235 379	246 169	266 843	286 334	323 638	352 213
Kepulauan Riau	228 610	248 241	262 232	283 965	295 095	340 581	356 873
DKI Jakarta	250 298	266 874	290 268	316 936	331 169	355 480	379 052
Jawa Barat	149 673	165 734	176 216	191 985	201 138	220 098	231 438
Jawa Tengah	142 337	154 111	168 168	182 515	192 435	209 611	222 327
DI Yogyakarta	170 720	184 965	194 830	211 978	224 258	249 629	260 173
Jawa Timur	145 205	153 145	169 112	188 317	199 327	219 727	233 202
Banten	160 688	169 485	181 076	198 750	208 023	226 662	239 767
Bali	161 763	165 954	176 569	196 466	208 152	233 172	249 997
Nusa Tenggara Barat	140 712	150 026	167 536	185 025	196 185	215 576	242 831
Nusa Tenggara Timur	114 982	126 389	139 731	156 191	175 308	198 553	211 786
Kalimantan Barat	134 747	142 529	158 834	174 617	189 407	206 850	226 175
Kalimantan Tengah	151 905	162 266	186 003	202 612	215 466	241 525	269 940
Kalimantan Selatan	147 915	161 514	180 263	195 787	210 850	238 535	262 459
Kalimantan Timur	207 282	220 368	237 979	261 185	285 218	316 819	347 577
Sulawesi Utara	145 285	156 550	168 160	184 772	194 334	212 823	215 260
Sulawesi Tengah	147 443	154 006	168 025	189 653	203 237	235 512	246 392
Sulawesi Selatan	120 786	126 623	138 334	153 715	163 089	179 933	190 545
Sulawesi Tenggara	124 264	130 625	141 919	161 583	165 208	181 577	195 306
Gorontalo	130 668	138 181	147 154	162 189	171 371	187 215	203 907
Sulawesi Barat	130 480	135 242	146 492	163 224	171 356	186 041	198 792
Maluku	173 201	179 552	188 931	207 771	226 030	245 120	280 693
Maluku Utara	150 812	165 039	187 671	201 500	212 982	225 242	242 112
Papua Barat	202 340	205 998	233 570	277 416	294 727	318 796	333 485
Papua	180 201	202 379	225 195	246 225	259 128	276 116	284 388
Indonesia	151 997	166 697	182 636	200 262	211 726	233 740	248 707

Catatan / Note : Referensi waktu untuk seluruh data adalah bulan Maret / Time reference for all data is March

Sumber / Source : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS / Based on National Socio Economic Survey, BPS - Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.1.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2005-2011
Table 4.1.4 Distribution of Expenditure per Capita and Gini Index, 2005-2011

Daerah <i>Region</i>	Tahun <i>Year</i>	40% Berpengeluaran Rendah <i>40 % Low Expenditure</i>	40 % Berpengeluaran Sedang <i>40 % Medium Expenditure</i>	20 % Berpengeluaran Tinggi <i>20 % High Expenditure</i>	Indeks Gini <i>Gini Index</i>
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)				
Kota / Urban	2005	21,16	37,24	41,60	0,32
	2006	19,79	36,90	43,33	0,35
	2007	19,08	37,13	43,80	0,37
	2008	18,55	37,00	44,45	0,37
	2009	19,93	36,89	43,18	0,37
	2010	17,57	36,99	45,44	0,38
	2011 ¹	16,10	34,78	49,13	0,42
Desa / Rural	2005	23,41	40,04	36,55	0,27
	2006	23,42	39,04	37,53	0,28
	2007	22,00	37,94	40,05	0,30
	2008	22,06	38,58	39,36	0,30
	2009	23,30	38,58	38,12	0,29
	2010	20,98	38,78	40,24	0,32
	2011 ¹	19,99	37,48	42,53	0,34
Kota+Desa	2005	20,22	37,69	42,09	0,33
Urban+Rural	2006	21,42	37,65	41,26	0,36
	2007	18,74	36,51	44,75	0,38
	2008	18,72	36,43	44,86	0,37
	2009	21,22	37,54	41,24	0,37
	2010	18,05	36,48	45,47	0,38
	2011 ¹	16,86	34,73	48,41	0,41

Catatan / Note :¹ Tahun 2011 kondisi Susenas Triwulan I Bulan Maret / In 2011 is the Susenas March quarter I condition

Dihitung dengan menggunakan data individu / Calculated with individual data

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.1.5 **Percentase Rumah Tangga dengan Penampungan Akhir Tinja Tangki Septik Menurut Provinsi, 2006-2011**
Table 4.1.5 **Percentage of Household with Toilet Discharge Septic Tank by Province, 2006-2011**

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,28	38,12	48,82	52,41	56,68	58,33
Sumatera Utara	47,23	53,92	58,75	60,17	64,45	64,13
Sumatera Barat	33,37	39,11	41,27	40,81	47,46	46,87
Riau	36,01	47,23	58,48	57,49	59,22	57,50
Jambi	31,96	38,16	42,29	44,25	53,66	52,02
Sumatera Selatan	33,18	43,15	44,92	48,38	52,39	53,67
Bengkulu	27,12	34,34	34,99	40,32	43,85	41,96
Lampung	28,09	36,54	40,61	42,84	48,28	48,92
Kep. Bangka Belitung	48,61	55,68	63,82	68,13	70,12	73,41
Kepulauan Riau	46,43	54,04	49,42	50,78	82,15	83,35
DKI Jakarta	82,29	86,75	88,74	91,71	93,34	93,90
Jawa Barat	42,60	49,96	53,7	58,33	60,81	58,30
Jawa Tengah	43,10	49,84	54,09	58,10	61,07	62,39
DI Yogyakarta	60,38	70,34	74,91	78,52	83,25	83,82
Jawa Timur	36,80	46,49	51,41	55,57	56,87	57,73
Banten	46,76	55,07	61,56	62,08	66,98	67,12
Bali	63,77	76,26	79,46	80,07	82,80	85,15
Nusa Tenggara Barat	22,20	41,52	46,63	46,16	50,97	54,05
Nusa Tenggara Timur	11,91	19,98	22,06	19,43	32,31	28,05
Kalimantan Barat	28,32	35,01	38,81	44,89	47,79	45,92
Kalimantan Tengah	18,61	23,75	27,8	28,07	41,11	36,81
Kalimantan Selatan	26,10	32,26	39,86	45,14	53,29	51,91
Kalimantan Timur	45,34	57,89	58,59	65,28	73,85	72,60
Sulawesi Utara	46,39	61,20	60,88	69,58	74,43	72,26
Sulawesi Tengah	32,31	39,94	48,76	50,28	54,25	55,99
Sulawesi Selatan	43,01	52,95	55,55	63,25	68,72	67,79
Sulawesi Tenggara	31,18	41,69	48,19	51,16	55,32	55,95
Gorontalo	24,27	41,62	46,63	52,90	56,52	58,18
Sulawesi Barat	20,26	33,26	42,5	50,67	45,00	47,28
Maluku	29,34	41,94	47,66	49,52	61,53	61,43
Maluku Utara	39,23	55,64	58,13	54,33	72,22	68,86
Papua Barat	33,75	37,90	47,26	56,66	63,76	63,05
Papua	21,48	32,35	29,42	31,05	31,32	28,42
Indonesia	40,67	49,13	53,33	56,54	60,63	60,33

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.1.6 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih¹ menurut Provinsi, 2006-2011
Table Percentage of Household which Use Clean Water¹ by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,15	38,44	41,23	48,61	53,88	59,11
Sumatera Utara	50,57	50,89	52,27	56,52	60,38	62,09
Sumatera Barat	45,60	49,44	49,51	53,55	56,72	59,10
Riau	23,89	35,06	41,02	43,50	45,91	51,16
Jambi	35,57	43,02	46,89	46,83	51,78	53,25
Sumatera Selatan	40,69	46,97	48,23	51,54	52,50	57,37
Bengkulu	38,03	29,82	31,31	37,97	38,18	40,19
Lampung	42,82	41,48	45,01	45,20	45,94	50,48
Kep. Bangka Belitung	35,48	49,01	54,03	60,47	67,77	74,14
Kepulauan Riau	60,11	71,27	56,82	61,50	79,82	83,57
DKI Jakarta	77,49	80,36	87,77	87,86	90,64	91,54
Jawa Barat	43,15	46,30	50,41	55,62	58,82	59,52
Jawa Tengah	55,91	57,14	58,09	61,93	63,98	66,26
DI Yogyakarta	59,01	68,30	69,61	70,65	75,39	75,39
Jawa Timur	57,63	63,44	65,16	67,08	68,16	70,06
Banten	41,58	46,14	53,89	53,94	58,89	62,64
Bali	72,12	73,54	74,57	80,38	78,37	80,06
Nusa Tenggara Barat	43,53	51,11	50,00	53,01	56,89	55,04
Nusa Tenggara Timur	43,30	43,33	45,13	45,34	48,99	50,25
Kalimantan Barat	19,37	18,09	19,44	19,28	22,90	23,92
Kalimantan Tengah	33,26	32,36	35,46	38,11	43,39	45,88
Kalimantan Selatan	54,17	54,39	54,00	55,45	56,77	60,27
Kalimantan Timur	62,43	65,51	67,51	69,47	73,21	75,21
Sulawesi Utara	58,44	56,36	58,47	62,50	63,60	64,84
Sulawesi Tengah	41,05	41,14	45,74	49,64	45,22	51,61
Sulawesi Selatan	51,15	51,44	53,97	58,06	61,20	61,98
Sulawesi Tenggara	52,99	53,29	56,04	59,31	56,09	61,59
Gorontalo	40,20	43,96	41,29	48,46	47,97	50,88
Sulawesi Barat	32,55	41,70	44,91	47,68	43,45	39,33
Maluku	55,14	54,13	46,92	55,68	59,33	54,02
Maluku Utara	42,53	39,93	41,82	44,56	54,19	48,86
Papua Barat	37,55	46,02	40,00	42,72	54,81	50,74
Papua	28,47	32,21	27,83	31,39	30,99	27,45
Indonesia	49,69	52,92	55,07	58,18	60,87	62,65

Catatan :¹ Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke

Note tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m] / Consist of packaged water, refill water, pipe, and [(artesian well/pump, protected well, and protected spring) that the distance to toilet hole ≥ 10 m]

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.1.7
Table **Percentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik**
Menurut Provinsi, 2006-2011

Percentage of Household Using Source of Lighting from Non Electricity by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,65	14,58	10,17	7,26	6,67	4,59
Sumatera Utara	9,01	9,04	7,41	6,98	7,09	6,06
Sumatera Barat	16,14	13,09	11,35	9,34	9,23	8,60
Riau	20,09	15,16	12,80	10,56	11,95	9,21
Jambi	20,77	17,35	15,61	13,16	12,07	9,50
Sumatera Selatan	22,79	19,48	16,56	11,06	11,31	7,99
Bengkulu	26,29	22,65	19,43	12,23	14,10	12,30
Lampung	27,33	18,88	13,73	11,06	8,71	7,47
Kep. Bangka Belitung	8,75	7,77	6,01	5,38	7,23	3,51
Kepulauan Riau	10,16	7,24	12,66	6,30	4,55	2,66
DKI Jakarta	0,06	0,32	0,37	0,43	0,45	0,05
Jawa Barat	1,74	2,23	1,57	1,09	0,99	0,55
Jawa Tengah	2,07	2,24	1,53	1,01	0,80	0,60
DI Yogyakarta	1,43	1,47	1,20	0,57	0,41	0,45
Jawa Timur	2,00	2,90	1,65	1,20	1,03	0,70
Banten	5,65	6,83	3,55	2,45	2,33	0,73
Bali	2,34	2,04	2,15	2,05	2,28	1,15
Nusa Tenggara Barat	17,96	15,29	13,83	9,22	10,61	9,19
Nusa Tenggara Timur	61,19	61,33	58,29	52,72	47,45	45,87
Kalimantan Barat	24,98	23,03	21,34	23,35	22,03	18,81
Kalimantan Tengah	30,81	26,01	24,84	21,39	18,46	19,64
Kalimantan Selatan	10,54	8,66	6,16	5,63	5,99	4,64
Kalimantan Timur	7,77	8,83	6,84	5,01	4,82	6,41
Sulawesi Utara	5,15	5,16	4,20	4,25	3,38	3,08
Sulawesi Tengah	30,57	25,87	22,28	20,84	19,56	18,92
Sulawesi Selatan	14,77	12,32	11,47	8,91	7,51	7,12
Sulawesi Tenggara	34,72	28,70	23,66	17,98	20,71	15,69
Gorontalo	33,36	23,29	23,10	19,25	22,67	19,12
Sulawesi Barat	35,32	31,07	22,41	16,08	25,75	21,10
Maluku	30,24	25,02	24,94	27,40	20,36	22,38
Maluku Utara	36,91	27,26	24,17	26,71	20,33	19,39
Papua Barat	39,07	32,75	32,52	30,72	17,83	21,81
Papua	60,01	53,62	58,18	55,45	57,29	60,60
Indonesia	9,38	8,54	7,27	6,50	5,85	5,17

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.1.8 Persentase Rumah Tangga yang Bahan Bakar Memasaknya Kayu Bakar Menurut Provinsi, 2006-2011
Table 4.1.8 Percentage of Household Using Source of Cooking Fuel from Fire Wood by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	56,87	49,76	45,37	43,63	44,17	39,64
Sumatera Utara	41,25	41,38	38,84	34,49	36,47	32,98
Sumatera Barat	57,25	56,68	54,75	55,21	55,66	51,48
Riau	33,12	34,68	24,53	26,24	30,34	26,69
Jambi	63,07	52,97	49,12	49,95	48,24	44,73
Sumatera Selatan	52,02	49,19	46,82	41,98	41,64	36,97
Bengkulu	64,64	64,47	58,44	56,37	61,44	55,27
Lampung	76,59	73,23	73,40	71,37	69,32	63,02
Kep. Bangka Belitung	43,02	31,48	27,85	27,60	28,19	20,39
Kepulauan Riau	15,32	12,29	20,83	16,84	9,61	8,56
DKI Jakarta	0,51	0,27	0,68	0,51	0,37	0,16
Jawa Barat	35,26	36,66	33,68	26,17	26,85	26,50
Jawa Tengah	66,16	62,33	60,41	50,51	49,57	47,69
DI Yogyakarta	53,61	50,06	49,33	46,01	44,83	42,69
Jawa Timur	59,76	56,43	55,72	48,90	47,93	45,21
Banten	33,26	34,37	31,74	31,71	30,76	27,77
Bali	52,45	49,47	46,37	48,89	43,17	40,44
Nusa Tenggara Barat	66,65	62,86	63,91	62,47	63,47	60,26
Nusa Tenggara Timur	87,45	85,25	83,51	85,23	82,12	82,45
Kalimantan Barat	64,54	61,57	59,77	56,29	56,70	49,96
Kalimantan Tengah	62,51	57,46	59,59	54,74	54,14	54,49
Kalimantan Selatan	56,42	49,65	50,11	47,17	47,18	44,11
Kalimantan Timur	23,28	24,10	21,40	21,88	20,21	18,50
Sulawesi Utara	57,89	52,47	47,36	48,29	48,39	46,38
Sulawesi Tengah	74,48	66,84	65,07	67,38	63,71	64,09
Sulawesi Selatan	65,89	52,67	51,48	48,25	43,96	41,32
Sulawesi Tenggara	78,32	64,67	63,11	62,51	61,79	63,40
Gorontalo	71,76	66,21	64,55	62,92	62,32	60,50
Sulawesi Barat	88,56	77,40	69,44	67,48	74,06	71,55
Maluku	62,07	64,79	65,70	64,74	58,69	57,29
Maluku Utara	77,36	72,55	67,26	66,45	69,42	69,01
Papua Barat	59,60	56,39	57,22	54,36	44,75	47,05
Papua	67,97	65,08	69,60	67,14	70,43	71,11
Indonesia	51,96	49,38	47,49	42,81	42,33	39,89

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.1.9 Jumlah Desa Menurut Keberadaan Sungai yang Melintasi Desa dan Permukiman Kumuh, 2011
Table 4.1.9 Number of Villages by the Existence of Rivers that Flows Through the Village and Slum Areas, 2011

Provinsi Province	Keberadaan Sungai <i>The Existence of Rivers</i>		Keberadaan Permukiman Kumuh <i>The Existence of Slum Areas</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 620	2 863	67	6 416
Sumatera Utara	4 519	1 278	376	5 421
Sumatera Barat	839	194	76	957
Riau	1 273	382	48	1 607
Jambi	1 196	176	44	1 328
Sumatera Selatan	2 639	547	236	2 950
Bengkulu	1 279	230	8	1 501
Lampung	1 950	514	150	2 314
Kep. Bangka Belitung	291	70	19	342
Kepulauan Riau	134	219	61	292
DKI Jakarta	180	87	185	82
Jawa Barat	5 048	857	982	4 923
Jawa Tengah	7 456	1 121	317	8 260
DI Yogyakarta	343	95	11	427
Jawa Timur	6 486	2 016	235	8 267
Banten	1 182	353	288	1 247
Bali	620	96	22	694
Nusa Tenggara Barat	960	124	224	860
Nusa Tenggara Timur	1 605	1 361	20	2 946
Kalimantan Barat	1 844	123	168	1 799
Kalimantan Tengah	1 379	149	27	1 501
Kalimantan Selatan	1 694	306	28	1 972
Kalimantan Timur	1 262	203	132	1 333
Sulawesi Utara	1 189	504	93	1 600
Sulawesi Tengah	1 338	477	-	1 815
Sulawesi Selatan	2 307	675	314	2 668
Sulawesi Tenggara	1 286	835	16	2 105
Gorontalo	575	156	10	721
Sulawesi Barat	541	97	6	632
Maluku	519	505	26	998
Maluku Utara	621	458	-	1 079
Papua Barat	971	468	38	1 401
Papua	2 868	1 056	40	3 884
Indonesia	60 014	18 595	4 267	74 342

Sumber : Statistik Potensi Desa Indonesia 2011, BPS

Source Village Potential Statistics of Indonesia 2011, BPS-Statistic Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.2.1 Jumlah Kasus Korupsi yang Sudah Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011
Table Number of Corruption Cases Solved by Regional Police Office, 2006-2011

Kepolisian Daerah Regional Police Office	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1	1	-	6	5	5
Sumatera Utara	14	14	6	1	3	18
Sumatera Barat	4	-	1	-	3	4
Riau	7	3	-	2	2	4
Jambi	-	2	-	5	3	3
Sumatera Selatan	4	2	4	4	5	4
Bengkulu	2	1	5	8	5	20
Lampung	2	4	-	-	1	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	3	-	-
Kepulauan Riau	-	2	-	-	2	2
Metro Jaya ¹	1	14	6	16	28	17
Jawa Barat	25	16	49	49	19	7
Jawa Tengah	14	4	11	6	17	33
DI Yogyakarta	5	2	3	2	7	-
Jawa Timur	31	101	37	21	10	11
Banten	-	-	1	3	3	7
Bali	6	4	8	14	5	3
Nusa Tenggara Barat	4	3	3	1	3	7
Nusa Tenggara Timur	1	3	-	14	14	22
Kalimantan Barat	-	8	17	1	1	-
Kalimantan Tengah	7	-	6	3	4	9
Kalimantan Selatan	6	4	5	12	4	1
Kalimantan Timur	-	-	-	8	5	10
Sulawesi Utara	21	14	16	8	6	26
Sulawesi Tengah	-	17	13	4	2	28
Sulawesi Selatan ²	17	14	8	18	16	24
Sulawesi Tenggara	1	2	8	13	9	5
Gorontalo	-	-	3	1	1	-
Maluku	3	1	-	2	13	1
Maluku Utara	1	-	3	-	3	4
Papua ³	33	18	1	20	9	8
Indonesia	210	254	214	245	208	283

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Note *Metro Jaya Police Regional consist of Police Subregionals of Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Bekasi Regency, Bekasi Municipality, Tangerang Regency, Tangerang Municipality, Depok Municipality, Soekarno-Hatta Airport, and KP3.*

² Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat / Sulselbar Regional Police Covers Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Provinces

³ Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat / Papua Regional Police Covers Papua and Papua Barat Provinces

Sumber / Source : MABES POLRI / Indonesian National Police Headquarters

Tabel 4.2.2 Jumlah Kasus Pembunuhan Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011
Table 4.2.2 Number of Homicide Cases by Regional Police Office, 2006-2011

Kepolisian Daerah Regional Police Office	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1	11	16	9	15	18
Sumatera Utara	137	91	114	99	127	112
Sumatera Barat	19	15	9	17	11	16
Riau	40	19	37	37	13	10
Jambi	21	17	10	22	20	11
Sumatera Selatan	51	60	66	52	70	65
Bengkulu	18	11	10	5	18	29
Lampung	39	56	57	60	20	5
Kep. Bangka Belitung	11	7	4	16	11	6
Kepulauan Riau	15	7	5	12	8	12
Metro Jaya ¹	53	53	71	58	180	526
Jawa Barat	65	57	54	60	66	63
Jawa Tengah	45	71	52	48	66	52
DI Yogyakarta	9	10	10	11	10	12
Jawa Timur	117	121	76	103	26	15
Banten	-	1	2	16	20	20
Bali	14	5	20	13	13	13
Nusa Tenggara Barat	73	71	9	17	10	14
Nusa Tenggara Timur	41	34	51	30	24	82
Kalimantan Barat	27	9	17	15	16	3
Kalimantan Tengah	11	16	21	10	24	34
Kalimantan Selatan	48	53	58	47	14	-
Kalimantan Timur	24	44	28	32	29	23
Sulawesi Utara	45	54	52	79	42	61
Sulawesi Tengah	11	14	15	7	11	10
Sulawesi Selatan ²	127	109	88	92	84	98
Sulawesi Tenggara	7	20	27	25	24	20
Gorontalo	5	5	4	5	8	3
Maluku	1	17	4	18	4	3
Maluku Utara	3	-	-	1	4	6
Papua ³	42	10	13	16	15	36
Indonesia	1 120	1 068	1 000	1 032	1 003	1 378

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu,

Note Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Metro Jaya Police Regional consist of Police Subregions of Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Bekasi Regency, Bekasi Municipality, Tangerang Regency, Tangerang Municipality, Depok Municipality, Soekarno-Hatta Airport, and KP3.

² Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat / *Sulselbar Regional Police Covers Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Provinces*

³ Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat / *Papua Regional Police Covers Papua and Papua Barat Provinces*

Sumber / Source : MABES POLRI / *Indonesian National Police Headquarters*

TABEL - TABEL

Tabel 4.3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Provinsi, 2006-2012
Table Estimate of Infant Mortality Rate (IMR) by Province, 2006-2012

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33,0	32,6	32,1	31,7	31,3	30,9	30,5
Sumatera Utara	23,9	23,3	22,7	22,1	21,5	21,0	20,4
Sumatera Barat	28,0	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,2
Riau	22,8	22,3	21,8	21,3	20,9	20,4	20,0
Jambi	28,2	27,5	26,9	26,3	25,7	25,2	24,6
Sumatera Selatan	26,3	25,6	25,0	24,4	23,9	23,3	22,8
Bengkulu	30,3	29,4	28,6	27,7	26,9	26,2	25,4
Lampung	26,7	25,8	24,8	23,9	23,1	22,2	21,4
Kep. Bangka Belitung	26,9	26,4	26,0	25,5	25,1	24,7	24,2
Kepulauan Riau	20,8	20,6	20,3	20,1	19,8	19,6	19,3
DKI Jakarta	8,6	8,4	8,2	8,1	7,9	7,7	7,6
Jawa Barat	28,7	27,9	27,1	26,3	25,6	24,9	24,2
Jawa Tengah	22,2	21,4	20,7	19,9	19,3	18,6	18,0
DI Yogyakarta	8,9	8,7	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7
Jawa Timur	26,3	25,4	24,5	23,6	22,8	22,0	21,2
Banten	32,6	32,0	31,3	30,7	30,1	29,5	28,9
Bali	13,2	12,9	12,7	12,5	12,3	12,1	11,9
Nusa Tenggara Barat	46,1	44,6	43,2	41,9	40,5	39,3	38,0
Nusa Tenggara Timur	33,4	32,3	31,2	30,1	29,1	28,1	27,2
Kalimantan Barat	28,5	28,0	27,4	26,9	26,4	25,9	25,4
Kalimantan Tengah	23,2	22,8	22,4	22,0	21,6	21,3	20,9
Kalimantan Selatan	36,0	34,9	33,9	32,9	31,9	31,0	30,1
Kalimantan Timur	21,5	20,2	19,0	17,8	16,7	15,7	14,8
Sulawesi Utara	12,7	12,1	11,5	10,9	10,4	9,9	9,7
Sulawesi Tengah	36,9	35,9	34,9	33,9	33,0	32,1	31,2
Sulawesi Selatan	29,1	28,2	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2
Sulawesi Tenggara	31,0	30,0	29,1	28,2	27,3	26,4	25,6
Gorontalo	33,2	32,0	30,8	29,7	28,5	27,5	26,4
Sulawesi Barat	29,1	28,2	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2
Maluku	33,5	32,6	31,8	30,9	30,1	29,3	28,6
Maluku Utara	36,8	35,5	34,3	33,1	31,9	30,8	29,7
Papua Barat	33,9	32,7	31,6	30,5	29,5	28,5	27,5
Papua	32,8	31,7	30,7	29,7	28,8	27,8	27,0
Indonesia	28,2	27,5	26,8	26,2	25,5	24,9	24,3

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS

Source Indonesia Population Projection 2005-2025, BPS-Statistics Indonesia

Tabel
Table 4.3.2

Estimasi Angka Harapan Hidup (e_0) Menurut Provinsi (tahun), 2006-2012
Estimate of Life Expectancy at Birth (e_0) by Province (year), 2006-2012

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	68,9	69,0	69,1	69,2	69,3	69,5	69,6
Sumatera Utara	71,4	71,6	71,7	71,9	72,1	72,2	72,4
Sumatera Barat	70,2	70,5	70,7	70,9	71,1	71,4	71,6
Riau	71,7	71,9	72,0	72,1	72,2	72,4	72,5
Jambi	70,2	70,3	70,5	70,7	70,8	71,0	71,2
Sumatera Selatan	70,7	70,9	71,1	71,2	71,4	71,5	71,7
Bengkulu	69,6	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	70,9
Lampung	70,6	70,9	71,1	71,3	71,6	71,8	72,1
Kep. Bangka Belitung	70,5	70,7	70,8	70,9	71,0	71,2	71,3
Kepulauan Riau	72,3	72,3	72,4	72,5	72,6	72,6	72,7
DKI Jakarta	75,6	75,8	75,9	76,0	76,2	76,3	76,4
Jawa Barat	70,1	70,3	70,5	70,7	70,9	71,1	71,3
Jawa Tengah	72,0	72,1	72,3	72,5	72,6	72,8	73,0
DI Yogyakarta	75,4	75,5	75,7	75,8	76,0	76,2	76,3
Jawa Timur	70,7	71,0	71,2	71,4	71,7	71,9	72,2
Banten	69,0	69,2	69,3	69,5	69,7	69,8	70,0
Bali	74,0	74,1	74,1	74,2	74,3	74,4	74,4
Nusa Tenggara Barat	65,7	66,0	66,3	66,7	67,0	67,3	67,6
Nusa Tenggara Timur	68,9	69,1	69,4	69,6	69,9	70,2	70,4
Kalimantan Barat	70,1	70,2	70,4	70,5	70,7	70,8	71,0
Kalimantan Tengah	71,6	71,7	71,8	71,9	72,0	72,1	72,3
Kalimantan Selatan	68,2	68,4	68,7	68,9	69,2	69,4	69,7
Kalimantan Timur	72,3	72,5	72,7	73,0	73,2	73,4	73,6
Sulawesi Utara	74,2	74,4	74,6	74,8	74,9	75,1	75,3
Sulawesi Tengah	67,9	68,2	68,4	68,6	68,9	69,1	69,4
Sulawesi Selatan	70,0	70,2	70,4	70,6	70,8	71,1	71,3
Sulawesi Tenggara	69,5	69,7	69,9	70,2	70,4	70,7	70,9
Gorontalo	68,9	69,2	69,5	69,8	70,1	70,4	70,6
Sulawesi Barat	70,0	70,2	70,4	70,6	70,8	71,1	71,3
Maluku	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,9	70,1
Maluku Utara	68,0	68,3	68,6	68,9	69,2	69,5	69,8
Papua Barat	68,7	69,0	69,3	69,5	69,8	70,1	70,3
Papua	69,0	69,3	69,5	69,8	70,0	70,3	70,5
Indonesia	70,2	70,4	70,5	70,7	70,9	71,1	71,3

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS

Source *Indonesia Population Projection 2005-2025, BPS-Statistics Indonesia*

TABEL - TABEL

Tabel 4.3.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Selama Sebulan yang lalu Menurut Provinsi, 2006-2011
Table 4.3.3 Percentage of Population who Sought Treatment Outpatient at Health Center and Subsidiary Health Center During The Previous Month by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,55	45,20	37,80	45,95	41,47	47,87
Sumatera Utara	29,00	21,93	18,79	19,47	20,63	19,81
Sumatera Barat	35,82	37,20	33,69	33,88	31,61	33,39
Riau	41,18	36,23	27,77	34,61	35,50	31,78
Jambi	50,25	40,33	35,20	43,69	36,86	35,96
Sumatera Selatan	53,14	29,53	33,26	33,74	32,37	33,57
Bengkulu	43,07	36,69	32,23	30,05	34,57	28,77
Lampung	34,70	28,59	27,21	26,77	29,29	27,29
Kep. Bangka Belitung	49,95	42,52	35,37	38,49	37,01	38,19
Kepulauan Riau	41,61	37,39	44,76	62,78	36,22	43,53
DKI Jakarta	31,52	31,16	31,25	33,44	33,27	32,33
Jawa Barat	36,75	32,76	33,44	32,94	34,16	37,80
Jawa Tengah	35,57	30,25	31,33	31,32	30,35	29,44
DI Yogyakarta	36,70	28,11	32,11	33,45	33,07	32,32
Jawa Timur	31,69	26,20	24,63	24,83	25,87	25,80
Banten	35,81	27,58	31,89	27,38	30,51	30,02
Bali	28,59	26,25	21,48	23,56	24,54	25,68
Nusa Tenggara Barat	52,69	39,10	34,52	37,87	40,59	43,22
Nusa Tenggara Timur	64,32	65,10	70,34	68,98	68,46	74,29
Kalimantan Barat	43,13	39,95	37,37	38,81	39,67	38,19
Kalimantan Tengah	57,27	46,65	50,05	51,39	48,93	55,09
Kalimantan Selatan	46,90	39,48	39,33	41,14	42,96	39,64
Kalimantan Timur	45,61	46,21	42,75	44,11	44,93	45,70
Sulawesi Utara	41,33	31,66	35,48	30,71	31,91	33,76
Sulawesi Tengah	51,49	46,63	47,31	49,10	51,81	46,53
Sulawesi Selatan	53,43	46,89	49,29	50,42	52,42	55,48
Sulawesi Tenggara	56,13	60,96	53,64	59,70	58,39	58,49
Gorontalo	42,77	43,88	44,90	40,22	42,82	44,57
Sulawesi Barat	63,98	62,75	57,62	57,51	59,42	59,89
Maluku	60,97	53,86	56,18	57,57	56,82	58,54
Maluku Utara	48,57	47,80	56,48	54,80	55,40	58,63
Papua Barat	41,30	62,52	72,25	54,31	50,77	59,47
Papua	65,94	65,30	66,17	63,35	54,13	66,21
Indonesia	39,16	33,93	33,43	34,00	34,60	35,12

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.3.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Provinsi dan Alat KB yang sedang Digunakan, 2011
Percentage of Married Women Aged 15-49 Years by Province and Type of Contraceptive Currently Used, 2011

Provinsi Province	MOW/ Tubektomi Tubectomy	MOP/ Vasektomi Vasectomy	AKDR/ IUD	Suntikan <i>Injection</i>	Susuk KB <i>Implant</i>	Pil <i>Pill</i>	Kondom <i>Condom</i>	Intravag/ Tisu <i>Intravag/Tissue</i>	Kondom wanita <i>Female condom</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,67	0,23	2,46	68,91	1,19	24,36	0,56	0,00	0,07
Sumatera Utara	4,52	1,40	3,93	48,09	6,24	30,81	1,29	0,04	0,30
Sumatera Barat	2,33	0,63	7,10	62,34	8,44	16,27	1,02	0,02	0,03
Riau	1,59	0,24	3,46	60,38	3,55	27,71	1,21	0,02	0,22
Jambi	1,31	0,11	2,70	60,64	5,96	28,05	0,39	0,07	0,07
Sumatera Selatan	1,60	0,39	1,69	71,36	7,16	16,15	0,51	0,11	0,01
Bengkulu	1,07	0,44	3,80	65,70	10,12	16,19	1,55	0,01	0,13
Lampung	0,85	0,34	3,18	66,84	6,30	21,37	0,58	0,00	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,61	0,19	2,32	55,78	3,46	34,10	0,71	0,00	0,09
Kepulauan Riau	1,78	1,38	4,81	51,99	2,20	34,38	1,34	0,00	0,08
DKI Jakarta	2,62	0,38	11,44	52,74	2,38	25,55	1,97	0,00	0,07
Jawa Barat	1,82	0,36	7,30	61,41	2,82	25,23	0,43	0,05	0,07
Jawa Tengah	4,64	0,79	5,61	66,23	7,09	13,46	1,02	0,04	0,08
DI Yogyakarta	4,22	0,66	19,61	47,40	5,36	13,37	4,16	0,00	0,15
Jawa Timur	3,72	0,45	7,15	59,96	4,34	22,63	0,50	0,02	0,03
Banten	1,06	0,31	4,56	69,19	2,76	20,62	0,67	0,08	0,06
Bali	4,60	0,81	29,83	45,45	2,00	13,76	1,29	0,11	0,07
Nusa Tenggara Barat	1,00	0,26	5,16	70,21	8,64	13,43	0,53	0,00	0,00
Nusa Tenggara Timur	2,04	1,51	7,20	61,64	10,94	12,39	0,18	0,02	0,04
Kalimantan Barat	1,55	0,36	2,03	62,63	1,95	30,26	0,52	0,03	0,09
Kalimantan Tengah	0,55	0,23	0,71	57,06	3,30	35,91	0,47	0,11	0,02
Kalimantan Selatan	1,09	0,16	0,97	45,86	3,45	47,06	0,72	0,00	0,05
Kalimantan Timur	1,97	0,19	5,95	48,35	1,81	39,56	0,73	0,08	0,02
Sulawesi Utara	1,52	0,61	5,70	46,36	15,50	28,64	0,47	0,04	0,06
Sulawesi Tengah	1,35	0,22	4,14	47,00	6,50	38,51	0,30	0,03	0,00
Sulawesi Selatan	0,87	0,21	2,00	58,78	5,37	29,92	0,55	0,07	0,01
Sulawesi Tenggara	1,35	0,20	1,74	44,49	10,05	37,19	0,10	0,06	0,07
Gorontalo	1,21	0,49	5,51	42,17	18,00	31,16	0,18	0,04	0,21
Sulawesi Barat	1,13	0,12	3,11	44,02	5,91	43,40	0,27	0,00	0,00
Maluku	2,96	0,34	2,07	64,02	11,12	14,34	0,00	0,00	0,06
Maluku Utara	0,84	0,09	0,79	70,55	11,20	14,97	0,11	0,00	0,00
Papua Barat	1,68	0,59	2,32	54,13	4,07	29,74	0,11	0,00	0,23
Papua	1,38	0,16	1,67	38,78	3,48	17,27	0,39	0,04	0,05
Indonesia	2,58	0,49	6,14	60,37	4,91	23,14	0,75	0,04	0,07

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.3.5 **Percentase Balita yang Diimunisasi Menurut Provinsi dan Jenis Imunisasi, 2010-2011**
Table **Percentage of Under-Fives who Immunized by Province and Type of Immunization, 2010-2011**

Provinsi Province	BCG		DPT		Polio		Campak/Morbili Measles		Hepatitis B	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	87,12	87,02	84,70	84,54	87,66	86,89	74,24	74,06	79,88	79,31
Sumatera Utara	86,37	86,46	83,54	83,13	85,56	85,22	72,59	71,32	76,24	77,57
Sumatera Barat	90,11	88,48	86,24	84,83	87,64	85,91	72,43	70,98	82,39	80,47
Riau	88,79	87,58	86,13	84,63	88,20	84,78	77,53	73,26	83,39	79,67
Jambi	91,13	91,49	87,95	88,13	88,37	87,89	76,77	75,66	84,16	83,42
Sumatera Selatan	92,21	92,18	88,78	89,99	89,17	88,70	77,72	77,70	84,47	85,16
Bengkulu	93,13	94,13	89,94	90,61	90,05	89,74	79,62	78,01	88,89	89,10
Lampung	95,28	94,59	93,00	90,91	92,82	90,15	80,04	79,69	89,01	87,90
Kep. Bangka Belitung	89,53	90,67	86,19	86,44	88,14	86,15	75,95	73,51	85,67	84,38
Kepulauan Riau	94,73	95,74	90,53	93,09	93,32	93,39	80,66	81,42	90,28	91,09
DKI Jakarta	97,38	96,01	95,49	93,56	94,25	93,07	80,47	78,74	93,14	91,22
Jawa Barat	94,98	92,51	92,31	90,14	92,31	90,84	78,82	77,28	85,92	84,59
Jawa Tengah	97,58	96,33	94,16	93,50	94,85	93,20	80,84	80,18	92,00	90,98
DI Yogyakarta	97,62	99,08	93,45	95,67	93,94	95,08	82,36	86,17	94,81	95,60
Jawa Timur	94,36	93,67	91,13	91,52	91,70	91,37	78,70	78,79	87,86	86,66
Banten	89,51	88,53	86,62	85,95	88,72	86,93	73,90	74,44	80,15	79,43
Bali	98,94	98,12	95,49	94,65	96,19	94,75	82,50	82,45	94,63	94,54
Nusa Tenggara Barat	95,94	95,87	92,14	92,52	93,64	93,18	80,54	80,50	92,94	92,33
Nusa Tenggara Timur	92,21	92,61	90,17	90,57	90,78	90,60	79,21	80,59	87,21	88,12
Kalimantan Barat	88,32	87,22	86,28	85,48	86,97	86,60	74,41	74,29	83,12	81,26
Kalimantan Tengah	86,51	87,16	83,96	84,43	85,53	85,02	75,08	74,84	81,38	81,37
Kalimantan Selatan	89,20	87,76	85,91	84,44	87,02	83,52	72,67	72,10	81,90	80,14
Kalimantan Timur	96,11	95,12	93,86	93,04	93,92	92,59	83,37	81,49	91,36	89,92
Sulawesi Utara	97,14	95,03	93,82	91,66	93,95	91,12	83,50	79,51	91,95	89,12
Sulawesi Tengah	87,94	84,18	85,19	80,33	86,80	80,51	74,78	69,34	82,90	76,23
Sulawesi Selatan	91,18	91,00	88,03	87,13	88,34	86,73	76,65	75,02	86,46	83,79
Sulawesi Tenggara	89,86	89,05	86,95	86,01	87,86	84,98	76,87	74,52	84,17	82,77
Gorontalo	93,31	94,77	89,46	90,62	91,07	90,02	78,51	79,40	86,75	87,76
Sulawesi Barat	76,51	81,16	74,33	78,59	76,65	79,71	67,45	67,69	71,48	76,11
Maluku	79,38	81,54	76,77	79,00	78,49	80,64	68,87	71,26	72,29	76,54
Maluku Utara	89,19	87,09	86,39	85,20	88,44	86,63	77,71	76,14	83,19	82,56
Papua Barat	92,22	87,91	89,47	85,59	89,96	85,99	77,54	75,88	85,65	81,49
Papua	68,21	74,65	65,51	68,47	68,19	70,51	59,22	62,18	61,32	64,94
Indonesia	92,77	91,85	89,79	89,07	90,56	89,34	77,67	76,88	85,95	85,01

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.3.6 Status Gizi Balita Menurut Provinsi, 2005-2010
Table 4.3.6 Nutritional Status of Children Under Five Years Old by Province, 2005-2010

Provinsi Province	Gizi Buruk Severe Nourished			Gizi Kurang Lack Nourished			Gizi Normal Moderate Nourished			Gizi Lebih Well Nourished		
	2005 ¹	2007	2010	2005 ¹	2007	2010	2005 ¹	2007	2010	2005 ¹	2007	2010
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	-	10,70	7,10	-	15,80	16,60	-	69,20	72,10	-	4,20	4,20
Sumatera Utara	10,45	8,40	7,80	18,20	14,30	13,50	67,79	72,70	71,10	3,56	4,50	7,50
Sumatera Barat	10,81	5,90	2,80	19,63	14,30	14,40	66,88	77,00	81,30	2,68	2,80	1,60
Riau	9,27	7,50	4,80	16,54	13,90	11,40	67,52	73,30	75,20	6,67	5,30	8,60
Jambi	5,54	6,30	5,40	18,72	12,60	14,30	71,33	75,80	76,30	4,41	5,30	4,10
Sumatera Selatan	8,54	6,50	5,50	17,52	11,70	14,40	69,02	75,00	74,50	4,92	6,70	5,60
Bengkulu	6,97	4,80	4,30	19,59	11,90	11,00	69,91	77,20	73,70	3,53	6,00	10,90
Lampung	7,24	5,70	3,50	16,72	11,80	10,00	72,33	78,30	79,80	3,71	4,20	6,80
Kep. Bangka Belitung	8,70	4,60	3,20	17,04	13,70	11,70	69,07	76,40	80,60	5,19	5,40	4,50
Kepulauan Riau ²	-	3,00	4,30	-	9,40	9,80	-	81,50	81,30	-	6,10	4,60
DKI Jakarta	7,30	2,90	2,60	15,03	10,00	8,70	72,87	80,60	77,70	4,80	6,50	11,10
Jawa Barat	5,77	3,70	3,10	16,23	11,30	9,90	74,82	81,50	81,60	3,19	3,50	5,40
Jawa Tengah	5,84	4,00	3,30	18,13	12,00	12,40	73,34	80,40	78,10	2,69	3,60	6,20
DI Yogyakarta	4,08	2,40	1,40	10,97	8,50	9,90	81,76	85,00	81,50	3,19	4,00	7,30
Jawa Timur	5,67	4,80	4,80	18,09	12,60	12,30	73,04	78,00	75,30	3,20	4,50	7,60
Banten	6,98	4,40	4,80	19,19	12,20	13,70	69,49	79,90	77,50	4,33	3,40	4,00
Bali	5,10	3,20	1,70	15,41	8,20	9,20	75,73	83,90	81,00	3,76	4,70	8,00
Nusa Tenggara Barat	8,44	8,10	10,60	24,95	16,70	19,90	64,42	71,40	66,90	2,19	3,70	2,60
Nusa Tenggara Timur	13,04	9,40	9,00	28,03	24,20	20,40	57,25	64,40	67,50	1,68	2,00	3,10
Kalimantan Barat	11,56	8,50	9,50	21,16	14,00	19,70	63,61	72,50	67,00	3,67	5,00	3,90
Kalimantan Tengah	10,19	8,10	5,30	17,18	16,10	22,30	68,54	72,10	69,40	4,08	3,60	2,90
Kalimantan Selatan	11,29	8,40	6,00	24,48	18,20	16,80	61,94	70,40	73,10	2,29	3,00	4,00
Kalimantan Timur	7,59	6,20	4,40	18,33	13,10	12,70	69,55	75,30	75,90	4,53	5,40	7,00
Sulawesi Utara	15,41	4,30	3,80	26,07	11,50	6,80	56,44	80,70	84,30	2,07	3,60	5,10
Sulawesi Tengah	10,36	8,90	7,90	20,96	18,70	18,60	66,50	69,40	69,10	2,18	3,00	4,40
Sulawesi Selatan	8,65	5,10	6,40	21,51	12,50	18,60	66,51	73,10	72,20	3,33	9,30	2,80
Sulawesi Tenggara	10,04	6,80	6,50	19,34	15,90	16,30	67,69	73,60	66,90	2,93	3,60	10,20
Gorontalo ²	-	8,20	11,20	-	17,20	15,30	-	71,30	69,40	-	3,30	4,10
Sulawesi Barat ²	-	10,00	7,60	-	15,40	12,90	-	72,10	74,90	-	2,40	4,70
Maluku	15,19	9,30	8,40	18,47	18,50	17,80	62,51	67,30	70,50	3,83	4,90	3,40
Maluku Utara	10,24	6,70	5,70	17,06	16,10	17,90	68,90	74,30	73,20	3,80	3,00	3,20
Papua Barat ²	-	6,80	9,10	-	16,40	17,40	-	74,20	67,30	-	2,70	6,20
Papua	13,75	6,60	6,30	17,46	14,60	10,00	63,93	73,40	78,40	4,86	5,30	5,30
Indonesia	8,80	5,40	4,90	19,24	13,00	13,00	68,48	77,20	76,20	3,48	4,30	5,80

Catatan / Note : ¹ Sumber dari Survey Konsumsi Garam Yodium, BPS / Source from Iodized Salt Surveys, BPS-Statistics Indonesia

² Data tahun 2005 masih tergabung dengan provinsi induknya / The 2005 data was still integrated with main province

Sumber / Source : Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan / Basic Health Research, Ministry of Health

TABEL - TABEL

Tabel 4.3.7 Jumlah Penderita dan Angka Kesakitan Malaria Menurut Provinsi, 2006-2010
Table Number of Malaria Patient and Annual Paracite Incidence (API) by Province, 2006-2010

Provinsi Province	Jumlah Penderita Number of Patient				
	2006		2007		2008
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	25 220	50 616	9 690	22 888	31 913
Sumatera Utara	149 815	33 179	75 549	75 549	114 272
Sumatera Barat	2 150	2 446	7 340	7 340	1 258
Riau	17 099	18 499	13 601	13 601	9 161
Jambi	56 026	19 122	57 429	50 253	40 191
Sumatera Selatan	58 875	2 132	31 601	31 601	51 840
Bengkulu	8 064	16 148	37 419	45 780	59 016
Lampung	32 356	24 406	19 674	42 222	27 947
Kep. Bangka Belitung	44 734	31 080	50 714	66 609	63 978
Kepulauan Riau	6 140	15 424	18 238	9 488	17 151
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	29 901	22 240	43 560	33 798	18 918
Jawa Tengah	206 566	171 924	120 989	84 792	76 717
DI Yogyakarta	38 125	2 458	3 107	3 107	36
Jawa Timur	105 281	9 167	41 571	41 571	23 917
Banten	658	2 692	2 795	4 946	1 068
Bali	32 053	17 925	18 764	13 659	10 846
Nusa Tenggara Barat	79 958	51 963	118 185	57 546	80 044
Nusa Tenggara Timur	453 306	332 114	508 244	232 270	492 792
Kalimantan Barat	3 096	40 857	13 027	13 027	122 137
Kalimantan Tengah	25 679	31 297	24 254	25 957	33 768
Kalimantan Selatan	8 766	8 297	13 211	12 598	11 390
Kalimantan Timur	8 059	5 919	18 141	18 141	19 560
Sulawesi Utara	33 321	20 129	32 593	32 593	35 891
Sulawesi Tengah	58 224	34 686	51 650	55 133	79 462
Sulawesi Selatan	9 504	2 132	11 319	11 319	23 503
Sulawesi Tenggara	29 942	20 356	23 221	12 209	25 289
Gorontalo	11 793	10 674	13 834	13 834	7 671
Sulawesi Barat	1 001	15 552	8 604	8 604	26 385
Maluku	21 258	39 488	67 283	67 283	51 321
Maluku Utara	56 606	88 937	58 289	58 289	38 981
Papua Barat	138 901	242 722	149 803	113 375	171 343
Papua	363 589	390 264	227 508	63 219	311 052
Indonesia	2 116 066	1 774 845	1 891 207	1 342 601	2 078 818

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.3.7

Provinsi Province	Angka Kesakitan Malaria Annual Parasite Incident				
	2006 ¹	2007	2008	2009	2010
	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,32	0,94	0,25	0,48	0,54
Sumatera Utara	16,93	-	0,28	0,25	0,61
Sumatera Barat	0,90	0,03	0,57	0,41	0,11
Riau	5,22	-	0,23	0,47	0,24
Jambi	20,96	1,21	2,12	1,89	1,64
Sumatera Selatan	11,00	0,08	0,54	0,45	0,45
Bengkulu	6,29	1,52	4,70	4,36	4,26
Lampung	5,14	0,33	0,33	0,78	0,32
Kep. Bangka Belitung	43,05	15,89	8,09	7,87	5,06
Kepulauan Riau	4,93	1,06	1,34	1,12	0,86
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,52	0,37	0,58	0,36	0,43
Jawa Tengah	0,13	0,12	0,07	0,08	0,10
DI Yogyakarta	0,10	0,05	0,00	0,03	0,01
Jawa Timur	0,18	0,18	0,71	0,47	0,10
Banten	0,02	0,05	0,03	0,14	0,03
Bali	0,55	0,42	0,17	0,02	0,03
Nusa Tenggara Barat	19,25	3,47	4,88	1,93	1,81
Nusa Tenggara Timur	105,66	30,09	20,35	15,62	12,14
Kalimantan Barat	0,90	-	0,65	0,54	0,45
Kalimantan Tengah	14,84	-	2,53	1,38	3,48
Kalimantan Selatan	3,51	0,49	1,04	1,06	0,79
Kalimantan Timur	5,01	2,90	2,04	0,93	0,47
Sulawesi Utara	20,29	1,99	3,37	4,57	1,63
Sulawesi Tengah	25,71	2,01	2,56	1,35	2,08
Sulawesi Selatan	1,53	0,08	0,31	0,47	0,35
Sulawesi Tenggara	14,95	0,52	0,28	0,22	0,46
Gorontalo	15,40	0,43	4,13	0,54	1,71
Sulawesi Barat	0,87	0,48	0,57	0,85	0,55
Maluku	15,35	0,85	8,94	7,37	5,43
Maluku Utara	58,58	11,25	8,91	8,91	6,45
Papua Barat	198,02	53,57	46,10	27,66	17,86
Papua	164,75	41,66	18,35	9,94	18,03
Indonesia	...	2,89	2,47	1,85	1,96

Catatan / Note : ¹ API = Annual Parasite Incident (in Java & Bali Islands), AMI = Annual Malaria Incident (in outer Java & Bali)

Sumber / Source : Profil Kesehatan Indonesia 2006-2010, Kementerian Kesehatan / Health Profile of Indonesia 2006-2010, Ministry of Health

TABEL - TABEL

Tabel 4.3.8 Kumulatif Kasus AIDS, Kasus Meninggal, dan Angka Kumulatif Kasus Menurut Provinsi, 2010
Table AIDS Cummulative Cases, Death Cases, and Cases Rate by Province, 2010

Provinsi Province	Jumlah Kasus Number of Cases	Meninggal Death	Angka Kumulatif Kasus ¹ Cases Rate ¹
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	53	12	1,29
Sumatera Utara	507	94	3,88
Sumatera Barat	410	99	9,10
Riau	477	132	8,39
Jambi	268	62	9,37
Sumatera Selatan	219	38	3,04
Bengkulu	131	29	7,49
Lampung	144	42	1,86
Kep. Bangka Belitung	120	18	11,65
Kepulauan Riau	374	143	24,96
DKI Jakarta	3 995	576	44,74
Jawa Barat	3 728	665	8,91
Jawa Tengah	944	289	2,92
DI Yogyakarta	505	108	14,82
Jawa Timur	3 771	779	10,44
Banten	401	67	3,86
Bali	1 747	311	49,16
Nusa Tenggara Barat	142	69	3,07
Nusa Tenggara Timur	242	36	5,55
Kalimantan Barat	1 125	138	23,96
Kalimantan Tengah	57	4	2,40
Kalimantan Selatan	27	5	0,78
Kalimantan Timur	11	10	0,35
Sulawesi Utara	173	62	7,69
Sulawesi Tengah	12	6	0,46
Sulawesi Selatan	591	62	6,65
Sulawesi Tenggara	22	5	0,95
Gorontalo	3	1	0,33
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	192	70	14,21
Maluku Utara	17	8	1,77
Papua Barat	58	19	8,93
Papua	3 665	580	173,69
Indonesia	24 131	4 539	10,46

Catatan / Note :¹ Per 100.000 penduduk / Per 100,000 population

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL), Kementerian Kesehatan

Source Directorate General of Disease Control and Environmental Health, Ministry of Health

Tabel 4.3.9
Table **Jumlah Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi, 2006-2010**
Number of Tuberculosis Disease Cases by Province, 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4 274	3 424	3 828	3 966	4 592
Sumatera Utara	18 969	15 799	17 133	16 815	19 673
Sumatera Barat	5 131	5 449	5 403	5 482	6 068
Riau	4 003	3 570	3 478	4 325	4 553
Jambi	2 981	1 209	2 960	3 291	3 459
Sumatera Selatan	7 660	2 611	8 284	7 779	8 046
Bengkulu	1 768	7 721	1 598	1 941	2 083
Lampung	6 788	1 015	7 592	7 266	7 241
Kep. Bangka Belitung	1 059	1 690	1 210	1 229	1 500
Kepulauan Riau	1 249	7 067	1 500	1 695	1 621
DKI Jakarta	18 749	23 774	25 490	25 074	24 895
Jawa Barat	53 707	54 726	61 557	61 964	61 010
Jawa Tengah	33 543	15 735	35 951	34 671	37 986
DI Yogyakarta	2 283	33 098	2 461	2 345	2 450
Jawa Timur	35 975	2 341	39 113	38 010	37 511
Banten	14 131	37 500	17 896	15 629	13 877
Bali	2 690	2 902	3 159	3 227	2 942
Nusa Tenggara Barat	5 751	5 384	5 688	5 346	5 122
Nusa Tenggara Timur	5 783	5 229	5 315	5 302	5 507
Kalimantan Barat	5 688	4 914	5 558	5 499	5 797
Kalimantan Tengah	2 078	1 761	1 881	2 090	2 094
Kalimantan Selatan	5 032	4 802	4 990	4 609	4 710
Kalimantan Timur	3 111	3 016	3 829	3 694	3 848
Sulawesi Utara	4 778	4 395	4 858	4 989	4 997
Sulawesi Tengah	2 898	1 335	2 781	2 397	2 719
Sulawesi Selatan	10 211	2 506	8 303	8 223	9 633
Sulawesi Tenggara	3 685	1 075	2 724	2 663	3 445
Gorontalo	1 703	1 075	1 451	1 620	1 822
Sulawesi Barat	1 319	2 733	1 298	1 179	1 361
Maluku	2 785	2 327	2 279	2 702	3 199
Maluku Utara	913	963	981	1 096	1 176
Papua Barat	-	5 375	1 259	1 559	1 487
Papua	6 894	1 521	6 521	7 054	6 437
Indonesia	277 589	268 042	298 329	294 731	302 861

Sumber / Source : Profil Kesehatan Indonesia 2006-2010, Kementerian Kesehatan / Health Profile of Indonesia 2006-2010, Ministry of Health

TABEL - TABEL

Tabel

4.3.10

Prevalensi Perokok Saat ini dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi, 2010

Prevalence of Current Smokers and Average of Cigarettes Consumed by

Population Aged 15 Years and Over by Province, 2010

Provinsi Province	Perokok Saat ini ¹ Current Smokers ¹	Rata-rata Batang Rokok per Hari			
		Average of Cigarettes Consumed per Day			
		1-10	11-20	21-30	31+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37,1	38,8	46,0	9,9	5,4
Sumatera Utara	35,7	41,1	49,7	6,2	3,0
Sumatera Barat	38,4	32,6	55,9	6,4	5,1
Riau	36,3	37,2	54,5	3,9	4,3
Jambi	38,1	35,7	53,1	6,3	4,8
Sumatera Selatan	36,5	48,0	45,4	4,4	2,2
Bengkulu	37,8	43,0	47,8	6,9	2,3
Lampung	38,0	50,3	46,0	2,8	0,8
Kep. Bangka Belitung	35,3	25,1	50,1	8,5	16,2
Kepulauan Riau	38,9	39,3	48,7	6,8	5,2
DKI Jakarta	30,8	56,4	37,4	4,5	1,7
Jawa Barat	37,7	56,5	38,3	4,2	1,0
Jawa Tengah	32,6	62,7	33,7	3,0	0,6
DI Yogyakarta	31,6	66,3	30,2	3,0	0,6
Jawa Timur	31,4	53,2	38,9	6,5	1,4
Banten	36,3	48,6	44,5	5,8	1,1
Bali	31,0	67,8	27,9	3,3	0,9
Nusa Tenggara Barat	35,5	51,7	42,6	3,9	1,8
Nusa Tenggara Timur	41,2	68,7	26,8	3,4	1,1
Kalimantan Barat	34,3	36,8	51,6	7,4	4,2
Kalimantan Tengah	43,1	43,0	45,5	6,2	5,4
Kalimantan Selatan	30,5	34,7	52,4	5,0	7,9
Kalimantan Timur	34,8	37,8	54,2	3,8	4,3
Sulawesi Utara	36,2	61,0	32,8	3,1	3,0
Sulawesi Tengah	38,2	51,2	40,7	4,6	3,5
Sulawesi Selatan	31,6	47,3	46,0	2,0	4,6
Sulawesi Tenggara	28,3	44,9	51,5	0,7	2,8
Gorontalo	38,7	55,7	39,3	3,0	1,9
Sulawesi Barat	35,6	46,0	51,3	0,7	2,0
Maluku	36,7	69,4	25,6	3,0	2,1
Maluku Utara	40,7	59,3	32,6	5,2	2,9
Papua Barat	38,5	59,9	33,5	4,3	2,4
Papua	37,1	54,2	40,0	3,8	2,0
Indonesia	34,7	52,3	41,0	4,7	2,1

Catatan : ¹ Perokok saat ini = merokok satu bulan terakhir (perokok tiap hari dan perokok kadang-kadang)

Note Current smokers =smoking in the last month (daily smokers and occasional smokers)

Sumber / Source : Riset Kesehatan Dasar 2010, Kementerian Kesehatan / Basic Health Research 2010, Ministry of Health

Tabel 4.3.11 Jumlah Kasus Bunuh Diri Menurut Kepolisian Daerah, 2006-2011
Table 4.3.11 Number of Suicide Cases by Regional Police Office, 2006-2011

Kepolisian Daerah Regional Police Office	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2	5	2	2	-	2
Sumatera Utara	51	58	58	52	9	-
Sumatera Barat	30	14	12	11	11	5
Riau	11	23	11	7	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	3	3	7	4	5	-
Bengkulu	2	2	3	5	11	2
Lampung	7	10	-	-	1	-
Kep. Bangka Belitung	-	2	-	-	2	-
Kepulauan Riau	7	8	14	6	1	3
Metro Jaya ¹	29	-	90	55	-	9
Jawa Barat	187	224	107	117	19	20
Jawa Tengah	364	333	264	292	240	201
DI Yogyakarta	57	71	59	56	53	43
Jawa Timur	201	271	147	134	25	156
Banten	-	7	9	1	-	-
Bali	154	132	131	116	14	75
Nusa Tenggara Barat	-	14	3	9	3	4
Nusa Tenggara Timur	13	10	8	5	6	18
Kalimantan Barat	48	37	36	30	15	6
Kalimantan Tengah	4	2	15	6	-	3
Kalimantan Selatan	11	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	16	2	11	-	8	13
Sulawesi Utara	6	3	10	17	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	7
Sulawesi Selatan ²	11	11	18	10	3	14
Sulawesi Tenggara	2	9	2	8	5	1
Gorontalo	2	4	-	1	-	-
Maluku	4	6	2	1	-	-
Maluku Utara	-	2	-	-	-	-
Papua ³	6	7	5	2	2	1
Indonesia	1 228	1 270	1 025	947	433	583

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Note *Metro Jaya Police Regional consist of Police Subregions of Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Bekasi Regency, Bekasi Municipality, Tangerang Regency, Tangerang Municipality, Depok Municipality, Soekarno-Hatta Airport, and KP3.*

² Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat / *Sulselbar Regional Police Covers Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Provinces*

³ Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat / *Papua Regional Police Covers Papua and Papua Barat Provinces*

Sumber / Source : MABES POLRI / *Indonesian National Police Headquarters*

TABEL - TABEL

Tabel 4.4.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Tamat Pendidikan Dasar¹ Menurut Provinsi, 2006-2011

Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Graduated from Primary Education¹ by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	53,03	55,71	56,67	59,28	60,46	60,23
Sumatera Utara	58,55	58,92	58,47	59,32	62,23	61,39
Sumatera Barat	51,91	52,82	54,23	56,41	57,05	55,36
Riau	52,72	53,96	56,84	57,31	56,55	57,35
Jambi	45,30	47,26	48,30	48,69	49,97	50,73
Sumatera Selatan	44,52	45,56	44,52	46,54	47,74	47,42
Bengkulu	49,21	50,95	50,82	53,64	53,49	53,78
Lampung	41,99	44,70	43,51	47,06	49,51	48,46
Kep. Bangka Belitung	38,67	41,43	44,42	44,86	44,27	45,35
Kepulauan Riau	59,14	63,60	49,29	51,96	68,69	70,86
DKI Jakarta	73,42	73,51	72,58	74,27	75,72	76,57
Jawa Barat	43,57	43,68	43,77	46,57	49,01	48,05
Jawa Tengah	39,34	39,45	40,25	41,70	43,20	43,12
DI Yogyakarta	58,17	59,32	58,79	60,01	62,78	64,78
Jawa Timur	41,34	41,67	41,67	43,88	44,18	45,20
Banten	48,71	48,50	51,10	51,01	54,75	55,63
Bali	49,13	49,44	50,90	51,43	54,64	56,13
Nusa Tenggara Barat	37,44	40,89	39,31	40,45	40,67	43,51
Nusa Tenggara Timur	30,48	32,03	34,23	33,67	37,87	34,99
Kalimantan Barat	37,50	40,24	39,07	39,05	40,99	40,16
Kalimantan Tengah	46,77	47,08	45,07	47,35	48,44	47,86
Kalimantan Selatan	42,80	44,89	45,21	45,30	46,67	46,18
Kalimantan Timur	57,32	59,77	60,18	59,38	60,95	63,26
Sulawesi Utara	58,67	60,73	56,66	57,39	58,41	58,88
Sulawesi Tengah	44,89	47,44	46,99	47,47	48,76	48,01
Sulawesi Selatan	44,86	45,76	44,59	46,28	50,14	48,53
Sulawesi Tenggara	48,70	50,60	50,25	51,07	52,99	52,68
Gorontalo	33,15	35,45	36,42	40,17	42,16	40,09
Sulawesi Barat	32,95	34,94	40,53	41,36	43,20	40,04
Maluku	52,66	55,95	57,09	54,38	59,54	57,89
Maluku Utara	46,05	48,79	50,93	50,38	53,48	51,66
Papua Barat	42,26	48,05	53,29	52,61	62,27	59,77
Papua	36,78	42,45	40,72	42,79	43,24	38,57
Indonesia	45,66	46,56	46,66	48,33	50,26	50,18

Catatan : ¹ Program pendidikan dasar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP)

Note Primary education with a program six years in elementary school and 3 years in junior high school

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Menurut Provinsi, 2006-2011
Table 4.4.2 Net Enrollment Ratio of Elementary School by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	95,5	95,7	96,0	97,0	97,3	92,6
Sumatera Utara	94,0	93,9	94,3	94,5	95,3	91,5
Sumatera Barat	94,2	94,5	94,6	94,7	95,5	93,5
Riau	94,7	94,8	95,0	95,5	96,2	91,7
Jambi	94,4	93,9	94,3	95,0	95,6	92,7
Sumatera Selatan	93,0	92,7	93,0	93,6	94,2	89,8
Bengkulu	93,9	94,2	94,4	95,0	95,5	92,7
Lampung	93,9	94,0	94,3	94,8	95,2	91,5
Kep. Bangka Belitung	91,5	91,6	91,8	92,5	92,9	91,1
Kepulauan Riau	93,7	93,5	93,8	93,9	94,6	92,0
DKI Jakarta	90,8	93,3	93,8	94,1	94,7	89,8
Jawa Barat	94,2	94,2	94,2	94,6	95,0	92,3
Jawa Tengah	94,1	94,8	95,1	95,6	95,9	90,2
DI Yogyakarta	94,4	93,5	94,3	94,4	94,8	92,0
Jawa Timur	94,2	94,5	94,6	95,3	95,6	91,9
Banten	94,8	93,0	93,4	94,1	94,7	92,2
Bali	93,3	94,4	94,9	95,0	95,5	90,4
Nusa Tenggara Barat	94,5	94,1	94,2	94,8	95,2	92,7
Nusa Tenggara Timur	91,6	91,6	91,7	92,5	93,0	92,1
Kalimantan Barat	93,8	93,5	94,0	94,0	94,8	92,2
Kalimantan Tengah	96,0	95,4	95,7	96,1	96,6	92,3
Kalimantan Selatan	93,3	94,0	94,2	94,5	95,0	92,0
Kalimantan Timur	92,9	93,2	93,6	93,7	94,1	92,2
Sulawesi Utara	90,4	90,8	91,2	91,9	92,3	85,9
Sulawesi Tengah	92,9	92,0	92,8	93,0	93,5	90,0
Sulawesi Selatan	91,1	92,1	92,2	92,3	92,9	89,5
Sulawesi Tenggara	92,3	93,6	94,2	94,7	95,1	88,8
Gorontalo	90,5	90,2	90,4	90,4	90,8	90,0
Sulawesi Barat	91,7	92,2	92,7	92,8	93,9	89,4
Maluku	92,2	93,5	93,9	94,4	95,0	88,0
Maluku Utara	93,1	91,9	92,5	93,4	94,0	90,0
Papua Barat	78,1	80,9	90,8	91,3	91,9	88,3
Papua	88,2	90,7	81,8	76,1	76,2	70,1
Indonesia	93,5	93,8	94,0	94,4	94,8	91,0

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL-TABEL

Tabel 4.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama Menurut Provinsi, 2006-2011
Table Net Enrollment Ratio of Junior High School by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	78,4	76,4	76,6	77,4	78,6	74,8
Sumatera Utara	73,1	73,6	74,0	74,2	74,8	68,0
Sumatera Barat	67,8	67,2	67,4	67,6	68,2	67,1
Riau	72,9	70,0	70,2	70,6	71,4	66,0
Jambi	65,3	65,8	66,1	66,4	66,9	66,5
Sumatera Selatan	68,0	65,0	65,4	65,9	66,3	64,1
Bengkulu	66,7	68,7	69,0	69,8	70,4	68,6
Lampung	66,7	68,3	68,8	69,2	69,6	66,6
Kep. Bangka Belitung	55,3	52,2	52,7	53,1	53,6	60,2
Kepulauan Riau	72,0	71,3	72,0	72,5	72,9	73,3
DKI Jakarta	71,4	71,3	71,4	72,0	72,2	68,8
Jawa Barat	62,1	66,9	67,4	67,9	68,4	69,6
Jawa Tengah	67,7	68,8	69,2	69,7	69,9	69,8
DI Yogyakarta	72,3	74,5	75,0	75,3	75,6	69,2
Jawa Timur	70,3	69,0	69,3	69,9	70,2	71,8
Banten	66,6	58,4	58,9	59,7	60,3	71,1
Bali	70,2	66,6	66,9	67,4	67,8	69,2
Nusa Tenggara Barat	69,6	70,7	71,0	71,3	71,7	76,7
Nusa Tenggara Timur	47,2	49,5	49,7	50,2	51,0	56,7
Kalimantan Barat	60,9	54,6	55,0	55,5	56,1	58,8
Kalimantan Tengah	67,7	60,1	60,2	60,6	61,3	66,4
Kalimantan Selatan	62,1	59,3	59,7	60,6	60,9	65,8
Kalimantan Timur	64,0	71,1	71,3	72,1	72,6	72,4
Sulawesi Utara	66,0	65,9	66,3	66,7	67,0	61,2
Sulawesi Tengah	63,0	59,0	59,3	60,2	60,8	61,7
Sulawesi Selatan	60,3	60,4	60,7	61,7	62,3	65,3
Sulawesi Tenggara	72,4	65,8	66,1	66,4	67,1	64,3
Gorontalo	52,3	52,2	52,3	53,0	53,8	59,2
Sulawesi Barat	55,2	52,2	52,6	53,4	54,2	60,3
Maluku	76,9	70,1	70,6	71,5	71,9	64,3
Maluku Utara	65,3	64,7	65,1	65,5	66,0	65,9
Papua Barat	47,4	48,6	48,9	49,0	49,6	57,7
Papua	53,9	48,8	48,8	49,1	49,6	46,0
Indonesia	66,5	66,6	67,0	67,4	67,7	68,1

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.4.4 **Percentase Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Minimal SMA Menurut Provinsi, 2006-2011**
Percentage of Population Aged 25-64 Years Old have Completed Minimum Education Senior High School by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	28,79	32,26	33,35	34,80	37,52	35,42
Sumatera Utara	35,28	37,02	37,51	38,34	40,00	39,04
Sumatera Barat	32,41	35,21	36,60	38,39	36,81	37,80
Riau	32,29	33,74	38,14	37,56	35,07	35,85
Jambi	24,60	27,35	28,60	28,50	29,13	29,67
Sumatera Selatan	25,21	25,78	26,37	26,88	28,18	27,60
Bengkulu	28,38	31,43	31,01	34,06	34,13	33,58
Lampung	20,86	23,93	23,06	28,99	25,39	26,41
Kep. Bangka Belitung	21,79	25,61	28,75	28,52	27,50	29,18
Kepulauan Riau	43,30	45,25	30,62	36,55	51,74	55,39
DKI Jakarta	55,24	53,97	54,87	55,60	56,80	58,63
Jawa Barat	25,44	26,29	26,70	28,65	31,29	28,93
Jawa Tengah	20,06	21,38	22,53	23,34	24,09	23,12
DI Yogyakarta	41,81	42,81	43,79	43,37	45,79	47,42
Jawa Timur	22,95	24,03	24,62	26,44	26,03	26,18
Banten	29,36	30,02	34,06	32,17	35,78	35,60
Bali	35,24	36,00	36,92	37,87	40,99	41,88
Nusa Tenggara Barat	21,10	23,62	23,20	23,03	23,26	24,15
Nusa Tenggara Timur	18,73	20,97	21,90	21,00	24,65	22,69
Kalimantan Barat	19,33	23,24	22,50	22,80	24,17	23,61
Kalimantan Tengah	23,19	24,77	24,74	26,49	27,39	26,91
Kalimantan Selatan	25,15	26,39	27,16	27,85	28,25	26,89
Kalimantan Timur	37,47	39,52	40,36	39,43	41,80	43,83
Sulawesi Utara	35,80	39,04	36,62	38,10	39,60	38,93
Sulawesi Tengah	26,12	27,78	28,47	28,27	29,03	28,85
Sulawesi Selatan	29,04	30,81	29,48	31,42	33,76	32,06
Sulawesi Tenggara	29,09	31,68	32,15	33,29	34,04	34,21
Gorontalo	20,45	22,82	21,42	25,19	25,97	24,41
Sulawesi Barat	17,77	20,78	26,31	25,32	23,96	24,33
Maluku	31,24	35,11	36,99	36,06	40,43	39,07
Maluku Utara	25,67	28,91	31,56	31,28	32,88	32,24
Papua Barat	24,00	30,75	34,40	35,24	45,23	42,15
Papua	22,98	28,06	25,45	30,19	27,13	25,59
Indonesia	26,86	28,37	29,00	30,29	31,50	31,00

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.4.5 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi, 2006-2011
Table Literacy Rate of Population Aged 15 Years and Over by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	94,27	94,51	95,94	96,30	96,88	95,84
Sumatera Utara	96,61	96,73	97,04	97,15	97,32	96,83
Sumatera Barat	95,88	96,10	96,66	96,80	97,09	96,20
Riau	97,24	97,28	97,76	98,11	98,35	97,61
Jambi	94,71	94,83	95,31	95,50	95,88	95,52
Sumatera Selatan	96,59	96,66	97,05	97,21	97,36	96,65
Bengkulu	93,69	93,91	94,60	94,89	95,30	95,13
Lampung	92,84	93,13	93,63	94,38	94,64	95,02
Kep. Bangka Belitung	94,86	94,87	95,34	95,37	95,46	95,60
Kepulauan Riau	95,29	95,67	95,81	96,11	97,19	97,67
DKI Jakarta	98,23	98,76	98,74	98,94	99,14	98,83
Jawa Barat	94,91	95,32	95,53	95,97	96,18	95,96
Jawa Tengah	88,24	88,62	89,24	89,44	89,95	90,34
DI Yogyakarta	86,43	87,78	89,45	90,23	90,84	91,49
Jawa Timur	87,10	87,42	87,31	87,79	88,35	88,52
Banten	95,01	95,24	95,21	95,92	96,20	96,25
Bali	85,79	85,98	86,94	87,33	88,40	89,17
Nusa Tenggara Barat	78,78	79,75	79,85	80,09	81,05	83,24
Nusa Tenggara Timur	86,50	87,25	87,66	87,89	88,59	87,63
Kalimantan Barat	88,99	89,40	88,52	89,78	90,26	90,03
Kalimantan Tengah	96,35	96,64	97,27	97,35	97,48	96,86
Kalimantan Selatan	93,90	94,05	95,08	95,41	95,94	95,66
Kalimantan Timur	95,48	95,70	96,36	96,90	97,05	96,99
Sulawesi Utara	98,99	98,95	99,15	99,22	99,32	98,85
Sulawesi Tengah	94,81	94,86	95,68	95,81	96,08	94,51
Sulawesi Selatan	85,70	86,24	86,53	87,02	87,75	88,07
Sulawesi Tenggara	89,84	90,50	91,15	91,53	91,85	91,29
Gorontalo	95,70	95,75	95,51	95,70	96,00	94,69
Sulawesi Barat	85,90	86,40	87,31	87,63	88,48	87,61
Maluku	96,50	96,85	97,31	97,39	97,46	96,63
Maluku Utara	94,41	94,65	95,44	95,74	96,08	96,01
Papua Barat	88,55	90,32	92,15	93,03	94,83	92,41
Papua	69,01	75,06	72,47	70,79	68,27	64,08
Indonesia	91,45	91,87	92,19	92,59	92,91	92,81

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.5.1 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, 2000-2010
Table Population and Growth Rate of Population by Province, 2000-2010

Provinsi Province	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Annual Growth Rate of Population (%)	
	2000	2010	1990-2000 ¹	2000-2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 929,2	4 494,4	1,46	2,36 ²
Sumatera Utara	11 642,5	12 982,2	1,32	1,10
Sumatera Barat	4 248,5	4 846,9	0,62 ^r	1,34
Riau	3 907,8	5 538,4	4,27 ^r	3,58
Jambi	2 407,2	3 092,3	1,83 ^r	2,56
Sumatera Selatan	6 210,8	7 450,4	1,24 ^r	1,85
Bengkulu	1 455,5	1 715,5	2,20 ^r	1,67
Lampung	6 730,8	7 608,4	1,17	1,24
Kep. Bangka Belitung	900	1 223,3	-	3,14
Kepulauan Riau	1 040,2	1 679,2	-	4,95
DKI Jakarta	8 361,1	9 607,8	0,13 ^r	1,41
Jawa Barat	35 724,1	43 053,7	2,24 ^r	1,90
Jawa Tengah	31 223,3	32 382,7	0,94	0,37
DI Yogyakarta	3 121,0	3 457,5	0,72	1,04
Jawa Timur	34 766,0	37 476,8	0,70	0,76
Banten	8 098,3	10 632,2	-	2,78
Bali	3 150,1	3 890,8	1,31	2,15
Nusa Tenggara Barat	4 008,6	4 500,2	1,81 ^r	1,17
Nusa Tenggara Timur	3 823,2	4 683,8	1,63	2,07
Kalimantan Barat	4 016,4	4 396,0	2,28 ^r	0,91
Kalimantan Tengah	1 855,5	2 212,1	2,98 ^r	1,79
Kalimantan Selatan	2 984,0	3 626,6	1,45	1,99
Kalimantan Timur	2 451,9	3 553,1	2,80 ^r	3,81
Sulawesi Utara	2 000,9	2 270,6	1,40 ^r	1,28
Sulawesi Tengah	2 176,0	2 635,0	2,52 ^r	1,95
Sulawesi Selatan	7 159,2	8 034,8	1,48 ^r	1,17
Sulawesi Tenggara	1 820,4	2 232,6	3,14 ^r	2,08
Gorontalo	833,5	1 040,2	-	2,26
Sulawesi Barat	891,6	1 158,7	-	2,68
Maluku	1 166,3	1 533,5	0,67 ^r	2,80
Maluku Utara	815,1	1 038,1	-	2,47
Papua Barat	529,7	760,4	-	3,71
Papua	1 684,1	2 833,4	3,10 ^r	5,39
Indonesia	205 132,5	237 641,3	1,40^r	1,49

Catatan : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

¹ Laju pertumbuhan penduduk provinsi hasil pemekaran digabungkan dengan provinsi induknya / Population growth rate of splitting provinces was included in their main provinces

Laju pertumbuhan penduduk 1990-2000 sebesar 1,40 persen mencakup Provinsi Timor Timur pada tahun 1990 / Population growth rate of 1990-2000 at 1,40 percent included Timor Timur in 1990

Laju pertumbuhan penduduk 1990-2000 tanpa Provinsi Timor Timur dihitung dengan periode 115 bulan diperoleh sebesar 1,45 persen / Population growth rate of 1990-2000 excluding Timor Timur was calculated by 115 months period which was 1,45 percent per year

² Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000-2010 untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data SPAN 2005 dan SP 2010 / Annual growth rate of population 2000-2010 to Aceh was calculates using data SPAN 2005 and 2010 Population Census

Sumber / Source : Diolah dari hasil SP 1990, SP 2000, dan SP 2010, BPS / Based on 1990, 2000 and 2010 Population Census, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.5.2 Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi, 2006-2012
Table Total Fertility Rate (TFR) by Province, 2006-2012

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2,44	2,42	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32
Sumatera Utara	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,40	2,38
Sumatera Barat	2,50	2,47	2,45	2,42	2,40	2,38	2,35
Riau	2,39	2,37	2,35	2,33	2,32	2,30	2,28
Jambi	2,31	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25
Sumatera Selatan	2,23	2,21	2,20	2,19	2,18	2,16	2,15
Bengkulu	2,23	2,22	2,20	2,19	2,18	2,16	2,15
Lampung	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23
Kep. Bangka Belitung	2,22	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,14
Kepulauan Riau	2,39	2,37	2,35	2,33	2,32	2,30	2,28
DKI Jakarta	1,56	1,55	1,54	1,52	1,51	1,50	1,49
Jawa Barat	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	2,17	2,16
Jawa Tengah	2,04	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,97
DI Yogyakarta	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,38
Jawa Timur	1,68	1,67	1,67	1,66	1,66	1,65	1,65
Banten	2,30	2,29	2,29	2,28	2,28	2,27	2,27
Bali	1,70	1,69	1,68	1,67	1,66	1,65	1,64
Nusa Tenggara Barat	2,53	2,50	2,46	2,43	2,39	2,36	2,33
Nusa Tenggara Timur	2,94	2,89	2,84	2,80	2,75	2,71	2,66
Kalimantan Barat	2,50	2,48	2,45	2,43	2,41	2,38	2,36
Kalimantan Tengah	2,25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18
Kalimantan Selatan	2,20	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13
Kalimantan Timur	2,26	2,25	2,23	2,22	2,21	2,19	2,18
Sulawesi Utara	1,92	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,88
Sulawesi Tengah	2,37	2,35	2,33	2,31	2,29	2,27	2,25
Sulawesi Selatan	2,32	2,30	2,28	2,27	2,25	2,23	2,22
Sulawesi Tenggara	2,73	2,69	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49
Gorontalo	2,29	2,28	2,27	2,25	2,24	2,23	2,21
Sulawesi Barat	2,31	2,30	2,28	2,26	2,25	2,23	2,22
Maluku	2,75	2,73	2,70	2,68	2,66	2,64	2,62
Maluku Utara	2,68	2,66	2,65	2,63	2,62	2,60	2,58
Papua Barat	2,76	2,73	2,71	2,69	2,67	2,64	2,62
Papua	2,71	2,70	2,68	2,67	2,65	2,64	2,62
Indonesia	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13

Sumber / Source : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS / 2005-2025 Indonesia Population Projection, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.5.3 Angka Beban Ketergantungan Menurut Provinsi (persen), 2006-2012
Table Dependency Ratio by Province (percent), 2006-2012

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	55,9	54,9	54,2	53,4	52,7	52,1	51,6
Sumatera Utara	58,2	56,4	55,5	54,7	53,9	53,1	52,4
Sumatera Barat	58,9	56,9	56,0	55,2	54,3	53,5	52,8
Riau	51,6	51,5	51,6	51,8	51,9	50,9	50,0
Jambi	52,4	51,1	50,2	49,2	48,4	47,6	47,1
Sumatera Selatan	53,0	52,1	51,5	50,9	50,4	49,5	48,7
Bengkulu	51,0	50,1	49,6	49,1	48,4	47,6	46,9
Lampung	52,4	51,1	50,1	49,2	48,3	47,7	47,3
Kep. Bangka Belitung	46,9	46,6	46,4	46,0	45,8	45,6	45,4
Kepulauan Riau	51,2	50,7	50,2	49,6	48,9	48,6	48,0
DKI Jakarta	38,8	38,2	37,8	37,3	36,8	36,8	36,8
Jawa Barat	48,6	48,1	47,8	47,5	47,3	46,9	46,5
Jawa Tengah	49,6	48,3	47,8	47,3	46,9	46,7	46,7
DI Yogyakarta	39,0	38,6	38,1	37,7	37,1	37,1	37,1
Jawa Timur	42,0	40,8	40,4	39,9	39,4	39,3	39,3
Banten	53,8	52,5	51,6	50,7	49,8	48,7	47,7
Bali	43,2	42,9	42,7	42,6	42,5	41,8	41,3
Nusa Tenggara Barat	56,6	55,5	54,9	54,2	53,7	53,2	52,9
Nusa Tenggara Timur	62,9	61,4	60,4	59,4	58,6	58,0	57,5
Kalimantan Barat	55,5	53,7	52,9	52,2	51,5	51,0	50,6
Kalimantan Tengah	50,0	49,3	48,7	48,2	47,8	47,0	46,0
Kalimantan Selatan	48,5	47,3	46,5	45,6	44,7	44,3	44,2
Kalimantan Timur	48,3	47,1	46,2	45,3	44,7	43,9	43,3
Sulawesi Utara	45,2	44,2	43,5	42,7	42,0	41,7	41,5
Sulawesi Tengah	52,1	50,8	49,9	49,1	48,3	47,6	47,1
Sulawesi Selatan	53,0	51,7	51,1	50,5	49,9	49,6	49,4
Sulawesi Tenggara	59,5	58,7	58,0	57,5	57,0	56,1	55,1
Gorontalo	52,0	50,7	49,8	48,8	47,6	47,0	46,8
Sulawesi Barat	52,7	51,5	50,8	50,0	49,3	48,9	48,6
Maluku	62,0	60,0	58,2	56,7	55,3	54,7	54,3
Maluku Utara	61,2	59,2	57,7	55,8	54,3	53,4	52,8
Papua Barat	52,1	50,4	49,2	48,4	48,0	47,9	47,8
Papua	51,7	50,2	49,3	48,3	47,6	47,6	47,7
Indonesia	49,3	48,3	47,8	47,2	46,7	46,3	46,0

Sumber / Source : Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS / 2005-2025 Indonesia Population Projection, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.6.1 Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Bencana Alam, 2005-2011
Table Number of Villages by Province and Type of Natural Disaster, 2005-2011

Provinsi Province	Banjir / Flood			Gempa Bumi / Earthquake			Tanah Longsor / Landslide		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1 587	1 991	1 463	3 313	745	260	293	310	227
Sumatera Utara	662	682	649	754	196	34	392	470	407
Sumatera Barat	230	243	315	217	634	496	197	205	244
Riau	442	479	328	23	2	-	39	24	23
Jambi	484	402	357	35	250	132	54	51	27
Sumatera Selatan	560	328	499	27	31	36	163	136	147
Bengkulu	79	145	215	369	776	24	53	88	114
Lampung	400	251	432	29	15	7	69	58	82
Kep. Bangka Belitung	12	20	16	-	2	-	-	1	-
Kepulauan Riau	...	33	24	...	-	-	...	10	11
DKI Jakarta	162	178	53	5	-	-	2	1	1
Jawa Barat	1 059	1 162	989	125	68	2 169	1 435	1 610	1 477
Jawa Tengah	1 215	1 367	1 266	25	905	116	1 014	1 254	1 410
DI Yogyakarta	79	52	89	3	410	8	65	61	78
Jawa Timur	1 138	1 419	1 370	95	90	10	556	696	673
Banten	379	535	401	48	15	41	81	127	140
Bali	31	33	71	64	27	4	52	105	162
Nusa Tenggara Barat	124	199	282	76	183	166	35	28	59
Nusa Tenggara Timur	498	612	557	405	21	14	459	621	565
Kalimantan Barat	552	394	740	1	-	-	37	35	67
Kalimantan Tengah	355	451	316	5	-	-	14	10	9
Kalimantan Selatan	596	533	591	1	-	-	39	40	44
Kalimantan Timur	411	478	463	2	-	17	41	113	71
Sulawesi Utara	228	375	336	53	186	174	227	303	294
Sulawesi Tengah	420	583	565	322	40	144	101	178	143
Sulawesi Selatan	721	801	746	11	16	20	355	364	278
Sulawesi Tenggara	303	276	351	82	15	8	61	55	51
Gorontalo	150	276	307	4	12	60	24	54	57
Sulawesi Barat	...	181	221	...	36	24	...	159	220
Maluku	71	119	122	18	60	13	31	48	68
Maluku Utara	94	132	155	62	128	51	10	34	23
Papua Barat	...	50	32	...	30	196	...	18	13
Papua	290	363	411	62	38	157	275	291	336
Indonesia	13 332	15 143	14 732	6 610	4 931	4 381	6 174	7 558	7 521

Sumber : Statistik Potensi Desa Indonesia 2005, 2008 dan 2011, BPS

Source Village Potential Statistics of Indonesia 2005, 2008 and 2011, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.6.2 Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Upaya Antisipasi Bencana Alam, 2011
Table 4.6.2 Number of Villages by Province and The Efforts in Anticipation of Natural Disaster, 2011

Provinsi Province	Sistem Peringatan Dini Tsunami <i>Tsunami Early Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>	Gotong Royong Warga <i>Community Self-help</i>	Penyuluhan Keselamatan <i>Safety Advisory</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	142	59	2 161	320	91
Sumatera Utara	17	32	1 466	202	71
Sumatera Barat	83	101	660	370	50
Riau	4	37	519	85	24
Jambi	1	16	452	63	21
Sumatera Selatan	-	38	1 186	132	70
Bengkulu	47	43	505	235	52
Lampung	38	6	943	143	36
Kep. Bangka Belitung	-	3	104	21	9
Kepulauan Riau	3	6	155	13	8
DKI Jakarta	-	153	215	142	27
Jawa Barat	55	252	4 137	1 617	321
Jawa Tengah	12	200	5 256	1 373	347
DI Yogyakarta	13	84	341	222	52
Jawa Timur	27	180	4 708	843	208
Banten	38	47	881	224	40
Bali	35	17	460	134	41
Nusa Tenggara Barat	-	13	510	125	46
Nusa Tenggara Timur	31	21	977	252	119
Kalimantan Barat	5	23	520	63	28
Kalimantan Tengah	-	26	361	51	28
Kalimantan Selatan	2	19	463	31	37
Kalimantan Timur	2	38	574	85	19
Sulawesi Utara	62	19	935	349	55
Sulawesi Tengah	16	19	744	120	54
Sulawesi Selatan	14	38	1 417	216	118
Sulawesi Tenggara	-	8	493	26	38
Gorontalo	11	10	428	60	22
Sulawesi Barat	-	4	366	28	18
Maluku	13	2	209	61	18
Maluku Utara	36	6	271	34	8
Papua Barat	8	13	90	17	13
Papua	37	18	464	81	18
Indonesia	752	1 551	32 971	7 738	2 107

Sumber : Statistik Potensi Desa Indonesia 2011, BPS

Source *Village Potential Statistics of Indonesia 2011, BPS-Statistics Indonesia*

TABEL - TABEL

Tabel 4.6.3 Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Provinsi dan Kondisi Korban, 2006-2011
Table Number of Natural Disaster Victims by Province and Condition of Victims, 2006-2011

Provinsi Province	Meninggal / Death					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	46	4	17	5	16	14
Sumatera Utara	63	13	4	12	30	31
Sumatera Barat	33	108	16	1 198	469	13
Riau	9	7	4	2	-	5
Jambi	-	3	-	3	2	-
Sumatera Selatan	3	2	1	-	7	5
Bengkulu	-	16	-	-	-	-
Lampung	-	-	7	10	14	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	3	48	8	-	4	-
Jawa Barat	529	42	45	100	108	84
Jawa Tengah	1 335	106	46	43	160	74
DI Yogyakarta	4 715	8	5	-	280	4
Jawa Timur	119	42	33	22	62	29
Banten	2	23	8	107	3	3
Bali	2	9	4	2	4	8
Nusa Tenggara Barat	9	4	-	6	8	17
Nusa Tenggara Timur	13	43	36	35	41	8
Kalimantan Barat	-	-	2	1	2	1
Kalimantan Tengah	2	3	4	-	-	-
Kalimantan Selatan	8	10	9	-	28	4
Kalimantan Timur	3	13	10	-	14	2
Sulawesi Utara	44	48	2	6	4	7
Sulawesi Tengah	-	85	8	3	13	8
Sulawesi Selatan	231	22	14	32	27	12
Sulawesi Tenggara	2	-	-	5	79	-
Gorontalo	3	2	3	1	3	7
Sulawesi Barat	-	9	3	11	5	-
Maluku	6	-	10	-	55	5
Maluku Utara	-	1	-	-	3	3
Papua Barat	-	-	-	4	170	-
Papua	6	-	31	4	19	16
Indonesia	7 186	671	330	1 612	1 630	360

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.6.3

Provinsi Province	Luka-luka / Injured					
	2006 (1)	2007 (8)	2008 (9)	2009 (10)	2010 (11)	2011 (12)
Aceh	22	-	311	98	69	2
Sumatera Utara	13 242	268	659	3	782	84
Sumatera Barat	18	887	7	1 820	592	4
Riau	313	363	4 939	-	22	-
Jambi	-	1	-	26	524	-
Sumatera Selatan	-	1 067	29	2	167	2
Bengkulu	-	38	-	162	10	-
Lampung	54	-	520	13	114	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	6	651	151	2	240	-
Jawa Barat	4 318	8 414	11 967	1 398	985	43
Jawa Tengah	18 690	114	6 683	652	299	219
DI Yogyakarta	20 291	54	15	-	221	8
Jawa Timur	1 676	46	26 233	19	99	65
Banten	-	31	13 183	61	63	3
Bali	3	20	2	1	6	97
Nusa Tenggara Barat	107	892	15	20	22	37
Nusa Tenggara Timur	324	688	1 505	4	31	15
Kalimantan Barat	18	62	6	-	-	3
Kalimantan Tengah	-	-	855	-	-	-
Kalimantan Selatan	11	32	25	-	358	18
Kalimantan Timur	-	2 655	358	-	7	2
Sulawesi Utara	21 206	37	8	78	10	7
Sulawesi Tengah	240	7 502	217	-	141	-
Sulawesi Selatan	38	-	259	173	23	38
Sulawesi Tenggara	-	-	128	-	277	19
Gorontalo	5 439	3 595	3 319	-	4	4
Sulawesi Barat	-	-	17	119	164	1
Maluku	2	-	296	-	122	1
Maluku Utara	-	1 271	-	-	1	7
Papua Barat	-	-	38	509	3	-
Papua	31	-	8	-	133	13
Indonesia	86 049	28 688	71 753	5 160	5 489	692

TABEL-TABEL

Lanjutan Tabel / *Continued Table 4.6.3*

Provinsi Province	Hilang / Missing					
	2006 (14)	2007 (15)	2008 (16)	2009 (17)	2010 (18)	2011 (19)
Aceh	3	-	1	1	3	-
Sumatera Utara	-	-	-	1	12	1
Sumatera Barat	5	2	1	2	62	3
Riau	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	2	-	11	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17	6	4	42	16	14
Jawa Tengah	65	2	2	1	1	37
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	5	3	19	3	5	2
Banten	-	-	-	93	-	-
Bali	-	-	-	-	3	1
Nusa Tenggara Barat	-	-	1	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	2	26	3	2	7	5
Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	1	1	-	-	11	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	4	2	5	1	4	-
Sulawesi Tengah	-	15	2	-	3	1
Sulawesi Selatan	10	2	3	4	3	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	14	-
Gorontalo	1	-	-	-	2	4
Sulawesi Barat	-	-	-	3	4	-
Maluku	-	-	2	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	1
Papua Barat	-	-	-	-	118	-
Papua	2	-	-	-	-	-
Indonesia	115	59	46	153	279	69

Sumber : <http://dibi.bnpp.go.id> diakses pada 15 juni 2012

Source <http://dibi.bnpp.go.id> accessed on 15 June 2012

Tabel
Table 4.6.4

Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam Menurut Provinsi dan Kondisi Kerusakan,
2006-2011

*Number of Damage House Caused by Natural Disaster by Province and Condition of Damage,
2006-2011*

Provinsi Province	Rusak Berat / Heavily Damaged					
	2006 (1)	2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 (5)	2011 (6)
Aceh	2 784	17	768	478	208	737
Sumatera Utara	2 587	61	40	-	1 623	580
Sumatera Barat	14	19 475	189	48 939	748	131
Riau	2	-	-	676	-	49
Jambi	-	9	-	680	551	18
Sumatera Selatan	-	7	-	-	115	65
Bengkulu	-	14 923	-	-	-	6
Lampung	694	114	79	106	95	25
Kep. Bangka Belitung	-	67	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	1
DKI Jakarta	13	3 791	1	-	72	-
Jawa Barat	2 525	455	505	21 738	3 443	1 068
Jawa Tengah	33 601	447	162	614	2 424	1 849
DI Yogyakarta	13 288	-	-	-	2 356	99
Jawa Timur	323	663	3 523	68	464	1 002
Banten	34	32	-	327	518	78
Bali	62	7	-	-	21	55
Nusa Tenggara Barat	258	1 810	195	55	200	717
Nusa Tenggara Timur	407	142	2 212	736	742	1 313
Kalimantan Barat	-	-	1	-	47	71
Kalimantan Tengah	-	26	-	-	-	14
Kalimantan Selatan	72	-	29	9	118	100
Kalimantan Timur	22	15	-	3	36	47
Sulawesi Utara	266	704	213	-	67	473
Sulawesi Tengah	-	286	1 216	-	249	535
Sulawesi Selatan	395	181	699	66	894	374
Sulawesi Tenggara	25	-	-	366	274	341
Gorontalo	-	401	21	13	278	494
Sulawesi Barat	-	-	39	-	229	211
Maluku	277	-	205	-	145	145
Maluku Utara	57	79	-	-	77	66
Papua Barat	-	-	37	-	987	3
Papua	-	-	6	-	3 103	997
Indonesia	57 706	43 712	10 140	74 874	20 084	11 664

TABEL - TABEL

Lanjutan Tabel / *Continued Table 4.6.4*

Provinsi Province	Rusak Ringan / <i>Lightly Damage</i>					
	2006 (8)	2007 (9)	2008 (10)	2009 (11)	2010 (12)	2011 (13)
Aceh	6 722	127	2 748	653	1 452	1 175
Sumatera Utara	3 402	103	117	-	442	3 066
Sumatera Barat	140	39 343	166	91 617	345	350
Riau	-	-	-	36	48	523
Jambi	-	22	-	1 034	678	511
Sumatera Selatan	-	28	8	-	304	213
Bengkulu	-	11 395	-	-	-	132
Lampung	298	281	236	1 284	266	75
Kep. Bangka Belitung	-	88	486	-	-	5
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	40
DKI Jakarta	-	-	21	-	-	229
Jawa Barat	1 403	2 177	469	69 534	6 739	5 245
Jawa Tengah	64 720	12 740	1 976	1 544	6 075	4 841
DI Yogyakarta	32 067	29	-	-	68	107
Jawa Timur	971	1 521	8 177	483	3 041	6 150
Banten	-	69	26 623	12	888	401
Bali	73	173	-	547	269	162
Nusa Tenggara Barat	444	7 040	263	-	509	745
Nusa Tenggara Timur	494	727	4 710	2 506	1 515	732
Kalimantan Barat	-	-	-	-	321	252
Kalimantan Tengah	-	2	-	-	-	129
Kalimantan Selatan	775	-	28	-	20	458
Kalimantan Timur	41	10	-	13	131	22
Sulawesi Utara	124	188	194	-	565	1 780
Sulawesi Tengah	-	62	572	49	500	307
Sulawesi Selatan	1 436	577	3 220	722	1 688	636
Sulawesi Tenggara	-	-	-	415	593	511
Gorontalo	-	866	51	119	7 763	527
Sulawesi Barat	-	16	-	-	257	900
Maluku	-	-	32	-	147	272
Maluku Utara	34	493	10	-	138	199
Papua Barat	-	-	17	-	-	25
Papua	-	-	191	-	941	348
Indonesia	113 144	78 077	50 315	170 568	35 703	31 068

Sumber : <http://dibi.bnpp.go.id> diakses pada 15 juni 2012

Source <http://dibi.bnpp.go.id> acceses on 15 June 2012

Tabel 4.7.1 Perkiraan Emisi CO₂ dari Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak (ribu ton), 2008 - 2010
Estimates of CO₂ Emissions from Household by Province and Type of Cooking Fuel Used (thousands ton), 2008 - 2010

Provinsi Province	Gas / LPG			Minyak Tanah / Kerosene			Kayu Bakar / Firewood		
	2008 (1)	2009 (2)	2010 (3)	2008 (5)	2009 (6)	2010 (7)	2008 (8)	2009 (9)	2010 (10)
Aceh	66,9	63,0	83,3	330,5	360,7	308,0	2 363,4	2 704,9	2 825,0
Sumatera Utara	133,4	146,2	451,5	1 364,4	1 419,0	670,8	6 301,0	5 812,8	6 556,6
Sumatera Barat	67,8	58,0	62,7	307,1	316,5	278,9	3 400,4	3 535,6	3 778,6
Riau	91,0	76,7	90,9	565,6	623,6	487,0	1 622,4	1 951,5	2 376,1
Jambi	51,6	44,1	58,2	176,2	198,7	175,1	1 820,5	2 178,0	2 248,0
Sumatera Selatan	138,9	281,6	378,9	494,1	223,2	100,3	4 250,2	4 417,5	4 725,4
Bengkulu	26,0	25,6	28,9	97,7	103,5	78,3	1 282,9	1 383,7	1 584,2
Lampung	70,9	95,4	188,9	281,1	238,8	86,2	7 255,1	7 837,0	8 165,9
Kep. Bangka Belitung	38,8	40,3	49,0	100,2	105,8	83,2	419,6	481,6	535,0
Kepulauan Riau	19,5	14,6	64,1	235,0	284,5	189,4	447,9	421,1	237,2
DKI Jakarta	797,6	829,9	853,2	355,1	178,5	142,9	84,7	75,2	45,4
Jawa Barat	1 232,4	2 997,2	3 273,0	3 881,7	294,9	249,0	19 631,0	18 419,1	19 537,5
Jawa Tengah	535,0	1 198,4	1 708,1	1 919,2	883,2	112,2	28 119,5	25 358,4	26 508,6
DI Yogyakarta	119,3	174,8	195,5	153,0	37,4	12,8	2 814,3	2 603,6	2 702,6
Jawa Timur	688,5	1 330,4	1 884,9	2 562,3	1 379,3	501,5	30 697,3	29 444,7	30 896,6
Banten	409,2	634,4	714,1	567,8	96,1	71,1	3 956,0	4 577,1	4 562,5
Bali	114,6	135,3	204,1	184,9	134,8	54,7	2 258,0	2 825,3	2 560,3
Nusa Tenggara Barat	11,0	10,0	9,8	342,5	377,6	324,0	3 951,5	4 488,7	4 847,2
Nusa Tenggara Timur	3,5	2,9	2,9	129,7	121,2	130,7	4 412,0	4 850,9	4 946,7
Kalimantan Barat	54,3	52,3	110,4	222,8	248,0	137,3	3 104,1	3 283,8	3 480,7
Kalimantan Tengah	9,9	12,1	15,4	162,0	191,4	182,7	1 649,1	1 780,2	1 792,0
Kalimantan Selatan	33,7	29,9	34,4	336,4	368,3	330,1	2 489,5	2 627,2	2 751,5
Kalimantan Timur	76,7	98,1	200,3	364,4	370,2	172,7	864,2	1 105,1	1 026,7
Sulawesi Utara	6,8	4,6	4,8	260,3	247,6	230,4	1 513,0	1 579,4	1 642,0
Sulawesi Tengah	7,2	4,6	6,5	139,6	133,7	123,6	2 057,5	2 380,8	2 357,8
Sulawesi Selatan	128,0	149,7	344,3	460,8	428,9	130,5	4 999,4	5 150,5	4 967,5
Sulawesi Tenggara	8,2	7,0	9,5	111,4	130,7	121,1	1 591,2	1 794,4	1 859,8
Gorontalo	1,5	1,5	1,1	76,0	77,5	71,1	871,0	854,0	898,6
Sulawesi Barat	11,2	8,7	8,5	35,8	43,4	31,7	879,9	1 005,9	1 148,6
Maluku	1,4	1,2	0,7	85,2	99,7	108,9	1 019,6	1 128,3	1 059,3
Maluku Utara	1,3	1,2	0,7	56,9	56,4	52,5	750,5	813,3	870,2
Papua Barat	2,6	2,0	2,4	61,9	63,2	70,5	553,8	536,3	434,0
Papua	2,9	2,7	3,2	126,5	173,9	139,9	1 874,5	2 553,0	2 781,6
Indonesia	4 961,7	8 534,4	11 044,4	16 547,9	10 010,2	5 959,1	149 305,0	149 958,8	156 709,7

Sumber : Dihitung berdasarkan data dari BPS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan faktor emisi yang ditetapkan oleh IPCC, 2006

Source Calculated base on data from BPS-Statistics indonesia, Ministry of Energi and Mineral Resources and default factor emission that established by IPCC, 2006

TABEL - TABEL

**Tabel 4.7.2 Perkiraan Emisi CO₂ yang Berasal dari Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi (ribu ton),
Table 2006-2010**
Estimates of CO₂ Emissions from Motorized Vehicles by Province (thousand ton), 2006-2010

Provinsi Province	Emisi CO ₂ dari Bensin / CO ₂ Emissions from Gasoline				
	2006 (1)	2007 (2)	2008 r (3)	2009 r (4)	2010 (5)
Aceh	800,1	1 065,8	1 164,0	1 372,9	1 384,7
Sumatera Utara	2 529,2	2 282,4	2 665,6	2 932,3	2 927,1
Sumatera Barat	724,4	751,5	757,2	889,1	944,2
Riau	1 298,0	1 168,4	1 180,1	1 318,1	1 312,6
Jambi	812,2	1 030,4	1 508,3	1 808,5	1 778,0
Sumatera Selatan	921,3	928,7	1 660,2	1 969,2	2 276,4
Bengkulu	233,1	344,2	349,6	415,6	496,4
Lampung	789,4	801,6	838,5	982,2	1 080,8
Kep. Bangka Belitung	222,9	258,4	289,5	340,5	367,1
Kepulauan Riau	438,5	365,9	457,4	536,0	548,2
DKI Jakarta	8 752,3	7 707,2	8 164,4	7 049,3	7 356,1
Jawa Barat	2 034,9	2 004,1	2 078,3	2 680,9	3 433,2
Jawa Tengah	6 562,5	5 716,4	5 820,7	6 601,4	6 790,0
DI Yogyakarta	1 317,3	1 689,0	1 679,4	1 977,2	2 160,7
Jawa Timur	6 341,2	6 842,7	6 950,5	7 773,1	7 763,2
Banten	401,4	454,5	464,9	547,9	605,2
Bali	1 773,3	1 645,0	1 871,7	2 168,2	2 247,7
Nusa Tenggara Barat	471,3	478,4	716,5	853,1	975,2
Nusa Tenggara Timur	221,1	251,5	425,9	512,5	620,9
Kalimantan Barat	839,3	820,5	854,2	984,5	1 019,8
Kalimantan Tengah	391,5	430,9	445,2	519,2	545,8
Kalimantan Selatan	832,7	829,6	817,8	958,4	1 000,7
Kalimantan Timur	961,0	941,5	928,9	1 081,6	1 212,7
Sulawesi Utara	283,7	305,8	431,7	517,6	621,9
Sulawesi Tengah	659,7	637,0	922,5	1 095,0	1 235,0
Sulawesi Selatan	674,1	562,1	978,3	1 155,4	1 590,5
Sulawesi Tenggara	86,4	97,4	405,2	498,7	663,6
Gorontalo	62,7	77,4	101,4	123,2	158,9
Sulawesi Barat ¹	-	-	-	-	-
Maluku	162,5	168,0	166,3	193,4	334,3
Maluku Utara	0,8	0,9	18,8	22,8	27,8
Papua Barat ¹	-	-	-	-	-
Papua	217,0	276,0	287,3	349,2	397,6
Indonesia	41 815,7	40 933,4	45 400,5	50 227,1	53 876,4

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.7.2

Provinsi Province	Emisi CO ₂ dari Solar / CO ₂ Emission from Solar				
	2006 (1)	2007 † (7)	2008 † (8)	2009 † (9)	2010 (10)
Aceh	511,8	521,1	541,1	798,5	927,4
Sumatera Utara	1 075,5	858,1	868,3	1 188,2	1 429,2
Sumatera Barat	782,5	751,6	748,7	1 102,9	1 302,5
Riau	815,6	682,0	724,0	1 063,4	1 260,9
Jambi	483,8	582,6	966,6	1 417,6	1 663,1
Sumatera Selatan	639,8	611,0	609,3	900,7	1 090,1
Bengkulu	153,7	160,9	170,2	255,2	317,8
Lampung	371,4	302,9	328,4	487,4	648,0
Kep. Bangka Belitung	170,9	180,6	608,7	191,5	282,7
Kepulauan Riau	197,8	119,2	119,9	199,2	252,1
DKI Jakarta	7 331,1	7 599,0	8 066,1	6 242,5	7 422,8
Jawa Barat	2 649,3	2 244,6	2 259,4	3 298,2	3 933,0
Jawa Tengah	2 196,0	1 728,2	1 712,9	2 493,1	2 975,0
DI Yogyakarta	449,9	453,3	549,7	809,5	965,3
Jawa Timur	2 072,8	1 622,9	1 680,5	2 444,6	2 956,3
Banten	181,4	169,6	323,1	474,4	578,7
Bali	787,1	853,8	865,5	1 269,6	1 536,2
Nusa Tenggara Barat	270,3	316,5	428,3	649,3	774,2
Nusa Tenggara Timur	214,5	247,7	349,5	522,2	623,2
Kalimantan Barat	399,6	538,7	611,1	909,3	1 078,6
Kalimantan Tengah	309,5	420,4	473,9	710,8	837,0
Kalimantan Selatan	649,9	783,5	837,1	1 239,6	1 478,2
Kalimantan Timur	1 110,1	1 117,9	1 179,1	1 490,6	1 764,1
Sulawesi Utara	385,1	404,3	457,3	690,8	823,7
Sulawesi Tengah	494,9	536,0	531,1	790,2	965,9
Sulawesi Selatan	1 234,7	1 361,8	1 417,2	2 095,5	2 480,9
Sulawesi Tenggara	334,2	449,1	463,6	700,0	834,8
Gorontalo	62,0	61,6	265,7	402,6	466,0
Sulawesi Barat ¹	-	-	-	-	-
Maluku	105,3	89,9	90,3	134,7	167,8
Maluku Utara	1,2	1,4	11,0	18,0	22,1
Papua Barat ¹	-	-	-	-	-
Papua	158,8	150,0	177,0	264,3	317,6
Indonesia	26 600,7	25 920,3	28 434,9	35 254,2	42 175,3

TABEL - TABEL

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.7.2

Provinsi Province	Emisi CO ₂ dari Kendaraan Bermotor / CO ₂ Emission from Motorized Vehicles				
	2006 (1)	2007 ^r (12)	2008 ^r (13)	2009 ^r (14)	2010 (15)
Aceh	1 311,9	1 586,9	1 705,1	2 171,4	2 312,2
Sumatera Utara	3 604,7	3 140,4	3 533,9	4 120,5	4 356,3
Sumatera Barat	1 506,9	1 503,1	1 505,8	1 992,0	2 246,7
Riau	2 113,6	1 850,5	1 904,1	2 381,5	2 573,5
Jambi	1 296,0	1 613,1	2 474,9	3 226,1	3 441,1
Sumatera Selatan	1 561,1	1 539,7	2 269,6	2 869,9	3 366,5
Bengkulu	386,9	505,2	519,8	670,8	814,2
Lampung	1 160,8	1 104,4	1 166,9	1 469,6	1 728,8
Kep. Bangka Belitung	393,7	439,0	898,2	532,0	649,8
Kepulauan Riau	636,3	485,2	577,3	735,2	800,3
DKI Jakarta	16 083,4	15 306,2	16 230,4	13 291,7	14 779,0
Jawa Barat	4 684,2	4 248,7	4 337,7	5 979,0	7 366,3
Jawa Tengah	8 758,5	7 444,7	7 533,6	9 094,5	9 765,0
DI Yogyakarta	1 767,2	2 142,3	2 229,2	2 786,7	3 126,0
Jawa Timur	8 414,0	8 465,6	8 631,0	10 217,7	10 719,5
Banten	582,8	624,1	788,1	1 022,2	1 183,9
Bali	2 560,4	2 498,9	2 737,2	3 437,9	3 783,9
Nusa Tenggara Barat	741,6	795,0	1 144,8	1 502,4	1 749,4
Nusa Tenggara Timur	435,6	499,1	775,5	1 034,8	1 244,1
Kalimantan Barat	1 239,0	1 359,2	1 465,3	1 893,8	2 098,4
Kalimantan Tengah	700,9	851,3	919,2	1 230,0	1 382,8
Kalimantan Selatan	1 482,6	1 613,2	1 654,9	2 198,0	2 478,9
Kalimantan Timur	2 071,1	2 059,5	2 107,9	2 572,2	2 976,8
Sulawesi Utara	668,7	710,0	889,1	1 208,4	1 445,6
Sulawesi Tengah	1 154,6	1 173,0	1 453,6	1 885,1	2 200,9
Sulawesi Selatan	1 908,8	1 923,9	2 395,5	3 251,0	4 071,3
Sulawesi Tenggara	420,6	546,5	868,9	1 198,7	1 498,4
Gorontalo	124,7	139,0	367,2	525,7	624,8
Sulawesi Barat ¹	-	-	-	-	-
Maluku	267,8	257,8	256,5	328,1	502,1
Maluku Utara	2,0	2,3	29,8	40,7	49,9
Papua Barat ¹	-	-	-	-	-
Papua	375,8	426,1	464,3	613,4	715,2
Indonesia	68 416,3	66 853,6	73 835,3	85 481,4	96 051,7

Catatan : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Note ¹ Data masih tergabung dengan provinsi induknya / Tha data were still included in its main province

Sumber : Diolah berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , dan faktor emisi yang ditetapkan oleh IPCC, 2006

Source Calculated based on data from Police Headquarters of Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources and default factor emission that established by IPCC, 2006

Tabel 4.7.3 Perkiraan Emisi CH₄ dari Hewan Ternak dan Unggas Menurut Provinsi (ton), 2008-2011
Table 4.7.3 Estimates of CH₄ Emissions from Livestocks and Poultries by Province (ton), 2008-2011

Provinsi Province	Emisi CH ₄ dari Hewan Ternak				Emisi CH ₄ dari Hewan Unggas			
	CH ₄ Emissions from Livestocks				CH ₄ Emissions from Poultries			
	2008	2009	2010	2011 ^x	2008	2009	2010	2011 ^x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	51 290,4	54 018,3	57 536,1	35 274,4	288,4	285,0	307,4	323,2
Sumatera Utara	38 249,3	38 593,5	39 307,0	43 076,8	1 380,7	1 386,2	1 453,0	1 495,1
Sumatera Barat	35 241,2	36 792,1	38 372,1	23 243,3	609,0	636,7	670,0	730,0
Riau	12 264,7	12 731,0	12 337,6	11 130,6	709,5	678,1	892,6	920,5
Jambi	12 834,4	13 908,3	15 017,7	10 964,1	259,0	343,4	403,8	484,4
Sumatera Selatan	23 041,7	23 044,5	23 401,5	16 025,2	609,7	575,2	729,3	759,4
Bengkulu	6 897,6	7 441,9	8 042,9	7 289,9	129,9	152,2	194,3	251,7
Lampung	28 880,5	30 860,5	32 651,7	44 210,9	658,1	837,8	850,3	956,9
Kep. Bangka Belitung	1 431,9	2 704,6	4 386,6	4 812,7	190,3	212,0	244,5	281,2
Kepulauan Riau	2 454,8	12 731,0	2 020,8	2 497,4	169,2	165,0	171,6	174,2
DKI Jakarta	346,6	312,1	343,0	383,6	2,3	3,7	3,6	3,6
Jawa Barat	68 222,8	72 592,1	77 252,1	86 729,2	9 450,7	10 223,6	11 137,9	11 785,2
Jawa Tengah	115 748,9	121 184,0	124 127,7	143 984,7	2 412,4	2 520,8	2 706,4	2 772,1
DI Yogyakarta	16 108,2	16 755,4	17 092,5	21 129,3	282,4	294,0	284,9	285,5
Jawa Timur	203 211,8	207 892,8	222 809,5	275 227,7	4 339,9	2 335,5	2 389,4	2 443,5
Banten	19 162,7	19 655,9	19 535,0	17 080,1	1 228,1	3 163,5	1 243,7	1 360,8
Bali	40 053,2	40 466,9	40 815,1	38 615,6	310,5	309,9	332,9	340,5
Nusa Tenggara Barat	40 044,0	41 699,6	46 799,3	43 465,4	131,7	141,3	170,8	175,9
Nusa Tenggara Timur	53 081,1	54 225,6	57 595,9	66 185,4	214,6	215,2	173,5	175,3
Kalimantan Barat	12 484,7	13 123,2	13 222,2	12 284,7	610,9	566,5	543,6	557,2
Kalimantan Tengah	7 717,7	5 257,0	6 449,9	5 147,6	243,4	192,2	215,2	240,6
Kalimantan Selatan	13 317,4	13 731,2	14 283,9	8 785,0	854,2	1 043,9	1 286,6	1 351,9
Kalimantan Timur	5 911,0	6 657,3	7 102,7	5 959,6	631,8	922,8	929,1	947,7
Sulawesi Utara	8 323,0	8 055,4	7 882,5	8 315,5	98,8	122,6	97,6	102,1
Sulawesi Tengah	12 982,0	14 070,1	14 360,7	15 715,4	157,4	199,0	197,7	257,6
Sulawesi Selatan	50 117,4	51 257,9	58 409,5	62 572,5	810,9	850,2	942,0	1 019,0
Sulawesi Tenggara	12 696,8	13 482,3	14 124,8	11 397,1	207,7	219,7	258,1	272,8
Gorontalo	11 648,2	12 344,2	13 050,4	9 740,4	58,1	55,6	54,4	58,4
Sulawesi Barat	8 111,3	9 418,5	10 192,6	6 880,5	104,7	222,4	250,8	349,6
Maluku	7 507,5	8 293,9	8 949,4	8 194,1	62,6	69,7	77,0	85,3
Maluku Utara	3 461,7	3 210,7	3 241,4	4 052,3	29,8	32,2	33,2	34,2
Papua Barat	2 108,0	2 233,2	2 362,1	2 680,1	36,6	28,6	31,5	34,5
Papua	7 074,8	7 649,8	8 428,2	8 575,6	60,2	82,6	96,7	97,9
Indonesia	932 027,3	965 647,6	1 021 504,1	1 061 626,9	27 343,3	29 087,4	29 373,7	31 128,0

Catatan : ^x Angka sementara / Preliminary figures

Note Dihitung berdasarkan jumlah unggas dan ternak dikalikan dengan faktor emisi yang ditetapkan oleh IPCC, 2006

Calculated based on number of livestocks and poultries multiplied by emission factor that established by IPCC, 2006

Sumber : Diolah dari Survei Rumah Tangga Peternakan dan Survei Perusahaan Peternakan, BPS

Source Based on Livestock Household Survey and Livestock Establishment Survey, BPS - Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.7.4 Impor Komoditi Bahan yang Mengandung Zat Perusak Ozon (ton), 2009-2011
Table Import of Materials Containing Ozone Depleting Substances (ton), 2009-2011

Kode HS HS Code	Komoditi Commodities	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)
(1)	(2)			
2903.14.00.00	Carbon Tetrachloride	-	-	-
2903.19.00.10	1,1,1, Trichloroethane	12,40	-	-
2903.39.20.00	Methyl Bromide	503,17	432,87	1 372,60
2903.41.00.00	Trichlorofluoro Methane	58,01	137,84	38,69
2903.42.00.00	Dichloro difluoro Methane	1,88	-	-
2903.43.00.00	Trichloro Trifluoro Ethane	-	-	0,01
2903.44.00.00	Dichloro tetrafluoro ethanes and chloro penta fluoroethane	0,06	-	26,90
2903.45.00.00	Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine	-	-	0,02
2903.46.00.00	Bromo Chlorodifluoro methane, Bromo Trifluoro Methane, Dibromo Tetra Fluoro Ethane	-	-	-
2903.49.00.00	Derivatives of methane, ethane/propane , halogenated with flourine & chlorine	6 278,92	6 162,96	5 511,88
3824.71.00.00	Mix cont halogenated, drv methane,ethane cont cfcs, pfcs, hfcs	-	-	-

- Catatan : Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.24/M-DAG/PER/6/2006
Notes Ozone Depleting Substance According to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No.24/M-DAG/PER/6/2006
Sumber : Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PIB)
Source Based on customs declaration documents from Directorate General of Customs and Excise (Imports Declaration)

Tabel 4.7.5 Rata-rata Bulanan Hasil Pengukuran Konsentrasi Gas SO₂ dan NO₂ di Stasiun Kemayoran, Jakarta (ppm/24 jam), 2006-2011
Monthly Average of SO₂ and NO₂ Concentration at Kemayoran Station, Jakarta (ppm/24 hours), 2006-2011

Bulan Month	SO ₂					
	2006 (1)	2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 (5)	2011 (6)
Januari / January	0,007	0,006	0,010	0,039	0,006	0,005
Pebruari / February	0,007	0,009	0,006	0,020	0,006	0,002
Maret / March	0,006	0,006	0,005	0,017	0,005	0,005
April / April	0,004	0,006	0,005	0,025	0,005	0,005
Mei / May	0,005	0,005	0,005	0,037	0,005	0,004
Juni / June	0,002	0,004	0,005	0,036	0,006	0,005
Juli / July	0,005	0,005	0,008	0,028	0,011	0,005
Agustus / August	0,006	0,005	0,004	0,022	0,011	0,007
September / September	0,005	0,004	0,006	0,025	0,001	0,001
Oktober / October	0,005	0,004	0,017	0,012	0,008	0,007
Nopember / November	0,003	0,006	0,008	0,030	0,014	0,011
Desember / December	0,004	0,008	0,007	-	0,004	0,004

Bulan Month	NO ₂					
	2006 (1)	2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 (5)	2011 (6)
Januari / January	0,005	0,001	0,058	0,027	0,018	0,021
Pebruari / February	0,013	0,001	0,028	0,026	0,025	0,023
Maret / March	0,008	0,001	0,037	0,039	0,027	0,019
April / April	0,007	0,003	0,037	0,041	0,016	0,020
Mei / May	0,000	0,001	0,036	0,045	0,028	0,021
Juni / June	0,011	0,001	0,030	0,057	0,029	0,025
Juli / July	0,019	0,001	0,024	0,047	0,021	0,029
Agustus / August	0,012	0,001	0,029	0,079	0,027	0,028
September / September	0,001	0,004	0,019	0,065	0,027	... ¹
Oktober / October	0,001	0,024	0,029	0,082 #	0,058	... ¹
Nopember / November	0,002	0,024	0,033	0,029	0,040	... ¹
Desember / December	0,003	0,019	0,026	-	0,019	... ¹

Catatan : Nilai ambang batas
Note Threshold value

SO₂ = 0,14 ppm/24 jam
0,14 ppm/24 hours

NO₂ = 0,08 ppm/24 jam
0,08 ppm/24 hours

Melebihi ambang batas / Over threshold

¹ Alat rusak / Damaged equipment

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Source Meteorology, Climatology and Geophysics Agency

TABEL-TABEL

Tabel 4.8.1 Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi dan Jenis Irigasi (ha), 2006-2010
Table 4.8.1 Wetland Area by Province and Type of Irrigation (ha), 2006-2010

Provinsi Province	Sawah Irigasi / Irrigated Wetland				
	2006 (1)	2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 (5)
Aceh	206 693	205 715	218 106	239 888	202 297
Sumatera Utara	273 436	273 811	275 776	286 481	289 524
Sumatera Barat	176 621	178 068	182 189	184 125	184 316
Riau	17 941	15 440	16 290	13 426	10 854
Jambi	35 108	33 791	33 839	33 963	34 040
Sumatera Selatan	86 394	90 306	97 072	101 339	102 037
Bengkulu	57 680	64 279	63 114	64 031	66 290
Lampung	164 927	174 804	180 499	182 114	184 091
Kep. Bangka Belitung	2 842	3 052	2 595	3 175	2 995
Kepulauan Riau	50	78	79	146	293
DKI Jakarta	1 374	1 156	1 156	1 184	1 223
Jawa Barat	750 487	756 991	762 594	759 552	755 956
Jawa Tengah	687 992	692 651	691 034	689 383	699 661
DI Yogyakarta	47 423	47 035	46 590	46 547	46 477
Jawa Timur	862 612	863 564	874 133	879 958	879 618
Banten	111 691	107 955	108 317	111 084	108 884
Bali	78 805	79 821	80 393	78 683	81 040
Nusa Tenggara Barat	197 458	195 927	196 266	200 361	201 010
Nusa Tenggara Timur	74 326	86 621	86 724	95 938	106 544
Kalimantan Barat	75 630	72 859	83 568	93 190	103 255
Kalimantan Tengah	50 208	42 742	58 186	59 706	58 861
Kalimantan Selatan	42 657	48 548	52 284	51 292	47 622
Kalimantan Timur	19 700	19 906	23 897	25 492	24 340
Sulawesi Utara	49 369	50 124	50 129	50 130	42 553
Sulawesi Tengah	111 034	121 481	120 223	121 805	125 674
Sulawesi Selatan	346 352	348 521	351 729	353 973	358 085
Sulawesi Tenggara	56 495	54 676	64 757	68 598	69 145
Gorontalo	18 692	19 873	20 857	20 666	22 015
Sulawesi Barat	29 750	29 475	31 183	33 071	34 101
Maluku	8 657	9 950	11 364	11 215	11 451
Maluku Utara	8 477	8 910	10 515	6 744	8 118
Papua Barat	4 654	5 314	5 721	5 842	5 422
Papua	17 599	24 885	27 196	25 720	25 945
Jawa	2 461 579	2 469 352	2 483 824	2 487 708	2 491 819
	(52,68)	(52,22)	(51,44)	(50,78)	(50,92)
Luar Jawa / Outside Jawa	2 211 555	2 258 977	2 344 551	2 411 114	2 401 918
	(47,32)	(47,78)	(48,56)	(49,22)	(49,08)
Indonesia	4 673 134	4 728 329	4 828 375	4 898 822	4 893 737

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.8.1

Provinsi Province	Sawah Non Irigasi / Non Irrigated Wetland				
	2006 (1)	2007 (7)	2008 (8)	2009 (9)	2010 (10)
Aceh	108 584	107 088	104 904	119 863	112 471
Sumatera Utara	187 050	179 561	202 745	177 775	179 200
Sumatera Barat	52 848	49 287	43 434	44 051	45 377
Riau	107 044	112 802	105 965	109 312	105 107
Jambi	84 134	83 752	82 373	82 534	78 394
Sumatera Selatan	437 528	439 898	480 749	509 733	509 349
Bengkulu	26 205	29 500	26 130	25 583	26 686
Lampung	152 486	167 703	168 233	167 030	161 346
Kep. Bangka Belitung	1 206	1 124	911	1 842	1 061
Kepulauan Riau	32	46	54	92	149
DKI Jakarta	92	44	44	31	89
Jawa Barat	176 295	177 854	182 950	177 874	174 312
Jawa Tengah	275 409	270 291	272 950	271 385	262 810
DI Yogyakarta	8 795	8 505	8 742	8 778	9 046
Jawa Timur	233 867	233 041	234 445	220 559	227 658
Banten	84 847	88 415	87 266	84 725	87 860
Bali	447	430	480	502	385
Nusa Tenggara Barat	35 393	35 202	34 720	36 059	37 609
Nusa Tenggara Timur	38 389	36 028	37 437	38 257	35 935
Kalimantan Barat	246 208	217 533	209 119	207 716	203 761
Kalimantan Tengah	116 495	116 317	99 220	111 722	116 772
Kalimantan Selatan	398 063	422 494	425 052	413 289	388 696
Kalimantan Timur	71 086	73 028	60 338	62 816	58 456
Sulawesi Utara	10 893	10 974	11 004	11 004	10 236
Sulawesi Tengah	8 429	6 769	8 793	9 074	10 567
Sulawesi Selatan	206 588	212 468	215 791	211 622	214 004
Sulawesi Tenggara	5 791	10 662	18 049	21 003	13 753
Gorontalo	6 976	7 921	10 470	8 396	7 551
Sulawesi Barat	19 134	21 325	22 037	22 985	25 375
Maluku	-	85	97	66	-
Maluku Utara	3 390	2 872	3 115	2 146	1 360
Papua Barat	3 081	3 081	3 395	3 407	2 289
Papua	11 371	1 512	1 822	1 734	1 812
Jawa	779 305	778 150	786 397	763 352	761 775
	(24,99)	(24,88)	(24,86)	(24,13)	(24,50)
Luar Jawa / Outside Jawa	2 338 851	2 349 462	2 376 437	2 399 613	2 347 701
	(75,01)	(75,12)	(75,14)	(75,87)	(75,50)
Indonesia	3 118 156	3 127 612	3 162 834	3 162 965	3 109 476

Catatan : Angka dalam tanda kurung () menunjukkan persentase terhadap total Indonesia

Note Figure in brackets () indicates percentage to total of Indonesia

Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaan, Statistik Tanaman Pangan, BPS

Source Land Area by Utilization, Food Crop Statistics, BPS-Statistics Indonesia

TABEL-TABEL

Tabel 4.8.2 Luas Lahan Tegal/Kebun Menurut Provinsi (ha), 2006-2010
Table Area of Dry Field/Garden by Province (ha), 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	441 557	444 788	500 670	494 573	401 951
Sumatera Utara	415 376	429 994	446 190	480 133	542 286
Sumatera Barat	279 537	295 195	289 668	329 528	324 374
Riau	505 886	669 498	563 471	561 039	561 620
Jambi	405 300	373 465	363 031	383 581	377 989
Sumatera Selatan	458 981	471 297	437 943	426 346	423 248
Bengkulu	185 912	184 039	180 750	172 754	176 470
Lampung	805 011	820 947	814 919	791 362	768 715
Kep. Bangka Belitung	133 609	128 881	134 870	120 402	144 893
Kepulauan Riau	68 066	49 195	47 104	44 352	44 092
DKI Jakarta	997	980	984	949	999
Jawa Barat	548 182	610 660	576 565	563 015	561 150
Jawa Tengah	744 343	741 677	732 102	730 370	727 235
DI Yogyakarta	94 772	98 773	96 061	95 762	95 367
Jawa Timur	1 123 429	1 125 567	1 118 717	1 131 247	1 114 530
Banten	180 817	181 786	185 371	170 267	167 393
Bali	137 258	138 235	136 796	133 067	133 138
Nusa Tenggara Barat	213 504	227 755	227 208	241 606	240 044
Nusa Tenggara Timur	494 439	533 739	513 161	501 591	501 547
Kalimantan Barat	554 513	447 617	445 379	472 534	473 132
Kalimantan Tengah	433 427	317 154	345 504	378 374	466 609
Kalimantan Selatan	270 844	262 021	267 726	275 271	269 582
Kalimantan Timur	280 897	267 934	225 259	205 701	216 869
Sulawesi Utara	239 005	238 826	205 543	205 543	205 543
Sulawesi Tengah	380 547	559 615	560 778	555 258	577 485
Sulawesi Selatan	532 637	525 431	542 006	561 384	559 256
Sulawesi Tenggara	216 306	190 896	213 524	209 068	207 034
Gorontalo	103 703	116 872	132 644	136 160	151 159
Sulawesi Barat	79 754	70 659	74 652	83 386	116 525
Maluku	804 599	1 324 629	1 324 543	1 289 909	790 337
Maluku Utara	144 368	199 497	201 531	202 585	202 272
Papua Barat	1 246	1 346	6 052	6 052	6 470
Papua	236 514	233 305	328 021	328 021	328 153
Jawa	2 692 540	2 759 443	2 709 800	2 691 610	2 666 674
	(23,38)	(22,47)	(22,14)	(21,92)	(22,45)
Luar Jawa / Outside Jawa	8 822 796	9 522 830	9 528 943	9 589 580	9 210 793
	(76,62)	(77,53)	(77,86)	(78,08)	(77,55)
Indonesia	11 515 336	12 282 273	12 238 743	12 281 190	11 877 467

Catatan : Angka dalam tanda kurung () menunjukkan persentase terhadap total Indonesia

Note Figure in brackets () indicates percentage to total of Indonesia

Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaan, Statistik Tanaman Pangan, BPS

Source Land Area by Utilization, Food Crop Statistics, BPS-Statistics Indonesia

Tabel

4.8.3

Luas Lahan Ladang/Huma Menurut Provinsi (ha), 2006-2010
Area of Shifting Cultivation by Province (ha), 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	238 383	255 024	272 382	270 893	233 934
Sumatera Utara	327 496	371 924	391 466	393 205	313 465
Sumatera Barat	136 563	151 022	136 043	132 240	136 213
Riau	160 257	174 987	189 973	193 796	193 196
Jambi	199 141	173 459	185 212	200 921	195 743
Sumatera Selatan	243 860	250 125	232 137	225 202	239 410
Bengkulu	86 461	91 350	88 296	81 571	87 636
Lampung	-	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	25 382	34 775	33 762	45 830	31 087
Kepulauan Riau	25 695	24 703	23 563	33 965	33 874
DKI Jakarta	-	-	-	25	75
Jawa Barat	243 435	239 498	221 749	234 072	226 801
Jawa Tengah	12 205	10 341	13 346	13 413	11 664
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	12 774	18 106	31 953	42 564	44 312
Banten	92 938	85 000	88 435	85 878	82 708
Bali	4	4	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36 462	44 653	46 559	45 102	44 706
Nusa Tenggara Timur	298 608	325 537	323 646	332 939	331 769
Kalimantan Barat	222 300	252 394	261 945	279 431	360 701
Kalimantan Tengah	223 504	247 804	218 446	253 960	227 799
Kalimantan Selatan	105 525	100 567	154 346	149 728	133 694
Kalimantan Timur	147 361	149 486	177 523	151 610	150 454
Sulawesi Utara	106 273	104 864	114 903	114 904	114 904
Sulawesi Tengah	229 232	208 189	206 012	213 112	240 957
Sulawesi Selatan	90 862	90 412	96 474	102 217	92 581
Sulawesi Tenggara	122 268	110 498	115 567	125 794	111 440
Gorontalo	70 132	66 591	69 619	76 606	74 466
Sulawesi Barat	40 885	42 334	39 856	46 016	41 636
Maluku	267 316	310 323	310 311	309 903	283 271
Maluku Utara	84 353	65 383	68 000	69 205	68 979
Papua Barat	757 998	758 018	758 018	758 018	751 763
Papua	501 007	458 681	471 244	471 244	473 044
Jawa	361 352	352 945	355 483	375 952	365 560
	(7,07)	(6,77)	(6,66)	(6,89)	(6,86)
Luar Jawa / Outside Jawa	4 747 328	4 863 107	4 985 303	5 077 412	4 966 722
	(92,93)	(93,23)	(93,34)	(93,11)	(93,14)
Indonesia	5 108 680	5 216 052	5 340 786	5 453 364	5 332 282

Catatan : Angka dalam tanda kurung () menunjukkan persentase terhadap total Indonesia

Note Figure in brackets () indicates percentage to total of Indonesia

Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaan, Statistik Tanaman Pangan, BPS

Source Land Area by Utilization, Food Crop Statistics, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.8.4 Luas Lahan yang Sementara Tidak Diolah Menurut Provinsi (ha), 2006-2010
Table Area of Temporarily Unused Land by Province (ha), 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	378 951	263 005	57 571	372 863	251 332
Sumatera Utara	286 045	301 695	320 613	285 824	283 414
Sumatera Barat	181 659	181 826	261 639	323 118	317 495
Riau	506 304	575 892	449 940	461 747	429 117
Jambi	457 695	413 632	371 822	326 753	290 372
Sumatera Selatan	678 490	763 301	737 953	654 233	579 209
Bengkulu	145 105	238 483	311 580	150 357	219 782
Lampung	56 650	83 803	84 988	84 521	60 294
Kep. Bangka Belitung	121 429	112 636	112 019	134 587	108 958
Kepulauan Riau	202 869	185 127	170 410	161 265	160 545
DKI Jakarta	-	-	-	9	135
Jawa Barat	11 447	32 447	12 487	12 957	8 932
Jawa Tengah	5 114	1 819	1 772	1 628	1 478
DI Yogyakarta	535	1 196	1 147	1 079	1 018
Jawa Timur	12 105	13 874	16 644	11 788	10 813
Banten	30 103	30 656	23 287	19 644	25 337
Bali	478	268	265	120	345
Nusa Tenggara Barat	55 441	54 434	53 977	53 517	54 860
Nusa Tenggara Timur	860 994	801 680	801 050	751 173	747 250
Kalimantan Barat	1 676 585	1 773 913	1 604 716	1 347 614	1 367 688
Kalimantan Tengah	936 319	884 590	964 630	911 286	1 299 985
Kalimantan Selatan	235 457	251 096	188 102	179 871	171 770
Kalimantan Timur	1 299 378	1 406 138	1 207 599	1 392 699	1 261 246
Sulawesi Utara	48 997	43 576	48 195	48 195	48 195
Sulawesi Tengah	726 156	609 772	611 224	600 323	481 601
Sulawesi Selatan	133 610	118 686	85 800	88 870	86 753
Sulawesi Tenggara	306 248	200 718	128 888	158 731	182 377
Gorontalo	106 921	101 890	106 333	91 406	95 872
Sulawesi Barat	78 679	65 779	87 450	84 872	79 974
Maluku	773 622	864 327	863 259	871 302	862 674
Maluku Utara	20 701	18 495	18 495	18 814	18 569
Papua Barat	2 145 992	2 145 332	2 145 010	2 144 922	2 090 056
Papua	3 259 379	3 155 567	3 183 470	3 155 810	3 157 563
Jawa	59 304	79 992	55 337	47 105	47 713
	(0,38)	(0,51)	(0,37)	(0,32)	(0,32)
Luar Jawa / Outside Jawa	15 680 154	15 615 661	14 976 998	14 854 793	14 707 296
	(99,62)	(99,49)	(99,63)	(99,68)	(99,68)
Indonesia	15 739 458	15 695 653	15 032 335	14 901 898	14 755 009

Catatan : Angka dalam tanda kurung () menunjukkan persentase terhadap total Indonesia

Note Figure in brackets () indicates percentage to total of Indonesia

Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaan, Statistik Tanaman Pangan, BPS

Source Land Area by Utilization, Food Crop Statistics, BPS-Statistics Indonesia

Tabel

4.8.5

Percentase Luas Hutan Terhadap Luas Wilayah Menurut Provinsi
Percentage of Forest Area to Area of Province by Province

Provinsi Province	Luas ¹ Area ¹ (ribu / thousands ha)	Luas Kawasan Hutan ² Extent of Forest Area ² (ribu / thousands ha)	Percentase Luas Hutan terhadap Luas Wilayah Percentage of Forest Area to Area of Province
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5 795,6	2 819,9	48,66
Sumatera Utara	7 298,1	1 718,7	23,55
Sumatera Barat	4 201,3	1 878,2	44,71
Riau	8 702,4	2 754,5	31,65
Jambi	5 005,8	1 284,8	25,67
Sumatera Selatan	9 159,2	1 013,7	11,07
Bengkulu	1 991,9	685,3	34,40
Lampung	3 462,4	296,4	8,56
Kep. Bangka Belitung	1 642,4	207,9	12,66
Kepulauan Riau	820,2	263,9	32,18
DKI Jakarta	66,4	0,1	0,15
Jawa Barat	3 537,8	439,4	12,42
Jawa Tengah	3 280,1	495,2	15,10
DI Yogyakarta	313,3	11,9	3,80
Jawa Timur	4 780,0	1 090,4	22,81
Banten	966,3	131,8	13,64
Bali	578,0	86,4	14,95
Nusa Tenggara Barat	1 857,2	707,5	38,09
Nusa Tenggara Timur	4 871,8	794,9	16,32
Kalimantan Barat	14 730,7	5 727,2	38,88
Kalimantan Tengah	15 356,5	8 232,6	53,61
Kalimantan Selatan	3 874,4	838,3	21,64
Kalimantan Timur	20 453,4	11 477,9	56,12
Sulawesi Utara	1 385,2	533,6	38,52
Sulawesi Tengah	6 184,1	3 943,3	63,76
Sulawesi Selatan	4 671,7	1 360,2	29,12
Sulawesi Tenggara	3 806,8	1 810,2	47,55
Gorontalo	1 125,7	708,0	62,89
Sulawesi Barat	1 678,7	796,4	47,44
Maluku	4 691,4	2 928,8	62,43
Maluku Utara	3 198,3	2 181,4	68,21
Papua Barat	9 702,4	8 415,4	86,73
Papua	31 903,6	25 631,9	80,34
Indonesia	191 093,1	91 098,1	47,67

Catatan :¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008

Note Based on Home Affairs Ministerial Regulation No. 6/2008, January 31, 2008

² Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+, 2009/2010

Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+, 2009/2010

Sumber / Source : Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri / Ministry of Forestry and Ministry of Home Affairs

TABEL-TABEL

Tabel 4.8.6 Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi Satelit Menurut Provinsi, 2006-2010
Table 4.8.6 Number of Hotspot Detected by Satellite by Province, 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007 ¹	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1 667	261	924	654	287
Sumatera Utara	3 581	936	871	1 172	530
Sumatera Barat	1 231	427	770	495	171
Riau	11 526	4 169	3 943	7 756	1 707
Jambi	6 948	3 120	1 970	1 733	603
Sumatera Selatan	21 734	5 182	3 055	3 891	1 481
Bengkulu	474	255	204	192	84
Lampung	3 747	1 639	218	395	123
Kep. Bangka Belitung	1 202	764	523	1 058	143
Kepulauan Riau	215	101	53	99	55
DKI Jakarta	26	77	15	14	4
Jawa Barat	1 160	325	869	253	114
Jawa Tengah	1 746	268	1 082	147	64
DI Yogyakarta	99	35	34	13	10
Jawa Timur	2 032	1 503	2 643	691	259
Banten	155	38	52	76	33
Bali	59	57	154	7	14
Nusa Tenggara Barat	568	903	844	476	0
Nusa Tenggara Timur	1 147	1 140	2 289	489	0
Kalimantan Barat	29 266	7 561	5 528	10 144	1 785
Kalimantan Tengah	40 897	4 800	1 240	4 640	831
Kalimantan Selatan	6 469	928	199	1 270	111
Kalimantan Timur	6 603	2 082	2 231	2 307	974
Sulawesi Utara	114	35	26	34	14
Sulawesi Tengah	562	182	132	367	165
Sulawesi Selatan	1 201	551	525	519	175
Sulawesi Tenggara	749	288	148	396	94
Gorontalo	586	93	16	83	24
Sulawesi Barat	364	145	30	84	25
Maluku	48	26	21	4	0
Maluku Utara	88	13	7	4	0
Papua Barat	0	0	0	0	0
Papua	0	5	0	0	0
Indonesia	146 264	37 909	30 616	39 463	9 880

Catatan / Note : ¹ Stasiun Bumi tidak memantau pada bulan Januari 2007 / Earth Station did not conduct observation in January 2007

Sumber / Source : Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan / Forestry Statistics of Indonesia 2010, Ministry of Forestry

Tabel 4.9.1 Jumlah dan Persentase Desa Menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2011
Table 4.9.1 Number and Percentage of Village by Province and Geographical Location, 2011

Provinsi Province	Letak Geografis / Geographical Location		Persentase / Percentage	
	Pesisir Coastal	Bukan Pesisir Non Coastal	Pesisir Coastal	Bukan Pesisir Non Coastal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	761	5 722	11,74	88,26
Sumatera Utara	396	5 401	6,83	93,17
Sumatera Barat	116	917	11,23	88,77
Riau	232	1 423	14,02	85,98
Jambi	29	1 343	2,11	97,89
Sumatera Selatan	34	3 152	1,07	98,93
Bengkulu	182	1 327	12,06	87,94
Lampung	231	2 233	9,38	90,63
Kep. Bangka Belitung	163	198	45,15	54,85
Kepulauan Riau	299	54	84,70	15,30
DKI Jakarta	16	251	5,99	94,01
Jawa Barat	217	5 688	3,67	96,33
Jawa Tengah	347	8 230	4,05	95,95
DI Yogyakarta	33	405	7,53	92,47
Jawa Timur	655	7 847	7,70	92,30
Banten	131	1 404	8,53	91,47
Bali	177	539	24,72	75,28
Nusa Tenggara Barat	279	805	25,74	74,26
Nusa Tenggara Timur	943	2 023	31,79	68,21
Kalimantan Barat	163	1 804	8,29	91,71
Kalimantan Tengah	45	1 483	2,95	97,05
Kalimantan Selatan	166	1 834	8,30	91,70
Kalimantan Timur	218	1 247	14,88	85,12
Sulawesi Utara	721	972	42,59	57,41
Sulawesi Tengah	901	914	49,64	50,36
Sulawesi Selatan	504	2 478	16,90	83,10
Sulawesi Tenggara	813	1 308	38,33	61,67
Gorontalo	191	540	26,13	73,87
Sulawesi Barat ¹	148	490	23,20	76,80
Maluku	859	165	83,89	16,11
Maluku Utara	856	223	79,33	20,67
Papua Barat ¹	536	903	37,25	62,75
Papua	522	3 402	13,30	86,70
Indonesia	11 884	66 725	15,12	84,88

Sumber / Source : Statistik Potensi Desa Indonesia 2011, BPS / Village Potential Statistics of Indonesia 2011, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.9.2 Sebaran Kawasan Konservasi Laut Menurut Provinsi, 2010
Table 4.9.2 Distribution of Marine Conservation Area by Province, 2010

Provinsi Province	Cagar Alam <i>Strict Nature Reserve</i>		Suaka <i>Margasatwa Wildlife Sanctuary</i>		Taman Wisata <i>Alam Nature Recreational Park</i>		Taman Nasional <i>National Park</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	Unit	Luas / Area (ha)	Unit	Luas / Area (ha)	Unit	Luas / Area (ha)	Unit	Luas / Area (ha)	Unit	Luas / Area (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	-	-	-	-	-	2	231 400,0	-	-	231 400,0
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampung	1	11 330,0	-	-	-	-	-	-	1	11 330,0
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	1	107 489,0	1	107 489,0
Jawa Barat	2	1 620,0	1	90,0	-	-	-	-	3	1 710,0
Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	1	110 117,3	1	110 117,3
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	1	720,0	-	-	1	720,0
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2	8 600,0	-	-	2	8 600,0
Nusa Tenggara Timur	1	2 000,0	-	-	3	119 350,0	-	-	4	121 350,0
Kalimantan Barat	1	77 000,0	-	-	-	-	-	-	1	77 000,0
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	1	220,0	1	280,0	-	-	2	500,0
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	1	89 065,0	1	89 065,0
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	1	362 605,0	1	362 605,0
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	1	530 765,0	1	530 765,0
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	2	117 800,0	1	1 390 000,0	3	1 507 800,0
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	3	13 098,0	-	-	3	13 098,0
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	1	62 660,0	2	5 278,3	-	-	-	-	3	67 938,3
Papua	-	-	-	-	-	-	1	1 453 500,0	1	1 453 500,0
Indonesia	6	154 610,0	4	5 588,3	14	491 248,0	7	4 043 541,3	31	4 694 987,6

Catatan / Note : (-) : Tidak ada kawasan konservasi / No conservation area

Sumber / Source : Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan / Forestry Statistics of Indonesia 2010, Ministry of Forestry

Tabel 4.9.3 Luas dan Kondisi Terumbu Karang Menurut Provinsi, 2011
Table 4.9.3 Area and Condition of Coral Reef by Province, 2011

Provinsi Province	Luas (Ha) Area (Ha)	Kondisi / Condition (%)			
		Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damage	Tidak Teridentifikasi Not identified
		(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29 185,70	72,08	-	27,92	-
Sumatera Utara	77 419,30	21,86	55,30	22,84	-
Sumatera Barat ¹	36 693,39	15,92	24,92	59,16	-
Riau	1,25	16,00	24,00	60,00	-
Jambi	1 600,00	100,00
Sumatera Selatan
Bengkulu	6 651,00	62,34	18,37	16,79	2,50
Lampung	813,98	59,17	24,00	16,73	0,10
Kep. Bangka Belitung	24 335,35	71,84	26,93	0,14	1,09
Kepulauan Riau	33 002,48	43,42	35,13	21,45	-
DKI Jakarta
Jawa Barat	13 224,15	70,60	11,86	17,54	-
Jawa Tengah	1 377,18	31,29	6,43	62,28	-
DI Yogyakarta	710,00	100,00	-	-	-
Jawa Timur	49 310,65	100,00
Banten	1 137,42	96,13	1,85	2,02	-
Bali	7 765,00	41,40	39,10	19,50	-
Nusa Tenggara Barat	193,99	23,52	30,45	46,03	-
Nusa Tenggara Timur	154 341,65	17,60	58,80	23,50	0,10
Kalimantan Barat	2 090,04	1,76	97,17	1,07	-
Kalimantan Tengah	8 614,00	0,00	1,46	0,69	97,85
Kalimantan Selatan	13 086,76	87,92	9,89	2,19	-
Kalimantan Timur	23 149,93	34,71	20,29	45,00	-
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah	86 990,97	17,20	8,40	74,41	-
Sulawesi Selatan	127 333,40	22,00	30,00	48,00	-
Sulawesi Tenggara	257 873,45	68,13	16,75	15,12	-
Gorontalo	30 243,75	63,93	-	36,07	-
Sulawesi Barat	7 033,53	15,61	20,40	63,99	-
Maluku	223 413,86	78,66	20,55	0,79	-
Maluku Utara
Papua Barat	75 644,43	22,60	32,92	44,44	0,04
Papua	388,05	51,75	25,19	23,06	-
Indonesia	1 293 624,66	44,37	25,99	25,01	4,63

Catatan / Note : ¹ Data tahun 2010 / Data for 2010

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Provincial Marine and Fishery Office

TABEL - TABEL

Tabel 4.10.1 Volume Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi (ribu m³), 2006-2010
Table 4.10.1 Volume of Clean Water that Distributed by Water Supply Establishment by Province (thousand m³), 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12 370	8 782	7 327	12 993	49 379
Sumatera Utara	197 250	173 508	174 429	191 288	199 545
Sumatera Barat	40 280	24 751	45 890	48 013	46 147
Riau	13 380	12 589	13 845	12 129	16 378
Jambi	20 790	20 854	23 013	22 527	22 330
Sumatera Selatan	49 812	56 771	60 255	59 342	23 510
Bengkulu	9 216	5 696	10 641	13 079	13 299
Lampung	15 094	17 388	19 321	12 555	13 467
Kep. Bangka Belitung	2 672	1 197	3 205	2 720	3 360
Kepulauan Riau	45 490	50 465	52 492	51 877	51 656
DKI Jakarta	656 270	641 088	705 197	402 323 ^r	417 980
Jawa Barat	174 576	146 082	194 312	216 473	251 548
Jawa Tengah	187 672	172 676	208 241	225 310	238 455
DI Yogyakarta	25 195	19 395	21 289	22 296	22 724
Jawa Timur	1 841 170	346 423	332 433	358 526	368 921
Banten	75 896	70 571	14 341	170 291	179 853
Bali	78 580	94 086	105 748	98 373	102 214
Nusa Tenggara Barat	50 761	28 056	38 555	36 395	41 990
Nusa Tenggara Timur	23 630	16 923	12 615	19 872	22 050
Kalimantan Barat	31 381	30 713	27 848	31 582	34 293
Kalimantan Tengah	18 168	17 077	15 695	17 693	21 024
Kalimantan Selatan	46 302	47 462	49 186	55 799	58 781
Kalimantan Timur	46 189	73 772	86 463	83 251	89 713
Sulawesi Utara	12 609	9 236	14 141	9 090	11 043
Sulawesi Tengah	13 710	13 519	28 812	13 996	17 508
Sulawesi Selatan	56 533	58 190	65 277	66 234	72 345
Sulawesi Tenggara	16 268	5 932	9 495	12 038	7 574
Gorontalo	4 761	5 850	37 378	6 842	7 722
Sulawesi Barat	5 141	2 700	6 357	2 838	3 986
Maluku	5 979	2 209	4 841	13 215	5 612
Maluku Utara	6 912	6 069	6 851	6 891	8 363
Papua Barat	1 421	2 766	3 374	5 573	3 704
Papua	3 618	11 724	12 034	11 237	12 151
Indonesia	3 789 096	2 194 520	2 410 901	2 312 661	2 438 625

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Sumber / Source : Statistik Air Bersih 2010, BPS / Water Supply Statistics 2010, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.10.2 Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi, 2006-2010
Table 4.10.2 Number of Water Supply Establishment Customers by Province, 2006-2010

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42 543	58 750	57 112	80 598	111 995
Sumatera Utara	624 618	575 540	617 721	621 169	642 851
Sumatera Barat	188 343	117 440	183 936	198 751	206 787
Riau	193 654	72 891	60 978	59 606	58 865
Jambi	146 561	150 965	126 857	117 146	112 148
Sumatera Selatan	163 659	242 593	247 436	181 644	210 607
Bengkulu	37 887	43 784	44 728	51 439	52 968
Lampung	76 366	67 765	68 938	62 029	66 060
Kep. Bangka Belitung	14 400	9 299	16 502	15 191	15 975
Kepulauan Riau	137 966	53 704	39 369	173 708	176 196
DKI Jakarta	1 399 321	1 524 362	1 676 798	1 191 337 ^r	1 201 557
Jawa Barat	723 960	639 852	813 527	1 259 973	1 386 562
Jawa Tengah	829 094	1 130 139	1 048 992	1 285 562	1 075 901
DI Yogyakarta	129 096	84 447	122 277	125 052	118 292
Jawa Timur	1 105 928	1 122 306	1 807 759	1 696 448 ^r	1 529 809
Banten	166 513	168 737	74 064	210 736 ^r	215 275
Bali	250 110	329 965	621 341	322 126	334 055
Nusa Tenggara Barat	260 761	96 744	119 062	129 081	143 465
Nusa Tenggara Timur	163 466	80 262	55 874	91 755	98 584
Kalimantan Barat	135 873	134 319	113 845	155 495	141 103
Kalimantan Tengah	72 728	70 428	77 489	83 747	99 342
Kalimantan Selatan	193 853	189 791	221 571	374 739	373 207
Kalimantan Timur	181 914	254 663	273 684	279 413	304 485
Sulawesi Utara	74 430	57 437	79 121	158 610	168 264
Sulawesi Tengah	53 809	53 408	109 139	56 305	99 195
Sulawesi Selatan	261 900	271 008	363 982	361 843	309 910
Sulawesi Tenggara	47 066	48 428	50 367	51 761	59 275
Gorontalo	27 005	26 318	28 920	29 826	35 620
Sulawesi Barat ¹	49 270	17 884	30 203	16 829	96 502
Maluku	22 193	11 024	20 201	46 128 ^r	29 609
Maluku Utara	25 223	26 177	27 676	26 014	33 435
Papua Barat ¹	4 531	14 765	15 284	15 040	15 332
Papua	13 985	40 019	39 802	40 302	42 547
Indonesia	7 818 026	7 785 214	9 254 555	9 569 403 ^r	9 565 778

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Sumber / Source : Statistik Air Bersih 2010, BPS / Water Supply Statistics 2010, BPS-Statistics Indonesia

TABEL-TABEL

Tabel 4.10.3 Kandungan Maksimum Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) pada Air Sungai di Beberapa Kota di Indonesia (mg/L), 2011
Maximum of Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD)
on the River Water in Major Cities in Indonesia (mg/L), 2011

Kota City	Sungai River	BOD	COD
(1)	(2)	(3)	(4)
Banda Aceh	Banda Aceh	-	-
Medan	Deli	32,20	55,00
Padang	Padang	-	-
Pekanbaru	Pekanbaru	-	-
Jambi	Batanghari	6,00	21,00
Palembang	Musi	2,55	13,32
Bengkulu	Bengkulu	-	-
Bandar Lampung	Bandar Lampung	-	-
Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	-	-
Tanjung Pinang	Waduk Sei Putai	2,10	12,00
Jakarta	Kalimalang	12,80	44,79
Bandung	Bandung	-	-
Semarang	Kaligarang	7,26	37,79
Yogyakarta	Konteng	66,00	96,00
Surabaya	Brantas	24,80	61,00
Serang	Cidurian	17,00	97,00
Denpasar	Tukad Ayung	7,90	23,00
Mataram	Mataram	-	-
Kupang	Dendeng	7,20	129,60
Pontianak	Kapuas	4,29	11,80
Palangkaraya	Kahayang	9,20	378,60
Banjarmasin	Martapura	16,09	40,38
Samarinda	Mahakam	12,90	50,22
Manado	Ongkag Sangkup	-	39,00
Palu	Lariang	1,55	5,74
Makasar	Saddang	2,20	15,20
Kendari	Konaweha	6,80	21,26
Gorontalo	Bone Hilir	6,62	15,80
Mamuju	Mamuju So'do	2,60	16,25
Ambon	Ambon	-	-
Ternate	Ternate	-	-
Manokwari	Manokwari	-	-
Jayapura	Entrop	10,40	192,00

Catatan : Nilai Baku mutu BOD = 2 mg/L dan COD = 10 mg/L, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Note Threshold value of BOD = 2 mg/L and COD = 10 mg/L, based on Government Regulation of Republic Indonesia No. 82 year 2001 on Water Quality Management and Water Pollution Control

Sumber / Source : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah / Regional Environmental Impact Control Agency

Tabel 4.11.1 Kawasan Konservasi Daratan Menurut Provinsi, 2010
Table 4.11.1 Land Conservation Area by Province, 2010

Provinsi Province	Cagar Alam		Suaka Margasatwa		Taman Nasional		Taman Wisata Alam	
	Strict Nature Reserve		Wildlife Sanctuary		National Park		Nature Recreation Park	
	Unit	Luas / Area (Ha)	Unit	Luas / Area (Ha)	Unit	Luas / Area (Ha)	Unit	Luas / Area (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	2	8 300,00	1	102 500,00	0,79	867 789,00	-	-
Sumatera Utara	11	16 612,76	4	85 552,00	1,21	334 903,00	6	3 505,60
Sumatera Barat	16	361 506,03	1	4 000,00	1,25	538 625,10	3	610,00
Riau	2	20 559,60	10	391 291,95	1,76	193 172,80	1	4 712,50
Jambi	6	5 942,71	-	-	2,56	693 354,97	1	1 425,50
Sumatera Selatan	1	1,00	6	223 579,00	1,20	484 020,31	2	260,00
Bengkulu	20	14 338,37	-	-	0,42	380 064,00	5	15 288,30
Lampung	-	-	-	-	1,81	420 621,30	-	-
Kep. Bangka Belitung	6	34 690,00	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	2	600,00	-	-	-	-	1	2 065,62
DKI Jakarta	1	18,00	2	115,02	-	-	1	99,82
Jawa Barat	25	46 105,51	2	13 527,50	2,54	98 850,75	14	3 206,24
Jawa Tengah	30	2 718,50	1	103,90	1,71	10 292,93	4	247,20
DI Yogyakarta	3	13,84	2	615,60	0,29	1 842,07	1	1,05
Jawa Timur	18	11 661,85	2	17 976,60	4	176 696,20	3	298,50
Banten	3	4 230,00	-	-	1,46	174 937,25	2	623,15
Bali	1	1 762,80	-	-	1	19 002,89	3	1 890,47
Nusa Tenggara Barat	6	47 830,56	1	21 674,68	1	41 330,00	9	7 715,02
Nusa Tenggara Timur	6	25 229,64	5	13 978,00	4	272 926,59	12	56 406,85
Kalimantan Barat	5	335 834,79	-	-	3,39	1 092 500,00	7	26 461,60
Kalimantan Tengah	3	246 916,00	1	76 110,00	2,61	1 094 330,00	2	2 533,00
Kalimantan Selatan	5	89 317,37	3	9 438,60	-	-	3	1 578,70
Kalimantan Timur	4	186 500,00	-	-	2	1 559 104,00	-	-
Sulawesi Utara	4	41 233,00	2	31 169,00	0,99	285 104,83	2	1 250,00
Sulawesi Tengah	7	366 758,42	6	22 249,79	1	217 991,18	2	5 250,00
Sulawesi Selatan	3	90 187,22	1	2 972,00	1	43 750,00	8	106 189,25
Sulawesi Tenggara	3	1 454,36	5	153 302,00	1	105 194,00	2	1 093,00
Gorontalo	4	48 846,90	1	31 215,00	0,01	2 010,17	-	-
Sulawesi Barat	-	-	1	2 000,00	-	-	-	-
Maluku	14	118 011,38	5	141 328,75	1	189 000,00	1	734,46
Maluku Utara	6	40 757,53	-	-	1	167 300,00	-	-
Papua Barat	18	1 508 486,82	3	16 580,53	-	-	5	13 249,02
Papua	4	654 195,00	6	3 662 858,37	2	2 863 810,00	2	1 775,00
Indonesia	239	4 330 619,96	71	5 024 138,29	43	12 328 523,34	102	258 469,85

TABEL - TABEL

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.11.1

Provinsi Province	Taman Hutan Rakyat		Taman Buru		Jumlah <i>Total</i> (Ha)	
	Grand Forest Park		Hunting Park			
	Unit (10)	Luas / Area (Ha) (11)	Unit (12)	Luas / Area (Ha) (13)		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Aceh	1	6 300,00	1	80 000,00	1 064 889,00	
Sumatera Utara	1	51 600,00	1	8 350,00	500 523,36	
Sumatera Barat	1	12 100,00	-	-	916 841,13	
Riau	1	6 172,00	-	-	615 908,85	
Jambi	1	15 830,00	-	-	715 553,18	
Sumatera Selatan	-	-	-	-	707 860,31	
Bengkulu	1	1 122,00	2	25 300,00	436 112,67	
Lampung	1	22 245,00	-	-	442 866,30	
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	34 690,00	
Kepulauan Riau	-	-	1	16 000,00	18 665,62	
DKI Jakarta	-	-	-	-	232,84	
Jawa Barat	3	631,81	1	12 420,70	174 691,51	
Jawa Tengah	1	231,30	-	-	13 593,83	
DI Yogyakarta	1	617,00	-	-	3 089,55	
Jawa Timur	1	27 828,30	-	-	234 461,45	
Banten	-	-	-	-	179 790,40	
Bali	1	1 392,00	-	-	24 048,16	
Nusa Tenggara Barat	1	3 155,00	2	52 537,90	174 243,16	
Nusa Tenggara Timur	1	1 900,00	2	3 562,64	374 003,72	
Kalimantan Barat	-	-	-	-	1 454 796,39	
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1 419 889,00	
Kalimantan Selatan	1	112 000,00	-	-	212 334,67	
Kalimantan Timur	1	67 766,00	-	-	1 813 370,00	
Sulawesi Utara	-	-	-	-	358 756,83	
Sulawesi Tengah	1	7 128,00	1	5 000,00	624 377,39	
Sulawesi Selatan	2	4 195,00	1	9 780,20	257 073,67	
Sulawesi Tenggara	1	7 877,00	1	8 000,00	276 920,36	
Gorontalo	-	-	-	-	82 072,07	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	2 000,00	
Maluku	-	-	-	-	449 074,59	
Maluku Utara	-	-	-	-	208 057,53	
Papua Barat	-	-	-	-	1 538 316,37	
Papua	-	-	-	-	7 182 638,37	
Indonesia	22	350 090,41	13	220 951,44	22 511 742,28	

Sumber / Source : Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan / Forestry Statistics of Indonesia 2010, Ministry of Forestry

Tabel 4.11.2 Spesies Satwa yang Dilindungi, 2000-2011
Table 4.11.2 Protected Species of Fauna, 2000-2011

Tahun Year	Mamalia	Aves	Reptilia	Pisces	Insecta	Crustacea	Anthozoa	Bivalvia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000	127	382	31	9	20	2	1	12
2001	127	382	31	9	20	2	1	12
2002	127	382	31	9	20	2	1	12
2003	127	382	31	9	20	2	1	12
2004	127	382	31	9	20	2	1	12
2005	127	382	31	9	20	2	1	12
2006	127	382	31	9	20	2	1	12
2007	127	382	31	9	20	2	1	12
2008	127	382	31	8	20	2	1	14
2009	127	382	31	8	20	2	1	14
2010	127	382	31	8	20	2	1	14
2011	127	382	31	8	20	2	1	14

Sumber / Source : Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2011, Kementerian Kehutanan / Executive of Forestry Data Strategic 2011, Ministry of Forestry

TABEL-TABEL

Tabel 4.11.3 Spesies Tumbuhan yang Dilindungi, 2000-2011
Table 4.11.3 Protected Species of Flora, 2000-2011

Tahun Year	Palmae	Rafflesia	Orchidaceae	Nepenthaceae	Dipterocarpaceae	Araceae
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	12	11	29	8	13	2
2001	12	11	29	8	13	2
2002	12	11	29	8	13	2
2003	12	11	29	8	13	2
2004	12	11	29	8	13	2
2005	12	11	29	8	13	2
2006	12	11	29	8	13	2
2007	12	11	29	8	13	2
2008	14	11	29	8	13	2
2009	14	11	29	8	13	2
2010	14	11	29	8	13	2
2011	14	11	29	8	13	2

Sumber / Source : Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2011, Kementerian Kehutanan / Executive of Forestry Data Strategic 2011, Ministry of Forestry

**Tabel 4.12.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
(ribu rupiah), 2006-2011**

*Per Capita Gross Regional Domestic Product at Current Market Price by Province
(thousand rupiahs), 2006-2011*

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010 ^x	2011 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	16 697,2	16 849,1	17 056,0	16 336,7	17 351,3	18 606,1
Sumatera Utara	12 702,2	14 442,0	16 813,3	18 381,0	21 236,8	23 974,9
Sumatera Barat	11 447,3	12 808,1	15 002,4	16 021,5	17 995,2	20 168,8
Riau	33 730,7	41 957,5	53 335,0	55 387,4	62 412,1	72 030,5
Jambi	9 666,1	11 151,3	13 922,3	14 597,1	17 403,6	19 959,6
Sumatera Selatan	13 866,8	15 540,6	18 565,1	18 736,2	21 144,5	23 980,0
Bengkulu	7 161,6	7 865,9	8 966,7	9 692,6	10 871,1	12 140,8
Lampung	6 833,1	8 290,1	9 911,9	11 816,3	14 244,6	16 696,0
Kep. Bangka Belitung	14 596,6	15 989,3	18 563,7	19 331,3	21 715,9	23 978,7
Kepulauan Riau	34 621,4	35 485,2	38 229,6	39 752,8	42 648,9	45 469,4
DKI Jakarta	55 878,4	61 335,6	72 317,6	79 842,6	89 728,2	100 985,3
Jawa Barat	11 907,3	12 894,9	15 234,8	16 293,5	17 921,6	19 645,7
Jawa Tengah	8 777,1	9 739,1	11 406,7	12 322,9	13 732,4	15 376,2
DI Yogyakarta	8 651,6	9 798,4	11 229,5	12 083,9	13 196,2	14 848,6
Jawa Timur	12 826,9	14 572,7	16 807,0	18 445,7	20 774,6	23 459,8
Banten	10 584,7	10 939,1	13 852,3 ^r	14 706,9	16 148,2	17 594,8
Bali	10 859,9	11 563,2	13 886,0 ^r	15 793,9	17 140,8	18 502,5
Nusa Tenggara Barat	6 775,2	7 696,6	8 017,1	9 880,8	11 012,8	10 719,9
Nusa Tenggara Timur	3 873,7	4 331,4	4 804,0	5 257,5	5 922,2	6 532,9
Kalimantan Barat	9 181,3	9 910,0	11 362,7	12 445,2	13 762,9	15 081,1
Kalimantan Tengah	12 245,5	13 279,3	15 306,8	17 066,1	19 267,3	21 818,3
Kalimantan Selatan	10 359,9	11 501,5	13 113,9	14 440,5	16 495,0	18 466,2
Kalimantan Timur	67 531,1	69 787,3	96 096,2	83 139,5	90 597,2	105 849,2
Sulawesi Utara	9 798,0	10 992,9	12 939,2 ^r	14 712,1	16 256,4	18 075,2
Sulawesi Tengah	8 203,2	9 124,6	11 302,3 ^r	12 532,9	14 162,8	16 514,0
Sulawesi Selatan	8 018,8	8 907,3	10 825,4	12 567,4	14 669,0	16 929,0
Sulawesi Tenggara	7 680,5	8 527,6	10 335,2	11 704,6	12 706,8	14 067,7
Gorontalo	4 283,8	4 878,5	5 921,4	6 933,2	7 745,4	8 612,1
Sulawesi Barat	5 118,7	5 765,3	7 525,3	8 310,6	9 482,3	10 843,7
Maluku	3 958,1	4 022,4	4 306,6	4 725,9	5 272,1	6 088,3
Maluku Utara	3 033,5	3 264,1	3 894,8	4 618,9	5 192,1	5 697,4
Papua Barat	12 741,1	15 143,2	19 689,5	24 659,8	35 348,3	45 842,7
Papua	23 744,4	22 746,9	23 984,7	28 458,6	30 979,4	25 530,9
Indonesia	14 991,1	17 360,6	21 424,7	23 914,0	27 084,0	30 812,9

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

^x Angka sementara / Preliminary figures

^{xx} Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia 2006-2011, BPS

Source Regional Domestic Product of Provinces in Indonesia 2006-2011, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.2 Tabungan Bruto Menurut Sektor (triliun rupiah), 2006-2011
Table 4.12.2 Gross Saving by Sectors (trillion rupiahs), 2006-2011

Sektor / Sector	2006 (1)	2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 ^x (5)	2011 ^{xx} (6)
I. Keuangan / Financial						
1. Bank Sentral / Central Bank	17,3	-15,4	18,6	-5,1	-27,5	-8,2
2. Bank Umum Konvensional <i>Commercial Banks</i>	27,6	24,7	50,1	83,5	36,4	52,4
3. Bukan Bank / Non Banks	8,8	19,4	18,6	40,7	22,6	...
II. Bukan Keuangan / Non-financial						
1. Rumah Tangga / Household	180,3	241,3	325,4 ^r	398,8	453,7	...
2. Pemerintahan Umum <i>General Government</i>	181,1 ^r	168,7	229,5	116,0 ^r	173,0	201,2
3. Perusahaan Pemerintah <i>Government Enterprises</i>	3,7	40,6	64,5	52,3	7,8	...
4. Bisnis/Private Enterprises	467,9 ^r	502,5	838,8 ^r	1 011,9 ^r	1 357,7	...
III. Luar Negeri / Rest of the World	-38,4	2,8	-36,7 ^r	38,9	72,9	106,8
Jumlah / Total	848,3^r	984,6	1 508,8	1 737,1	2 096,6	352,2

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

^x Angka sementara / Preliminary figures

^{xx} Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber / Source : ¹ Tahun 2006 - 2007, data dikutip dari publikasi Neraca Arus Dana Tahunan / In 2006 - 2007, data cited from the publication of Yearly Indonesian Flow of Funds Accounts

² Tahun 2008, data dikutip dari publikasi Neraca Arus Dana Tahunan dengan revisi pada sektor Rumah Tangga dan sektor Perusahaan swasta Non Finansial / In 2008, data cited from the publication of Yearly Indonesian Flow of Funds Accounts with revision for Household sector and Private Enterprises sector

³ Tahun 2009, data dikutip dari publikasi Neraca Arus Dana Tahunan dengan revisi pada sektor Pemerintahan Umum dan sektor Perusahaan Swasta Non Finansial / In 2009, data cited from the publication of Yearly Indonesian Flow of Fund Accounts with revision for General Government sector and Private Enterprises sector

⁴ Tahun 2010, data dikutip dari publikasi Neraca Arus Dana Tahunan dengan revisi pada jumlah tabungan bruto, Sektor Pemerintah Umum, Sektor Bisnis, dan Sektor Luar Negeri/In 2009, data cited from the publication of Yearly Indonesian Flow of Funds Accounts with revision for total of gross saving, General Government Sector, Private Enterprises Sector, and Rest of The World Sector

Tabel 4.12.3 Pembagian Investasi dalam Produk Domestik Bruto (miliar rupiah), 2005-2011
Table 4.12.3 Investment Share in Gross Domestic Product (billion rupiahs), 2005-2011

Tahun Year	Investasi <i>Investment</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestik Product</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	Pembagian <i>Share</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	695 828,9	2 774 281,1	25,08
2006	848 168,3	3 339 216,8	25,40
2007	984 573,8	3 950 893,2	24,92
2008	1 376 539,3	4 948 688,4	27,82
2009	1 737 092,9	5 606 203,4	30,99
2010 ^x	2 096 574,8	6 436 270,8	32,57
2011 ^{xx}	2 433 863,5	7 427 086,1	32,77

Catatan : ^x Angka sementara / *Preliminary figures*

Note ^{xx} Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

Sumber : Ditolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source Based on Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.4 Laju Inflasi 66 Kota¹ di Indonesia (2007=100), 2006-2011
Table Inflation Rate of 66 Cities¹ in Indonesia (2007=100), 2006-2011

Kota / Cities	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banda Aceh	9,54	11,00	10,27	3,50	4,64	3,32
Lhokseumawe	11,47	4,18	13,78	3,96	7,19	3,55
Sibolga	5,03	7,13	12,36	1,59	11,83	3,71
Pematang Siantar	6,06	8,37	10,16	2,72	9,68	4,25
Medan	5,97	6,42	10,63	2,69	7,65	3,54
Padang Sidempuan	10,02	5,87	12,34	1,87	7,42	4,66
Padang	8,05	6,90	12,68	2,05	7,84	5,37
Pekanbaru	6,32	7,53	9,02	1,94	7,00	5,09
Dumai	-	-	14,30	0,80	9,05	3,09
Jambi	10,66	7,42	11,57	2,49	10,52	2,76
Palembang	8,44	8,21	11,15	1,85	6,02	3,78
Bengkulu	6,52	5,00	13,44	2,88	9,08	3,96
Bandar Lampung	6,03	6,58	14,82	4,18	9,95	4,24
Pangkal Pinang	6,42	2,64	18,40	2,17	9,36	5,00
Batam	4,58	4,84	8,39	1,88	7,40	3,76
Tanjung Pinang	-	-	11,90	1,43	6,17	3,32
Jakarta	6,03	6,04	11,11	2,34	6,21	3,97
Bogor	-	-	14,20	2,16	6,57	2,85
Sukabumi	-	-	11,39	3,49	5,43	4,26
Bandung	5,33	5,25	10,23	2,11	4,53	2,75
Cirebon	6,31	7,87	14,14	4,11	6,70	3,20
Bekasi	-	-	10,10	1,93	7,88	3,45
Depok	-	-	11,70	1,30	7,97	2,95
Tasikmalaya	8,44	7,72	12,07	4,17	5,56	4,17
Purwokerto	8,45	6,15	12,06	2,83	6,04	3,40
Surakarta	6,18	3,28	6,96	2,63	6,65	1,93
Semarang	6,08	6,75	10,34	3,19	7,11	2,87
Tegal	7,73	8,89	8,52	5,83	6,73	2,58
Yogyakarta	10,40	7,99	9,88	2,93	7,38	3,88
Jember	6,84	7,25	10,63	3,66	7,09	2,43
Sumenep	-	-	10,20	2,73	6,75	4,18
Kediri	7,77	6,85	9,52	3,60	6,80	3,62
Malang	5,92	5,93	10,49	3,39	6,70	4,05
Probolinggo	-	-	10,89	3,55	6,68	3,78
Madiun	-	-	13,27	3,40	6,54	3,49
Surabaya	6,71	6,27	8,73	3,39	7,33	4,72
Serang	7,67	6,31	13,91	4,57	6,18	2,78
Tangerang	-	-	10,75	2,49	6,08	3,78
Cilegon	-	-	12,96	3,11	6,12	2,35

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.12.4

Kota / Cities	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Denpasar	4,30	5,91	9,25	4,37	8,10	3,75
Mataram	4,17	8,76	13,01	3,14	11,07	6,38
Bima	-	-	14,36	4,09	6,35	7,19
Maumere	-	-	16,17	5,22	8,48	6,59
Kupang	9,72	8,44	10,90	6,49	9,97	4,32
Pontianak	6,32	8,56	11,19	4,91	8,52	4,91
Singkawang	-	-	12,66	1,15	7,10	6,72
Sampit	7,75	7,57	8,89	2,85	9,53	3,60
Palangka Raya	7,72	7,96	11,65	1,39	9,49	5,28
Banjarmasin	11,03	7,78	11,62	3,86	9,06	3,98
Balikpapan	5,52	7,27	11,30	3,60	7,38	6,45
Samarinda	6,50	9,18	12,69	4,06	7,00	6,23
Tarakan	-	-	19,85	7,21	7,92	6,43
Manado	5,09	10,13	9,71	2,31	6,28	0,67
Palu	8,69	8,13	10,40	5,73	6,40	4,47
Watampone	-	-	14,22	6,84	6,74	3,94
Makassar	7,21	5,71	11,79	3,24	6,82	2,87
Parepare	-	-	13,34	1,40	5,79	1,60
Palopo	-	-	17,58	4,18	3,99	3,35
Kendari	10,57	7,53	15,28	4,60	3,87	5,09
Gorontalo	7,54	7,02	9,20	4,35	7,43	4,08
Mamuju	-	-	11,66	1,78	5,12	4,91
Ambon	4,80	5,85	9,34	6,48	8,78	2,85
Ternate	5,12	10,43	11,25	3,88	5,32	4,52
Manokwari	-	-	20,51	7,52	4,68	3,64
Sorong	-	-	19,56	2,61	8,13	0,90
Jayapura	9,52	10,35	12,55	1,92	4,48	3,40
Nasional / National	6,60	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79

Catatan / Note : ¹ Sebelum tahun 2008 merupakan laju inflasi 45 kota (2002=100) / Prior to 2008, the inflation rate in 45 cities (2002=100)

Sumber / Source : Ditolah dari hasil Survei Harga Konsumen, BPS / Based on Consumer Price Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.5 Rasio Pinjaman Luar Negeri Terhadap Produk Nasional Bruto, 2006-2011
Table Ratio of External Debt on Gross National Product, 2006-2011

Tahun Years	Pinjaman Luar Negeri <i>External Debt</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	Produk Nasional Bruto <i>Gross National Product</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	Rasio <i>Ratio</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	1 161 198,72	3 196 947,9	36,32
2007	1 287 015,55 ^r	3 788 408,5	33,97
2008	1 698 126,00	4 772 823,2	35,58
2009	1 624 987,40	5 409 983,9	30,04
2010	1 819 895,28	6 255 301,9 ^x	29,09 ^x
2011	2 043 700,50	7 215 396,8 ^{xx}	28,32 ^{xx}

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

^x Angka sementara / Preliminary figures

^{xx} Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source Based on Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia

Tabel 4.12.6 **Percentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi, 2005-2011**
Table **Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Worked by Province, 2005-2011**

Provinsi Province	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	86,00	89,57	90,16	90,44	91,29	89,88	92,57
Sumatera Utara	88,10	88,49	89,90	90,90	91,55	89,90	93,63
Sumatera Barat	86,66	88,13	89,69	91,96	92,03	90,85	93,55
Riau	87,84	89,76	90,21	91,80	91,44	84,69	94,68
Jambi	89,26	93,38	93,78	94,86	94,46	92,92	95,98
Sumatera Selatan	87,18	90,67	90,66	91,92	92,39	91,06	94,23
Bengkulu	91,09	93,96	95,32	95,10	94,92	94,17	97,63
Lampung	91,53	90,87	92,42	92,85	93,38	91,14	94,22
Kep. Bangka Belitung	92,81	91,01	93,51	94,01	93,86	90,78	96,39
Kepulauan Riau	-	87,76	90,99	91,99	91,89	93,82	92,20
DKI Jakarta	84,23	88,60	87,43	87,84	87,85	86,25	89,20
Jawa Barat	84,47	85,41	86,92	87,92	89,04	88,24	90,17
Jawa Tengah	90,46	91,98	92,30	92,65	92,67	92,66	94,07
DI Yogyakarta	92,41	93,69	93,90	94,62	94,00	94,92	96,03
Jawa Timur	91,49	91,81	93,21	93,58	94,92	95,78	95,84
Banten	83,41	81,09	84,25	84,82	85,03	80,83	86,94
Bali	94,68	93,96	96,23	96,69	96,87	96,53	97,68
Nusa Tenggara Barat	89,71	91,10	93,52	93,87	93,75	95,08	94,67
Nusa Tenggara Timur	95,18	96,35	96,28	96,27	96,03	95,94	97,31
Kalimantan Barat	91,87	91,47	93,53	94,59	94,56	95,17	96,12
Kalimantan Tengah	95,09	93,32	94,89	95,41	95,38	93,88	97,45
Kalimantan Selatan	92,66	91,13	92,38	93,82	93,64	93,15	94,77
Kalimantan Timur	88,83	86,57	87,93	88,89	89,17	82,95	90,16
Sulawesi Utara	85,95	85,38	87,65	89,35	89,44	82,02	91,38
Sulawesi Tengah	92,29	89,69	91,61	94,55	94,57	92,74	95,99
Sulawesi Selatan	84,07	87,24	88,75	90,96	91,10	86,10	93,44
Sulawesi Tenggara	89,07	90,33	93,60	94,27	95,26	93,61	96,94
Gorontalo	85,96	92,38	92,84	94,35	94,11	91,52	95,74
Sulawesi Barat	-	93,55	94,55	95,43	95,49	95,30	97,18
Maluku	84,99	86,28	87,80	89,33	89,43	85,26	92,62
Maluku Utara	86,91	93,10	93,95	93,52	93,24	89,62	94,45
Papua Barat	-	89,83	90,54	92,35	92,44	90,11	91,06
Papua	92,69	94,17	94,99	95,61	95,92	95,74	96,06
Indonesia	88,76	89,72	90,89	91,61	92,13	91,26	93,44

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Source Based on National Labor Force Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Rentan Kehilangan Pekerjaannya menurut Provinsi, 2005-2011
Table 4.12.7 Percentage of Population Aged 15 Years and Over who Vulnerable Employment by Province, 2005-2011

Provinsi Province	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	69,90	67,01	60,17	60,90	58,82	58,44	55,37
Sumatera Utara	63,98	57,84	57,04	60,43	60,35	61,04	53,22
Sumatera Barat	58,84	62,71	63,13	60,97	61,45	58,50	53,73
Riau	46,11	55,82	53,96	53,41	54,93	50,09	49,34
Jambi	67,59	69,09	63,24	62,60	61,59	59,43	50,71
Sumatera Selatan	73,37	71,93	66,15	66,89	69,73	68,08	60,72
Bengkulu	75,13	78,07	69,98	70,12	68,96	68,43	59,78
Lampung	72,69	69,78	67,27	66,85	68,21	65,14	60,38
Kep. Bangka Belitung	45,35	49,40	52,95	52,06	50,72	52,79	41,15
Kepulauan Riau	-	34,58	34,67	35,57	35,91	32,27	24,89
DKI Jakarta	28,32	28,15	32,69	36,75	36,02	35,58	28,35
Jawa Barat	49,39	48,03	50,95	49,46	49,23	48,33	42,19
Jawa Tengah	56,71	59,71	59,04	58,14	58,95	57,11	55,20
DI Yogyakarta	55,13	55,88	53,02	55,69	54,04	56,97	47,21
Jawa Timur	57,48	56,57	59,88	59,67	59,92	58,22	54,65
Banten	48,89	43,73	48,20	48,68	45,57	44,59	35,17
Bali	54,91	55,76	57,10	59,38	59,16	54,79	47,81
Nusa Tenggara Barat	64,94	66,64	64,48	63,15	60,45	63,74	59,07
Nusa Tenggara Timur	91,49	88,35	83,70	84,14	82,10	80,60	76,45
Kalimantan Barat	73,90	71,96	71,87	72,75	72,01	68,76	67,09
Kalimantan Tengah	75,91	71,55	68,84	68,95	66,41	62,64	56,89
Kalimantan Selatan	68,78	69,00	65,77	67,23	62,01	61,38	59,52
Kalimantan Timur	45,19	51,21	49,55	50,48	49,91	46,24	43,49
Sulawesi Utara	58,31	59,96	56,69	55,67	54,18	47,37	48,98
Sulawesi Tengah	73,04	76,04	69,01	72,54	71,45	67,94	63,47
Sulawesi Selatan	70,32	63,97	69,32	67,24	65,60	64,61	61,43
Sulawesi Tenggara	77,06	78,59	74,85	74,41	72,12	68,94	63,45
Gorontalo	61,02	62,35	57,64	59,99	56,98	57,76	54,86
Sulawesi Barat	-	78,83	78,08	76,46	71,97	76,90	68,85
Maluku	77,23	77,14	73,64	75,21	75,90	68,34	70,72
Maluku Utara	77,54	78,71	70,91	71,78	71,32	67,05	64,88
Papua Barat	-	73,06	66,33	69,04	68,02	66,18	59,66
Papua	83,30	85,88	82,38	80,87	80,63	84,09	78,57
Indonesia	58,77	58,27	58,67	58,57	58,33	56,81	52,03

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Source Based on National Labor Force Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.12.8 **Percentase Buruh/Karyawan/Pegawai Wanita di Sektor Non Pertanian Menurut Provinsi, 2007-2011**
Table 4.12.8 **Percentage of Women Workers in Non Agricultural Sector by Province, 2007-2011**

Provinsi Province	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30,88	32,23	35,48	36,54	36,79
Sumatera Utara	33,02	33,58	35,22	35,90	41,34
Sumatera Barat	34,53	36,54	40,34	41,60	39,99
Riau	30,17	28,81	29,96	34,35	34,86
Jambi	31,39	33,32	35,99	33,60	36,01
Sumatera Selatan	36,60	37,42	40,15	36,44	34,97
Bengkulu	31,26	33,95	34,46	38,55	38,97
Lampung	30,45	31,08	33,15	34,63	36,63
Kep. Bangka Belitung	24,68	24,09	27,63	28,77	33,32
Kepulauan Riau	39,46	40,61	39,40	39,65	33,59
DKI Jakarta	37,44	39,67	40,71	38,91	37,60
Jawa Barat	28,48	31,97	34,13	33,84	32,98
Jawa Tengah	38,16	42,37	43,54	41,62	42,56
DI Yogyakarta	38,35	39,29	40,35	42,72	40,71
Jawa Timur	35,44	36,14	38,70	38,19	38,39
Banten	33,25	33,97	34,84	33,87	34,93
Bali	36,54	38,03	38,25	38,52	38,13
Nusa Tenggara Barat	31,45	33,60	33,65	35,12	33,57
Nusa Tenggara Timur	31,06	32,26	31,50	36,39	36,48
Kalimantan Barat	26,80	30,76	31,76	28,87	30,45
Kalimantan Tengah	29,13	27,69	29,80	29,25	29,74
Kalimantan Selatan	32,54	31,31	33,25	30,88	30,55
Kalimantan Timur	24,27	24,65	29,70	25,92	26,50
Sulawesi Utara	36,44	34,31	34,62	37,97	36,21
Sulawesi Tengah	37,82	38,53	38,67	37,64	38,90
Sulawesi Selatan	23,94	35,15	36,20	37,21	37,89
Sulawesi Tenggara	26,31	30,97	35,36	36,75	34,29
Gorontalo	35,80	41,90	41,47	45,56	44,62
Sulawesi Barat	35,13	36,14	36,48	38,03	36,11
Maluku	31,42	33,56	34,60	41,34	38,21
Maluku Utara	32,69	26,93	33,40	37,70	36,02
Papua Barat	20,40	24,82	28,14	26,71	28,41
Papua	25,53	25,47	26,99	25,48	29,67
Indonesia	33,35	35,44	37,08	36,60	36,67

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Source Based on National Labor Force Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.9 **Percentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2006-2011**

Percentage of Household with Access to the Internet in the Last Three Months by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006 ¹	2007 ¹	2008 ¹	2009 ¹	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,76	3,24	7,01	9,01	22,13	19,95
Sumatera Utara	2,62	3,71	7,17	9,18	24,71	25,28
Sumatera Barat	3,65	6,01	9,11	14,80	30,10	29,03
Riau	3,40	5,02	8,70	13,25	26,46	26,67
Jambi	2,12	3,28	5,48	7,93	21,48	22,15
Sumatera Selatan	1,56	3,28	8,08	10,39	21,43	20,31
Bengkulu	2,91	4,47	7,81	11,24	22,66	22,33
Lampung	1,77	2,48	4,30	5,90	16,69	16,58
Kep. Bangka Belitung	2,24	3,62	7,93	10,89	24,48	25,25
Kepulauan Riau	8,64	13,3	9,02	14,13	35,61	40,68
DKI Jakarta	16,81	18,6	27,61	39,42	56,60	56,69
Jawa Barat	4,85	6,09	8,18	14,17	29,44	28,40
Jawa Tengah	2,95	4,18	7,34	10,91	23,19	24,11
DI Yogyakarta	18,23	20,83	24,39	27,71	45,26	43,97
Jawa Timur	3,55	5,05	8,61	13,12	24,01	23,55
Banten	6,34	7,19	10,04	13,91	27,81	31,35
Bali	6,65	7,1	8,57	13,73	30,86	33,11
Nusa Tenggara Barat	1,51	2,6	2,71	7,41	14,70	13,68
Nusa Tenggara Timur	1,17	1,7	4,46	4,74	10,30	10,37
Kalimantan Barat	2,65	3,33	6,17	7,72	19,38	18,61
Kalimantan Tengah	1,10	1,73	5,69	6,48	21,45	20,63
Kalimantan Selatan	2,92	3,17	6,24	11,26	27,53	27,51
Kalimantan Timur	7,17	8,74	11,05	20,56	40,53	38,37
Sulawesi Utara	3,08	3,89	6,79	12,07	33,13	30,54
Sulawesi Tengah	1,65	2,49	4,53	6,61	18,17	17,39
Sulawesi Selatan	2,55	4,5	5,48	10,59	28,56	25,91
Sulawesi Tenggara	2,40	3,56	5,27	7,23	19,13	16,87
Gorontalo	2,06	2,32	3,37	10,36	24,43	20,65
Sulawesi Barat	1,02	0,97	4,06	4,53	13,29	13,52
Maluku	1,52	2,85	3,64	8,06	18,45	18,89
Maluku Utara	1,79	3,52	4,77	6,74	16,43	12,37
Papua Barat	1,97	1,75	6,02	8,36	21,54	22,23
Papua	1,44	2,43	5,65	7,10	12,25	10,93
Indonesia	4,22	5,58	8,56	12,83	26,31	26,21

Catatan / Note : ¹ Referensi waktu selama satu bulan terakhir / Time reference was in the last month

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.12.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Menurut Provinsi, 2006-2011
Table 4.12.10 Percentage of Household Having Telephone by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,43	7,58	5,15	5,20	4,60	3,29
Sumatera Utara	9,00	11,38	10,36	9,57	7,62	5,74
Sumatera Barat	10,14	13,30	12,79	10,97	8,15	7,38
Riau	7,29	9,50	9,57	8,91	6,04	5,39
Jambi	5,96	8,58	8,11	6,36	5,91	4,52
Sumatera Selatan	7,75	9,05	9,15	9,04	8,64	7,05
Bengkulu	7,04	7,36	7,01	7,16	5,67	6,16
Lampung	5,68	7,81	6,92	7,07	5,46	4,14
Kep. Bangka Belitung	6,14	10,10	8,41	7,02	6,01	4,12
Kepulauan Riau	17,89	24,78	13,26	10,88	13,02	10,41
DKI Jakarta	38,34	37,45	35,42	37,76	27,23	26,69
Jawa Barat	12,69	14,24	13,46	13,25	11,64	8,77
Jawa Tengah	6,07	7,92	7,74	7,40	6,86	6,05
DI Yogyakarta	14,63	13,32	10,76	14,79	10,17	10,17
Jawa Timur	12,70	13,65	12,55	11,71	8,54	7,49
Banten	16,81	18,80	16,80	13,07	14,25	11,38
Bali	15,27	17,33	16,17	16,78	15,64	13,52
Nusa Tenggara Barat	4,09	4,51	4,06	4,88	3,32	3,13
Nusa Tenggara Timur	3,59	4,74	4,59	4,21	4,06	3,75
Kalimantan Barat	6,61	9,05	7,46	6,47	7,42	5,17
Kalimantan Tengah	6,68	7,71	6,77	8,00	6,36	4,36
Kalimantan Selatan	8,93	9,18	8,93	8,87	6,10	5,98
Kalimantan Timur	18,97	20,76	19,25	17,07	13,44	10,81
Sulawesi Utara	12,09	13,62	13,19	10,14	9,24	8,04
Sulawesi Tengah	5,39	6,77	5,56	5,04	5,05	3,78
Sulawesi Selatan	12,25	13,31	11,62	12,40	10,62	7,75
Sulawesi Tenggara	5,35	6,54	5,49	5,69	4,56	3,34
Gorontalo	5,29	7,39	6,75	7,26	3,57	3,45
Sulawesi Barat	3,04	4,44	6,24	4,17	3,41	2,85
Maluku	7,82	7,57	6,40	7,15	6,58	3,91
Maluku Utara	4,56	6,15	6,56	5,42	3,11	3,32
Papua Barat	5,91	10,49	7,40	8,20	8,35	3,63
Papua	6,14	8,56	6,13	5,64	4,28	2,91
Indonesia	11,20	12,69	11,67	11,20	9,45	7,85

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

TABEL - TABEL

Tabel 4.12.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler menurut Provinsi, 2006-2011
Table Percentage of Household Having Cellular Phone by Province, 2006-2011

Provinsi Province	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20,75	35,19	50,14	65,75	72,30	77,75
Sumatera Utara	24,96	40,87	56,25	69,39	75,57	83,63
Sumatera Barat	27,16	43,48	56,30	69,45	75,20	81,69
Riau	33,95	54,52	74,01	81,69	86,43	91,43
Jambi	22,49	42,44	60,68	69,24	78,72	85,94
Sumatera Selatan	18,30	32,88	53,17	62,52	75,03	81,00
Bengkulu	19,14	33,06	52,34	69,17	72,35	81,65
Lampung	16,79	29,38	46,74	63,72	71,73	81,25
Kep. Bangka Belitung	31,46	48,12	69,43	79,38	83,57	90,07
Kepulauan Riau	52,79	71,02	77,86	86,67	95,06	96,13
DKI Jakarta	59,90	71,27	84,22	91,28	93,04	96,05
Jawa Barat	22,88	34,48	49,18	65,61	72,45	79,47
Jawa Tengah	21,64	33,38	46,68	63,28	67,71	76,22
DI Yogyakarta	46,57	58,19	64,33	75,83	80,76	85,09
Jawa Timur	21,48	33,91	47,67	64,61	67,34	75,69
Banten	27,68	40,81	57,78	67,46	76,28	84,32
Bali	42,03	52,64	65,45	78,90	80,05	85,59
Nusa Tenggara Barat	16,84	28,05	38,15	50,80	53,24	62,68
Nusa Tenggara Timur	8,83	16,76	28,92	38,96	49,51	52,62
Kalimantan Barat	21,28	36,47	49,18	57,54	69,44	78,92
Kalimantan Tengah	19,02	35,58	51,69	64,14	75,31	83,38
Kalimantan Selatan	30,38	44,56	63,36	75,62	80,01	86,39
Kalimantan Timur	47,06	60,38	76,57	85,68	91,88	94,01
Sulawesi Utara	20,80	34,91	49,14	63,10	73,19	78,65
Sulawesi Tengah	13,05	24,91	41,89	52,54	59,69	67,89
Sulawesi Selatan	23,64	38,50	52,98	70,31	76,59	80,95
Sulawesi Tenggara	14,82	26,92	43,63	61,29	68,94	75,46
Gorontalo	12,06	25,49	40,03	56,75	62,69	75,28
Sulawesi Barat	10,71	24,24	44,26	58,25	61,79	68,64
Maluku	14,72	21,73	31,83	42,47	58,42	62,55
Maluku Utara	13,06	24,16	38,46	43,66	53,03	60,45
Papua Barat	16,23	29,66	40,85	48,90	67,76	64,61
Papua	15,74	25,81	28,11	33,17	34,89	35,12
Indonesia	24,60	37,59	51,99	66,11	72,00	78,96

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Source Based on National Socio Economic Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 4.12.12 **Percentase Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto, 2005-2010**
Table **Percentage of Tourism Economic Impact to Gross Domestic Product, 2005-2010**

Uraian <i>Description</i>	2005 (1)	2006 (2)	2007 (3)	2008 (4)	2009 (5)	2010 (6)
PDB (triliun rupiah) <i>GDP (trillion rupiahs)</i>	2 784,96	3 339,22	3 950,89	4 951,36	5 613,44	6 422,92
Peranan Pariwisata <i>Tourism Share</i>	5,27	4,30	4,29	4,70	4,17	4,06
Wisatawan Mancanegara <i>Foreign Tourist</i>	2,27	2,09	1,09	1,44	0,93	0,94
Wisatawan Nusantara <i>Domestic Tourist</i>	0,20	0,08	2,04	2,03	2,01	1,93
Wisatawan Indonesia yang ke Luar Negeri <i>Domestic Tourist to Abroad</i>	1,36	1,04	0,11	0,14	0,08	0,06
Investasi / <i>investment</i>	1,33	0,90	0,96	0,99	1,04	1,05
Promosi dan Pembinaan <i>Promotion and Development</i>	0,11	0,09	0,08	0,09	0,10	0,09

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional 2006-2010, BPS

Source National Tourism Satellite Account 2006-2010, BPS-Statistics Indonesia

TABEL-TABEL

Tabel 4.13.1 Persentase Transaksi Berjalan Terhadap Produk Domestik Bruto, 2006-2011
Table Percentage of Current Account to Gross Domestic Product, 2006-2011

Tahun Years	Transaksi Berjalan Current Account (miliar rupiah / billion rupiahs)	Produk Domestik Bruto (PDB) Gross Domestic Product (GDP) (miliar rupiah / billion rupiahs)	% Transaksi Berjalan terhadap PDB % Current Account to GDP
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	97 948,2	3 339 216,8	2,93
2007	98 814,7	3 950 893,2	2,50
2008	1 379,7	4 948 688,4	0,03
2009	99 903,2	5 606 203,4	1,78
2010 ^x	46 249,7	6 436 270,8	0,72
2011 ^{xx}	15 528,7	7 427 086,1	0,21

Catatan : ^x Angka sementara / *Preliminary figures*

Note ^{xx} Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

Sumber : Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source Based on Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia

Tabel 4.13.2 Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US \$), 2006-2011
Table 4.13.2 Value of Imports by Major Countries of Origin (CIF Value: million US \$), 2006-2011

Negara Asal / Country of Origin	2006	2007	2008 ¹	2009 ¹	2010 ¹	2011 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASIA						
ASEAN	18 970,6	23 792,2	40 967,8	27 722,0	38 912,2	51 108,9
Thailand / Muangthai	2 983,5	4 287,1	6 334,3	4 612,9	7 470,7	10 405,1
Singapura / Singapore	10 034,5	9 839,8	21 789,5	15 550,4	20 240,8	25 964,7
Filipina / Philippines	284,6	359,9	755,5	544,0	706,3	852,4
Malaysia	3 193,3	6 411,9	8 922,3	5 688,4	8 648,7	10 404,9
Myanmar	19,7	30,4	29,7	29,1	31,9	71,3
Kamboja / Cambodia	1,1	1,3	2,0	3,4	4,7	7,9
Brunei Darussalam	1 606,9	1 864,7	2 416,6	639,6	666,2	1 018,4
Laos / Lao PDR	0,2	2,9	0,2	0,4	0,6	1,3
Vietnam	846,8	994,2	717,7	653,8	1 142,3	2 382,9
Asia lainnya / Rest of Asia						
Jepang / Japan	5 515,8	6 526,7	15 128,0	9 843,7	16 965,8	19 436,6
Cina / China	6 636,9	8 557,9	15 247,2	14 002,2	20 424,2	26 212,2
Korea Selatan / Korea, Rep. of	2 869,1	3 196,7	6 920,1	4 742,3	7 703,0	12 999,7
Lainnya / Others	9 289,9	9 898,0	17 734,1	12 932,6	17 016,9	22 505,3
AFRIKA / AFRICA	1 189,6	2 314,2	2 241,9	2 047,4	2 455,4	4 029,9
AUSTRALIA & OCEANIA						
Australia	2 986,3	3 004,0	3 997,5	3 436,0	4 099,0	5 177,1
Selandia Baru / New Zealand	333,8	503,5	706,7	556,8	726,9	729,2
Oceania lainnya / Rest of Oceania	17,2	26,5	53,9	154,0	54,3	37,6
AMERIKA / AMERICA						
NAFTA	4 782,9	5 910,6	9 901,0	8 216,2	10 720,5	13 241,7
Amerika Serikat / USA	4 056,5	4 787,2	7 880,1	7 083,9	9 399,2	10 813,2
Kanada / Canada	666,5	1 055,6	1 871,5	992,5	1 108,4	2 015,8
Meksiko / Mexico	59,9	67,8	149,4	139,8	212,9	412,7
Amerika lainnya / Rest of America	1 194,2	1 484,0	2 494,6	2 282,0	3 212,9	4 231,1
EROPA / EUROPE						
Uni Eropa / European Union ²	6 023,7	7 679,9	10 560,0	8 679,9	9 862,5	12 499,7
Inggris / United Kingdom	553,0	654,0	1 067,6	844,6	937,9	1 173,9
Belanda / Netherlands	515,4	504,0	602,7	554,1	681,9	808,5
Perancis / France	949,9	1 443,7	1 689,7	1 633,1	1 340,5	2 004,6
Jerman / Germany	1 456,6	1 982,0	3 068,8	2 373,5	3 006,7	3 393,8
Austria	89,1	127,7	358,5	259,3	292,0	396,4
Belgia / Belgium	305,5	338,4	620,2	434,3	555,4	593,6
Denmark	80,9	101,3	102,6	116,6	168,4	176,2
Swedia / Sweden	646,1	773,2	1 031,0	712,3	725,6	886,2
Finlandia / Finland	372,9	326,9	359,7	227,0	358,7	500,1
Irlandia / Ireland	148,1	170,9	126,4	185,6	102,0	107,9
Italia / Italy	551,4	667,5	999,3	726,1	909,7	1 222,8
Spanyol / Spain	206,6	286,4	251,8	254,0	309,3	379,6
Uni Eropa lainnya / Other of European Union	148,2	303,9	281,7	359,4	474,4	856,1
Eropa lainnya / Rest of Europe	1 255,5	1 579,2	3 244,5	2 214,1	3 509,7	5 226,6
Jumlah / Total	61 065,5	74 473,4	129 197,3	96 829,2	135 663,3	177 435,6

Catatan / Note : ¹ Termasuk Kawasan Berikat / Including Bounded Zones

² Sejak Januari 2007 Uni Eropa menjadi 27 negara / Since January 2007 the European Union comprises 27 countries

Sumber : Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PIB)

Source : Based on customs declaration documents from Directorate General of Customs and Excise (Imports Declaration)

TABEL - TABEL

Tabel 4.13.3 Posisi Pinjaman Luar Negeri (juta US\$), 2007-2011
Table External Debt Outstanding (million US\$), 2007-2011

Rincian <i>Description</i>	2007 (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 ^r (4)	2011 ^x (5)
Pemerintah dan Otoritas Moneter Government and Monetary Authority	80 609	86 600	99 265	118 624	118 642
Menurut Institusi / By Institution					
Pemerintah Pusat / Central Government ¹	76 920	85 136	90 853	106 860	112 427
Otoritas Moneter / Monetary Authority ²	3 688	1 465	8 412	11 764	6 215
Menurut Persyaratan / By Term of Credits					
Komersial / Commercial ³	18 418	19 952	31 415	46 032	48 424
Bukan Komersial / Non-Commercial	62 191	66 648	67 850	70 571	70 218
ODA / ODA	47 663	56 093	58 342	61 796	62 120
Non ODA / Non-ODA	14 528	10 555	9 508	8 775	8 098
Swasta / Private³	56 032	68 480	73 606	83 789	106 732
Lembaga Keuangan / Financial Institutions	7 515	15 475	12 597	17 957	24 570
Bank / Bank	5 401	11 583	9 530	14 382	18 466
Bukan Bank / Non-Bank	2 114	3 891	3 066	3 575	6 103
Bukan Lembaga Keuangan	48 517	53 005	61 009	65 833	82 162
<i>Non-Financial Institutions</i>					
Jumlah / Total	136 641	155 080	172 871	202 413	225 375

Catatan : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Note ^x Angka sementara / Preliminary figures

¹ Termasuk obligasi pemerintah yg dimiliki bukan penduduk / Including government bond rupiah and foreign currency owned by non-resident

² Termasuk SBI yg dimiliki bukan penduduk / Including SBI owned by non-resident

³ Termasuk domestik securities yg dimiliki bukan penduduk / Including domestic securities owned by non-resident

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia

**Tabel
Table 4.13.4**

**Percentase Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Produk Domestik Bruto,
2006-2011**
Percentage of Foreign Direct Investment (FDI) to Gross Domestic Product (GDP), 2006-2011

Tahun Year	Penanaman Modal Asing Langsung <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	Produk Domestik Bruto (PDB) <i>Gross Domestic Product (GDP)</i> (miliar rupiah / billion rupiahs)	% FDI terhadap PDB <i>% FDI to GDP</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	44 324,3	3 339 216,8	1,33
2007	65 254,8	3 950 893,2	1,65
2008	102 032,1	4 948 688,4	2,06
2009	45 843,8	5 606 203,4	0,82
2010 ^x	123 815,1	6 436 270,8	1,92
2011 ^{xx}	174 485,8	7 427 086,1	2,35

Catatan : ^x Angka sementara / *Preliminary figures*

Note ^{xx} Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

Sumber : Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source *Based on Indonesian Economic and Financial Statistics Bank of Indonesia*

TABEL - TABEL

Tabel 4.13.5 Persentase Remitan terhadap Pendapatan Nasional, 2006-2011
Table Percentage of Remittances to National Income, 2006-2011

Tahun Year	Remitan Remittance	Pendapatan Nasional National Income	% Remitan terhadap Pendapatan Nasional % Remittance to National Income
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	40 590,9	2 931 844,3	1,38
2007 ^r	45 521,8	3 478 675,0	1,31
2008 ^r	57 006,5	4 421 343,7	1,29
2009 ^r	45 769,9	4 914 840,5	0,93
2010 ^x	31 167,9	5 708 294,8	0,55
2011 ^{xx}	42 117,7	6 664 317,2	0,63

Catatan : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Note ^x Angka sementara / Preliminary figures

^{xx} Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Ditolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Source Based on Indonesian Economic and Financial Statistics, Bank of Indonesia

Tabel 4.14.1 Pemakaian Energi Termasuk Biomasa Menurut Sektor (SBM), 2000-2010
Table 4.14.1 Energy Used Included as Biomass by Sectors (BOE), 2000-2010

Tahun Years	Industri Industry	Rumah Tangga Household	Komersial Comercial	Transportasi Transportation	Non Energi Non Energy	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	251 895 942	296 573 110	20 670 389	139 178 658	40 393 109	29 213 878
2001	252 158 714	301 347 223	21 449 843	148 259 584	48 524 092	30 585 607
2002	245 108 900	303 032 794	21 752 300	151 498 823	48 534 290	29 998 546
2003	275 308 517	309 046 165	22 397 122	156 232 909	48 317 775	28 445 436
2004	263 294 377	314 114 684	25 412 327	178 374 391	62 375 806	31 689 809
2005	262 686 505 r	313 772 025	26 234 764	178 452 407	54 352 999	29 102 166
2006	280 187 757	312 715 871	26 194 683	170 127 492	64 990 106	25 936 873
2007	300 675 120	319 333 000	27 896 499	174 144 177 r	64 759 190	24 912 051
2008 r	299 539 752	316 802 419	29 273 897	196 941 689	38 432 103	25 855 949
2009 r	297 613 630	314 762 682	30 390 508	225 767 144	54 356 235	27 186 782
2010	355 756 662	325 501 472	32 690 198	255 830 171	82 906 365	28 743 347

Catatan / Note : r Angka diperbaiki / Revised figures

Sumber : Buku Saku Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Source Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2011, Ministry of Energy and Mineral Resources

TABEL - TABEL

Tabel 4.14.2 Jumlah Kendaraan Penumpang dan Barang Menurut Provinsi, 2009-2011
Table Number of Passenger and Freight Vehicles by Province, 2009-2011

Provinsi Province	Mobil Penumpang Passenger Cars			Mobil Bis Buses			Mobil Truk Trucks		
	2009	2010	2011 ^x	2009	2010	2011 ^x	2009	2010	2011 ^x
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	89 914	96 534	102 634	62 293	62 553	62 668	88 532	90 013	95 235
Sumatera Utara	297 922 ^r	325 137	345 684	29 498 ^r	29 978	30 033	194 946 ^r	205 124	217 023
Sumatera Barat	51 614	118 899	126 413	83 519	84 657	84 813	124 802	129 613	137 132
Riau	432 126	443 871	471 921	61 501	63 869	63 987	139 369	143 554	151 882
Jambi	84 272	93 663	106 275	54 574	54 832	55 087	213 198	218 746	232 007
Sumatera Selatan	365 540	423 698	450 473	69 407	72 077	72 210	100 722	107 245	113 466
Bengkulu	30 464	31 934	33 952	7 001	9 473	9 490	41 211	42 800	45 283
Lampung	74 844	93 758	99 683	23 996	24 919	24 965	68 068	81 678	86 416
Kep. Bangka Belitung	9 451	21 522	22 882	20 033	21 062	21 101	16 135 ^r	25 449	26 925
Kepulauan Riau	117 511	123 180	130 964	11 245 ^r	13 119	13 143	26 387	28 348	29 992
DKI Jakarta	1 972 104 ^r	2 296 055	2 441 153	501 121 ^r	519 738	520 695	678 011 ^r	701 328	742 013
Jawa Barat	526 508	630 196	670 021	171 000	177 578	177 905	451 987	469 412	496 643
Jawa Tengah	403 430	527 417	560 747	69 492	72 495	72 628	401 425	416 901	441 086
DI Yogyakarta	237 014	248 448	264 148	41 903	43 515	43 595	111 003	115 282	121 970
Jawa Timur	965 495	1 012 074	1 076 031	49 770	58 445	58 553	411 989	427 872	452 693
Banten	81 366	85 291	90 681	21 617	24 582	24 627	67 989	70 610	74 706
Bali	499 264	523 350	556 423	26 948	31 629	31 687	212 867	221 074	233 899
Nusa Tenggara Barat	100 909	105 777	112 462	63 856	66 312	66 434	58 784	61 050	64 592
Nusa Tenggara Timur	133 712	137 865	146 577	50 880	52 747	52 844	47 767	49 769	52 656
Kalimantan Barat	280 561	286 827	304 953	55 036	56 216	56 319	116 715	121 215	128 247
Kalimantan Tengah	176 324	184 830	196 510	65 586	66 372	66 494	68 673	71 321	75 458
Kalimantan Selatan	148 449	155 611	165 445	88 226	91 620	91 789	145 924	151 550	160 342
Kalimantan Timur	190 079	199 249	211 840	52 141 ^r	54 642	54 743	229 414	235 556	249 221
Sulawesi Utara	70 332	73 725	78 384	90 578	94 062	94 235	39 904	41 442	43 846
Sulawesi Tengah	131 786	141 996	150 969	45 389	47 135	47 222	103 862	111 758	118 241
Sulawesi Selatan ¹	249 636	280 662	298 398	135 265	140 468	140 727	260 560	267 636	283 162
Sulawesi Tenggara	16 108	19 420	20 647	95 246	98 910	99 092	36 984	38 410	40 638
Gorontalo	60 203	66 296	70 486	70 638	71 039	71 170	5 405	5 613	5 939
Maluku	32 154	33 083	35 174	8 717	10 241	10 260	16 723	17 368	18 376
Maluku Utara	226	763	811	2 878	2 989	2 995	514 ^r	647	685
Papua ²	81 089	109 910	116 856	31 619	32 835	32 895	18 301	19 405	20 531
Indonesia	7 910 407^r	8 891 041	9 459 597	2 160 973^r	2 250 109	2 254 406	4 498 171^r	4 687 789	4 960 305

Catatan : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Note ^x Angka sementara / Preliminary figures

¹ Termasuk Sulawesi Barat / Including Sulawesi Barat

² Termasuk Papua Barat / Including Papua Barat

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia

Source Indonesia State Police

Tabel 4.14.3 Produksi Angkutan Kereta Api Penumpang dan Barang, 2008-2010
Table 4.14.3 Production of Passenger and Freight Railways Transportation, 2008-2010

Rincian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkutan Penumpang <i>Passenger Transportation</i>				
Jawa				
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang <i>Average length of journey per passenger</i>	km/orang <i>km/person</i>	90 ^r	93	98
Sumatera				
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang <i>Average length of journey per passenger</i>	km/orang <i>km/person</i>	230 ^r	219	186
Jumlah / Total				
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang <i>Average length of journey per passenger</i>	km/orang <i>km/person</i>	92	96	100
Angkutan Barang <i>Freight Transportation</i>				
Jawa				
Rata-rata jarak angkutan tiap ton <i>Average distance of freight transported</i>	km/ton <i>km/ton</i>	223	302	519
Sumatera				
Rata-rata jarak angkutan tiap ton <i>Average distance of freight transported</i>	km/ton <i>km/ton</i>	284	302	299
Jumlah / Total				
Rata-rata jarak angkutan tiap ton <i>Average distance of freight transported</i>	km/ton <i>km/ton</i>	272	302	343

Catatan / Note : ^r Angka diperbaiki / Revised figures

Sumber / Source : PT. Kereta Api (Persero) / Indonesian State Railways Company

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Anonim. 2012. *Bonus Demografi, Jendela Peluang atau Pintu Petaka*. Diakses pada 12 Oktober 2012. <http://www.perempuan.com/>
- Bauer, A. and Thant, Myo. 2010. *Poverty and Sustainable Development in Asia: Impact and Responses to the Global Economic Crisis*. Philippines: Asian Development Bank.
- Cordoba, J. C. and Ripol, M. 2007. *The Role of Education in Development*. Diakses pada 2 Agustus 2012. <http://www.econ.iastate.edu/>
- Dimyati, Vien. 2012. Bonus Demografi Berpotensi Menjadi Ancaman. Diakses pada 12 Oktober 2012. <http://www.jurnas.com/>
- Gupta, M. D., Bongaarts, J. and Cleland, J. 2011. *Population, Poverty, and Sustainable Development: A Review of the Evidence*. Development Research Group The World Bank.
- Maphosa, France. 2005. *The Impact of Remittances from Zimbabweans Working in South Africa on Rural Livelihoods in the Southern districts of Zimbabwe*. Diakses pada 4 September 2012. <http://cormsa.org.za>
- Orozco, Manuel. 2007. *The Role of Remittances in Leveraging Sustainable Development in Latin America and The Caribbean*. Inter-American Dialogue
- Reena Shah. 2000. *International Frameworks of Environmental Statistics and Indicators*. Diakses pada 12 Juni 2012. <http://www.unescap.org/>
- Rosenberg, Eureta. *Population Growth and Sustainable Development*. Diakses pada 10 Agustus 2012. <http://www.enviropaedia.com>
- Scott, R., Cotton, A.P. and Govindan, B. 2003. *Sanitation and the Poor*. London
- The Secretary-General Advisory Group on Energy and Climate Change (AGECC). 2010. *Energy for Sustainable Future: Report and Recomendation*. United Nation: New York.
- UNDP. *Remittance Strategy Framework for Sustainable Development in Sierra Leone*. Diakses pada 15 Agustus 2012. <http://www.sl.undp.org>.
- Unesco. *Literacy*. Diakses pada 2 Agustus 2012. <http://www.unesco.org/>
- Unesco. 2001. *Education and Poverty Eradication*. Diakses pada 2 Agustus 2012. <http://www.unesco.org/education/>
- Unesco. 2007. *Literacy Initiative for Employment 2006-2015*. Diakses pada 9 Agustus 2012. <http://www.unesdoc.unesco.org/>
- United Nations. 1987. *Report of the World Commission on Environmental and Development: Our Common Future*. Diakses pada 20 Maret 2012. <http://www.un.org/>

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations. 2011. *The History of Sustainable Development in the United Nations*. Diakses pada 11 Juni 2012. <http://www.uncsd2012.org/>
- United Nations. 2012. *The Millennium Development Goals Report 2012*. New York.
- United Nations. 2012. *United Nations: Environment Documentation*. Diakses pada 11 Juni 2012. <http://www.un.org/>
- United Nations-CSD. 2001. *Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies*. New York.
- United Nations-DSD. 2002. *Johannesburg Plan of Implementation on Sustainable Development*. New York.
- United Nations-DESA. 1992. *Agenda 21*. Diakses pada 10 Agustus 2012. <http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm>
- United Nations-DESA. 1996. *Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies*. New York.
- United Nations-DESA. September 2001, *Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies*, Second Edition. New York.
- United Nations Environment Programme. 1972. *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*. Diakses pada 11 Juni 2012. <http://www.unep.org/>
- United Nations Publication. October 2007. *Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies*, Third edition. New York.
- WHO. 2008. *The Global Burden Disease: 2004 Update*. Switzerland
- WHO. *Mental Health, Poverty and Development*. Diakses pada 4 Juli 2012. http://www.who.int/mental_health/
- WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. 2012. *Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 Update*. UNICEF and WHO: USA.

LAMPIRAN

Appendix

Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012

CSD Indicators of Sustainable Development and Indicators of Sustainable Development 2012

Tema Theme	SubTema Sub-theme	Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD CSD Indicators of Sustainable Development		Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 Indicators of Sustainable Development 2012
		Indikator utama / Core Indicator	Indikator lain / Other Indicator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kemiskinan Poverty	Kemiskinan pendapatan <i>Income poverty</i>	Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan / Proportion of population living below national poverty line	Proporsi penduduk yang pendapatannya dibawah \$1 per hari / Proportion of population below \$ 1 a day	Jumlah penduduk miskin menurut provinsi / Number of poor people by province
	Ketimpangan pendapatan <i>Income inequality</i>	Rasio pembagian pendapatan nasional dari kuartil tertinggi hingga terkecil / Ratio of share in national income of highest to lowest quintile		Persentase penduduk miskin menurut provinsi / Percentage of poor people by province
	Sanitasi / Sanitation	Proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi yang lebih baik / Proportion of population using an improved sanitation facility		Garis kemiskinan menurut provinsi / Poverty line by province
	Air minum <i>Drinking water</i>	Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang lebih baik / Proportion of population using an improved water source		Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini Distribution of Expenditure per capita and gini index
	Akses terhadap energi / Access to energy	Proporsi rumah tangga tanpa listrik atau pelayanan energi modern lainnya / Share of households without electricity or other modern energy services	Persentase penduduk yang menggunakan bahan bakar padat untuk memasak / Percentage of population using solid fuels for cooking	Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septic menurut provinsi / Percentage of household with toilet discharge septic tank by province
	Kondisi tempat tinggal / Living conditions	Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh / Proportion of urban population living in slums		Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik menurut provinsi / Percentage of household using source of lighting from non electricity by province
Pemerintahan Governance	Korupsi <i>Corruption</i>	Persentase penduduk yang memberikan uang suap / Percentage of population having paid bribes		Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu bakar menurut provinsi / Percentage of household using source of cooking fuel from fire wood by province
	Kejahatan / Crime	Jumlah pembunuhan berencana per 100.000 penduduk / Number of intentional homicides per 100,000 population		Jumlah desa menurut keberadaan sungai yang melintasi desa dan permukiman kumuh / Number of villages by the existance of rivers that flows through the village and slum areas
				Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan menurut Kepolisian Daerah / Number of corruption cases solved by regional police office
				Jumlah kasus pembunuhan menurut Kepolisian Daerah / Number of homicide cases by regional police office

Lampiran / Appendix 1

APPENDIX

Tema <i>Theme</i>	SubTema <i>Sub-theme</i>	Indikator Pembangunan BerkelaJutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan BerkelaJutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / <i>Core Indicator</i>	Indikator lain / <i>Other Indicator</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kesehatan <i>Health</i>	Angka kematian <i>Mortality</i>	Angka kematian balita / <i>Under-five mortality rate</i>		Estimasi angka kematian bayi (AKB) menurut provinsi / <i>Estimated of infant mortality rate (IMR) by province</i>
		Angka harapan hidup saat lahir / <i>Life expectancy at birth</i>	Angka harapan hidup sehat saat lahir <i>Healthy life expectancy at birth</i>	Estimasi angka harapan hidup (e0) menurut provinsi / <i>Estimate of life expectancy at birth (e0) by province</i>
	Layanan Kesehatan <i>Health care delivery</i>	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dasar / <i>Percent of population with access to primary health care facilities</i>	Angka penggunaan kontrasepsi <i>Contraceptive prevalence rate</i>	Persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan pustu selama sebulan yang lalu menurut provinsi / <i>Percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health during the previous month by province</i>
		Imunisasi terhadap penyakit menular anak-anak / <i>Immunization against infectious childhood diseases</i>		Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin menurut provinsi dan alat KB yang sedang digunakan / <i>Percentage of married women aged 15-49 years by province and type of contraceptive currently used</i>
	Status gizi <i>Nutritional status</i>	Status gizi anak / <i>Nutritional status of children</i>		Persentase balita yang diimunisasi menurut provinsi dan jenis imunisasi / <i>Percentage of under-fives who immunized by province and type of immunization</i>
	Status kesehatan dan kesakitan <i>Health status and risks</i>	Angka kesakitan dari penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS, malaria, TBC <i>Morbidity of major diseases such as HIV/AIDS, malaria, tuberculosis</i>	Prevalensi pengguna rokok / <i>Prevalence of tobacco use</i>	Jumlah penderita dan angka kesakitan malaria menurut provinsi / <i>Number of patient and Annual Parasite Incidence (API) by province</i>
				Kumulatif kasus AIDS, kasus meninggal, dan angka kumulatif kasus menurut provinsi / <i>AIDS cummulative cases, death cases, and cases rate by province</i>
		Angka bunuh diri / <i>Suicide rate</i>		Jumlah kasus penyakit TB paru menurut provinsi / <i>Number of Tuberculosis disease cases by province</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Tingkat pendidikan <i>Education level</i>	Gross intake rate into last year of primary education	Life long learning	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar menurut provinsi / <i>Percentage of population aged 15 years and over who graduated from primary education by province</i>
		Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar / <i>Net enrolment rate in primary education</i>		Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar menurut provinsi / <i>Net Enrollment Ratio of elementary school by province</i>
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama menurut provinsi / <i>Net Enrollment Ratio of Junior High School by Province</i>

Tema Theme	SubTema Sub-theme	Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / Core Indicator	Indikator lain / Other Indicator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pendidikan tertinggi orang dewasa / <i>Adult secondary (tertiary) schooling attainment level</i>		Penduduk usia 25-64 dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA menurut provinsi / <i>Population aged 25-64 years old have completed minimum education senior high school by province</i>
	Melek Huruf <i>Literacy</i>	Angka Melek Huruf / <i>Adult literacy rate</i>		Angka Melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas menurut provinsi <i>Literacy rate of population aged 15 years and over by province</i>
Demografi <i>Demo graphics</i>	Perubahan kependudukan <i>Population change</i>	Laju pertumbuhan penduduk / <i>Population growth rate</i>	Angka kelahiran total / <i>Total fertility rate</i>	Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut provinsi <i>Population and growth rate of population by province</i>
		Angka beban ketergantungan / <i>Dependency ratio</i>	Rasio penduduk lokal terhadap penduduk asing di wilayah dan tujuan utama turis <i>Ratio of local residents to tourists in major tourist regions and destinations</i>	Angka beban ketergantungan menurut provinsi / <i>Dependency ratio by province</i>
Bencana Alam <i>Natural hazards</i>	Kerentanan terhadap bencana alam / <i>Vulnerability to natural hazards</i>	Percentase penduduk yang tinggal di area yang rentan dengan bencana alam <i>Percentage of population living in hazard prone areas</i>		Jumlah desa menurut provinsi dan jenis bencana alam / <i>Number of village by province and type of natural disaster</i>
	Kesiapan menghadapi bencana / <i>Disaster preparedness and response</i>		Kerugian manusia dan ekonomi yang berkaitan dengan bencana alam / <i>Human and economic loss due to natural disasters</i>	Jumlah desa menurut provinsi dan upaya antisipasi bencana alam <i>Number of village by province and the efforts in anticipation of natural disaster</i>
Atmosfer <i>Atmosphere</i>	Perubahan Iklim <i>Climate change</i>	Emisi gas karbondioksida / <i>Carbon dioxide emissions</i>	Emisi gas rumah kaca / <i>Emissions of greenhouse gases</i>	Perkiraan emisi CO2 dari rumah tangga menurut provinsi dan jenis bahan bakar untuk memasak / <i>Estimates of CO2 emissions from household by province and type of cooking fuel used</i>
				Perkiraan emisi CO2 yang berasal dari kendaraan bermotor menurut provinsi / <i>Estimates of CO2 emissions from motorized vehicles by province</i>
	Penipisan lapisan ozon / <i>Ozone layer depletion</i>	Konsumsi bahan penipis lapisan ozon <i>Consumption of ozone depleting substances</i>		Perkiraan emisi CH4 dari hewan ternak dan unggas / <i>Estimates of CH4 emissions from livestocks and poulties</i>
				Impor komoditi bahan yang mengandung zat perusak ozon / <i>Import of materials containing ozone depleting substances</i>

LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran / *Continued Appendix 1*

Tema <i>Theme</i>	SubTema <i>Sub-theme</i>	Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / <i>Core Indicator</i>	Indikator lain / <i>Other Indicator</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kualitas udara / <i>Air quality</i>	Konsentrasi yang berkaitan dengan bahan pengotor udara di area perkotaan / <i>Ambient concentration of air pollutants in urban areas</i>		Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO2 dan NO2 di stasiun BMKG Jakarta / <i>Monthly average of SO2 and NO2 concentration at BMKG station Jakarta</i>
Lahan / <i>Land</i>	Status dan penggunaan lahan <i>Land use and status</i>		Perubahan penggunaan lahan / <i>Land use change</i>	
			Degradasi Lahan / <i>Land Degradation</i>	
	Desertification		<i>Land affected by desertification</i>	
	Pertanian <i>Agriculture</i>	Area yang cocok untuk pertanian / <i>Arable and permanent cropland area</i>	Efisiensi penggunaan pupuk / <i>Fertilizer use efficiency</i>	Luas lahan sawah menurut provinsi dan jenis irigasi / <i>Wetland area by province and type of irrigation</i>
				Luas lahan tegal/kebun menurut provinsi / <i>Area of dry field/garden by province</i>
				Luas lahan ladang/huma menurut provinsi / <i>Area of shifting cultivation by province</i>
			Penggunaan pestisida untuk pertanian / <i>Use of agricultural pesticides</i>	Luas lahan yang sementara tidak diusahakan menurut provinsi / <i>Area of temporarily unused land by province</i>
	Hutan / <i>Forest</i>	Proporsi area lahan yang ditutupi hutan <i>Proportion of land area covered by forests</i>	Area hutan dibawah manajemen hutan lindung / <i>Area of forest under sustainable forest management</i>	Percentase luas hutan terhadap luas wilayah menurut provinsi / <i>Percentage of forest area to area of province by province</i>
			Percentase kerusakan hutan yang disebabkan penggundulan / <i>Percent of forest trees damaged by defoliation</i>	Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi satelit menurut Provinsi / <i>Number of Hotspot Detected by Satellite by Province</i>
Laut dan pesisir <i>Oceans, seas and coasts</i>	Daerah pesisir <i>Coastal zone</i>	Persentase penduduk yang tinggal di daerah pesisir / <i>Percentage of total population living in coastal areas</i>	Kualitas air untuk mandi / <i>Bathing water quality</i>	Jumlah dan persentase desa menurut provinsi dan letak geografis / <i>Number and percentage of village by province and geographical location</i>
	Perikanan / <i>Fisheries</i>	Proporsi persediaan ikan dengan batas biologi yang aman / <i>Proportion of fish stocks within safe biological limits</i>		
	Lingkungan laut <i>Marine environment</i>	Proporsi area laut yang dilindungi / <i>Proportion of marine area protected</i>	Indeks laut tropis / <i>Marine trophic index</i>	Sebaran kawasan konservasi laut menurut provinsi / <i>Distribution of marine conservation area by province</i>
			Area dari ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan karang hidup / <i>Area of coral reef ecosystems and percentage live cover</i>	Luas dan kondisi terumbu karang menurut provinsi / <i>Area and condition of coral reef by province</i>

Tema Theme	SubTema Sub-theme	Indikator Pembangunan BerkelaJutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan BerkelaJutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / Core Indicator	Indikator lain / Other Indicator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air tawar <i>Freshwater</i>	Kuantitas air <i>Water quantity</i>	Jumlah penggunaan sumber daya air <i>Proportion of total water resources used</i>		Volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih menurut provinsi / <i>Volume of cleaned water distributed of water supply establishment by province</i>
		Intensitas penggunaan air berdasarkan aktivitas ekonomi / <i>Water use intensity by economic activity</i>		Jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi <i>Number of water supply establishment costumers by province</i>
	Kualitas air / <i>Water quality</i>	Kandungan bakteri coli dalam air tawar <i>Presence of faecal coliforms in freshwater</i>	BOD pada kandungan air / <i>Biochemical oxygen demand in water bodies</i>	Kandungan <i>Maximum Biochemical Oxygen Demand (BOD)</i> dan <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i> pada air sungai di beberapa kota di Indonesia / <i>Maximum of Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) in river water in major cities in Indonesia</i>
Keanekaragaman hayati <i>Biodiversity</i>	Ekosistem <i>Ecosystem</i>	Proporsi dari total area terestrial yang dilindungi berdasarkan daerah ekologi / <i>Proportion of terrestrial area protected, total and by ecological region</i>	Efektifitas manajemen dari wilayah yang dilindungi / <i>Management effectiveness of protected areas</i>	Kawasan konservasi daratan menurut provinsi / <i>Land conservation area by province</i>
			Area dari ekosistem terpilih / <i>Area of selected key ecosystems</i>	
			Fragmentasi dari habitat / <i>Fragmentation of habitats</i>	
	Spesies / <i>Species</i>	Perubahan status ancaman pada spesies <i>Change in threat status of species</i>	Spesies terpilih yang berlimpah / <i>Abundance of selected key species</i>	Spesies satwa yang dilindungi / <i>Protected species of fauna</i>
			Penyerbuan spesies asing yang berlimpah <i>Abundance of invasive alien species</i>	Spesies tumbuhan yang dilindungi / <i>Protected species of flora</i>
Pembangunan ekonomi <i>Economic development</i>	Penyelenggaraan makro ekonomi <i>Macroeconomic performance</i>	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita <i>Gross domestic product (GDP) per capita</i>	Tabungan bruto / <i>Gross saving</i>	Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi / <i>Per capita gross regional domestics product at current market price by province</i>
		Pembagian investasi dalam PDB <i>Investment share in GDP</i>	Penghematan bersih yang disesuaikan sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto (PNB) / <i>Adjusted net savings as percentage of gross national income (GNI)</i>	Pembagian investasi dalam produk domestik bruto <i>Investment share in gross domestic product</i>
			Tingkat inflasi / <i>Inflation rate</i>	Laju inflasi 66 kota di Indonesia / <i>Inflation rate of 66 cities in Indonesia</i>

Tema Theme	SubTema Sub-theme	Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / Core Indicator	Indikator lain / Other Indicator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan umum berkesinambungan <i>Sustainable public finance</i>	Rasio hutang terhadap PNB / <i>Debt to GNI ratio</i>		Rasio pinjaman luar negeri terhadap produk nasional bruto <i>Ratio of external debt on gross national product</i>
Angkatan kerja <i>Employment</i>	Rasio penduduk yang bekerja / <i>Employment-population ratio</i>	Pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya <i>Vulnerable employment</i>	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi / <i>Percentage of population aged 15 years and over who worked by province</i>	
			Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang rentan kehilangan pekerjaannya menurut provinsi / <i>Percentage of population aged 15 years and over who vulnerable employment by province</i>	
	Kontribusi wanita dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian / <i>Share of women in wage employment in the non-agricultural sector</i>		Persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian menurut provinsi / <i>Percentage of women worker in non agricultural sector by province</i>	
	Teknologi informasi dan komunikasi <i>Information and communication technologies</i>	Jumlah pengguna internet / <i>Number of internet users per population</i>	Saluran telepon per 100 penduduk / <i>Fixed telephone lines per 100 populations</i>	Persentase rumah tangga yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir menurut provinsi / <i>Percentage of household with access to internet in the last three months by province</i>
Penelitian dan pengembangan <i>Research and development</i>			Persentase rumah tangga yang memiliki telepon menurut provinsi / <i>Percentage of household having telephone by province</i>	
			Persentase rumah tangga yang memiliki telepon selular menurut provinsi / <i>Percentage of household having handphone by province</i>	
Kepariwisataan <i>Tourism</i>	Sumbangan pariwisata terhadap PDB <i>Tourism contribution to GDP</i>		Persentase pengeluaran dalam negeri bruto untuk penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap PDB / <i>Gross domestic expenditure on research and experimental development (R&D) as a percent of GDP</i>	
Persekutuan ekonomi global <i>Global economic partnership</i>	Perdagangan <i>Trade</i>	Defisit transaksi berjalan terhadap PDB <i>Current account deficit as percentage of GDP</i>	Import dari negara maju dan negara berkembang (NSB) / <i>Share of import from developing countries and from LDCs</i>	Persentase transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto <i>Percentage of current account to gross domestic product</i>
			Rata-rata tarif barang eksport dari negara maju dan negara sedang berkembang (NSB) / <i>Average tariff barriers imposed on exports from developing countries and LDCs</i>	Nilai impor menurut negara asal utama / <i>Value of imports by major countries of origin</i>

Tema Theme	SubTema Sub-theme	Indikator Pembangunan Berkelanjutan CSD <i>CSD Indicators of Sustainable Development</i>		Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>
		Indikator utama / Core Indicator	Indikator lain / Other Indicator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembiayaan eksternal <i>External financing</i>	Persentase bantuan pembangunan yang diterima atau diberikan terhadap Pendapatan Nasional Bruto / <i>Net Official Development Assistance (ODA) given or received as a percentage of Gross National Income</i>	<i>Foreign Direct Investment (FDI) net inflows and net outflows as percentage of GDP</i>	Posisi pinjaman luar negeri / <i>External debt outstanding</i> Persentase penanaman modal asing langsung terhadap produk domestik bruto / <i>Percentage of Foreign Direct Investment (FDI) as percentage of Gross Domestic product (GDP)</i>
				Persentase remitan terhadap PNB / <i>Remittances as percentage of GNI</i>
Pola konsumsi dan produksi <i>Consumption and production patterns</i>	Konsumsi material <i>Material consumption</i>	Intensitas material ekonomi / <i>Material intensity of the economy</i>	Konsumsi bahan domestik / <i>Domestic material consumption</i>	
	Penggunaan energi / <i>Energy use</i>	Konsumsi energi tahunan berdasarkan kategori pemakai/ <i>Annual energy consumption, total and by user category</i>	Bagian dari sumber energi yang dapat diperbarui terhadap penggunaan keseluruhan energi / <i>Share of renewable energy sources in total energy use</i>	Pemakaian energi termasuk biomassa menurut sektor / <i>Energy used included as biomass by sectors</i>
			Intensitas penggunaan energi berdasarkan aktivitas ekonomi / <i>Intensity of energy use, total and by economic activity</i>	
	Turunan limbah dan pengelolaannya <i>Waste generation and management</i>	Turunan dari limbah berbahaya / <i>Generation of hazardous waste</i>	Turunan dari limbah / <i>Generation of waste</i>	
			Pengelolaan limbah radioaktif / <i>Management of radioactive waste</i>	
Angkutan <i>Transportation</i>	Pemilihan moda angkutan penumpang <i>Modal split of passenger transport</i>	Pemilihan moda angkutan barang / <i>Modal split of freight transport</i>	Jumlah kendaraan penumpang dan barang menurut provinsi <i>Number of passenger and freight vehicles by province</i>	
				Produksi Angkutan Kereta Api Penumpang dan Barang <i>Production of Passenger and Freight Railways Transportation</i>
			Intensitas energi dari angkutan / <i>Energy intensity of transport</i>	

LAMPIRAN

Lampiran / Appendix 2
Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 dan Tema yang Berhubungan
Indicators of Sustainable Development 2012 and Thematic Linkage

Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>	Tema / Theme								
	kemiskinan / Poverty	Pemerintahan / Governance	Kesehatan / Health	Pendidikan / Education	Demografi / Demographics	Bencana Alam / Natural Haards	Atmosfer / Atmosphere	Lahan / Land	Laut dan Pantai Oceans, Seas and Coasts
Jumlah penduduk miskin / Number of poor people									
Persentase penduduk miskin / Percentage of poor people									
Garis kemiskinan / Poverty line									
Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini / Distribution of expenditure per capita and gini index									
Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septic / Percentage of household with toilet discharge septic tank									
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih <i>Percentage of household which use clean water</i>									
Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik / Percentage of household using source of lighting from non electricity									
Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu bakar / Percentage of household using source of cooking fuel from fire wood									
Jumlah desa menurut keberadaan sungai yang melintasi desa dan permukiman kumuh / Number of villages by the existance of rivers that flows through the village and slum areas									
Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan / Number of corruption cases solved									
Jumlah kasus pembunuhan / Number of homicide cases									
Angka kematian bayi (AKB) / Infant mortality rate (IMR)									
Estimasi angka harapan hidup (e ₀) / Estimate of life expectancy at birth (e ₀)									
Persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu / Percentage of population who sought treatment outpatient at health center and subsidiary health center									
Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin menurut alat KB yang sedang digunakan <i>Percentage of married women aged 15-49 years by type of contraceptive currently used</i>									
Persentase balita yang diimunisasi / Percentage of under fives who immunized									

Lanjutan Lampiran / Continued Appendix 2

Tema / Theme	kemiskinan / Poverty	Pemerintahan / Governance	Kesehatan / Health	Pendidikan / Education	Demografi / Demographics	Bencana Alam / Natural Disasters	Atmosfer / Atmosphere	Lahan / Land	Laut dan Pantai Oceans, Seas and Coasts	Air Tawar / Fresh Water	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Pembangunan Ekonomi Economic Development	persekituan Ekonomi Global Global Economic Partnership	Pol a Konsumsi dan Produksi Consumption and Productions Patterns
Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 Indicators of Sustainable Development 2012														
Status gizi balita / Nutritional status of children under five years old														
Jumlah penderita dan angka kesakitan malaria Number of patient and annual paracite incidence (API)														
Kumulatif kasus AIDS, kasus meninggal, dan angka kumulatif kasus / AIDS cummulative cases, death cases, and cases rate														
Jumlah kasus penyakit TB paru / Number of tuberculosis disease cases														
Persentase perokok saat ini dan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap penduduk usia 15 tahun keatas / Prevalence of current smokers and average of cigarettes consumed by population aged 15 years and over														
Jumlah kasus bunuh diri / Number of suicide cases														
Penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar / Population age 15 years and over who graduated from primary education														
Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar / Net Enrollment Ratio of elementary school														
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama / Net Enrollment Ratio of Junior High School														
Penduduk usia 25-64 dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA / Population aged 25-64 years old have completed minimum education senior high school														
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas Literacy rate of population aged 15 years and over														
Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Population and growth rate of population														
Angka kelahiran total / Total fertility rate (TFR)														
Angka beban ketergantungan / Dependency ratio														
Jumlah desa menurut jenis bencana alam / Number of villages by type of natural disaster														
Jumlah desa menurut upaya antisipasi bencana alam Number of villages by the efforts in anticipation of natural disaster														

LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran / Continued Appendix 2

Tema / Theme	kemiskinan / Poverty	Pemerintahan / Governance	Kesehatan / Health	Pendidikan / Education	Demografi / Demographics	Bencana Alam / Natural Haards	Atmosfer / Atmosphere	Lahan / Land	Laut dan Pantai Oceans, Seas and Coasts	Air Tawar / Fresh Water	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Pembangunan Ekonomi Economic Development	persekituan Ekonomi Global Global Economic Partnership	Polikonsumsi dan Produkusi Consumption and Productions Patterns
Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 <i>Indicators of Sustainable Development 2012</i>														
Jumlah korban bencana menurut kondisi korban <i>Number of disaster victims by condition of victims</i>														
Jumlah kerusakan rumah akibat bencana / <i>Number of damage house caused by natural disaster</i>														
Perkiraan emisi CO ₂ dari rumah tangga menurut jenis bahan bakar untuk memasak / <i>Estimates of CO₂ emissions from household by type of cooking fuel used</i>														
Perkiraan emisi CO ₂ yang berasal dari kendaraan bermotor / <i>Estimates of CO₂ emissions from motorized vehicles</i>														
Perkiraan emisi CH ₄ dari hewan ternak dan unggas <i>Estimates of CH₄ emissions from livestocks and poultreys</i>														
Impor komoditi bahan yang mengandung zat perusak ozon / <i>Import of materials containing ozone depleting substances</i>														
Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO ₂ dan NO ₂ / <i>Monthly average of SO₂ and NO₂ concentration</i>														
Luas lahan sawah menurut jenis irigasi / <i>Wetland area by type of irrigation</i>														
Luas lahan tegal/kebun / <i>Area of dry field/garden</i>														
Luas lahan ladang/huma / <i>Area of shifting cultivation</i>														
Luas lahan yang sementara tidak diusahakan / <i>Area of temporarily unused land</i>														
Percentase luas hutan terhadap luas wilayah <i>Percentage of forest area to area of province</i>														
Jumlah Sebaran Titik Panas Yang Terdeteksi Satelit <i>Number of Hotspot Detected by Satellite</i>														
Jumlah dan persentase desa menurut letak geografis <i>Number and percentage of village by geographical location</i>														
Sebaran kawasan konservasi laut / <i>Distribution of marine conservation areas</i>														
Luas dan kondisi terumbu karang / <i>Area and condition of coral reef</i>														

Lanjutan Lampiran / Continued Appendix 2

Tema / Theme	kemiskinan / Poverty	Pemerintahan / Governance	Kesehatan / Health	Pendidikan / Education	Demografi / Demographics	Bencana Alam / Natural Disasters	Atmosfer / Atmosphere	Lahan / Land	Laut dan Pantai Oceans, Seas and Coasts	Air Tawar / Fresh Water	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Pembangunan Ekonomi Global Economic Development	persekituan Ekonomi Global Global Economic Partnership	Pola Konsumsi dan Produksi Consumption and Production Patterns
Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 Indicators of Sustainable Development 2012														
Volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih / Volume of cleaned water distributed of water supply establishment														
Jumlah pelanggan perusahaan air bersih / Number of water supply establishment costumers														
Kandungan maksimum biochemical oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD) pada air sungai / Maximum of biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) in river water														
Kawasan konservasi daratan / Land conservation area														
Spesies satwa yang dilindungi / Protected species of fauna														
Spesies tumbuhan yang dilindungi / Protected species of flora														
Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku / Per capita gross regional domestic product at current market price														
Tabungan bruto menurut sektor / Gross saving by sectors														
Pembagian investasi dalam Produk Domestik Bruto / Investment share in Gross Domestic Product														
Laju inflasi / Inflation rate														
Rasio pinjaman luar negeri terhadap Produk Nasional Bruto / Ratio of external debt on gross national product														
Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja / Percentage of population aged 15 years and over who worked														
Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang rentan kehilangan pekerjaannya / Percentage of population aged 15 years and over who vulnerable employment														
Persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian / Percentage of women workers in non agricultural sector														

LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran / Continued Appendix 2

Tema / Theme	kemiskinan / Poverty	Pemerintahan / Governance	Kesehatan / Health	Pendidikan / Education	Demografi / Demographics	Bencana Alam / Natural Haards	Atmosfer / Atmosphere	Lahan / Land	Laut dan Pantai Oceans, Seas and Coasts	Air Tawar / Fresh Water	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Pembangunan Ekonomi Economic Development	persekituan Ekonomi Global Global Economic Partnership	Polikonsumsi dan Produkusi Consumption and Productions Patterns
Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012 Indicators of Sustainable Development 2012														
Persentase rumah tangga yang mengakses internet <i>Percentage of household with access to internet</i>														
Persentase rumah tangga yang memiliki telepon <i>Percentage of household having telephone</i>														
Persentase rumah tangga yang memiliki telepon selular / <i>Percentage of household having handphone</i>														
Persentase dampak ekonomi pariwisata terhadap produk domestik bruto / <i>Percentage of tourism economic impact to gross domestic product</i>														
Persentase transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto / <i>Percentage of current account to gross domestic product</i>														
Nilai impor menurut negara asal utama / <i>Value of imports by major countries of origin</i>														
Posisi pinjaman luar negeri / <i>External debt outstanding</i>														
Persentase penanaman modal asing langsung terhadap produk domestik bruto / <i>Percentage of Foreign Direct Investment (FDI) to Gross Domestic product (GDP)</i>														
Persentase remitan terhadap pendapatan nasional <i>Percentage of remittance to national income</i>														
Pemakaian energi termasuk biomassa / <i>Energy used included as biomass</i>														
Jumlah kendaraan penumpang dan barang / <i>Number of passenger and freight vehicles</i>														
Produksi angkutan kereta api penumpang dan barang <i>Production of passenger and freight railways transportation</i>														

Catatan / Note :

Sangat berkaitan/berhubungan / *Very close relationship*

Berkaitan/berhubungan / *Close relationship*



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857406

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-2814

